



Kutai Kartanegara

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara ini disampaikan garis besar pelaksanaan, realisasi dan capaian tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan mengusung tema ***"Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan"***.

Substansi materi laporan ini menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat tentang arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan.





Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2024 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan kepentingan yang merupakan hasil implementasi kolaborasi dengan semangat *Betulungan Etam Bisa* oleh Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Disadari sepenuhnya akan segala keterbatasan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan tugas berkesinambungan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, koreksi, serta rekomendasi oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
Daftar Grafik	xii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum.....	1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah	1
1.3. Data Umum Daerah	28
A. Kondisi Geografis	28
B. Jumlah Penduduk	31
C. Pertumbuhan Penduduk.....	32
D. Jumlah Kecamatan, Jumlah Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah	34
E. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	41
F. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	42
G. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	43
BAB II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	45
3.4. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah	46
3.5. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah	48
3.6. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah	52
BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	54
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	54
A. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	54
B. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan / Urusan Penunjang / Urusan Pendukung	





Pemerintahan sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya	190
C. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	410
D. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	414
BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	421
4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan.....	421
BAB V Penutup	422





Daftar Tabel

Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026	6
Tabel 2. Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026	28
Tabel 3. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN.....	30
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	31
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024	32
Tabel 6. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.....	34
Tabel 7. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	35
Tabel 8. Jumlah PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	38
Tabel 9. Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024	38
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024	41
Tabel 11. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024.....	42
Tabel 12. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024.....	44
Tabel 13. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	48
Tabel 14. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	51
Tabel 15. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	53
Tabel 16. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	54
Tabel 17. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	57





Tabel 18. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	57
Tabel 19. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	59
Tabel 20. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	61
Tabel 21. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	61
Tabel 22. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024	62
Tabel 23. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	63
Tabel 24. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota	63
Tabel 25. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD.....	64
Tabel 26. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2024	64
Tabel 27. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024	67
Tabel 28. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024	72
Tabel 29. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD.....	73
Tabel 30. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2024	73
Tabel 31. Capaian <i>Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024</i>	76
Tabel 32. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2024	77
Tabel 33. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	79





Tabel 34. Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan 2023	80
Tabel 35. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	82
Tabel 36. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024	83
Tabel 37. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023	83
Tabel 38. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	84
Tabel 39. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	85
Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD	86
Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2024	86
Tabel 42. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2024	89
Tabel 43. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD	106
Tabel 44. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2024	106
Tabel 45. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2024	109
Tabel 46. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2024	109
Tabel 47. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD	111
Tabel 48. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2024	111
Tabel 49. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024	113
Tabel 50. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD	115
Tabel 51. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2024	115





Tabel 52. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2024	116
Tabel 53. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	122
Tabel 54. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD.....	123
Tabel 55. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2024	123
Tabel 56. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2024	125
Tabel 57. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024.....	126
Tabel 58. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD.....	131
Tabel 59. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2024	131
Tabel 60. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2024	133
Tabel 61. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD.....	135
Tabel 62. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2024	135
Tabel 63. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024	137
Tabel 64. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD.....	141
Tabel 65. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2024	141
Tabel 66. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024	142
Tabel 67. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD.....	145
Tabel 68. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2024	145
Tabel 69. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2024	146
Tabel 70. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD.....	147
Tabel 71. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2024	148





Tabel 72. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2024	150
Tabel 73. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	150
Tabel 74. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait penyediaan air bersih Tahun 2024	154
Tabel 75. Rekapitulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023 dan 2024	158
Tabel 76. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait rumah layak huni Tahun 2023-2024	158
Tabel 77. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2024 ...	160
Tabel 78. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD	161
Tabel 79. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2024	161
Tabel 80. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2024	162
Tabel 81. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat	163
Tabel 82. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD	166
Tabel 83. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2024	166
Tabel 84. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2024	168
Tabel 85. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD	172
Tabel 86. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2024	172
Tabel 87. Sungai yang nilai parameter <i>Fecal Coli</i> di atas Baku Mutu	174
Tabel 88. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2024	175
Tabel 89. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD	177
Tabel 90. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2024	178





Tabel 91. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023.....	179
Tabel 92. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024	181
Tabel 93. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa.....	183
Tabel 94. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	184
Tabel 95. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026	186
Tabel 96. Capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 RPJMD 2021-2026	189
Tabel 97. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	192
Tabel 98. Pelaksanaan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	236
Tabel 99. Pelaksanaan Urusan Pilihan	312
Tabel 100. Pelaksanaan Urusan Pendukung Pemerintah	339
Tabel 101. Pelaksanaan Urusan Pengawasan Pemerintah.....	346
Tabel 102. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan	349
Tabel 103. Pelaksanaan Urusan Kewilayahan.....	366
Tabel 104. Pelaksanaan Pemerintahan Umum.....	406
Tabel 105. Kebijakan Tahun 2024.....	410





Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara.....	29
Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN	30
Gambar 3. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	68
Gambar 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	68
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.....	69
Gambar 6. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	78





Daftar Grafik

Grafik 1. Persentase Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024	33
Grafik 2. Predikat SAKIP	62
Grafik 3. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024	69
Grafik 4. Detail Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2024.....	71
Grafik 5. Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024.....	72
Grafik 6. <i>Monitoring Center for Prevention</i> KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023	75
Grafik 7. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023- 2024	84
Grafik 8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2024	90
Grafik 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2024	91
Grafik 10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024	94
Grafik 11. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024	95
Grafik 12. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024	96
Grafik 13. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024	97
Grafik 14. Persentase Penduduk 7-23 tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2024.....	98
Grafik 15. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024	104





Grafik 16. IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024	105
Grafik 17. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2010- 2024	110
Grafik 18. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024.....	111
Grafik 19. Indeks Pembangunan Gender Kab Kutai Kartanegara Tahun 2010-2024	114
Grafik 20. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005- 2024	118
Grafik 21. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	118
Grafik 22. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024	122
Grafik 23. TPT Kab Kutai Kartanegara dan Prov. Kal-tim Tahun 2005 s.d 2024	128
Grafik 24. Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2025.....	129
Grafik 25. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024.....	130
Grafik 26. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2023	134
Grafik 27. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018- 2024	138
Grafik 28. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018- 2024	139
Grafik 29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018- 2024	140





Grafik 30. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024	143
Grafik 31. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024.....	147
Grafik 32. Rehabilitasi RTLH Tahun 2020-2024	159
Grafik 33. Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	164
Grafik 34. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	165
Grafik 35. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024	166
Grafik 36. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 – 2024	170
Grafik 37. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2024	177





BAB I

Pendahuluan

1.1. Dasar Hukum

Kabupaten Kutai Kartanegara sebelumnya bernama Kabupaten Kutai, dibentuk dan ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II Kutai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah serta potensi ekonomi guna menjamin perkembangan dan kemajuan diwilayah Provinsi Kalimantan Timur, wilayah Kabupaten Kutai sebagian dimekarkan menjadi daerah otonomi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Untuk membedakan penyebutan Kabupaten-kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2. Visi Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya tetapi lebih pada transformasi yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.





Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berbahagia”***

Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Masyarakat yang Berbahagia. Adapun penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas ada sebagai berikut:

Masyarakat yang Sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

Masyarakat yang Berbahagia, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Selain Visi dan Misi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan filosofi pembangunan tahun 2021-2026 yaitu **KUKAR IDAMAN**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Sedangkan secara terminologi merupakan untuk akronim dari Inovatif, Daya saing dan Mandiri (Idaman).





Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dalam menciptakan daya saing dan kemandirian daerah yang didasari semangat kolaborasi dan sinergisitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Memantapkan birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.

Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan. Birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia. Program prioritas dalam misi pertama yang dirumuskan adalah Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), program ASN Bahagia, serta Program Kukar Bebaya, dimana program tersebut merupakan program dedikasi KUKAR IDAMAN yang dicetuskan Bupati terpilih di masa kampanye.





Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

Misi kedua dari Visi Bupati terpilih fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di era modern ini, sumber daya manusia yang berakhlak mulia, unggul dan berbudaya merupakan aset bagi daerah. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi perangkat daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah tersebut. Sehingga semakin berkualitas SDM maka tujuan pembangunan dapat tercapai. Adapun program dedikasi KUKARIDAMAN antara lain, Program 1000 Guru Sarjana, Program KUKAR BERKAH, program beasiswa KUKAR IDAMAN, Program Keluarga Peduli Kesehatan, Program Kukar Siap Kerja, Program Kukar Berbudaya, Program Gerakan Etam Mengaji IDAMAN (GEMA IDAMAN) serta Program Kesejahteraan Sosial.

Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Misi ketiga adalah Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penguatan pembangunan ekonomi diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kemandirian dan inovasi ekonomi kerakyatan, yang bertumpu pada upaya mendorong usaha-usaha yang mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), dan mengalihkannya secara bertahap kepada pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (*renewableresources*). Program yang mendukung misi ketiga sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan, Program Hilirisasi Produk Pertanian, Program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F), Program Usaha Kecil IDAMAN dan Program Kukar Kreatif IDAMAN.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah

Akses terhadap infrastruktur, baik infrastruktur permukiman, air bersih, listrik ataupun fasilitas lainnya dapat menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk,





maka semakin meningkat pula kebutuhan-kebutuhan baik berupa kebutuhan jalan dalam kondisi baik, permukiman yang layak, akses terhadap air bersih, energi listrik untuk penerangan dan lain-lain. Rencana program yang dibuat sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN dalam mendukung misi keempat antara lain: Program Pemantapan Konektivitas Wilayah, Program Fasilitas Perumahan Rakyat, Program Air Bersih Desa, dan Program Klik Kampungku.

Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA selain menimbulkan dampak positif bagi perekonomian dan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan bencana alam. serta semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif (lahan kritis) Pengelolaan SDA perlu mendapat perhatian yang mendalam khususnya dalam pemanfaatan dan upaya perlindungannya dari kerusakan lingkungan hidup. Program yang diusulkan untuk mendukung misi kelima sebagai program dedikasi KUKAR IDAMAN antara lain: Program Desa Ramah Lingkungan, Program Kukar Peduli Lingkungan dan Program Dunia Usaha Ramah Lingkungan.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai tindaklanjut dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan maka dilaksanakan melalui program prioritas yang mempunyai keterkaitan langsung dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pada pembangunan tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kebijakan dan program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:





Tabel 1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Urusan dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”													
Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani													
Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien , inovatif, akuntabel, bersih dan melayani				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB (60,95)	BB (62,00)	BB (63,00)	BB (64,00)	BB (65,00)	BB (70,02)	BB (70,02)	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Nilai Sakip	Nilai	B (65,89)	B (66,89)	BB (70)	BB (73)	BB (77)	A (80,01)	A (80,01)	
Penataan dan Pengembangan n Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Persen	76	77	78	79	80	81	81	Sekretariat Daerah
				Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	83	87	92	96	98	100	100	
				Persentase nilai Sakip perangkat daerah predikat BB dan A	Persen	50	60	70	80	90	100	100	
		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang sosial budaya dan pemerintahan pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
				Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
				Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang Sarana dan Prasarana pada Renja-PD	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kab.	Persen	91.5	92	93	94	95	96	96	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah				Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	5.93	6,25	6,50	6.75	6.80	7.00	7.00	
Penataan dan Pengembangan n Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	90	100	100	100	100	100	100	
			Program Pengelolaan	Tingkat pemenuhan peraturan dan	Persen	75	100	100	100	100	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
			Barang Milik Daerah	pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016									
				Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	85	100	100	100	100	100	100	
				Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
				Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraa n Pengawasan	Persen	90	96	96	96	97	97	97	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	45	55	65	75	85	100	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan Publik				Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8.5	8.85	8.90	8.95	9.00	9.05	9.05	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
Penataan dan Pengembangan n Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP-EL	Persen	97.97	99	99	99	99	99	99	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Kepemilikan KIA	Persen	20	50	70	90	99	99	99	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Adminduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Data Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi: 2 Meningkatnya Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya													
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing				Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	7.59	75.34	75.85	76.00	76.20	76.59	76.59	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan				Indeks Pendidikan	Nilai	0.085	0.693	0.697	0.700	0.704	0.706	0.706	
				Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n/a	50.00	50.00	51.00	51.50	53.00	53.00	
Pengembangan n sumber daya	Peningkatan jangkauan dan	Urusan Pemerintahan		Capaian Indeks Mutu Pendidikan	Persen	84.43	85.86	87	88.43	89.71	89.71	89.71	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
manusia yang sehat, produktif, terampil	akses layanan pendidikan yang bermutu	Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	(IMP) SD (Angka Indeks Max 7)									Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	Persen	84.43	85.86	87	88.43	89.71	89.71	89.71	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	Persen	72.92	78.72	80.6	82.02	83.02	83.92	83.92	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	Persen	62.28	64.08	65.98	65.98	68.38	68.38	68.38	
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	0	3000	3000	3000	3000	3000	15000	
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	0	0	0	0	0	0	0	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	10	10	10	10	10	10	10	
	Penguatan modal sosial	Urusan Pemerintahan		Jumlah Pelaksanaan	Event	2	2	2	2	2	2	2	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
	budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara									
				Persentase Desa Budaya Yang Aktif (Existing 5 Desa Budaya)	Persen	10	10	10	10	10	10	10	
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Yang Berperan Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) Penyandang Distabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Memperoleh Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persen	77	80	85	90	95	100	100	
				Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
		Urusan Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Miskin Non Potensial									Sekretariat Daerah
				Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100		
				Persentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	85	100	100	100	100	100		
				Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100	100	100	100	100	100		
				Persentase Kerja sama yang di tindak lanjuti	Persen	75	80	85	90	90	90	90	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat				Indeks Kesehatan	Nilai	0.805	0,811	0,814	0,817	0.821	0.824	0.824	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentasi Balita Sunting	Persen	16.19	15.6	15.1	14.6	14.1	13.8	13.8	Dinas Kesehatan
				Indeks Keluarga sehat	Persen	0.21	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.5	
				Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.77	
				Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.78	
				Indeks Pelayanan Penyakit Menular	Persen	0.55	0.57	0.59	0.61	0.63	0.65	0.65	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0.44	0.46	0.48	0.5	0.52	0.54	0.54	
				Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.9	0.9	
				Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0.34	0.36	0.38	0.4	0.43	0.45	0.45	
				Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.49	
				Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88	25	28,13	31,25	34,38	34,38	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	68	68	70	75	80	85	85	
	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Capaian RTPHBS	Persen	26	30	32	34	36	40	40	
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				Indeks Pembangunan Gender	Nilai	78.9	79	79,05	79,1	79,15	79,2	79,2	
Pengembangan sumber daya manusia yang sehat,	Peningkatan keterampilan perempuan dan	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaa	Program Pengarusutamaan Gender dan	Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,	Persen	8.48	12.18	15.74	19.31	22.92	26.49	26.49	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
produktif, terampil	pemenuhan hak-hak anak	n Perempuan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan	Hukum, Sosial, Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan									Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	710	730	750	770	790	810	810	
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	97.78	100	100	100	100	100	100	
Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat				Tingkat Kebahagiaan	Nilai	n/a	71	72	73	74	75	75	
				Tingkat Kemiskinan	Persen	7.35	6,9	6,5	6,45	6,4	6,35	6,35	
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat				Indeks Gini	Nilai	0.290	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27	
				Indeks Desa Membangun	Nilai	0.685	0,705	0,725	0,745	0,765	0,785	0,785	
Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan masyarakat hukum adat	Persentase Posyandu Aktif	Persen	39	45.22	51.51	57.79	64.07	70.35	70.35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	16	50	70	80	90	95	95	
				Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	n/a	10	10	10	10	10	50	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kecukupan Konsumsi Energi	Persen	1971	2050	2150	2175	2200	2225	2225	
		Urusan Pemerintahan Bidang	Program Penataan Desa	Kecukupan Konsumsi Protein	Persen	54.7	55.5	57	57.1	57.2	57.25	57.25	
	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah	Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	n/a	1.55	5.18	10.36	25.91	38.86	38.86	
				Persentase Realisasi Kesepakatan Kerja sama Desa	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	
		Menurunnya pengangguran di masyarakat			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.20	4,94	4,65	4,4	4,25	4,1	
			PDRB per Kapita	Rp. (Juta)	188.64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69	204,69		
Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	Pengembangn kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kepemudaan	Persen	36.47	71.95	74.39	76.83	79.27	81.71	81.71	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	8.98	12.82	16.66	20.5	24.34	28.19	28.19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	n/a	1	2	3	3	3	3	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif													
Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	0.62	3,74	5,46	5,81	5,72	5,89	5,89	
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0.21	5,69	6,15	6,6	7,05	7,5	7,5	
Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	38,706.00	39,867.18	40,254.24	40,641.30	41,802.48	42,576.60	42,576.60	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	2878	3000	7500	13000	20000	30000	30000	
				Luas Tanam Palawija	Hektar (Ha)	14	25	35	45	55	65	65	
				Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	23,449.03	26,197.87	26,987.26	27,781.65	29,278.24	30,200.81	30,200.81	
				Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	33576	34416	35275	36157	37061	37988	37988	
				Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17115	17551	17990	18441	18900	19375	19375	
				Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	15534000	15999000	16480000	16975000	17483000	18009000	18009000	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28516	28570	28645	28720	28795	28880	28880	Dinas Perkebunan
				Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	190797	214116	237435	268526	307390	346255	346255	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17833	17898	17928	17958	17988	18033	18033	
				Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3375	3402	3412	3427	3442	3452	3452	
				Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7261	7286	7291	7301	7306	7311	7311	
				Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	72	78	89	110	115	125	125	
				Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	70	80	85	95	95	100	100	
				Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	237	237	243	248	248	253	253	
				Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	2	5	7	9	9	9	9	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	99500	28267	33000	20000	12500	10500	104267	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	5	14	23	23	21	19	100	
				Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter	78375	14664	20000	17000	10000	7500	69164	
				Jumlah DAM Parit yang dibangun	Unit	16	4	5	6	4	3	22	
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	Unit	128	19	35	33	19	19	125	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	100000	3600	3600	4000	4000	4800	20000	Dinas Perkebunan
				Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	20	3	4	4	5	4	20	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	90	92	94	95	96	97	97	Dinas Pertanian dan Peternakan





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	3	5	5	5	5	5	5	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	75	80	85	90	95	100	100	
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1	2	3	3	4	5	17	Dinas Perkebunan
				Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	1.91	4.8	9.8	14.6	19.6	24.6	24.60	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	Persen	75	80	85	90	95	100	100	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	80000	82400	86520	95172	104689	115158	115158	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	136960	150,656	165,721	185,608	207,881	232,827	232,827	
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Wilayah Suberdaya Perikanan Yang Diawasi	Kecamatan	5	5	20	20	20	20	20	
				Persentase Penyelesaian Kasus Illegal / Destruktif Fishing	Persen	n/a	92	93	95	98	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	21678	22762	23900	25095	26350	27668	27668	
				Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1500	1530	1607	1687	1771	1860	1860	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	n/a	95	97	98	98	99	99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	Persen	31	43	54	65	75	86	86	
				Pertumbuhan pendapatan pasar	Persen	2.48	3.33	3.35	3.62	4.22	4.22	4.22	
				Indeks Kualitas Pasar	Nilai	43	48	53	58	62	67	67	
		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	Dokumen	2	2	2	2	1	1	8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Urusan Pemerintahan Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	n/a	1.81	1.99	1.99	1.99	1.99	9.77	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	Persen	n/a	0.3	0.6	0.9	1.1	1.4	1.4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah				Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	-0.99	2,34	2,51	3,42	4	4,23	4,23	
Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial, budaya dan olah raga yang berkelanjutan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	28	59.14	64	82	100	100	100	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Okupansi	Persen	20	23.28	26.28	29.28	32.28	35.28	35.28	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku EKRAF	Persen	7	7	7	7	7	7	7	
Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif				Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	4.44	6,11	6,55	7,09	7,48	7,56	7,56	
Penguatan daya saing ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas industri kreatif	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terfasilitas	Persen	n/a	4	4	5	6	7	7	Dinas Pariwisata
Meningkatnya daya saing investasi daerah				Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1.69	1,71	1,73	1,75	1,77	1,79	1,79	
Penguatan daya saing	Peningkatan kemudahan	Urusan Pemerintahan	Program Pengembangan	Jumlah Proyek PMDN/PMA	Proyek	602	625	640	652	665	685	3267	Dinas Penanaman





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
ekonomi daerah yang unggul, bernilai tambah dan berkelanjutan	perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi	Bidang Penanaman Modal	Iklim Penanaman modal										Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	112	200	260	310	340	350	350	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan izin	Izin	678	750	850	950	1050	1150	4750	
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah													
Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah				Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37.80	35,8	34,8	33,8	32,8	31,8	31,8	
				Persentase penurunan kawasan kumuh	Persen	0.0058	0.0057	0.0057	0.0056	0.0055	0.0054	0.0054	
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih				Cakupan layanan air bersih	Persen	87.60	89,32	90,74	92,16	93,58	95	95	
				Persentase rumah layak huni	Persen	89.80	90,35	90,62	90,89	91,16	91,44	91,44	
Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Persen	26.30	31.77	37.25	42.72	48.19	53.67	53.67	
			Program Perumahan Dan kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	7.4	7.2	7	6.7	6.4	6.1	6.1	
				Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	25	517	517	517	517	517	2585	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	Persen	n/a	4.92	4.69	4.48	4.29	4.11	4.11	
		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Persen	87.9	89.32	90.74	92.16	93.58	95	95	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase Penyediaan SPAM	Persen	0	0.54	0.7	1.03	1.26	1.48	1.48	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
			Sistem Air Limbah	Perdesaan (50 Unit)									
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	81.7	83.4	85	86.7	88.3	90	90	
				Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	Persen	62.12	65.28	65.75	66.22	66.67	67.11	67.11	
		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1	1	2	1	1	1	6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Timbulan sampah	Persen	78.5	88.18	94.84	97.6	99.52	99.96	99.96	
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah				Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	83.17	84,18	85,18	86,18	87,18	88,18	88,18	
Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan Pembangunan kawasan di lokasi IKN	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	60.33	65	70	75	80	85	85	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan antar wilayah)	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0.75	0.76	0.78	0.8	0.82	0.85	0.85	Dinas Pekerjaan Umum





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K	K	
		Penataan Ruang		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.08	
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.04	
			Program Penyelenggaraa n Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	63.4	63.6	64.2	64.7	65	65.1	65.1	
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan													
Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan				Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	5	5	5	5	5	5	25	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72.82	73.14	73.47	73.81	74.15	74.51	74.51	
Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan	Pemulihan daya dukung lingkungan	Urusan Pemerintahan Bidang	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaaan Lingkungan	Persen	100	100	60	100	100	66.7	94.4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
secara lestari dan berkelanjutan		Lingkungan Hidup		Hidup yang disusun									
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,000,000	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	0	4	4	4	3	3	18	
			Program Pembinaan Dan pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan izin Perlindungan Dan Pengelola lingkungan hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19.32	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan yang diberikan	Penghargaan	101	124	126	128	129	119	626	
				Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan	Desa / Kelurahan	0	0	5	5	5	6	21	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama									
Meningkatnya ketahanan bencana daerah				Indeks Risiko Bencana	Nilai	110.00	108,55	106,42	104,28	102,14	100.00	100.00	
Pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	5.11	8.1	12.1	15.1	18.1	21.1	21.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	8.55	10.6	13.6	16.6	19.6	22.6	22.6	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
		Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen	Persen	10.86	12.2	15.8	17.6	19.3	20.1	20.1	





Visi / Misi / Tujuan / Sasaran / Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							2022	2023	2024	2025	2026		
							K	K	K	K	K		
				Kebakaran (WMK)									
				Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	Kelompok	74	10	15	20	25	30	100	
				Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Perda No 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026





Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan dan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 (lima) tahun ke depan.

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Target kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026

Indikator	Kondisi Awal	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Indeks Pembangunan Manusia	73,59	75,34	75,85	76	76,2	76,59
Angka Kemiskinan	7,35	6,90	6,50	6,45	6,4	6,35
Angka Pengangguran	5,2	4,94	4,65	4,4	4,25	4,1
Pertumbuhan Ekonomi	1,5	1,06	1,38	1,89	2,4	3
Pendapatan Perkapita	188,64	187,21	191,44	197,62	202,16	204,69
Ketimpangan Pendapatan (gini ratio)	0,29	0,290	0,290	0,290	0,290	0,80

Sumber : Perda No. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

1.3. Data Umum Daerah

A. Kondisi Geografis

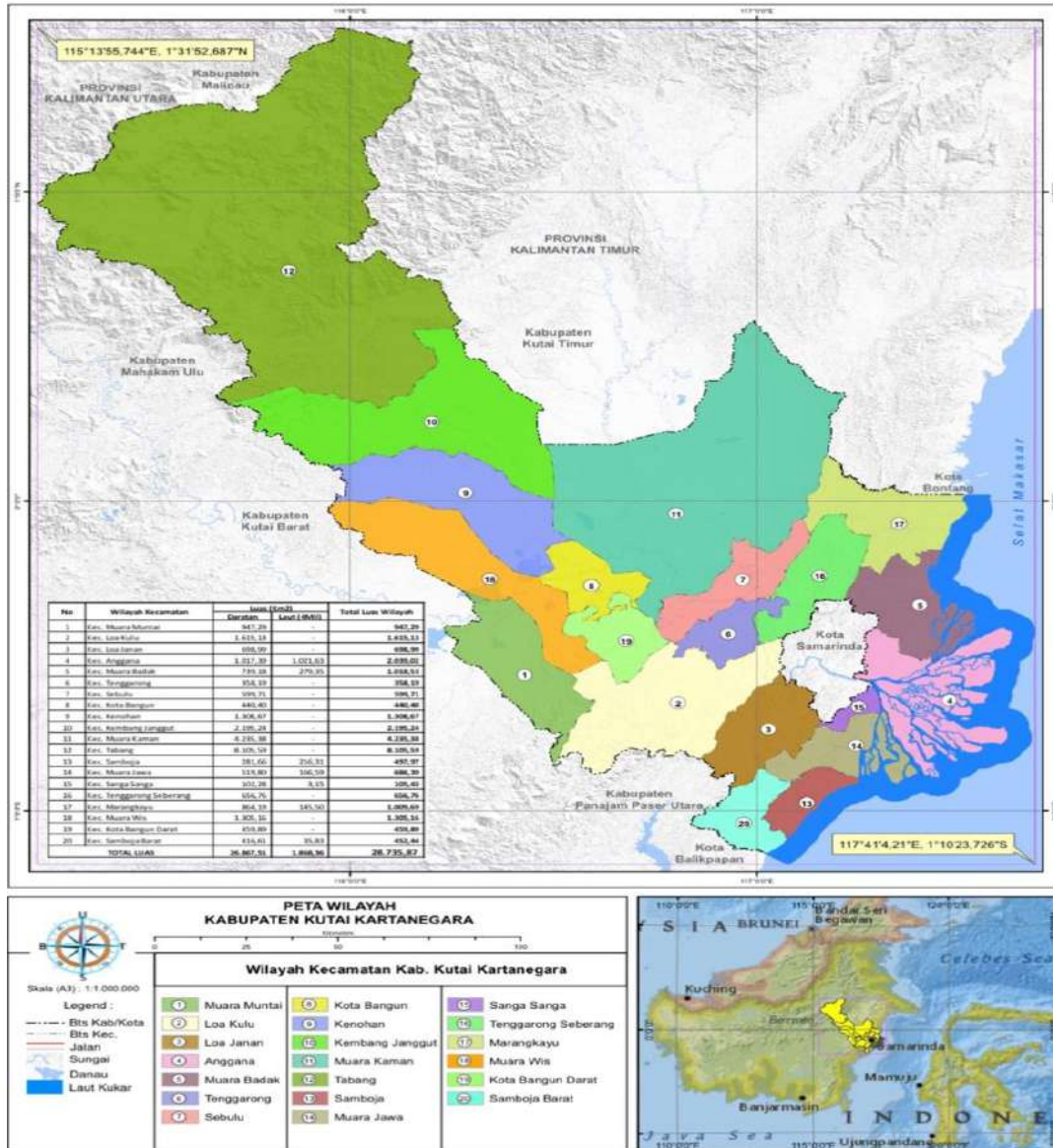
Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115⁰ 13'55" Bujur Timur sampai dengan 117⁰ 41'4" Bujur Timur dan 1⁰ 31'52" Lintang Utara sampai dengan 1⁰ 10'23" Lintang Selatan. Berdasarkan validasi perhitungan dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 September 2021, luas wilayah daratan Kabupaten





Kutai Kartanegara ± 26.867,51 km² dan luas wilayah laut ± 1.868,356 km² dengan total luas wilayah ± 28.735,87 km²

Gambar 1. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2024

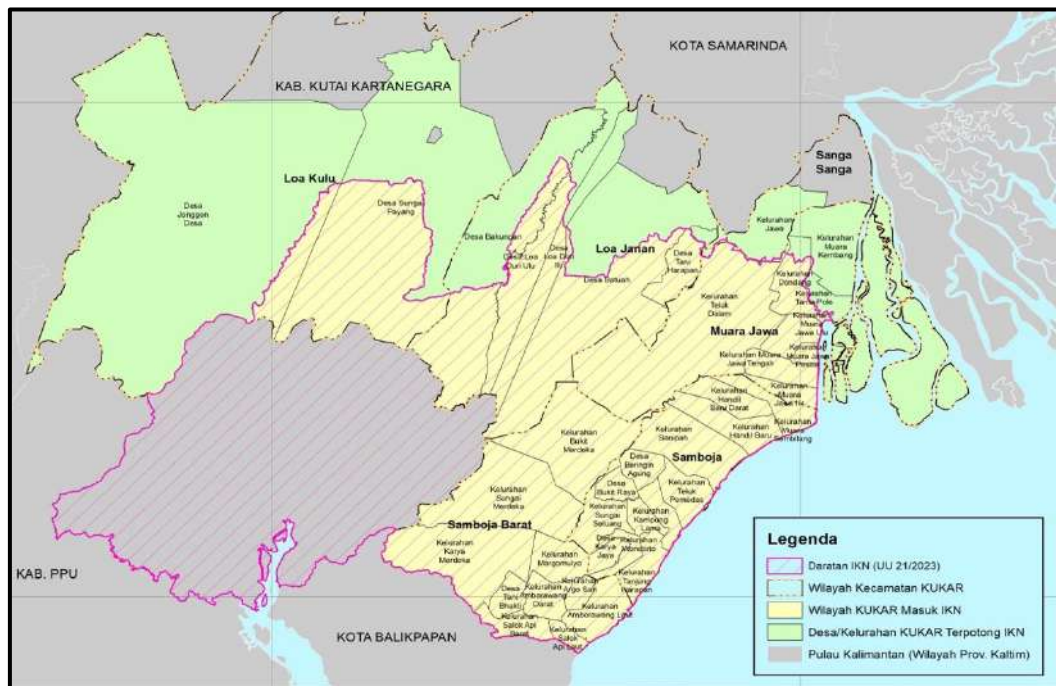
Kabupaten Kutai Kartanegara secara administratif berbatasan dengan Sebelah Utara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang dan Selat Makassar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat.





Ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Ibu Kota Negara Nusantara memiliki wilayah daratan seluas ± 252.660 ha dan wilayah lautan ± 69.769 ha yang dimana sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara.

Gambar 2. Peta Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk Wilayah IKN



Terdapat 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, secara rinci luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delineasi wilayah Ibu Kota Negara Nusantara sebagai berikut:

Tabel 3. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Pasca UU IKN

No	Kecamatan	Kawasan	Luas ($\pm km^2$)	
			Wilayah Diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
1	Tabang	Daratan	8.107	
2	Kembang Janggut	Daratan	2.195	
3	Kenohan	Daratan	1.309	





No	Kecamatan	Kawasan	Luas (±km ²)	
			Wilayah Diluar UU	Wilayah Masuk UU IKN
4	Muara Muntai	Daratan	947	
5	Muara Wis	Daratan	1.305,16	
6	Kota Bangun	Daratan	440	
7	Kota Bangun Darat	Daratan	460	
8	Muara Kaman	Daratan	4.235	
9	Sebulu	Daratan	600	
10	Tenggarong Seberang	Daratan	657	
11	Tenggarong	Daratan	358	
12	Marang Kayu	Daratan	864	
13	Muara Badak	Daratan	739	
14	Anggana	Daratan	1.017,39	
15	Loa Kulu	Daratan	1.365	250
16	Loa Janan	Daratan	321	378
17	Sanga-Sanga	Daratan	101,28	1
18	Muara Jawa	Daratan	222,80	297
19	Samboja	Daratan	-	281,66
20	Samboja Darat	Daratan	-	416,61
			25.290	1.625

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2024

B. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Semester II Tahun 2024 sebesar 806.964 jiwa di 20 (dua puluh) wilayah kecamatan. Komposisi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Muara Muntai	11.207	10.313	21.520
2	Loa Kulu	30.160	27.709	57.869
3	Loa Janan	40.950	36.835	77.785
4	Anggana	20.804	18.934	39.738
5	Muara Badak	27.132	25.090	52.222
6	Tenggarong	59.672	56.858	116.530
7	Sebulu	23.175	20.779	43.954
8	Kota Bangun	12.421	11.882	24.303





No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
9	Kenohan	6.718	5.908	12.626
10	Kembang Janggut	14.829	13.296	28.125
11	Muara Kaman	25.312	22.352	47.664
12	Tabang	7.436	6.466	13.902
13	Samboja	22.237	20.492	42.729
14	Muara Jawa	23.439	21.728	45.167
15	Sanga Sanga	11.064	10.396	21.460
16	Tenggarong Seberang	38.493	35.674	74.167
17	Marang Kayu	15.573	14.454	30.027
18	Muara Wis	5.326	4.653	9.979
19	Kota Bangun Darat	7.643	7.095	14.738
20	Samboja Barat	17.153	15.306	32.459
Jumlah Penduduk		420.744	386.220	806.964

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKB SMT II 2024

C. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah, Penghitungan pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah kematian dan jumlah kelahiran.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Kecamatan	Jml Penduduk SMT I 2024	Jml Penduduk SMT II 2024	Laju Pertumbuhan
1	Muara Muntai	21.303	21.520	0,51
2	Loa Kulu	57.066	57.869	0,7
3	Loa Janan	76.457	77.785	0,86
4	Anggana	38.904	39.738	1,06
5	Muara Badak	51.035	52.222	1,15
6	Tenggarong	114.639	116.530	0,82
7	Sebulu	43.339	43.954	0,7
8	Kota Bangun	23.912	24.303	0,81
9	Kenohan	12.453	12.626	0,69
10	Kembang Janggut	27.162	28.125	1,74
11	Muara Kaman	46.859	47.664	0,85
12	Tabang	13.495	13.902	1,49
13	Samboja	41.912	42.729	0,97
14	Muara Jawa	44.352	45.167	0,91



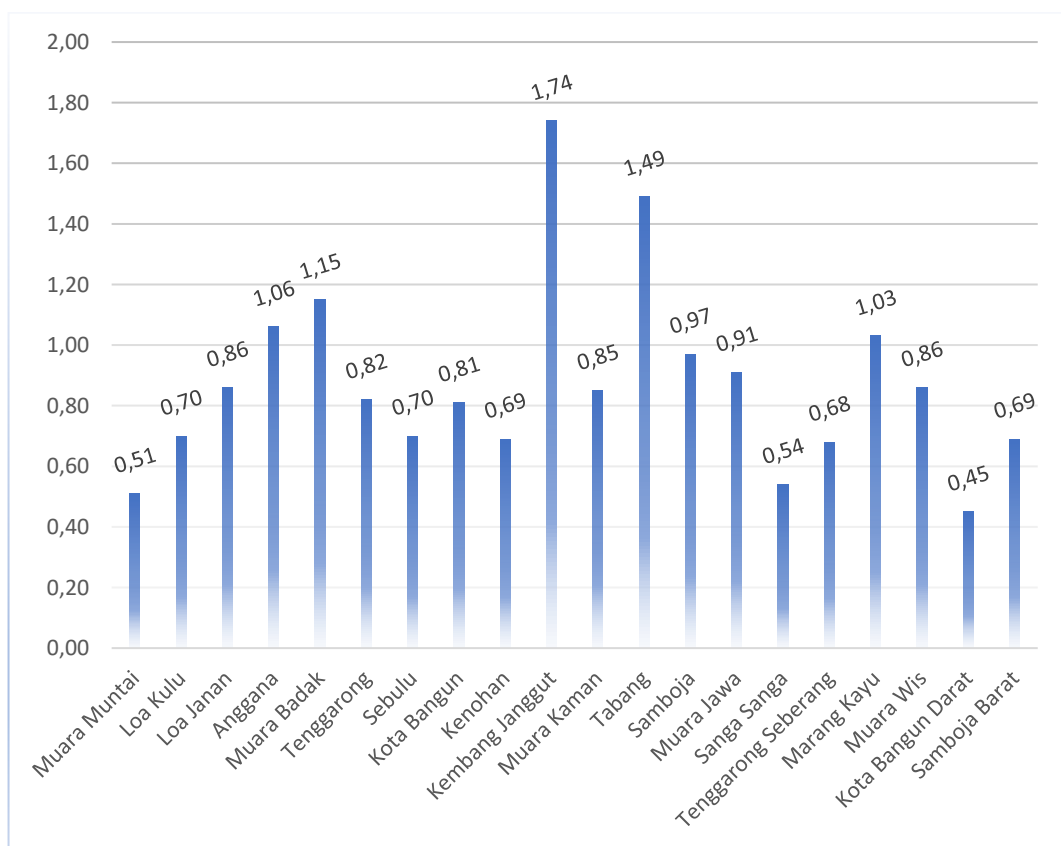


No	Kecamatan	Jml Penduduk SMT I 2024	Jml Penduduk SMT II 2024	Laju Pertumbuhan
15	Sanga Sanga	21.229	21.460	0,54
16	Tenggarong Seberang	73.170	74.167	0,68
17	Marang Kayu	29.413	30.027	1,03
18	Muara Wis	9.808	9.979	0,86
19	Kota Bangun Darat	14.606	14.738	0,45
20	Samboja Barat	32.017	32.459	0,69
Jumlah Penduduk		793.131	753.862	0,86

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKB SMT II 2024

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah 0,86%, terdapat kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk diatas rata-rata Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kec. Anggana 1,06%, Kec. Muara Badak 3,76%, Kec. Kembang Janggut 1,74%, Kec. Tabang 1,49% Kec. Samboja 0,97%, Kec. Muara Jawa 0,91% dan Kec. Marang Kayu 1,03% adapun persentase pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terlihat sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 1. Persentase Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DKB SMT II 2023





D. Jumlah Kecamatan, Jumlah Perangkat Daerah dan Jumlah Pegawai Pemerintah

Wilayah administrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 Kecamatan dan 193 Desa dan 44 Kelurahan, berikut ini ditampilkan tabel pembagian luas wilayah per kecamatan dan jumlah desa/kelurahan.

Tabel 6. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

No	Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (km ²)	Luas Wilayah Laut (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Muara Muntai	947,29	-	13	-
2	Loa Kulu	1.615,13	-	15	-
3	Loa Janan	698,99	-	8	-
4	Anggana	1.017,39	1.021,63	8	-
5	Muara Badak	739,18	279,35	13	-
6	Tenggarong	358,19	-	2	12
7	Sebulu	599,71	-	14	-
8	Kota Bangun	440,40	-	11	-
9	Kenohan	1.308,67	-	9	-
10	Kembang Janggut	2.195,24	-	11	-
11	Muara Kaman	4.235,38	-	20	-
12	Tabang	8.105,59	-	19	-
13	Samboja	281,66	216,31	3	10
14	Muara Jawa	519,80	166,59	-	8
15	Sanga-Sanga	102,28	3,15	-	5
16	Tenggarong Seberang	656,76	-	18	-
17	Marangkayu	864,19	145,50	11	-
18	Muara Wis	1.305,16	-	7	-
19	Kota Bangun Darat	459,89	-	10	-
20	Samboja Barat	416,61	-	1	9
Jumlah		26.968,51	1.868,36	193	44

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Kukar, 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 berjumlah sebanyak 56 OPD dan 3 Rumah Sakit Daerah sebagai Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan.





Jumlah pegawai di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 terdiri PNS sebanyak 11.309 orang, PPPK sebanyak 3.045 orang dan THL sebanyak 6.766 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	320	199	519
2.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	96	68	164
3.	Inspektorat	Penunjang	56	36	92
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	40	13	53
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umum	157	111	268
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	95	60	155
7.	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	63	51	114
8.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	49	23	72
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	40	13	53
10.	Badan Riset Inovasi Daerah	Penunjang	157	111	268
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	44	42	86
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	63	35	98
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	48	29	77
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35	30	65
15.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	243	564	807
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	26	27	53
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	43	23	66





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
18.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	32	32	64
19.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85	31	116
20.	Dinas Pariwisata	Pariwisata	86	44	130
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	215	111	326
22.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	62	11	73
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	53	47	100
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11	24	35
25.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31	37	68
26.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	1.822	2.956	4.778
27.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	24	25	49
28.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	87	31	118
29.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	62	43	105
30.	Dinas Perkebunan	Perkebunan	69	47	116
31.	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	39	28	67
32.	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	254	134	388
33.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Permukiman	75	82	157
34.	Dinas Sosial	Sosial	49	20	69
35.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37	27	64
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	124	9	133
37.	Kantor Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	18	15	33





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
38.	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	22	6	28
39.	Kantor Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	16	1	17
40.	Kantor Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	21	4	25
41.	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	Urusan Kewilayahan	17		17
42.	Kantor Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	15	15	30
43.	Kantor Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	36	17	53
44.	Kantor Kecamatan Marangkayu	Urusan Kewilayahan	11	11	22
45.	Kantor Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	13	12	25
46.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	33	41	74
47.	Kantor Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	50	11	61
48.	Kantor Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	26	13	39
49.	Kantor Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	22	8	30
50.	Kantor Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	45	36	81
51.	Kantor Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	47	23	70
52.	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	Urusan Kewilayahan	31	17	48
53.	Kantor Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	29	8	37
54.	Kantor Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	33	8	41
55.	Kantor Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	181	154	335
56.	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	41	14	55
57	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	122	167	289





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	PNS Laki-laki	PNS Perempuan	Jumlah
58	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	33	54	87
59	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	10	12	22
Jumlah			5.559	5.750	11.309

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara, 2024

Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga didukung oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan Tenaga Harian Lepas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah PPPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	328	1.003	1.331
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	484	1.202	1.686
3	Dinas Pertanian dan Peternakan	20	8	28
Jumlah		832	2.213	3.045

Tabel 9. Jumlah Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	152	128	280
2.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	56	67	123
3.	Inspektorat	Penunjang	18	12	30
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang	17	15	32
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Pemerintahan Umumn	9	11	20
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibum Sub Urusan Bencana	45	15	60
7.	Badan Pendapatan Daerah	Penunjang	41	18	59
8.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Penunjang	40	14	54





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang	12	4	16
10.	Badan Riset Inovasi Daerah	Penunjang	13	22	35
11.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kearsipan dan Perpustakaan	26	14	40
12.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	45	19	64
13.	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Kepemudaan dan Olah Raga	55	19	74
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	19	38
15.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	244	443	687
16.	Dinas Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	11	14	25
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	35	8	43
18.	Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12	13	25
19.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	41	45	86
20.	Dinas Pariwisata	Pariwisata	51	27	78
21.	Dinas Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum	47	35	82
22.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Trantibum Sub Urusan Kebakaran	255	36	291
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	26	23	49
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14	6	20
25.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35	19	54
26.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan	1150	1978	3128
27.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	10	9	19
28.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	135	86	221





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
29.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan	40	39	79
30.	Dinas Perkebunan	Perkebunan	42	26	68
31.	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang	Pertanahan Dan Penataan Ruang	34	16	50
32.	Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pertanian dan Peternakan	115	92	207
33.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Pemukiman	64	64	128
34.	Dinas Sosial	Sosial	11	18	29
35.	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Transmigrasi dan Tenaga Kerja	22	15	37
36.	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibum Sub Urusan Trantibumlinmas	217	53	270
37.	Kantor Kecamatan Anggana	Urusan Kewilayahan	4	2	6
38.	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	Urusan Kewilayahan	7	3	10
39.	Kantor Kecamatan Kenohan	Urusan Kewilayahan	13	1	14
40.	Kantor Kecamatan Kota Bangun	Urusan Kewilayahan	11	10	21
41.	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	Urusan Kewilayahan	4	7	11
42.	Kantor Kecamatan Loa Janan	Urusan Kewilayahan	10	7	17
43.	Kantor Kecamatan Loa Kulu	Urusan Kewilayahan	28	12	40
44.	Kantor Kecamatan Marangkayu	Urusan Kewilayahan	8	11	19
45.	Kantor Kecamatan Muara Badak	Urusan Kewilayahan	5	9	14
46.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	Urusan Kewilayahan	38	55	93
47.	Kantor Kecamatan Muara Kaman	Urusan Kewilayahan	21	14	35
48.	Kantor Kecamatan Muara Muntai	Urusan Kewilayahan	11	5	16
49.	Kantor Kecamatan Muara Wis	Urusan Kewilayahan	15	4	19





No	Nama Perangkat Daerah	Urusan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
50.	Kantor Kecamatan Samboja	Urusan Kewilayahan	51	41	92
51.	Kantor Kecamatan Samboja Barat	Urusan Kewilayahan	35	21	56
52.	Kantor Kecamatan Sanga-Sanga	Urusan Kewilayahan	15	28	43
53.	Kantor Kecamatan Sebulu	Urusan Kewilayahan	3	7	10
54.	Kantor Kecamatan Tabang	Urusan Kewilayahan	3	10	13
55.	Kantor Kecamatan Tenggarong	Urusan Kewilayahan	99	84	183
56.	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	Urusan Kewilayahan	3	8	11
57.	RSUD Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	100	202	302
58.	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	225	328	553
59.	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	Organisasi Bersifat Khusus Pelayanan Kesehatan	111	118	229
Jumlah			3.979	4.429	8.408

E. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp.12.702.063.635.451,50 atau 88,75% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.14.312.025.946.608,00 secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	732.901.415.061,00	787.600.170.609,48	107,46%
	Pajak Daerah	160.000.000.000,00	165.870.568.096,40	103,67%
	Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	5.879.733.796,00	77,95%





No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.000.000.000,00	88.383.259.737,59	276,20%
	Lain-lain PAD yang Sah	533.358.595.061,00	527.466.608.979,49	98,90%
2	Pendapatan Trasnfer	13.329.124.531.547,00	11.833.530.509.534,30	88,78%
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	12.504.259.028.547,00	11.186.675.996.465,30	89,46%
	Dana Perimbangan	12.274.362.955.547,00	10.956.779.923.465,30	89,27%
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00%
	Dana Desa	195.105.755.000,00	195.105.755.000,00	100,00%
	Intensif Fiskal	34.790.318.000,00	34.790.318.000,00	100,00%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	824.865.503.000,00	646.854.513.069,00	78,42%
	Pendapatan Bagi Hasil	766.425.503.000,00	588.414.513.069,00	76,77%
	Bantuan Keuangan	58.440.000.000,00	58.440.000.000,00	100,00%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37%
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00%
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	250.000.000.000,00	80.932.955.307,69	32,37%
Total		14.312.025.946.608,00	12.702.063.635.451,50	88,75%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2024 *Unaudited*

F. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp.12.808.056.939.981,10 atau 88,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.14.531.000.000.000,00 Secara rinci target dan realisasi belanja daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	7.308.463.985.598,24	6.241.519.304.899,94	87,20%
	Belanja Pegawai	2.315.252.391.445,96	2.027.620.403.312,00	87,73%
	Belanja Barang dan Jasa	4.673.176.313.252,26	3.942.510.396.024,94	87,10%
	Belanja Subsidi	134.594.500,00	101.040.120,00	75,07%





No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Hibah	293.603.569.400,02	246.099.465.443,00	83,82%
	Belanja Bantuan Sosial	26.297.117.000,00	25.188.000.000,00	95,78%
2	Belanja Modal	6.088.385.154.796,76	5.289.137.808.823,25	87,30%
	Belanja Modal Tanah	69.771.831.992,00	62.606.649.543,00	89,73%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.485.656.834.108,66	1.276.782.023.180,00	87,71%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.961.404.549.197,50	1.646.496.068.022,73	83,94%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.541.849.901.434,60	2.281.781.596.417,52	89,77%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.047.354.497,00	5.811.543.160,00	52,61%
	Belanja Modal Aset Lainnya	18.654.683.567,00	15.659.928.500,00	83,95%
3	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	0,00	0,00%
4	Belanja Transfer	1.124.150.859.605,00	1.119.682.510.459,00	99,60%
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab./Kota dan Desa	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	100,00%
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab./Kota Kepada Pemerintah Desa	754.282.000,00	754.282.000,00	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kab./Kota	302.828.903,00	0	0,00%
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab./Kota Kepada Desa	1.107.093.748.702,00	1.102.928.228.459,00	99,62%
Total		14.531.000.000.000,00	12.808.056.939.981,10	88,14%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2024 *Unaudited*

G. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Netto Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp.271.928.787.749,45 atau 124,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.218.974.053.392,00 Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal. Secara rinci target dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:





Tabel 12. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	295.974.053.392,00	295.974.053.392,00	100,00%
	- Sisa lebih perhitungan pembayaran tahun sebelumnya	295.974.053.392,00	295.973.787.749,45	100,00%
2	Pengeluaran Pembiayaan	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23%
	- Penyertaan Modal Daerah	77.000.000.000,00	24.045.000.000,00	31,23%
Pembiayaan Netto		218.974.053.392,00	271.928.728.618,00	124,18%

Sumber : LKPD Kab. Kutai Kartanegara Ta. 2024 *Unaudited*





BAB II

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu komponen utama untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Perkembangan informasi dan teknologi pemerintah harus dapat dioptimalkan dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan agar mempermudah akses data informasi yang dibutuhkan oleh setiap unsur *stakeholder*. Pengelolaan keuangan daerah melingkupi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan wujud pelaksanaan amanat sekaligus bukti capaian pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan beberapa kondisi perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA), yang berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.





3.4. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan umum perubahan pendapatan daerah masih diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui memaksimalkan pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Secara umum kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperhatikan potensi dan kondisi perekonomian daerah. Sedangkan untuk pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

PAD diprediksi masih sama dengan target awal, baik untuk pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan transfer dilakukan penyesuaian target. Penyesuaian tersebut berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan





perhitungan potensi kurang bayar dana bagi hasil (DBH) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi kurang bayar/lebih bayar DBH dan cara penyalurannya. Adanya kurang bayar DBH dari Pemerintah pusat juga berdampak pada dana bagi hasil pajak Provinsi sehingga penyesuaian akan dilakukan kembali berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

Sedangkan pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, juga masih sama dengan target awal atau tidak mengalami penyesuaian.

Sampai saat ini, ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat masih relatif cukup tinggi. Namun, adanya, kebijakan pemerintah pusat untuk memperketat aturan terkait alokasi dan penggunaan Dana Perimbangan, mengakibatkan Pemerintah Daerah tidak leluasa lagi dalam penggunaan Dana Perimbangan untuk membiayai pembangunan sesuai dengan kebijakan lokal, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan PAD dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja.

Dalam hal PAD, secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten juga memiliki kendala, diantaranya:

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan validitas data pajak daerah.
2. Potensi belum terukur dan lemahnya tata kelola dan rendahnya pengawasan untuk retribusi daerah.

Perubahan pendapatan pada rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA.2024, menjadi sebesar Rp14.300.604.067.668 terurai atas:

1. Pendapatan asli daerah masih sebesar Rp732.901.415.061, terdiri:
 - a. Pajak daerah menjadi sebesar Rp160.000.000.000.
 - b. Retribusi daerah menjadi sebesar Rp7.542.820.000.





- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menjadi sebesar Rp32.000.000.000
- d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi sebesar Rp533.358.595.061.

2. Pendapatan Transfer menjadi sebesar Rp13.317.702.652.607, terdiri:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp12.504.259.028.547,00.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah bertambah sehingga menjadi sebesar Rp 824.865.503.000,00

3. Sedangkan pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, masih sebesar Rp250.000.000.000

Dari uraian perubahan pendapatan sebagaimana dimaksud, secara ringkas tergambar pada tabel berikut:

Tabel 13. Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Sebelum Perubahan	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang
Pendapatan Daerah	12.699.000.000.000,00	14.312.025.946.608,00	1.613.025.946.608,00
Pendapatan Asli Daerah	732.901.415.061,00	732.901.415.061,00	-
Pajak Daerah	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	-
Retribusi Daerah	7.542.820.000,00	7.542.820.000,00	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.000.000.000,00	32.000.000.000,00	-
Lain-lain PAD yang Sah	533.358.595.061,00	533.358.595.061,00	-
Pendapatan Transfer	11.716.098.584.939,00	13.329.124.531.547,00	1.613.025.946.608,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.913.058.041.939,00	12.504.259.028.547,00	1.591.200.986.608,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	803.040.543.000,00	824.865.503.000,00	21.824.960.000,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perpu	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00	-

3.5. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah

Adanya penyesuaian pendapatan daerah juga mempengaruhi belanja daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis di antara instrumen





kebijakan fiskal lainnya adalah kebijakan anggaran belanja. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah digunakan untuk mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Memperhatikan prioritas, sasaran, target pembangunan dan kemampuan keuangan daerah serta sisa waktu pelaksanaan, secara garis besar kebijakan perubahan belanja daerah terurai sebagai berikut:

- a. Prioritas Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat. Belanja ini dimaksudkan demi terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta belanja mengikat yang merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap sampai dengan berakhirnya tahun anggaran seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga
- b. Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatari, merupakan belanja atau pengeluaran daerah yang besarannya sudah diatur oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah.
- c. Prioritas Pemenuhan Belanja SPM. Hal ini merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang





kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

- d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (*Major Project*). Prioritas pada belanja ini merupakan prioritas pembangunan daerah yang merupakan program unggulan/dedikasi Kepala Daerah. Terdapat 23 program *major project* dedikasi dari Kepala Daerah terpilih.
- e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya. Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, dan upaya pengentasan kemiskinan, serta mendukung kebijakan nasional.

Selain hal tersebut, Pemerintah Kabupaten pun melakukan penyesuaian terhadap prioritas, sasaran, target Pembangunan agar pembangunan daerah dapat optimal.

Belanja daerah pada rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA.2024 menjadi sebesar Rp14.531.000.000.000,00 dan secara jenis terurai atas Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja operasi menjadi sebesar Rp7.308.463.985.598,23 Pada belanja pegawai, penyesuaian dilakukan dengan tetap memperhitungkan ketersediaan alokasi yang cukup sampai





dengan akhir tahun. Begitu juga belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja hibah dan belanja bansos, penyesuaian dimaksudkan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sedangkan belanja subsidi tidak mengalami penyesuaian.

Belanja modal dialokasikan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya berupa Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Jaringan dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja modal menjadi sebesar Rp6.088.385.154.796,76 dan dalam perolehannya tetap memperhatikan waktu efektif pelaksanaan.

Belanja tidak terduga (BTT) berkurang sehingga menjadi Rp10.000.000.000 dan tetap dialokasikan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi ini menyesuaikan pendapatan yang diterima oleh Kabupaten. Belanja Transfer pada perubahan menjadi sebesar Rp1.124.150.859.605,00 yang terurai dalam bentuk belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Adapun gambaran umum perubahan belanja daerah sebagai berikut:

Tabel 14. Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Sebelum Perubahan	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang
Belanja Daerah	13.372.000.000.000,00	14.531.000.000.000,00	1.158.999.999.999,99
Belanja Operasi	7.281.429.024.847,00	7.308.463.985.598,23	27.034.960.751,23
Belanja Pegawai	2.878.630.352.788,00	2.315.252.391.445,96	- 563.377.961.342,04





Uraian	APBD Sebelum Perubahan	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang
Belanja Barang dan Jasa	4.132.780.279.973,00	4.673.176.313.252,25	540.396.033.279,25
Belanja Subsidi	337.474.000,00	134.594.500,00	- 202.879.500,00
Belanja Hibah	265.911.718.086,00	293.603.569.400,02	27.691.851.314,02
Belanja Bantuan Sosial	3.769.200.000,00	26.297.117.000,00	22.527.917.000,00
Belanja Modal	4.907.153.386.761,00	6.088.385.154.796,76	1.181.231.768.035,76
Belanja Modal Tanah	48.546.133.400,00	69.771.831.992,00	21.225.698.592,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	953.068.932.041,00	1.485.656.834.108,66	532.587.902.067,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.926.185.059.220,00	1.961.404.549.197,50	35.219.489.977,50
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.970.720.185.725,00	2.541.849.901.434,60	571.129.715.709,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.199.538.875,00	11.047.354.497,00	2.847.815.622,00
Belanja Modal Aset Lainnya	433.537.500,00	18.654.683.567,00	18.221.146.067,00
Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00	10.000.000.000,00	- 90.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	100.000.000.000,00	10.000.000.000,00	- 90.000.000.000,00
Belanja Transfer	1.083.417.588.392,00	1.124.150.859.605,00	40.733.271.213,00
Belanja Bagi Hasil	16.754.282.000,00	16.754.282.000,00	-
Belanja Bantuan Keuangan	1.066.663.306.392,00	1.107.396.577.605,00	40.733.271.213,00

3.6. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang merupakan salah satu komponen dari penerimaan pembiayaan terkoreksi berdasarkan audit BPK terhadap LKPD. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal tidak mengalami penyesuaian. Selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto. Pembiayaan netto inilah yang menutup defisit pada Perubahan APBD. Berikut rancangan perubahan pembiayaan TA. 2024.





Tabel 15. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Sebelum Perubahan	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	750.000.000.000,00	295.974.053.392,00	- 454.025.946.608,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	750.000.000.000,00	295.974.053.392,00	- 454.025.946.608,00
Pengeluaran Pembiayaan	77.000.000.000,00	77.000.000.000,00	-
Penyertaan Modal Daerah	77.000.000.000,00	77.000.000.000,00	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	77.000.000.000,00	77.000.000.000,00	-
Pembiayaan Netto	673.000.000.000,00	218.974.053.392,00	- 454.025.946.608,00
Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	0,01	0,01





BAB III

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahannya Tahun 2024, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditandatangani Bupati Kutai Kartanegara. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,28
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28

Sumber: Perjanjian Kinerja Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026

Pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun





sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

a) Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \left(1 + \left(\frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)\right) \times 100\%$$





Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam format Pengukuran Kinerja (PK), selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Skala Ordinal Pengukuran Kinerja Sasaran Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥ 95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30
Rata-rata Capaian							90,30
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71
Rata-rata Capaian							132,71





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65
Rata-rata Capaian							97,65
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
Rata-rata Capaian							107,01
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817	0,81	99,14
Rata-rata Capaian							99,14
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,600	100,63
Rata-rata Capaian							100,63
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745	0,7969	106,97
Rata-rata Capaian							98,66
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	106,59
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	240,87	121,89
Rata-rata Capaian							114,24
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55
Rata-rata Capaian							44,55
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,53
Rata-rata Capaian							229,53
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09	7,70	108,60
Rata-rata Capaian							108,60
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620,00
Rata-rata Capaian							620,00





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
Rata-rata Capaian							97,77
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24
Rata-rata Capaian							88,24
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70
Rata-rata Capaian							99,70
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08
Rata-rata Capaian							86,08

Adapun pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 19. Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	90,30			Berhasil	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1	132,71				Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	97,65				Sangat Berhasil
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	2	107,01				Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	1	99,14				Sangat Berhasil
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	100,63				Sangat Berhasil
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	2	98,66				Sangat Berhasil





NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	≤50%	51%≤80%	80%≤95%	≥95%
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	2	114,24				Sangat Berhasil
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	1	44,55	Kurang Berhasil			
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1	229,53				Sangat Berhasil
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	1	108,60				Sangat Berhasil
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	1	620,00				Sangat Berhasil
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	2	97,77				Sangat Berhasil
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	1	88,24			Berhasil	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	99,70				Sangat Berhasil
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	1	86,08			Berhasil	

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d $<50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Pencapaian kinerja 16 sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut:





Tabel 20. Predikat Nilai Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Berhasil	12	75%
2	Berhasil	3	18,75%
3	Cukup Berhasil	0	0%
4	Kurang Berhasil	1	6,25%
Jumlah		16	100,00%

Selanjutnya hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rekapitulasi Capaian IKU Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET RPJMD 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817	0,81	99,14
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,600	100,63
8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745	0,7969	106,97
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	106,59
11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	240,87	121,89
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,53
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09	7,70	108,60
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620,00
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :





1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP mencapai 90,30 dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 22. Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2024

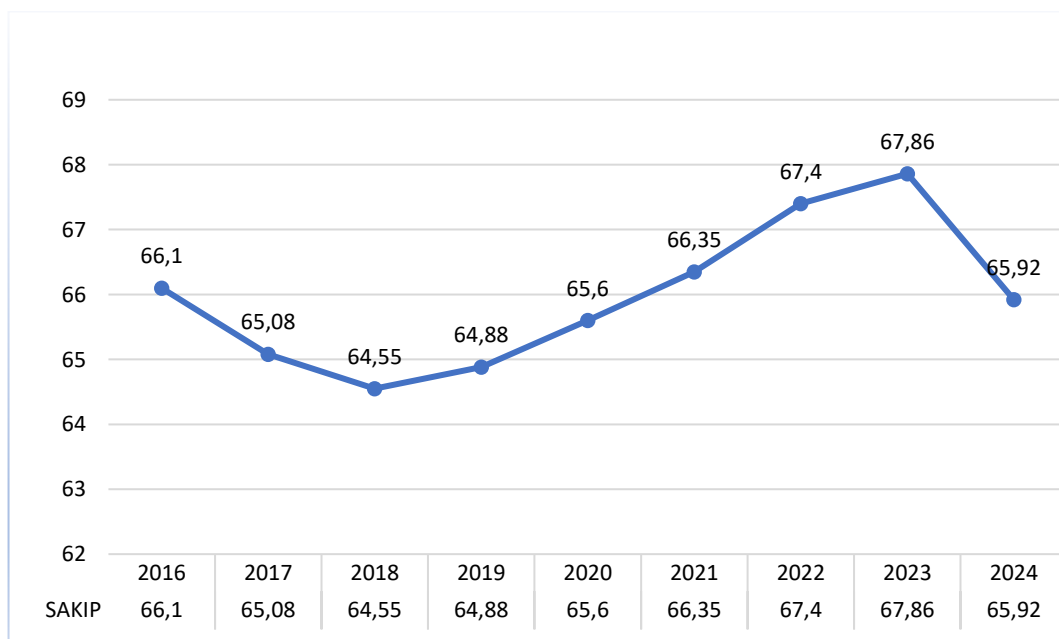
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan metode *desk* evaluasi, dengan hasil capaian sebesar 65,92 Predikat B. Capaian ini menurun 1,94 dari capaian Tahun 2023, namun capaian ini lebih rendah 7,08 dari target kinerja RPJMD 2024 yaitu sebesar 73,00. Adapun Capaian Predikat Akuntabilitas Kinerja dalam 9 tahun terakhir ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 2. Predikat SAKIP



Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2016-2024





Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,67	21,30
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,57	19,46
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,11	10,34
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,51	14,83
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,86	65,92
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024

Jika melihat hasil penilaian diatas Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai tertinggi ke tiga dari 10 (sepuluh) kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Berikut Tabel Hasil evaluasi SAKIP kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:

Tabel 24. Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota

No	Pemerintah Daerah	Nilai	Predikat
1	Provinsi Kalimantan Timur	78,74	BB
2	Kota Bontang	70,04	BB
3	Kota Balikpapan	69,06	B
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	65,92	B
5	Kota Samarinda	65,33	B
6	Kabupaten Kutai Barat	63,21	B
7	Kabupaten Berau	62,74	B
8	Kabupaten Penajam Paser Utara	62,19	B
9	Kabupaten Paser	61,38	B
10	Kabupaten Kutai Timur	60,08	B
11	Kabupaten Mahakam Ulu	54,50	CC

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:





Tabel 25. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	Nilai SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	77	80,01

Sumber data: Kementerian PANRB

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 26. Program dan Anggaran Sasaran 1 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,342,557,549,942.00	4,460,180,579,512.00	3,926,853,141,954.81	88.04%
2	Program Pengelolaan Arsip	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00	1,195,431,862.00	93.76%
3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	925,000,000.00	925,000,000.00	817,313,946.00	88.36%
4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	75,000,000.00	75,000,000.00	42,314,000.00	56.42%
5	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7,038,300,385.00	8,272,386,385.00	7,872,395,583.00	95.16%
6	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	72,738,141,916.00	70,626,202,232.00	60,499,809,296.00	85.66%
7	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6,652,400,000.00	6,205,482,550.00	5,481,781,456.00	88.34%
8	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	8,829,999,820.00	6,569,655,033.00	4,540,589,988.00	69.11%
9	Program Kepegawaian Daerah	8,865,011,000.00	8,390,011,000.00	5,882,729,974.00	70.12%
10	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	9,992,168,000.00	9,992,168,000.00	8,273,846,996.00	82.80%
11	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14,484,210,000.00	19,534,210,438.00	18,640,046,291.00	95.42%
12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	599,188,352,550.00	702,976,781,458.00	689,727,337,501.79	98.12%
13	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	4,881,135,281.00	7,023,879,301.00	6,345,746,176.00	90.35%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
14	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1,317,000,029.00	1,482,000,029.00	1,353,352,000.00	91.32%
15	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	50,000,000.00	50,000,000.00	49,580,000.00	99.16%
Total		5,078,869,268,923.00	5,303,578,355,938.00	4,737,575,417,024.60	89.33%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.4.737.575.417.024,60 dari total anggaran sebesar Rp. 5.078.869.268.923,00 atau sebesar 89,33%. Sementara itu, capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan mencapai 90,30%. Meskipun penggunaan dana lebih rendah dari capaian kinerja, terdapat indikasi ketidakefisienan dalam pemanfaatan sumber daya, karena target sasaran belum sepenuhnya tercapai (100%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran lebih rendah dari anggaran yang tersedia, efektivitas dalam pencapaian sasaran masih perlu ditingkatkan.

Adapun rekomendasi dari evaluasi SAKIP Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan atas manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya sehingga dapat mencapai kondisi yang diinginkan sebagaimana dimaksudkan dalam rekomendasi;
2. Menyusun pohon kinerja tingkat Pemkab Kutai Kartanegara dan memperbaiki pohon kinerja tingkat perangkat daerah sedemikian rupa sehingga telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
3. Apabila terjadi perubahan target kinerja agar dilakukan secara formal dengan melakukan revisi terhadap dokumen kinerja dimaksud;
4. Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data;





5. Mempertimbangkan ketersediaan data realisasi dalam menetapkan suatu indikator kinerja sehingga terhindar terjadinya penggunaan data realisasi tahun sebelumnya pada saat melakukan pengukuran kinerja;
6. Memastikan semua perangkat daerah taat mengisi aplikasi pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah setiap triwulan;
7. Menyajikan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai, terutama capaian kinerja yang sangat rendah dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar menyajikan alternatif solusi ke depan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target;
9. Meningkatkan kualitas penyajian Laporan Kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan kinerja pada level nasional/ internasional;
10. Melakukan evaluasi AKIP terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;
11. Menetapkan kebijakan pemberian *reward and punishment* kepada Perangkat Daerah dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong terjadinya peningkatan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara signifikan.
12. Untuk rekomendasi yang lainnya, akan dilaksanakan secara bertahap dengan pihak-pihak terkait.

Beberapa rekomendasi dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, sudah mulai ditindak lanjuti, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, membentuk Tim SAKIP Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Daerah;





2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, telah menyusun meta data terkait Indikator Kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Perangkat Daerah, untuk proses perencanaan dalam hal menyusun dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra 2025-2029.
3. Mulai Tahun 2024, hasil dari pengukuran kinerja masing-masing Perangkat Daerah dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau TPP;
4. Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi memperbaiki manajemen pengelolaan Aplikasi Sakip Kukar.

2. Analisis Kinerja Sasaran 2: “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 132,71% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 27. Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi berdasarkan IPAK yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Namun dalam LHE RB Tahun 2023 tidak mencantumkan nilai IPAK lagi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).

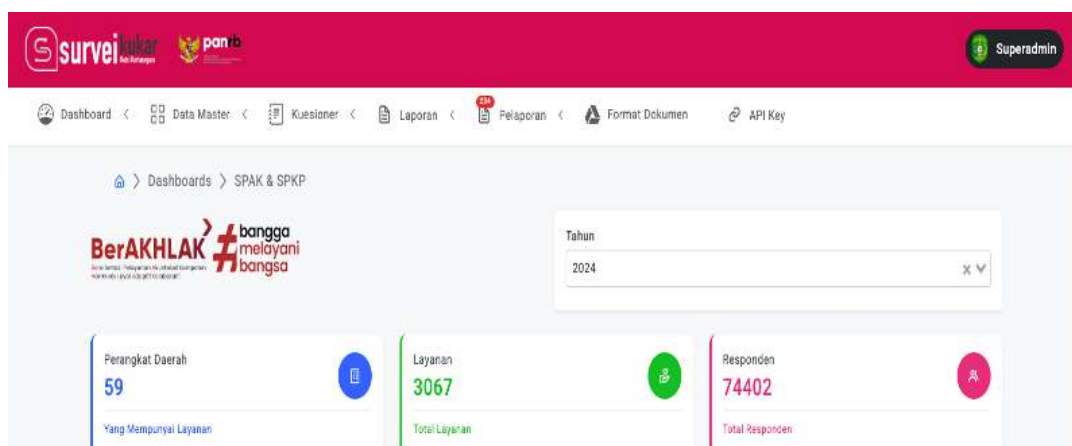




Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 melaksanakan SPAK melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survey di 56 (lima puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 3.067 layanan, dengan jumlah responden 74.402 orang.

Adapun hasil penarikan data IPAK melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Perangkat Daerah, Jumlah Layanan dan Total Responden SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Gambar 4. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024





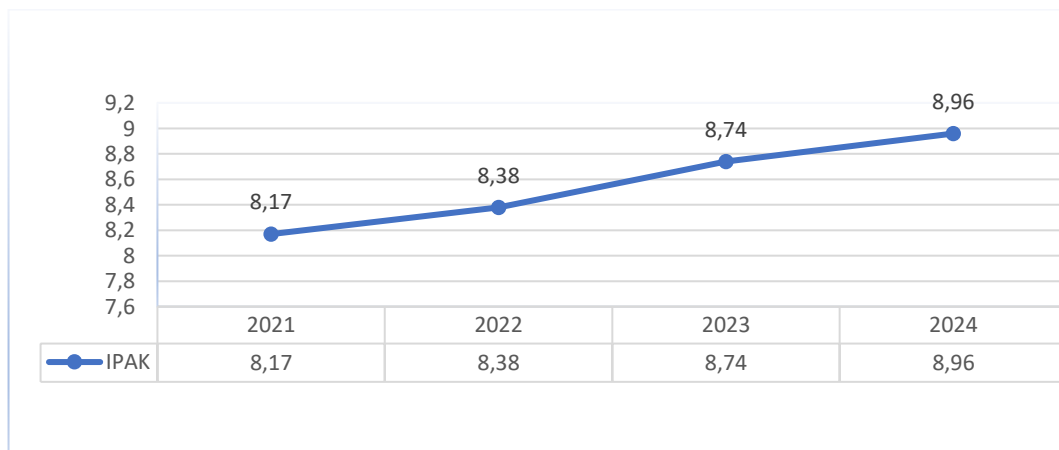
Gambar 5. Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Untuk Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, yang dilakukan melalui survei mandiri, mengalami peningkatan sebesar 0,22 dibandingkan dengan capai IPAK Tahun 2023 yang memperoleh nilai 8,74, setelah sebelumnya meningkat 0,28 di Tahun 2023 dibandingkan dengan IPAK Tahun 2022 yang memperoleh nilai sebesar 8,38. Perkembangan IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 3. IPAK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024



Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2024

Karena SPAK dilaksanakan secara mandiri, sehingga tidak tersedia data IPAK Kabupaten/ Kota lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. maka dalam laporan ini hanya menyajikan perbandingan IPAK Tahun 2021.





Sejak Tahun 2021 Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI), hasil survei ini juga menjadi salah satu komponen penilaian dalam LHE Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat integritas dalam suatu lembaga atau instansi, khususnya di sektor publik. SPI menjadi gambaran sejauh mana upaya pencegahan korupsi telah diterapkan serta bagaimana persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan terhadap potensi risiko korupsi dalam suatu institusi.

SPI memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

1. Mengidentifikasi Risiko Korupsi. SPI membantu menemukan titik rawan yang berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi dalam suatu instansi. Dengan memahami area yang berisiko, langkah-langkah mitigasi dapat segera diterapkan.
2. Mengukur Efektivitas Kebijakan Antikorupsi. Hasil survei memberikan gambaran tentang sejauh mana kebijakan pencegahan korupsi yang telah diterapkan oleh instansi berjalan dengan baik dan efektif.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi. Dengan adanya SPI, setiap instansi dapat lebih terbuka terhadap umpan balik dari berbagai pihak, termasuk pegawai, pengguna layanan, serta pemangku kepentingan lainnya.
4. Mendorong Budaya Integritas. SPI tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong perubahan budaya kerja yang lebih transparan, jujur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

SPI dilakukan dengan metode survei yang melibatkan berbagai kelompok responden untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif. Responden yang biasanya dilibatkan antara lain:

- a. Pegawai internal di instansi yang bersangkutan.



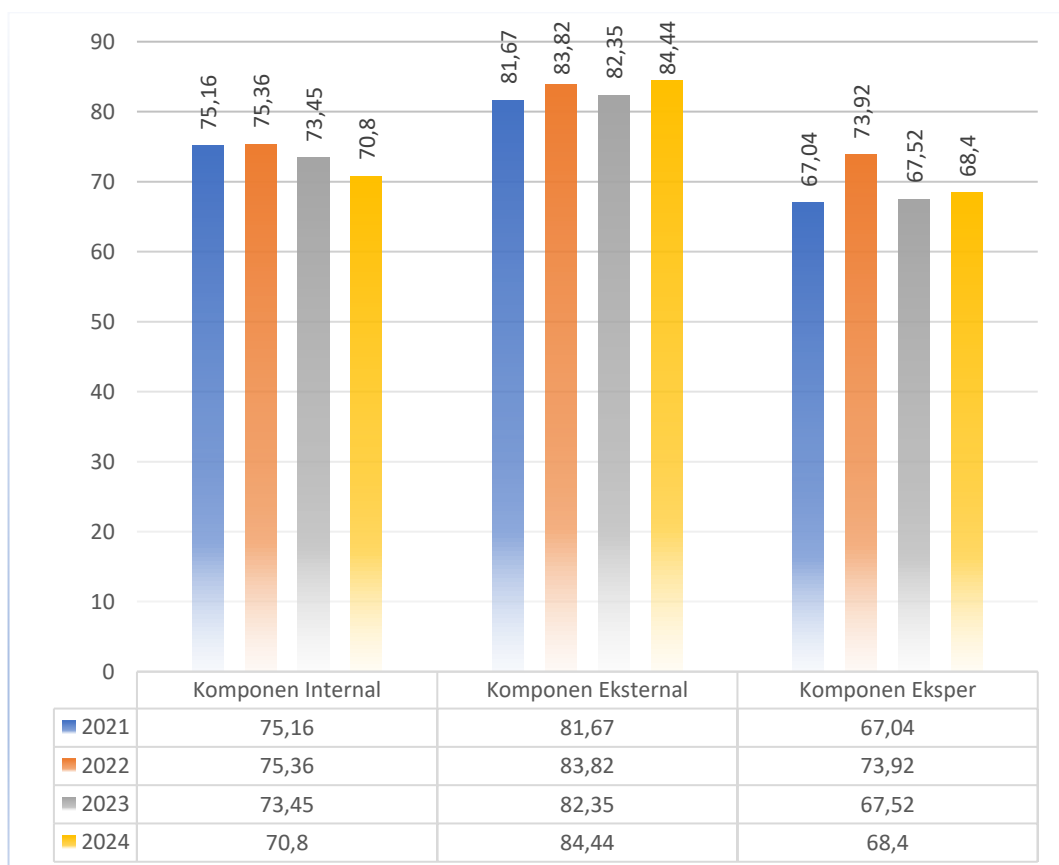


- b. Pengguna layanan atau mitra kerja yang berinteraksi dengan instansi tersebut.
- c. Ekspert atau akademisi yang memiliki wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa indikator, seperti transparansi dalam pelayanan publik, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

Berdasarkan hasil SPI yang dapat diakses pada laman <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=40829689>, Nilai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 67,14, Skor turun sebanyak 0.55 poin dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini berada dalam kategori Rentan. Berikut Detail Hasil Survei Penilaian Integritas Per Komponen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024:

Grafik 4. Detail Hasil SPI Per Komponen Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2024

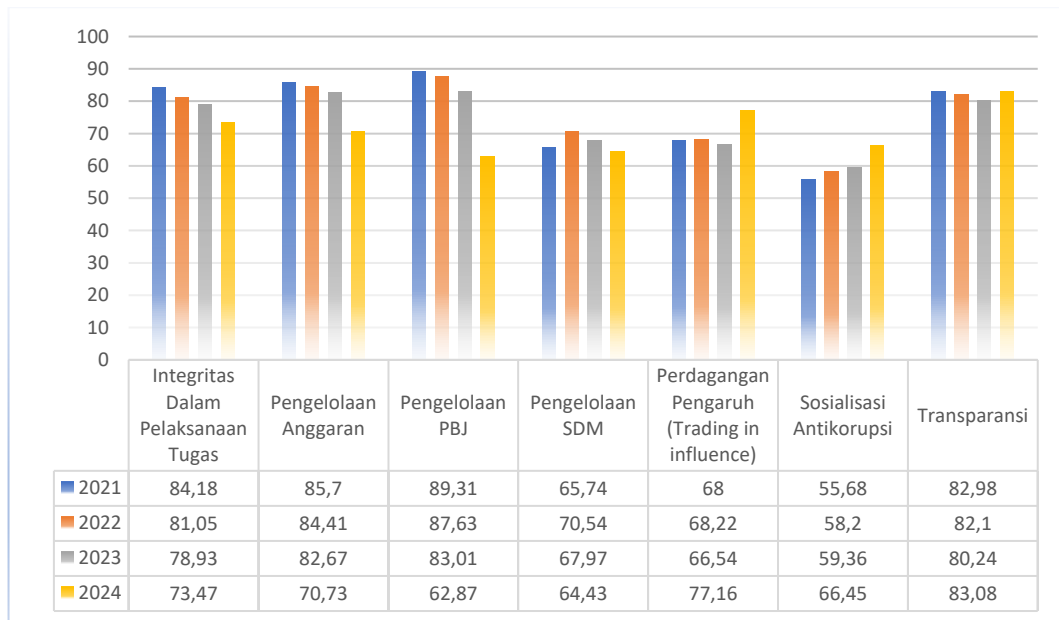


Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)





Grafik 5. Skor Per Dimensi Komponen Internal SPI Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024



Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tabel 28. Hasil Survei Penilaian Integritas Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024

Rata-Rata SPI	2021	2022	2023	2024	Kategori	Perbandingan Capaian SPI Tahun 2024 dengan 2023	Keterangan
Bontang	62,56	74,02	74,99	77,69	Waspada	2,70	Meningkat
Balikpapan	70,12	73,51	73,83	75,08	Waspada	1,25	Meningkat
Samarinda	62,8	70,03	72,32	71,55	Rentan	-0,76	Menurun
Paser	67,55	70,17	71,51	74,00	Waspada	2,50	Meningkat
Kutai Timur	59,94	65	70,99	59,16	Rentan	-11,83	Menurun
Berau	68,99	71,63	69,68	72,52	Rentan	2,84	Meningkat
Mahakam Hulu	71,25	66,98	69,14	71,08	Rentan	1,95	Meningkat
Kutai Kartanegara	72,06	67,22	67,69	67,14	Rentan	-0,55	Menurun
Kutai Barat	71,73	73,03	64,65	67,23	Rentan	2,58	Meningkat
Penajam Paser Utara	66,18	68,85	64,11	61,28	Rentan	-2,82	Menurun
Provinsi Kalimantan Timur	66,35	73,04	72,71	69,95	Rentan	-0,19	Menurun
Nasional	72,4	71,94	70,97	71,52	Rentan	-0,42	Menurun

Sumber data: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berdasarkan hasil Survey Penilaian Integritas (SPI), pada laman resmi <https://jaga.id/>, ada penurunan hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 4,84 poin di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan Tahun 2021, dan ditahun 2023 hasil SPI Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat 0,47-point jika dibandingkan dengan hasil SPI Tahun 2022, namun menurun kembali 0,55 poin di Tahun 2024 dibandingkan SPI Tahun 2023.





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 29. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,17	8,38	8,74	8,96	6,8	7

Sumber: LHE RB Tahun 2021-2022 dan Aplikasi Survei Kukar Tahun 2023-2024)

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 30. Program dan Anggaran Sasaran 2 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	20,518,109,000.00	31,368,970,462.00	27,312,201,201.00	87.07%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1,191,755,198,028.00	9,235,607,336.00	7,198,823,175.00	77.95%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6,446,619,000.00	7,066,776,000.00	6,248,208,259.00	88.42%
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	12,000,000,000.00	11,500,000,000.00	4,808,467,577.00	41.81%
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	1,649,242,765.00	41.23%
Total		1,234,719,926,028.00	63,171,353,798.00	47,216,942,977.00	74.74%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.47,216,942,977.00 dari anggaran sebesar Rp. 63,171,353,798.00 atau 74,74%. Realisasi keuangan sebesar 74,74% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 132,71%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dengan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, catatan berisi Detail Hasil SPI Per Komponen Internal: 70.8; Eksternal: 84.44; Eksper: 68.4, dari data tersebut skor terendah terletak pada komponen internal, yang dimensinya meliputi





Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan SDM, Perdagangan Pengaruh (*Trading in influence*), Sosialisasi Antikorupsi, Transparansi, sehingga ada rekomendasi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas, setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Dalam SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat skor SPI sebesar 67.14. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini TIDAK EFEKTIF.

Langkah-langkah dan Upaya yang Dilakukan dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi:

Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;

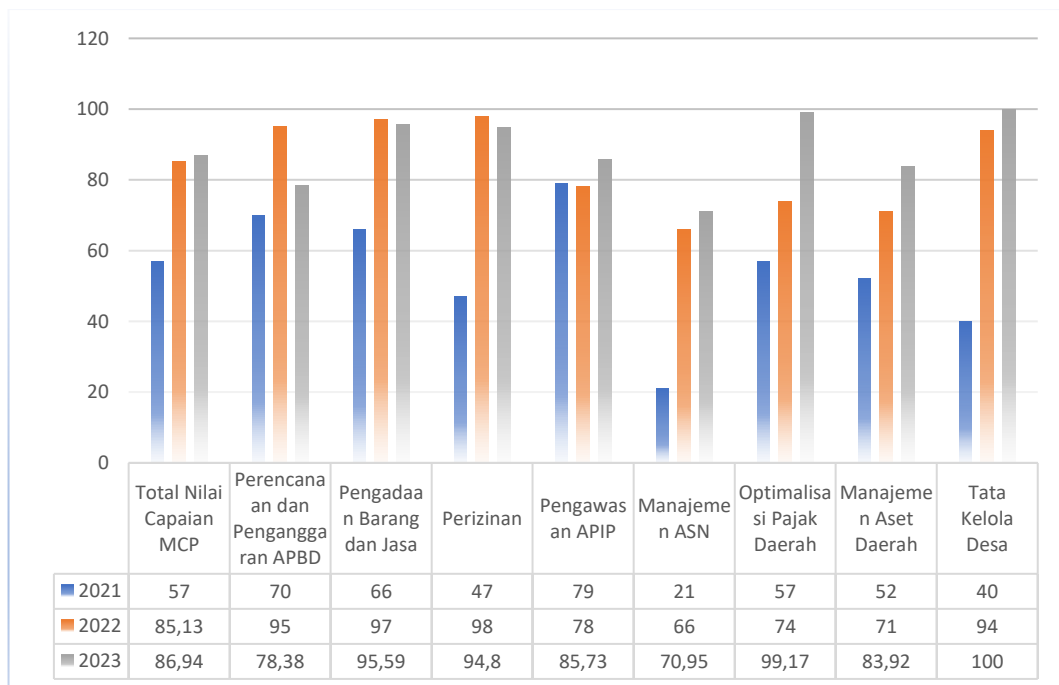




2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, melalui 8 area intervensi yaitu: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD; (2) Pengadaan Barang dan Jasa; (3) Perizinan; (4) APIP; (5) Manajemen ASN; (6) Optimalisasi Pajak Daerah; (7) Manajemen Aset Daerah; (8) Tata Kelola Dana Desa.

Grafik 6. Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2023



Sumber Data: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023

Hasil monitoring progres pelaksanaan aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 8 area intervensi, secara keseluruhan Hasil MCP KPK Tahun 2023 Kabupaten Kutai Kartanegara





meningkat dari Tahun 2022 sebesar 1,94%, namun dari 8 area intervensi, ada 3 area yang mengalami penurunan nilai, yaitu area Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Perijinan. Peningkatan signifikan pada area Tata Kelola Desa dari 94% di tahun 2022 menjadi 100% di Tahun 2023.

Untuk MCP KPK Tahun 2024 ada beberapa perubahan komponen penilaian, dan capaian MCP KPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mengalami penurunan nilai 17,09 %, dari 86,94% di tahun 2023 turun menjadi 69,85% di tahun 2024, berikut disajikan data capaian sesuai komponen penilaian MCP KPK Kutai Kartanegara Tahun 2024:

Tabel 31. Capaian *Monitoring Center for Prevention KPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024*

Uraian	Capaian	Uraian	Capaian
Perencanaan	63,60%	Penganggaran	64,42%
Perencanaan Pembangunan Daerah	63,6%	Pencegahan <i>Mark Up</i> Anggaran	30%
		Penetapan APBD	90,1%
		Transparansi APBD	100%
		Pengendalian dan Pengawasan	37,6%
Pengadaan Barang dan Jasa	66,46%	Pelayanan Publik	60,69%
Pelaksanaan Pengadaan	85,6%	Kebijakan Layanan	66%
Pengendalian PBJ Strategis	17,2%	Standar Layanan	63,25%
Independensi UKPBJ	96%	Kemudahan Layanan Publik	70,8%
		Pengendalian dan Pengawasan	42,5%
Pengawasan APIP	72,17%	Manajemen ASN	96,38%
Kapasitas APIP	76,22%	Tata Kelola ASN	94,8%
Penguatan Kelembagaan	67,35%	Penguatan Integritas dan Pengawasan	94,39%
Pengendalian dan Pengawasan	60,09%	Budaya Antikorupsi	100%
Koordinasi Pencegahan Korupsi	85%		
Pengelolaan BMD	48,25%	Optimalisasi Pajak	88,85%
Pengamanan BMD	50,5%	Regulasi, database dan Kemudahan	91,75%
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	41,5%	Peningkatan Pajak daerah	90%
Penertiban BMD	15%	Pengendalian dan Pengawasan	84,7%
Pengendalian dan Pengawasan	86%		
CAPAIAN 69,85%			

Sumber data: JAGA - Platform Pencegahan Korupsi Tahun 2024





Salah satu penyebab penurunan nilai MCP KPK Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah keterlambatan keluarnya pedoman penilaian tahun 2024, sehingga waktu koordinasi dengan perangkat daerah teknis tidak bisa dilaksanakan secara optimal, serta pemenuhan data dan dokumen terutama pada komponen Pengelolaan BMD menjadi salah satu faktor penyebab turunnya hasil penilaian di Tahun 2024, karena dari 8 (delapan) komponen penilaian MCP KPK, Pengelolaan BMD yang mendapat nilai paling rendah hanya di 48,25%.

3. Analisis Kinerja Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan indikator Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai 97,65% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 32. Realisasi Indikator Sasaran 3 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65

Sumber data: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Rumus perhitungan atau Penilaian terhadap Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) berdasarkan IPKP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2023, dimana ruang lingkup surat edaran tersebut salah satunya terkait menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) yang hasilnya dalam bentuk Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP).

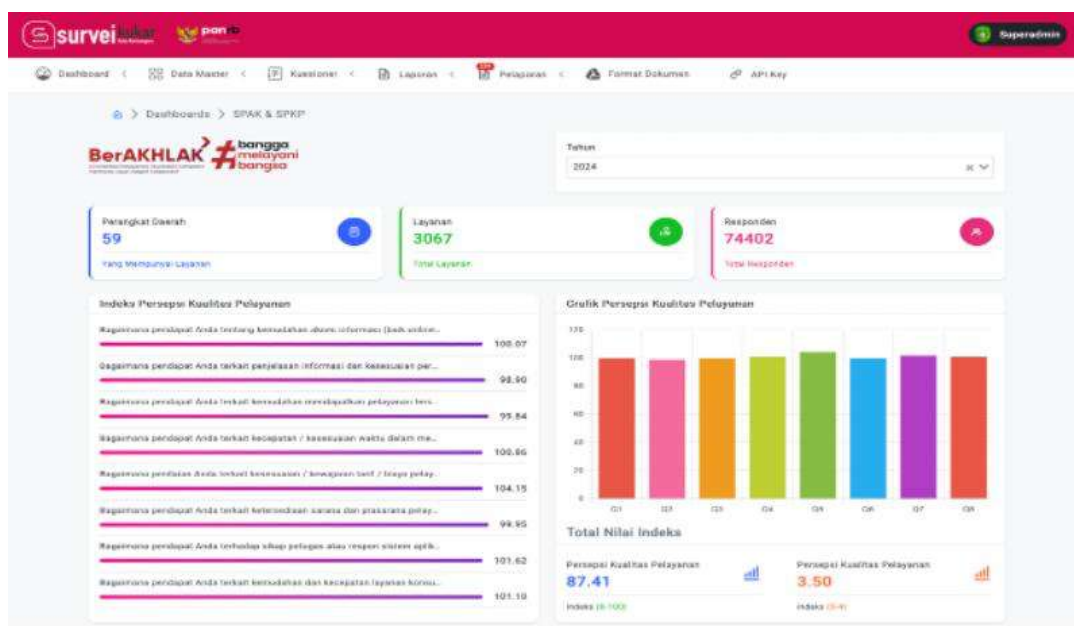




Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, maka Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2023 sampai dengan saat ini, melaksanakan SPKP melalui Aplikasi Survei Kukar dengan link akses <https://survei.kukarkab.go.id>, pelaksanaan survei di Tahun 2024 56 (lima puluh enam) perangkat daerah dan 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah, terhadap 3.067 layanan, dengan jumlah responden 74.402 orang.

Adapun hasil penarikan data IPKP melalui Aplikasi Survei Kukar adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2024 sebesar 87,41 atau dikonversi dalam skala 1-10, maka capaian kinerja sebesar 8,74 capaian ini mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar 0,33 dimana sebelumnya di Tahun 2023 IPKP sebesar 8,41. Setelah sebelumnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, IPKP oleh KemenPANRB mencapai 9,81, atau menurun sebesar 1,4 poin, dan jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu 8,95 maka capaian IPKP Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 sebesar 97,65%.





Dalam dokumen Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi mulai Tahun 2023 sampai saat ini, juga tersedia Capaian Indeks Pelayanan Publik dan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Di Tahun 2024 Kementerian PANRB telah melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, yang hasilnya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, terdapat sedikit perbedaan penetapan Unit Lokus Evaluasi (ULE) sebelumnya dilaksanakan di Dinas Sosial, RSUD dan Kecamatan, dan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi ULE di Tahun 2023 dilakukan terhadap 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Anggana, Dinas Sosial dan RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti. Namun di Tahun 2024 yang menjadi ULE adalah Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RSUD. Aji Batara Agung Dewa Sakti. Berikut hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2024 kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 33. Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Rata-Rata	Kategori	Disdukcapil	Dinas Sosial	RSUD
1.	Kutai Kartanegara	4,35	A-	4,47	4,30	4,39
2.	Samarinda	4,26	A-	4,54	3,71	4,52
3.	Balikpapan	4,19	A	4,43	4,23	3,19
4.	Bontang	4,28	A-	4,27	4,19	4,49
5.	Kutai Barat	4,11	A-	4,24	3,90	4,19
6.	Berau	3,71	B	3,03	4,47	3,64
7.	Penajam Paser Utara	3,75	B	3,66	3,68	3,90
8.	Kabupaten Kutai Timur	2,90	C	3,52	1,89	3,30
9.	Kabupaten Paser	4,03	A-	3,72	3,80	4,56
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-

Sumber data: Kementerian PANRB





Jika melihat hasil penilaian diatas Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh nilai tertinggi jika dibandingkan dengan hasil penilaian Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur. Capaian ini meningkat 0,11-point dari hasil evaluasi Tahun 2023 dengan nilai 4,24 dengan Kategori A-.

Tabel 34. Perbandingan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan 2023

No	Kab/Kota	Rata-Rata 2023	Kategori 2023	Rata-Rata 2024	Kategori 2024	Perbandingan Capaian 2024 dengan 2023	Keterangan
1.	Kutai Kartanegara	4,24	A-	4,35	A-	0,11	Meningkat
2.	Samarinda	4,02	A-	4,26	A-	0,24	Meningkat
3.	Balikpapan	4,51	A	4,19	A	-0,32	Menurun
4.	Bontang	4,11	A-	4,28	A-	0,17	Meningkat
5.	Kutai Barat	3,53	B	4,11	A-	0,58	Meningkat
6.	Berau	1,09	E	3,71	B	2,62	Meningkat
7.	Penajam Paser Utara	3,45	B-	3,75	B	0,3	Meningkat
8.	Kabupaten Kutai Timur	1,45	E	2,90	C	1,45	Meningkat
9.	Kabupaten Paser	3,91	B	4,03	A-	0,12	Meningkat
10.	Kabupaten Mahakam Ulu	1,82	D	-	-	-	-

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2023 dan 2024

Di Tahun 2024 Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei sampai bulan September 2024. Adapun lokus penilaian kepatuhan tahun 2024 di batasi pada:

1. 25 Kementerian, 14 Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, 98 Pemerintah Kota dan 416 Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan produk administratif.
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang menyelenggarakan produk jasa.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan produk jasa.





4. Penilaian instansi vertikal dilakukan pada unit pelayanan Kepolisian Resort (Polres) dan Kantor Pertanahan (Kantah).

Penilaian dilakukan tidak hanya atas pemenuhan standar pelayanan publik, namun termasuk juga penilaian persepsi mal administrasi kepada masyarakat pengguna layanan, pengukuran kompetensi penyelenggara layanan, pemenuhan sarana dan prasarana layanan, serta pengelolaan pengaduan yang ada di instansi tersebut. Seluruh penilaian tersebut akan menjadi komponen dari Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang nantinya akan menghasilkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik.

Untuk level pemerintah daerah, dimensi penilaian mencakup:

1. Dimensi *Input* terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan;
 - a. Pada variabel kompetensi, diukur pengetahuan pejabat dan petugas layanan mengenai komponen standar pelayanan, tugas dan kewenangan jabatan, bentuk-bentuk mal administrasi dan pengetahuan tentang layanan yang ramah kelompok marginal/rentan;
 - b. Pada variabel sarana prasarana, diukur pemenuhan penjaminan mutu untuk pelayanan yang diberikan, frekuensi pengawasan internal, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta sarana prasarana dan fasilitas bagi pengguna layanan dan pengguna dengan perlakuan khusus.
2. Dimensi *Proses* terdiri dari variabel standar pelayanan publik, yang mana pada variabel standar pelayanan diukur pemenuhan informasi standar pelayanan seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, maklumat pelayanan, visi misi pelayanan, moto pelayanan, atribut dan pelayanan terpadu;
3. Dimensi *Output* terdiri dari variabel penilaian persepsi mal administrasi, yang mana pada variabel penilaian persepsi mal administrasi diukur persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan berdasarkan





pengetahuan dan pengalaman pribadi mengenai transparansi standar pelayanan di instansi tersebut setelah selesai mengakses suatu layanan; dan

4. Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, yang mana pada variabel pengelolaan pengaduan, diukur kewajiban pengelolaan pengaduan, pemenuhan sarana pengaduan, pembinaan terhadap pengelola pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan dan informasi jangka waktu penyelesaian pengaduan.

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Puskesmas Teluk Dalam, Puskesmas Loa Janan. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara, yang menjadi objek penilaian terdiri dari 4 (empat) Dinas dan 2 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dengan rincian:

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Substansi Perizinan dan Administrasi Kesehatan);
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Substansi Administrasi Kependudukan);
3. Dinas Sosial (Substansi Sosial);
4. Puskesmas Teluk Dalam (Substansi Jasa Kesehatan); dan
5. Puskesmas Loa Janan (Substansi Jasa Kesehatan).

Hasil Penilaian merupakan penggabungan atas penilaian kompetensi penyelenggara, Standar Pelayanan dan Sarana Prasarana, Persepsi Mal administrasi, dan Pengelolaan Pengaduan. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir untuk masing-masing penyelenggara pelayanan dengan hasil kategorisasi penilaian akhir sebagai berikut:

Tabel 35. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Interval Nilai	Kategori	Zonasi	Opini
88.00 – 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi





Interval Nilai	Kategori	Zonasi	Opini
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

Adapun nilai akhir untuk Pemkab Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebesar 94,46 (Zona Hijau) dengan kategori A (Kualitas Tertinggi), hasil tersebut tidak ada perubahan dari hasil evaluasi di Tahun 2023, setelah sebelumnya meningkat 11,62 dari hasil Tahun 2022 dengan nilai 82,84 dengan kategori B (Kualitas Tinggi) dan mendapatkan Zona Hijau (detail rapor penilaian terlampir):

Tabel 36. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Unit Layanan	Dimensi Pelayanan				Nilai
		Input (21,85)	Proses (32,37)	Output (24,24)	Pengaduan (21,54)	
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19,85	32,14	22,30	21,54	95,83
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19,83	32,14	22,30	21,54	95,82
3.	Puskesmas Teluk Dalam	21,06	30,49	22,30	20,48	94,33
4.	Puskesmas Loa Janan	20,89	30,49	21,80	20,48	93,65
5.	Dinas Sosial	17,53	31,31	22,30	21,54	92,69
Nilai Akhir		94,46				
Zona		Hijau				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Sumber: Ombudsman, 2024

Dari 5 (lima) Unit Layanan yang dievaluasi pada Tahun 2024, ada 3 (tiga) unit layanan yang merupakan unit layanan yang menjadi sampling pada evaluasi Tahun 2022 dan 2023, berikut perbandingan hasil evaluasi Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023.

Tabel 37. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023

No	Unit Layanan	Dinas Sosial			Disdukcapil			DMPTSP		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Input	12,50	21,41	17,53	17,04	23,01	19,83	18,26	21,87	19,84
2.	Proses	11,70	31,03	31,31	30,28	31,03	32,14	31,11	32,37	32,14
3.	Output	20,14	21,33	22,30	20,74	20,92	22,30	21,41	20,97	22,30
4.	Pengaduan	13,49	21,01	21,54	19,34	21,54	21,54	21,07	21,54	21,54





No	Unit Layanan	Dinas Sosial			Disdukcapil			DMPTSP		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Nilai	57,83	94,78	92,69	87,40	96,50	95,82	91,86	96,75	95,83

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia

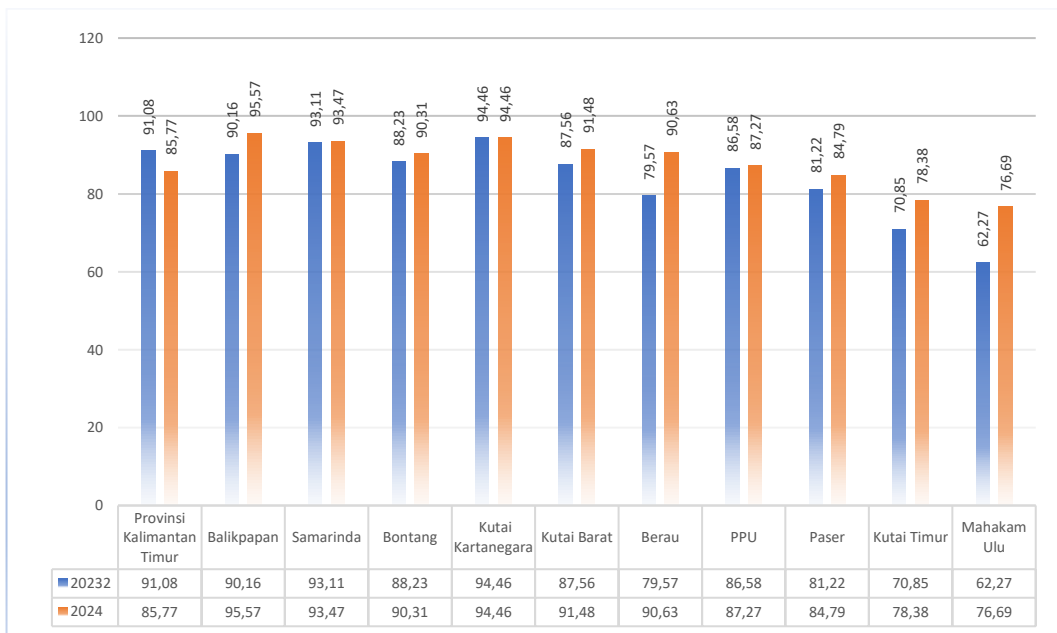
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, adapun hasil penetapan capaian adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Provinsi	Urutan Nasional	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1	Kalimantan Timur	25	85,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
2	Balikpapan	21	95,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3	Samarinda	41	93,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4	Bontang	69	90,31	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5	Kutai Kartanegara	83	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6	Kutai Barat	154	91,48	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7	Berau	168	90,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8	Penajam Paser Utara	242	87,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9	Paser	271	84,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10	Kutai Timur	335	78,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11	Mahakam Ulu	350	76,69	Kuning	C	Kualitas Sedang

Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Grafik 7. Perbandingan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024



Sumber data: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024





Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, mulai Tahun 2023, melalui Aplikasi Survei Kukar, dan beberapa perangkat daerah masih melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri maupun menggunakan jasa pihak ke tiga. Berdasarkan Laporan Kompilasi Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, pengolahan data SKM dari 42 (empat puluh dua) perangkat daerah, dan 3 RSUD, dengan total jumlah responden sebanyak 57.579 orang, hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah 88,85 (Sangat Baik), capaian ini lebih tinggi dari capaian IKM Tahun 2023 sebesar 88,368 (Sangat Baik) atau meningkat 0,48 poin. Adapun nilai IKM per unsur terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 39. Hasil IKM Per Unsur Pelayanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,50
U2	Prosedur Pelayanan	3,48
U3	Kecepatan Pelayanan	3,40
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,79
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,45
U6	Kompetensi Petugas	3,47
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,53
U8	Penanganan Pengaduan	3,74
U9	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,50

Sumber: Aplikasi Survei Kukar Tahun 2024

Dari hasil survei diatas, diketahui 3 (tiga) unsur pelayanan terendah yang harus menjadi perhatian dan untuk segera dibenahi, yang pertama unsur kecepatan pelayanan dengan nilai rata-rata 3,40, dapat diartikan pelayanan yang diberikan petugas masih dinilai lambat oleh masyarakat, unsur terendah ke dua adalah unsur kesesuaian pelayanan dengan nilai 3,45 dan unsur terendah ke tiga adalah unsur Kompetensi Petugas dengan nilai rata-rata 3,47. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Menyusun Langkah-





langkah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 40. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9	9,05

Sumber data: Kementerian PANRB Tahun 2021-2022 dan Survei Kukar 2023-2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 41. Program dan Anggaran Sasaran 3 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	16,719,858,396.00	17,871,593,836.00	16,758,632,913.00	93.77%
2	Program Pendaftaran Penduduk	1,000,000,000.00	1,280,000,000.00	1,052,601,428.00	82.23%
3	Program Pencatatan Sipil	971,619,610.00	828,579,610.00	761,254,509.00	91.87%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	625,000,000.00	625,000,000.00	294,117,135.00	47.06%
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	160,000,000.00	160,000,000.00	91,605,760.00	57.25%
6	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	64,695,357,336.00	80,600,357,336.00	78,527,739,629.00	97.43%
7	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	76,194,352,470.00	108,824,352,470.00	104,602,759,325.00	96.12%
8	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,450,000,000.00	2,300,000,000.00	1,947,244,470.00	84.66%
9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	850,000,000.00	1,050,000,000.00	1,009,529,849.00	96.15%
10	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	72,916,232,461.00	75,135,281,911.00	70,936,300,063.00	94.41%
11	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	700,000,000.00	700,000,000.00	599,540,000.00	85.65%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
12	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2,794,390,000.00	2,603,122,200.00	2,093,162,395.00	80.41%
13	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3,400,000,000.00	3,063,010,000.00	2,715,249,193.00	88.65%
Total		242,476,810,273.00	295,041,297,363.00	281,389,736,669.00	95.37%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.281,389,736,669.00 dari anggaran sebesar Rp.295,041,297,363.00 atau 95,37%. Realisasi keuangan sebesar 95,37% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,65%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Adanya komitmen dan atensi dari kepala daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan meluncurkan program prioritas yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan).
2. Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan.
3. Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.
4. Kompetensi petugas pelayanan belum merata dimiliki seluruh ASN yang memberikan pelayanan sehingga belum maksimal dalam memberika pelayanan yang lebih baik dan cepat, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik yang masih memiliki standar yang berbeda-beda antara perangkat daerah.

Bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:





1. Sejak 2021 sampai saat ini, setiap kepala perangkat daerah diwajibkan membuat inovasi minimal 1 inovasi setiap tahunnya, dan diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.
2. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP), Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), inovasi serta capaian predikat inovasi menjadi komponen penilaian kinerja perangkat daerah yang akan berpengaruh pada besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
3. Tahun 2024 telah dibuat pengembangan Aplikasi Disapa Idaman V2, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara *online* di Kutai Kartanegara. Aplikasi ini dibangun untuk mengatasi kondisi geografis, memberikan pelayanan jauh lebih mudah, cepat dan murah kepada masyarakat. Penekanan pelayanan yang murah lebih dititik beratkan pada murahnya *cost* yang harus dikeluarkan masyarakat dalam menerima pelayanan, karena tidak perlu mendatangi kantor/ unit pelayanan.
4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan Aplikasi Disapa Idaman V.2 sampai saat ini telah menyelesaikan 5.050 permohonan pelayanan di tingkat kelurahan/ desa dan kecamatan. Telah dilaksanakan di 18 (delapan belas) kecamatan dan di 211 (dua ratus sebelas) kelurahan dan desa.
5. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan melalui bimtek pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah.

4. Analisis Kinerja Sasaran 4 : “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan” dengan indikator Indeks Pendidikan & Indeks Pembangunan Kebudayaan mencapai 107,01% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:





Tabel 42. Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
Rata-rata Capaian					107,01

Salah satu indeks komposit yang digunakan sebagai indikator kinerja pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia/masyarakat di suatu wilayah. Menurut UNDP, pembangunan manusia hanya dapat direalisasikan bila penduduk dalam suatu wilayah tertentu setidaknya memiliki peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan keterampilan yang memadai dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif sehingga memiliki daya beli. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indeks tersendiri. Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan. Dimensi pengetahuan diukur dengan indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dan indikator harapan lama sekolah dari penduduk usia 7 tahun ke atas yang menghasilkan indeks pengetahuan. Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan yang menghasilkan indeks pendapatan.

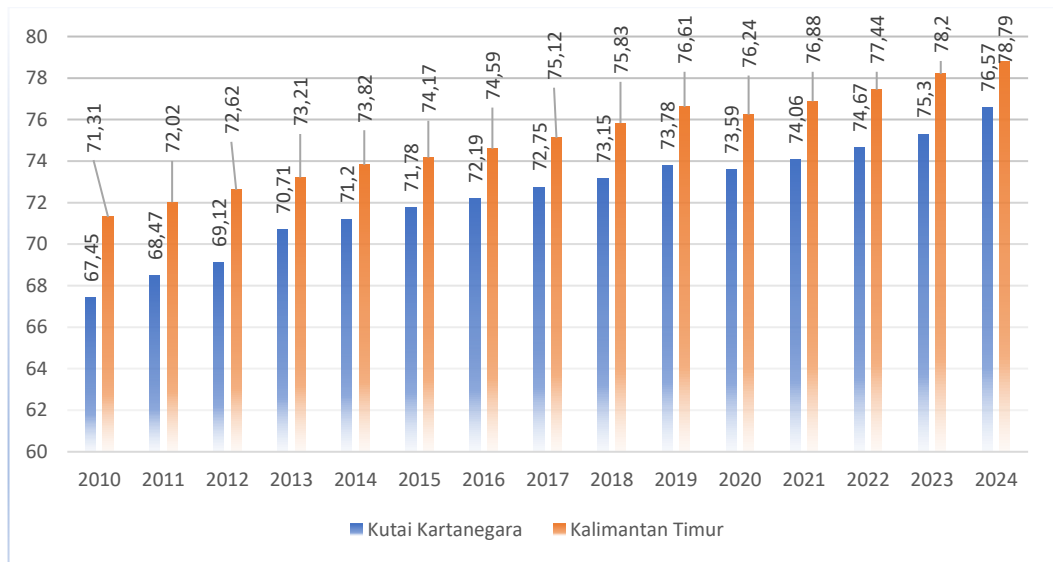
Perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2010-2024 terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat di Grafik 2.3.7. Dengan menggunakan metode baru, pada tahun 2010 IPM Kutai Kartanegara hanya mencapai 67,45, sementara IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai angka yang lebih tinggi 71,31. Pada tahun 2024 IPM Kutai Kartanegara meningkat 9,12 poin menjadi 76,57. Selama periode 2010-





2023 IPM Kutai Kartanegara selalu lebih rendah dari IPM Provinsi Kalimantan Timur. Kendati demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya, IPM Kutai Kartanegara tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan IPM Kaltim. Selama periode 2010-2024, IPM Kutai Kartanegara tumbuh 13,52 persen sementara IPM Kaltim hanya tumbuh di kisaran 10,49 persen.

Grafik 8. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010 - 2024



Sumber: BPS

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2024, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

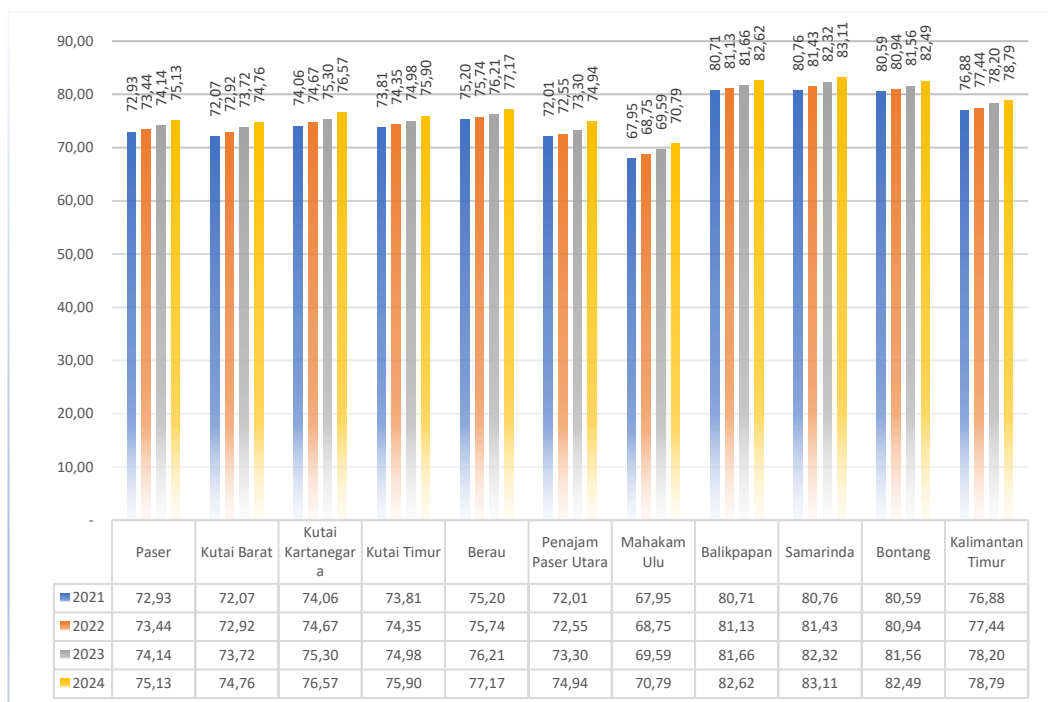
Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, dan mencapai 13,65 tahun pada 2024, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).





Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Grafik 9. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2021 - 2024



Sumber: BPS, 2024

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,65 tahun pada 2024, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara provinsi, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,03 tahun pada 2024.





Jika dibandingkan dengan daerah lain, Samarinda dan Balikpapan mencatatkan HLS tertinggi di Kalimantan Timur, masing-masing 15,10 tahun dan 14,25 tahun pada 2024, yang menunjukkan akses pendidikan lebih luas di kota-kota besar. Sementara itu, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara mencatat angka HLS lebih rendah, masing-masing 12,78 tahun dan 12,87 tahun pada 2024, menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara, menandakan kemajuan dalam sektor pendidikan, namun perbedaan antarwilayah menunjukkan masih perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, dukungan tenaga pengajar, serta program bantuan pendidikan agar kesempatan belajar semakin merata di seluruh daerah. Adapun penjelasan capaian indikator kinerja sasaran tersebut sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan, yang dihitung berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perubahan terjadi dalam pengukuran indeks pengetahuan, di mana indikator angka melek huruf tidak lagi digunakan karena mayoritas wilayah telah mencapai tingkat yang tinggi dan tidak lagi sensitif untuk mengukur kualitas pendidikan. Pada tahun 2010, dalam komponen pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pengetahuan mencatat angka terendah yaitu 57,79. Pada tahun 2022, indeks ini mengalami peningkatan sebesar 10,87 poin menjadi 68,66. Pada tahun 2024, Indeks Pengetahuan nasional meningkat lagi menjadi sekitar 65-66, seiring dengan kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 13,21 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,85 tahun, menunjukkan bahwa pendidikan formal rata-rata di Indonesia telah mencapai tingkat SMP kelas 2. Meskipun Indeks Pengetahuan tetap menjadi komponen IPM dengan angka terendah, pertumbuhannya tetap yang tercepat dibandingkan indeks lain.





Di tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Indeks Pendidikan juga mengalami peningkatan yang signifikan, sejalan dengan tren nasional. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kalimantan Timur telah mencapai lebih dari 13 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat mendekati 9 tahun, menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan setidaknya hingga tingkat SMP. Secara spesifik, di Kabupaten Kutai Kartanegara, peningkatan indeks ini didukung oleh program pendidikan daerah, seperti beasiswa untuk siswa kurang mampu, peningkatan fasilitas sekolah, serta dukungan bagi tenaga pendidik. Kebijakan pemerintah daerah yang terus memperluas akses pendidikan, baik melalui infrastruktur sekolah maupun program bantuan pendidikan, turut mempercepat kenaikan Indeks Pendidikan.

Namun, tantangan masih ada, terutama terkait ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman, ketersediaan tenaga pengajar berkualitas di desa-desa terpencil, serta minimnya akses terhadap teknologi dan internet di beberapa daerah. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap perbedaan pencapaian pendidikan antarwilayah dalam Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur secara umum. Dengan berbagai upaya peningkatan pendidikan yang terus dilakukan, diharapkan Indeks Pendidikan di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur dapat terus meningkat, mengejar rata-rata nasional, serta mendukung target peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.

Indeks Pendidikan dihitung dengan menggunakan rumus:

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Keterangan:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$I_{pendidikan}$ = Indeks Pendidikan

I_{HLS} = Indeks Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

I_{RLS} = Indeks Rata – rata Lama Sekolah

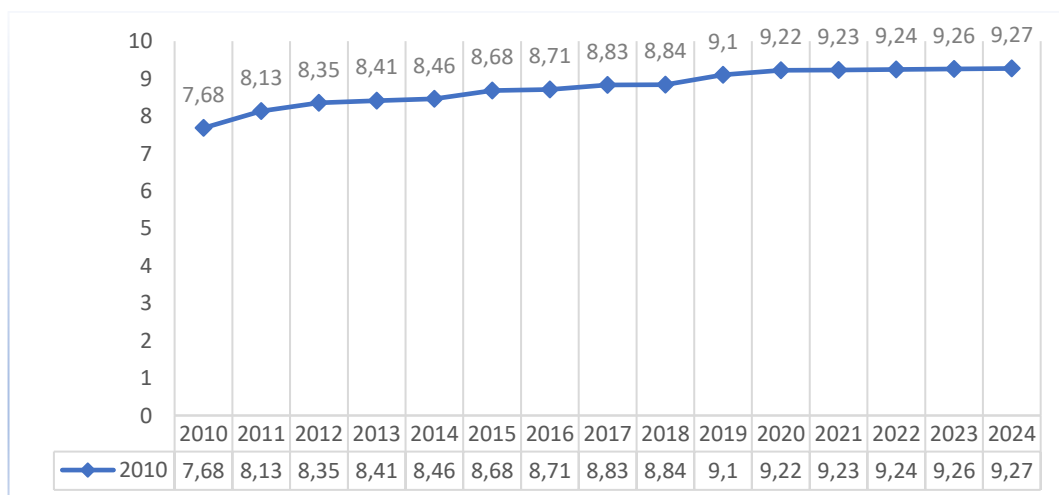




Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Komponen dimensi pengetahuan dalam pembangunan manusia dihitung dengan indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah tiap jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Cakupan penghitungan angka HLS adalah penduduk umur 7 tahun ke atas. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Grafik 10. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024



Sumber: BPS 2024

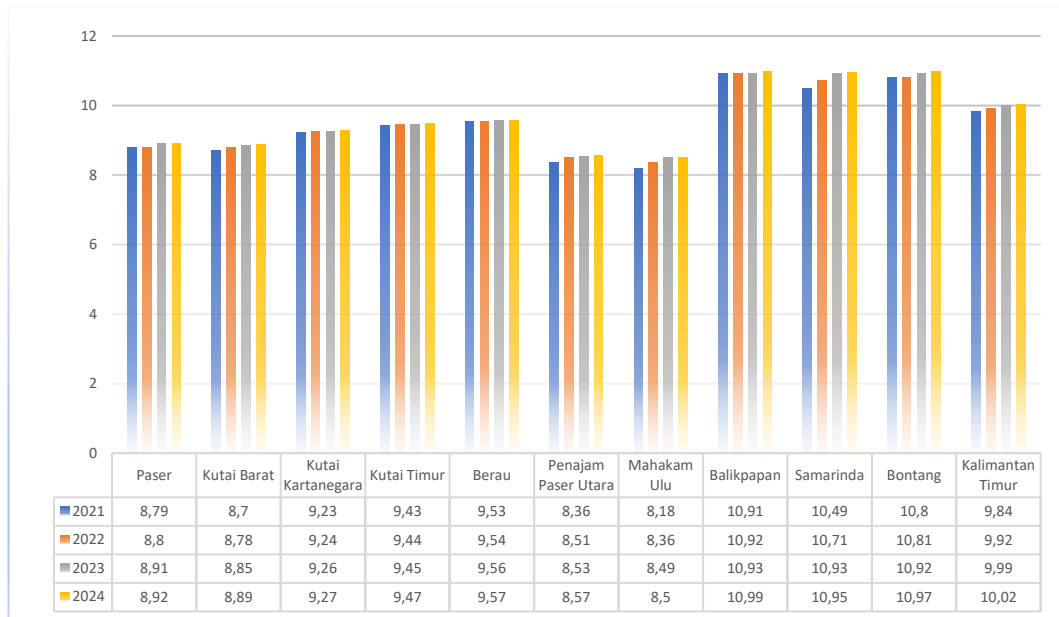
Grafik menunjukkan perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2021 hingga 2024, yang mengalami peningkatan dari 9,23 tahun pada 2021 menjadi 9,27 tahun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan akses terhadap pendidikan formal, di mana rata-rata penduduk Kutai Kartanegara telah menempuh pendidikan hingga hampir menyelesaikan SMP kelas 3. Meskipun mengalami pertumbuhan, angka ini masih berada sedikit di





bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2024 mencapai 10,02 tahun.

Grafik 11. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024



Sumber: BPS 2024

Sebagai perbandingan, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang memiliki RLS yang lebih tinggi, masing-masing 10,99 tahun, 10,95 tahun, dan 10,92 tahun pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perkotaan lebih banyak yang telah menamatkan jenjang SMA atau setidaknya mencapai kelas 1 SMA dibandingkan dengan Kutai Kartanegara. Faktor seperti akses sekolah yang lebih mudah, ketersediaan tenaga pendidik yang lebih baik, serta infrastruktur pendidikan yang lebih lengkap di daerah perkotaan dapat menjadi penyebab utama tingginya angka RLS di kota-kota tersebut.

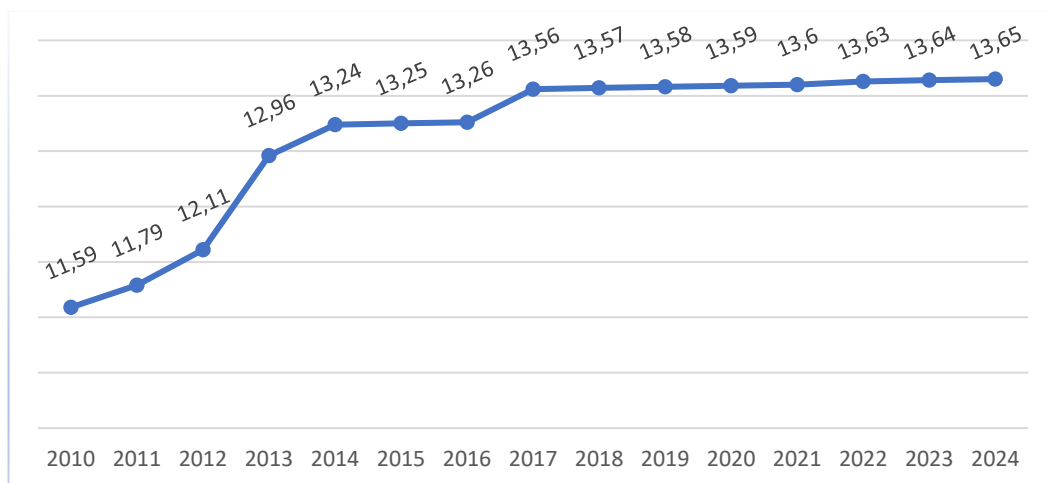
Di sisi lain, jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki angka RLS yang lebih tinggi dibandingkan Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara, yang pada tahun 2024 masing-masing hanya mencapai 8,55 tahun dan 8,57 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa di beberapa daerah dengan tantangan geografis dan akses pendidikan yang masih terbatas, rata-rata pendidikan penduduknya masih lebih rendah, dengan banyak yang belum menyelesaikan jenjang SMP.





Meskipun RLS di Kutai Kartanegara mengalami peningkatan, kesenjangan dengan kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda masih cukup terasa. Faktor yang dapat mendorong peningkatan RLS lebih signifikan di Kutai Kartanegara antara lain perluasan akses pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan yang lebih merata. Dengan program-program ini, diharapkan rata-rata lama sekolah di Kutai Kartanegara dapat terus meningkat, mengejar angka provinsi, dan mendekati capaian daerah perkotaan di Tabulasi Hasil SPAK dan SPKP Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Grafik 12. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2010-2024



Sumber: BPS 2024

Grafik menunjukkan perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010 hingga 2024, yang mengalami peningkatan signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2010, HLS tercatat sebesar 11,59 tahun, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga jenjang kelas 6 SMP. Angka ini terus meningkat, dengan lonjakan signifikan terjadi antara 2012 hingga 2014, di mana HLS naik dari 12,11 tahun menjadi 13,24 tahun, menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan menengah.

Sejak tahun 2015, pertumbuhan HLS mulai melambat, tetapi tetap menunjukkan tren positif, mencapai 13,56 tahun pada 2017 dan bertahan di angka tersebut hingga 2019. Setelah tahun 2020, angka HLS sedikit meningkat lagi menjadi 13,64 tahun pada 2023, dan mencapai 13,65 tahun





pada 2024, yang berarti rata-rata anak di Kutai Kartanegara kini diperkirakan akan bersekolah hingga jenjang kelas 1 perguruan tinggi atau diploma satu (D1).

Secara keseluruhan, peningkatan HLS ini menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan kesadaran pendidikan di Kutai Kartanegara, didukung oleh peningkatan fasilitas pendidikan, program beasiswa, serta kebijakan wajib belajar yang semakin efektif. Meskipun demikian, stagnasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi serta mengurangi angka putus sekolah, agar HLS dapat terus meningkat secara signifikan di masa mendatang.

Grafik 13. Harapan Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur 2010-2024



Sumber: BPS 2024





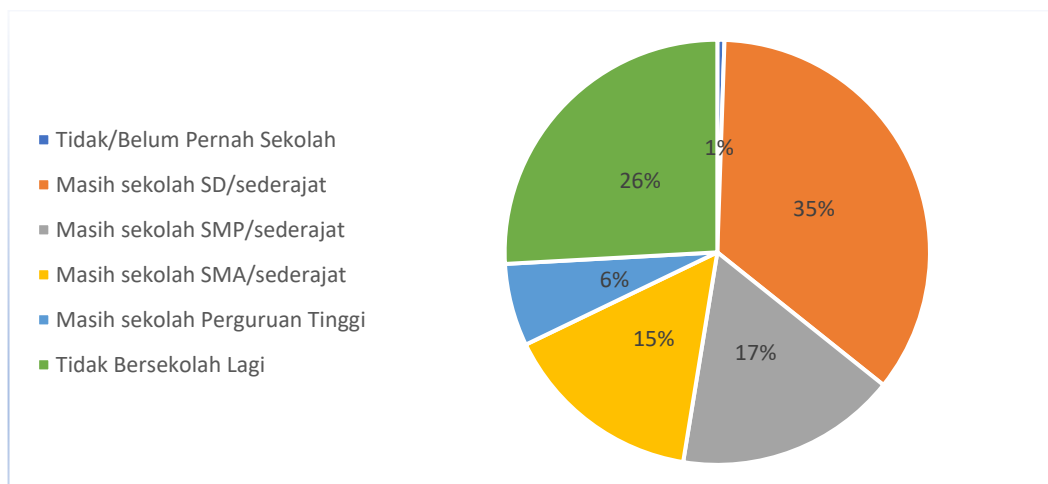
perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2021 hingga 2024. Secara keseluruhan, HLS mengalami peningkatan di semua daerah, menunjukkan adanya perbaikan akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, HLS meningkat dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,65 tahun pada 2024, yang berarti anak-anak di daerah ini diproyeksikan akan bersekolah hingga jenjang diploma satu (D1). Secara provinsi, Kalimantan Timur juga menunjukkan tren positif, dengan HLS meningkat dari 13,81 tahun pada 2021 menjadi 14,03 tahun pada 2024.

Jika dibandingkan dengan daerah lain, Samarinda dan Balikpapan mencatatkan HLS tertinggi di Kalimantan Timur, masing-masing 15,10 tahun dan 14,25 tahun pada 2024, yang menunjukkan akses pendidikan lebih luas di kota-kota besar. Sementara itu, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara mencatat angka HLS lebih rendah, masing-masing 12,78 tahun dan 12,87 tahun pada 2024, menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, peningkatan HLS di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara, menandakan kemajuan dalam sektor pendidikan, namun perbedaan antarwilayah menunjukkan masih perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan, dukungan tenaga pengajar, serta program bantuan pendidikan agar kesempatan belajar semakin merata di seluruh daerah.

Grafik 14. Persentase Penduduk 7-23 tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2024



Sumber: BPS 2024, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret





Persentase penduduk usia 7-23 tahun berdasarkan status pendidikan pada tahun 2024. Mayoritas penduduk dalam kelompok usia ini masih bersekolah, dengan 35,19% masih berada di jenjang SD/ sederajat, 16,84% di jenjang SMP/ sederajat, 15,28% di jenjang SMA/ sederajat, dan 6,28% di perguruan tinggi.

Namun, terdapat 25,87% penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi, yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan angka partisipasi pendidikan di jenjang lebih tinggi. Sementara itu, 0,54% penduduk usia 7-23 tahun tidak atau belum pernah bersekolah, meskipun jumlahnya relatif kecil, tetap menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan dasar.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk usia sekolah masih aktif menempuh pendidikan, tetapi angka partisipasi menurun di jenjang yang lebih tinggi, terutama di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya untuk kelompok yang berhenti sekolah lebih awal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Indeks Pendidikan/ Indeks Pengetahuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, diperoleh dengan perhitungan:

$$I_{pendidikan} = 0,71$$

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat





7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mencapai 57,42, mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 53,23. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, baik dari sisi pelestarian warisan budaya, peningkatan ekonomi budaya, hingga aspek kesetaraan gender. Setiap dimensi yang membentuk IPK memiliki peran yang signifikan dalam mencerminkan keberhasilan pembangunan kebudayaan di daerah ini.

Adapun capaian Dimensi penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Ekonomi Budaya

Dimensi Ekonomi Budaya mengalami peningkatan dari **34,00** pada tahun 2023 menjadi **39,00** pada tahun 2024.





- **Capaian indikator utama:** 39% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki sumber penghasilan dari keterlibatan dalam seni pertunjukan, naik dari 34% pada tahun sebelumnya.
- **Faktor pendukung:**
 - Program fasilitasi seni pertunjukan oleh pemerintah daerah, termasuk pendanaan untuk para seniman dan komunitas seni.
 - Pelaksanaan festival budaya secara rutin, seperti Pekan Budaya Bahari dan Festival Kampung yang memberikan peluang bagi pelaku seni untuk tampil dan memperoleh penghasilan.
 - Peningkatan dukungan terhadap pelaku industri kreatif, termasuk UMKM berbasis budaya.
- **Tantangan:**
 - Masih terbatasnya diversifikasi ekonomi budaya, yang saat ini lebih banyak berfokus pada seni pertunjukan.
 - Kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas bagi pelaku seni dan budaya.

b. Dimensi Pendidikan

Dimensi Pendidikan mengalami peningkatan dari 72,23 pada tahun 2023 menjadi 73,66 pada tahun 2024. Pendidikan yang lebih inklusif terlihat dari semakin tingginya angka partisipasi sekolah bagi kelompok ekonomi 40% terbawah yang mencapai 92,59%. Rata-rata lama sekolah penduduk juga sedikit meningkat menjadi 9,26 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 13,64 tahun. Pemerintah daerah terus memperkuat program pendidikan inklusif dan implementasi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, termasuk pengajaran bahasa daerah dan seni budaya. Namun, tantangan masih ada, terutama rendahnya angka partisipasi pendidikan bagi penyandang disabilitas yang hanya 48,35%, serta kurangnya tenaga pendidik di bidang seni dan budaya.

c. Dimensi Ketahanan Sosial Budaya

Dimensi Ketahanan Sosial Budaya mengalami peningkatan dari 75,96 pada tahun 2023 menjadi 82,29 pada tahun 2024. Kabupaten Kutai Kartanegara





menunjukkan tingkat toleransi sosial yang tinggi, dengan 97,79% rumah tangga menyatakan setuju jika salah satu anggota keluarga mereka bersahabat dengan orang dari suku yang berbeda. Sebagian besar masyarakat juga menerima keberadaan kelompok dari suku lain dan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Program penguatan toleransi sosial dan kebijakan yang mendukung keberagaman budaya berperan dalam mempertahankan harmoni sosial ini. Namun, meningkatnya pola hidup individualis serta pengaruh media digital menjadi tantangan dalam mempertahankan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.

d. Dimensi Warisan Budaya

Dimensi Warisan Budaya mengalami peningkatan dari 67,43 pada tahun 2023 menjadi 69,74 pada tahun 2024. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk pelestarian budaya, termasuk penetapan 12 dari 95 Objek Diduga Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Kabupaten serta pengakuan 22 Warisan Budaya Tak Benda sebagai bagian dari budaya nasional. Program konservasi dan dokumentasi warisan budaya terus diperkuat melalui kegiatan berbasis budaya seperti festival seni dan budaya lokal. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan penggunaan bahasa daerah yang masih rendah, dengan hanya 38,26% penduduk yang menggunakannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perhatian terhadap cagar budaya yang belum terdaftar juga masih perlu ditingkatkan.

e. Dimensi Ekspresi Budaya

Dimensi Ekspresi Budaya mengalami pertumbuhan signifikan dari 34,96 pada tahun 2023 menjadi 45,08 pada tahun 2024. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan budaya dan seni menunjukkan adanya ruang berekspresi yang lebih





terbuka. Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai event budaya yang lebih inklusif, memungkinkan setiap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi. Dukungan berupa ruang-ruang kreatif bagi seniman juga semakin berkembang. Namun, masih diperlukan penguatan fasilitas bagi komunitas seni agar mereka dapat mengekspresikan budaya secara lebih optimal.

f. Dimensi Budaya Literasi

Dimensi Budaya Literasi mengalami sedikit penurunan dari 39,00 pada tahun 2023 menjadi 38,80 pada tahun 2024. Rendahnya budaya membaca masih menjadi tantangan, dengan hanya 12,98% penduduk yang membaca buku selain kitab suci dalam satu minggu terakhir. Pemerintah telah meningkatkan akses terhadap perpustakaan dan taman bacaan masyarakat, tetapi pengaruh media sosial yang lebih dominan dalam konsumsi informasi menjadi penyebab utama rendahnya budaya literasi di masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mendorong minat baca melalui program literasi yang lebih menarik dan berbasis komunitas.

g. Dimensi Kesetaraan Gender

Dimensi Kesetaraan Gender mengalami peningkatan dari 49,00 pada tahun 2023 menjadi 51,19 pada tahun 2024. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan semakin meningkat, berkat berbagai program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal keterwakilan perempuan di sektor politik yang masih relatif rendah. Langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan ulasan per-indikator, terdapat 6 (enam) dimensi yang memiliki nilai indeks lebih tinggi dibanding tahun 2022, yaitu Ekonomi Budaya, Ketahanan Sosial

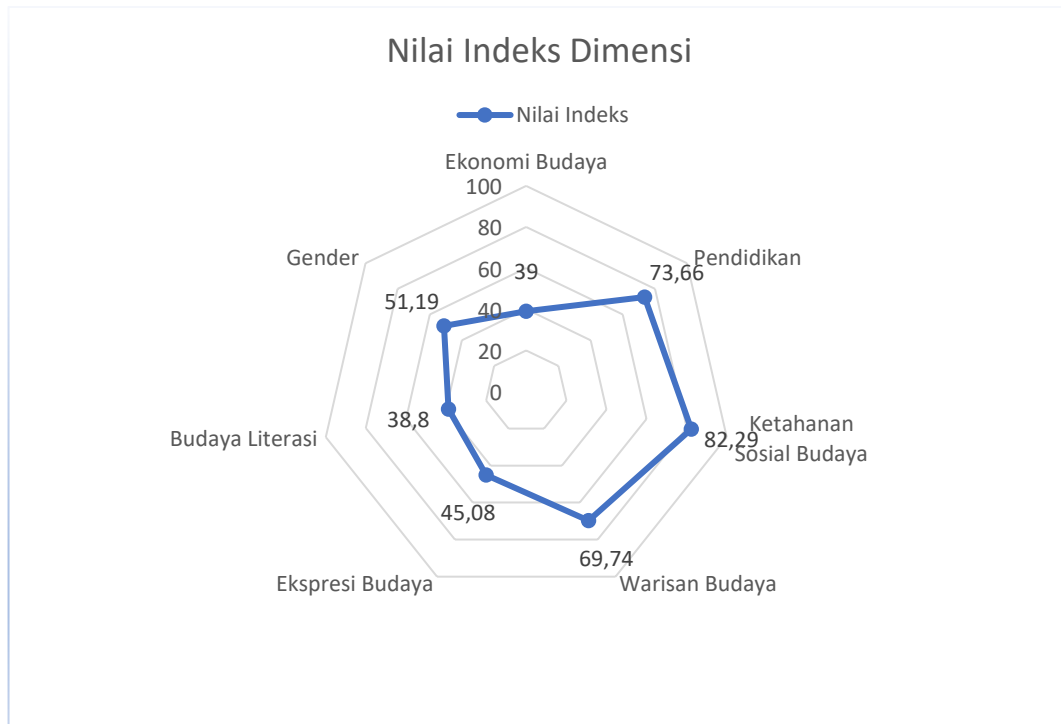
Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Sedangkan dimensi pendidikan berada di bawah angka tahun 2022. Nilai indeks Ekonomi Budaya dan Warisan Budaya mengalami peningkatan





signifikan ketimbang tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 15. Indeks Dimensi IPK Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Laporan IPK Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024

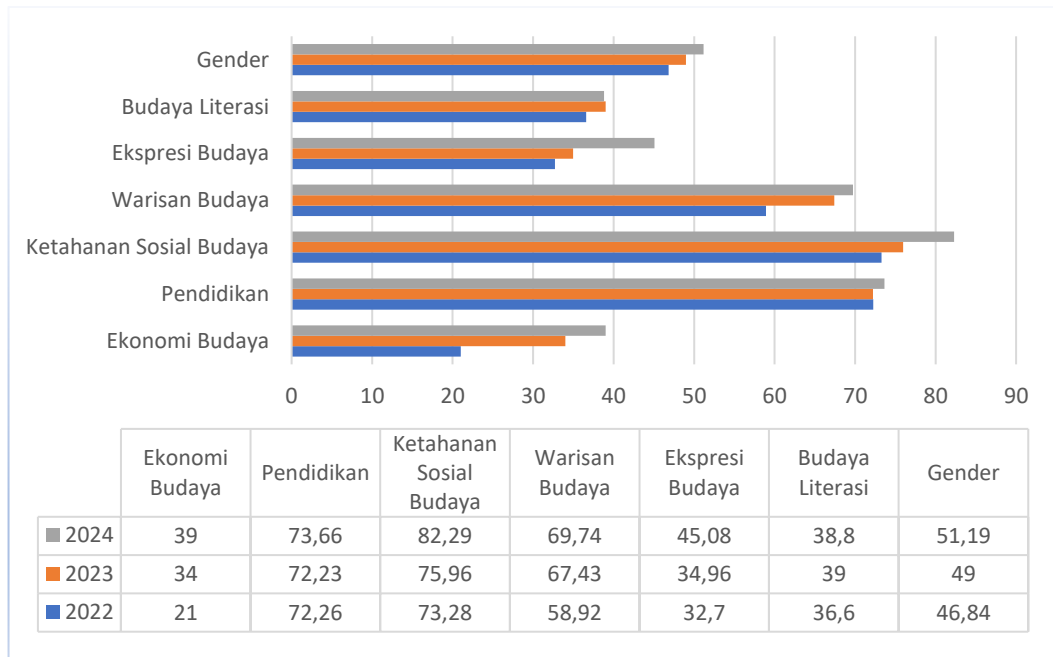
Apabila menilik nilai dimensi pada gambar di atas, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara dimensi yang satu dengan lainnya. Dimensi dengan hasil tertinggi adalah Ketahanan Sosial Budaya (82,29) dan Pendidikan (73,66). Tingginya nilai Ketahanan Sosial Budaya menggambarkan kemajemukan masyarakat di Kutai Kartanegara dapat dikelola dengan baik, sehingga kohesi sosial antar masyarakat yang berbeda agama, suku, dan ras cukup kuat. Sedangkan, tingginya nilai indeks dimensi pendidikan menunjukkan cukup mapannya sarana prasarana dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai aspek yang menunjang pembangunan dan transformasi kebudayaan. Sedangkan nilai dimensi Ekonomi Budaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (39,00) yang menunjukkan bahwa semakin berkembangnya aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Adapun per tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan insentif dan beasiswa pelatihan





bagi pelaku seni untuk mendorong kemandirian agar mampu berdaya saing dan meningkatkan taraf ekonomi.

Grafik 16. IPK Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara

Grafik ini membandingkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2022 hingga 2024 dalam tujuh kategori: Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Secara umum, semua kategori mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Ketahanan Sosial Budaya memiliki nilai tertinggi pada tahun 2024 (82,29), diikuti oleh Pendidikan (73,66) dan Warisan Budaya (69,74). Ekonomi Budaya mengalami peningkatan signifikan dari 21 pada 2022 menjadi 39 pada 2024. Ekspresi Budaya juga menunjukkan pertumbuhan pesat, dari 32,7 pada 2022 menjadi 45,08 pada 2024. Gender dan Budaya Literasi juga meningkat secara konsisten, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan kategori lainnya. Secara keseluruhan, IPK Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren positif dari 2022 hingga 2024.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 43. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,704	0,706
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	N/A	47,42	53,23	57,42	51,5	53

Sumber data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 44. Program dan Anggaran Sasaran 4 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	1,291,342,086,377.00	1,432,054,507,561.00	863,766,260,489.00	60.32%
2	Program Pengembangan Kurikulum	650,000,000.00	650,000,000.00	-	0.00%
3	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	250,000,000.00	250,000,000.00	158,234,600.00	63.29%
4	Program Pemberdayaan Sosial	7,814,000,000.00	7,814,000,000.00	6,842,546,992.00	87.57%
5	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,000,000.00	50,000,000.00	36,448,230.00	72.90%
6	Program Rehabilitasi Sosial	5,859,089,590.00	5,299,105,590.00	4,931,376,972.00	93.06%
7	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6,886,340,000.00	10,572,980,000.00	9,530,162,652.00	90.14%
8	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1,450,000,000.00	1,862,000,000.00	1,683,186,782.00	90.40%
9	Program Pengendalian Penduduk	4,482,420,000.00	4,273,701,000.00	3,672,498,148.00	85.93%
10	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2,000,000,000.00	4,278,263,900.00	4,105,562,114.00	95.96%
11	Program Pengembangan Kebudayaan	46,699,900,000.00	46,206,900,000.00	31,342,574,312.00	67.83%
12	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	5,550,000,000.00	5,650,000,000.00	2,194,362,924.00	38.84%
13	Program Pembinaan Sejarah	350,000,000.00	850,000,000.00	623,004,948.00	73.29%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
14	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	7,450,000,000.00	2,349,428,000.00	1,152,995,764.00	49.08%
15	Program Pembinaan Perpustakaan	8,657,000,000.00	8,707,000,000.00	7,842,165,270.00	90.07%
16	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	530,000,000.00	530,000,000.00	524,340,700.00	98.93%
17	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	116,240,244,448.00	139,007,137,830.00	115,578,401,524.00	83.15%
18	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	8,150,000,000.00	8,778,680,000.00	7,093,473,122.00	80.80%
Total		1,514,461,080,415.00	1,679,183,703,881.00	1,061,077,595,543.00	63.19%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.1,061,077,595,543.00 dari anggaran sebesar Rp.1,679,183,703,881.00 atau 63,19%. Realisasi keuangan sebesar 62,80% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 107,01%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa
2. Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia
3. Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau, juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan.





4. Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
5. Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional.
6. Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif.
7. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, *sponsorship*, publikasi, hingga promosi.
8. Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.

Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan indeks Pendidikan salah satunya menjadikan Program Beasiswa Idaman dan Program 1000 guru sarjana, menjadi program dedikasi/ prioritas. Beasiswa 1000 Guru Sarjana dibagi dalam 3 kategori yaitu beasiswa guru non PNS/ Tenaga Pendidik, Beasiswa Calon Guru dan Beasiswa Pasca Sarjana (S2 dan S3), sedangkan Beasiswa Kukar Idaman dibagi dalam 7 kategori yaitu Beasiswa Berkebutuhan Khusus, Beasiswa Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madrasah, Beasiswa Santri Pondok Pesantren, Beasiswa Stimulan (S1), Beasiswa Khusus (Yatim Piatu terdampak covid-19) Beasiswa Santri Lanjut Perguruan Tinggi dan Beasiswa Tematik.

Di Tahun 2024 melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kutai Kartanegara telah merealisasikan beasiswa dengan rincian:





Tabel 45. Realisasi Program Beasiswa Tahun 2022-2024

NO.	KATEGORI BEASISWA	CAPAIAN			KETERANGAN
		2022	2023	2024	
1	Beasiswa santri lanjut perguruan tinggi	7	22	48	
2	Beasiswa stimulan Mahasiswa	644	1094	3926	
3	Beasiswa Non ASN skema tematik	21	75	139	
4	Beasiswa santri pondok pesantren	159	329	238	
5	Beasiswa tingkat SD/SMP/SMA SLB	15	0	0	Tidak ada di Renstra
6	Beasiswa tingkat SMA/SMK/MA	95	347	855	Tidak ada di Renstra
7	Beasiswa khusus (yatim piatu) korban covid 19	21	57	0	Tidak ada di Renstra
TOTAL		962	1924	5206	

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

5. Analisis Kinerja Sasaran 5: “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kesehatan mencapai 99,14% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 46. Realisasi Indikator Sasaran 5 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,82	0,81	99,14

Pengukuran dimensi umur panjang dan sehat menggunakan indikator umur harapan hidup (*expectancy of life at birth*) yang menghasilkan indeks kesehatan, merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

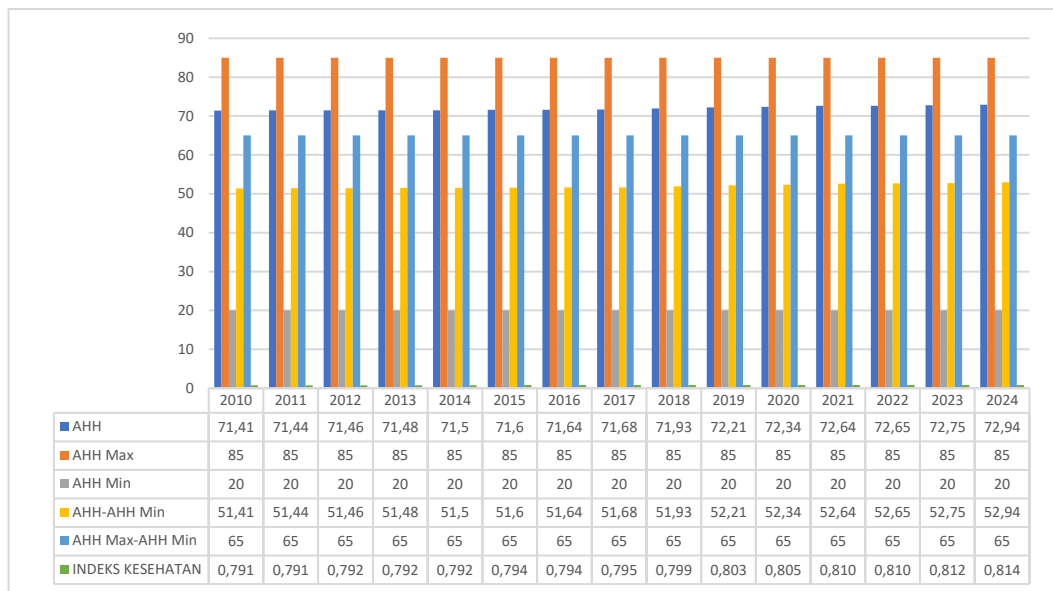
$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$





Pada Tahun 2023 Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 0,812, capaian ini meningkat 0,002 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 angka indeks kesehatan bisa mencapai 0,814. Setiap tahunnya indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat. Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mulai Tahun 2010 sampai Tahun 2024, ditampilkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 17. Indeks Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara

Angka Harapan Hidup



Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas

Komponen umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator angka harapan hidup saat lahir (*expectation of life at birth*). Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan lama hidup rata-rata penduduk (dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas). Semakin tinggi capaian indikator angka harapan hidup (AHH) maka semakin tinggi kemampuan manusia di suatu wilayah untuk hidup lebih lama.



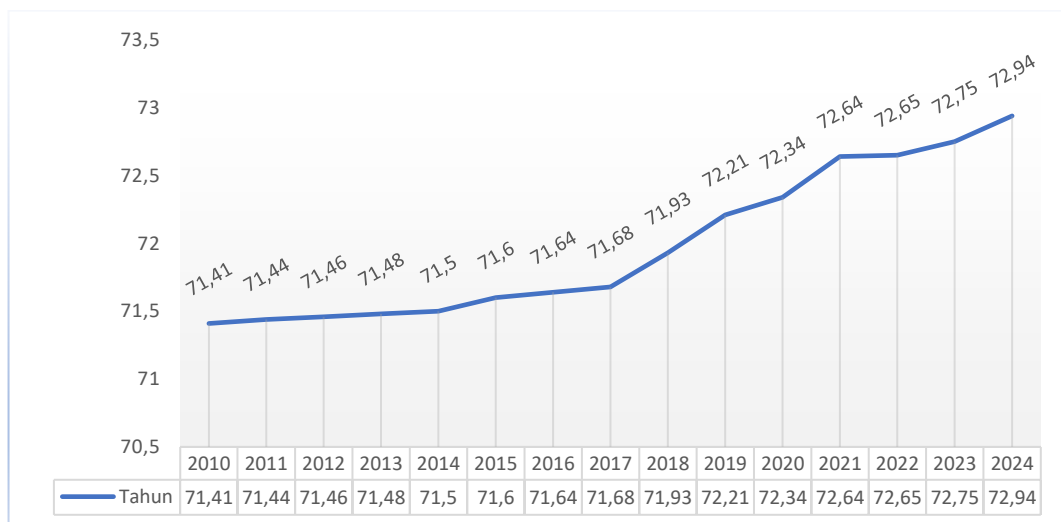


Pada tahun 2010 perkiraan rata-rata umur yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 71,41 tahun. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 72,75 tahun pada tahun 2023, dan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 mencapai 72,94.



Kunjungan Dokter Spesialis Anak ke Puskesmas

Grafik 18. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024



Sumber: BPS, 2024

Tabel 47. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,814	0,821	0,824

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 48. Program dan Anggaran Sasaran 5 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	809,789,389,794.00	967,478,549,872.00	865,411,423,482.42	89.45%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5,482,820,000.00	6,022,667,900.00	4,526,686,672.00	75.16%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	628,114,000.00	628,114,000.00	481,809,000.00	76.71%
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3,919,162,500.00	3,619,138,900.00	2,771,672,235.00	76.58%
5	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	6,292,495,000.00	10,473,414,000.00	8,880,592,960.00	84.79%
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	39,114,287,985.00	53,079,916,085.00	49,921,386,914.00	94.05%
Total		865,226,269,279.00	1,041,301,800,757.00	931,993,571,263.42	89.50%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.931,993,571,263.42 dari anggaran sebesar Rp. 1,041,301,800,757.00 atau sebesar 89,50%. Sementara itu, realisasi keuangan sebesar 89,50% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai 99,14% menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya relatif efisien. Meskipun target sasaran belum tercapai 100%, efektivitas pencapaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan anggaran mencerminkan bahwa sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai hasil yang hampir sesuai dengan target.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah.
2. Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit-unit layanan Kesehatan masyarakat.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memecahkan permasalahan ini antara lain:





1. Penyediaan fasilitas sarana prasarana Kesehatan sesuai standar yang dilakukan secara bertahap, dengan membangun dan memperbaiki kondisi Bangunan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Penyediaan SDM Kesehatan secara bertahap, salah satunya melalui pengangkatan PPPK, yang akan bertugas di RSUD dan Puskesmas.
3. Terus meningkatkan penyediaan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada masyarakat.
4. Terhadap kesenjangan SDM Kesehatan, maka dijadwalkan secara rutin kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas-puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan, mengoptimalkan pelaksanaan program upaya Kesehatan masyarakat dan perorangan, serta mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah, menjadi sasaran tambahan dalam perjanjian kinerja seluruh kepala perangkat daerah.

6. Analisis Kinerja Sasaran 6: “Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan” dengan indikator Indeks Pembangunan Gender mencapai 100,63% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 49. Realisasi Indikator Sasaran 6 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,60	100,63

)* Data Capaian Tahun 2024

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index





(GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.

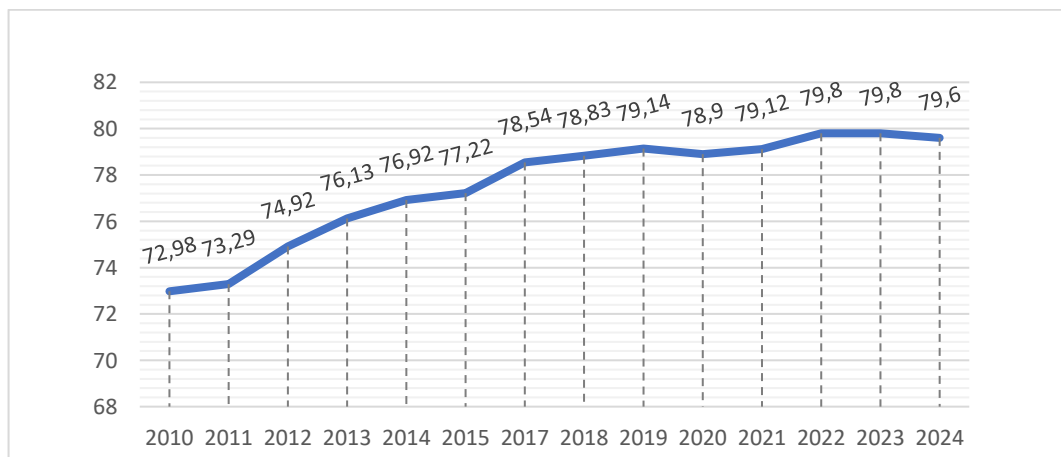
$$\text{Rumusan: IPG} = \text{IPM perempuan} / \text{IPM laki-laki}$$

Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), (ii) Pengetahuan (*knowledge*), dan (iii) Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Grafik 19. Indeks Pembangunan Gender Kab Kutai Kartanegara Tahun 2010-2024



Sumber data: Badan Pusat Statistik





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 50. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,80	79,80	79,60	79,15	79,2

Sumber data: Badan Pusat Statistik

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 51. Program dan Anggaran Sasaran 6 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	11,203,961,884.00	9,060,321,884.00	8,446,174,632.00	93.22%
2	Program Perlindungan Perempuan	1,719,504,000.00	1,769,431,000.00	1,440,437,056.00	81.41%
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	250,000,000.00	250,000,000.00	230,582,968.00	92.23%
4	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	930,000,000.00	1,130,000,000.00	996,002,742.00	88.14%
5	Program Perlindungan Khusus Anak	1,315,700,000.00	1,315,700,000.00	1,059,752,324.00	80.55%
Total		15,419,165,884.00	13,525,452,884.00	12,172,949,722.00	90.00%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.12,172,949,722.00 dari anggaran sebesar Rp.13,525,452,884.00 atau 90%. Realisasi keuangan sebesar 90% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,63%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Kondisi ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi. Perempuan yang berdaya salah satunya dapat dilihat dari kondisi finansial. Tak dapat dipungkiri lagi, keterbatasan kontribusi perempuan dalam perekonomian terjadi karena adanya diskriminasi gender dalam pasar tenaga kerja. Jika





hal ini masih terus terjadi, kesetaraan gender dalam penciptaan pendapatan tampaknya tidak akan mudah dicapai.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki landasan hukum yang lebih terbaru dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender telah mengalami perubahan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021, yang mengatur lebih lanjut mengenai tanggung jawab Bupati, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG. Selain itu, guna mendukung implementasi yang lebih konkret, diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Kutai Kartanegara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang lebih responsif gender. Dengan adanya regulasi yang lebih mutakhir ini, diharapkan kesetaraan dan keadilan gender dapat semakin terwujud dalam berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Analisis Kinerja Sasaran 7: “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Hidup Masyarakat” dengan indikator Indeks Gini dan Indeks Desa Membangun mencapai 98,67% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 52. Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,75	0,7969	106,97
Rata-rata Capaian					98,67

Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kemendes Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:





Indeks Gini

Angka realisasi 2024 Indeks Gini atau Gini Ratio terealisasi sebesar 0,307, angka ini menurun sebesar 0,023 poin dari Tahun 2023 sebesar 0,284. Target tahun 2024 sebesar 0,28 sehingga capaiannya adalah sebesar 90,36 %. Angka tersebut lebih kecil apabila dibandingkan angka Indeks Gini nasional sebesar 0,379 (pada Maret 2024), dan juga lebih rendah dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,310 (data BPS Kalimantan Timur per Maret 2024).

Indeks Gini merupakan tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar 0 hingga 1. Jika mendekati 1 maka ketimpangan pendapatan penduduk makin lebar. Jika mendekati 0, maka distribusi pendapatan makin merata. Realisasi Indeks Gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada kriteria ketimpangan rendah.

Perkembangan gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada awal periode tahun 2005 gini ratio di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 0,290. Menurut Oshima (1976), angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Gini ratio terus menurun meskipun berfluktuatif hingga mencapai nilai terendah pada tahun 2011 sebesar 0,205. Pada tahun 2012 gini ratio meningkat tajam menjadi 0,299 dan terus meningkat hingga mencapai 0,312 pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di antara penduduk semakin melebar dibanding kondisi periode 2005-2011.

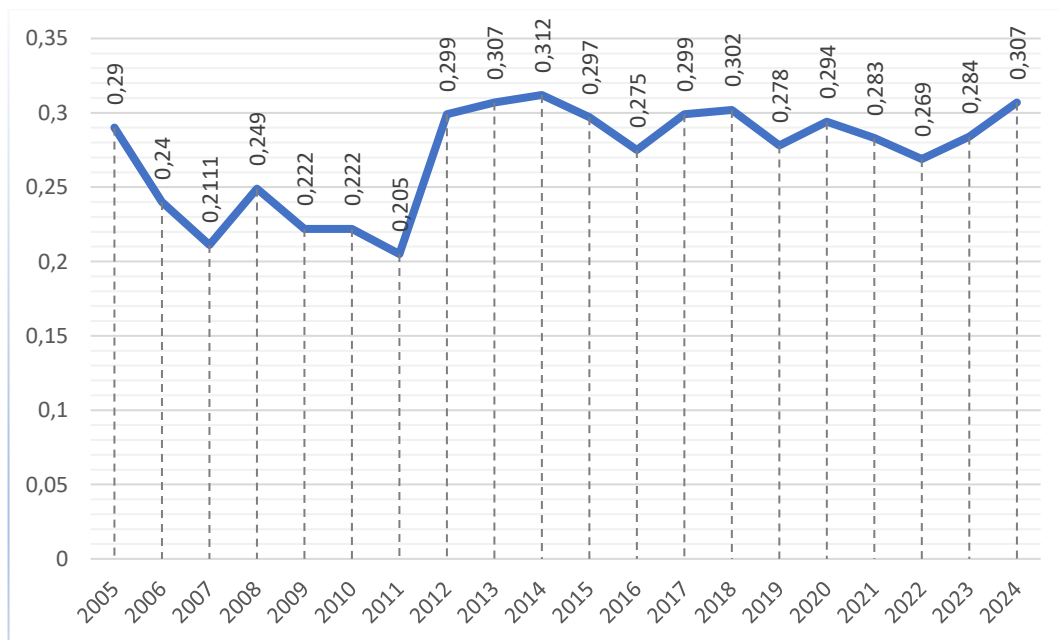
Pada periode berikutnya, 2015 hingga 2016, angka gini ratio sempat turun hingga mencapai 0,275 namun kembali meningkat di tahun 2017 dan 2018. Meskipun sempat turun di tahun 2019 namun karena pandemi Covid-19 angka gini ratio kembali meningkat di tahun 2020. Pada periode 2012 hingga 2021 dapat dikatakan gini ratio cenderung turun melambat meskipun berfluktuatif. Gini ratio tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai angka 0,269 yang menunjukkan kondisi





pemerataan yang lebih baik dibanding awal periode tahun 2021, karena mengalami penurunan 0,014, namun meningkat Kembali di Tahun 2023 dengan angka 0,284 hingga pada Tahun 2024.

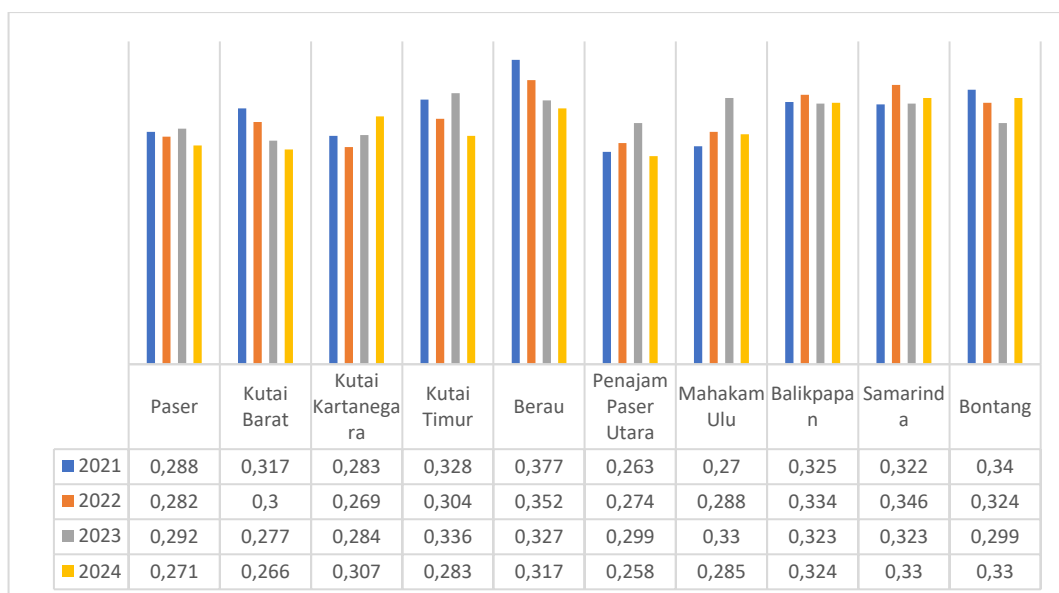
Grafik 20. Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2024



Sumber data: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024, jika dibandingkan dengan Indeks Gini kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 21. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024





Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya rasio gini, pertama yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Hal itu telah menciptakan kemiskinan yang menurun. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, bahkan dibawah standar sedangkan pekerja formal memiliki gaji yang terlalu melampaui standar seharusnya. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.



Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menekan tingkat kesenjangan, salah satunya pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK: <https://rbpk.kukarkab.go.id/>) Kutai Kartanegara, agar meningkatkan *Colaboratif Working* antara pemerintah pusat, pemerintah



provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan keterlibatan non pemerintah. Beberapa program antara lain Program Sanitasi Aman, Program *Yok Baiki* Rumah, Program Air Bersih, Program Pondok Pangan Etam. Program Nyaman

Be'jukut, Program Pendidikan Keaksaraan Dasar, Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM), Program Pendidikan Kecakapan Hidup, Program Pendidikan Kesetaraan Paket A s/d C, Program Bantuan Alat Bantu Aksesibilitas, Program Bantuan Pangan. Melalui program-program ini nantinya diharapkan bisa mencapai Kemiskinan 0% pada tahun 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dibutuhkan kolaborasi semua *stakeholder* serta meningkatkan partisipasi pihak swasta dalam pengentasan kemiskinan.





Selain itu, program jaring pengaman sosial juga akan sangat mempengaruhi penurunan gini ratio. Melalui Program Rehabilitasi Sosial, Pemda Kutai Kartanegara telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi di luar panti, sebanyak 1.388 orang atau tercapai 100% dari yang ditargetkan pada Tahun 2024. Bantuan ini mencakup 615 jiwa penerima bantuan permakanan kemiskinan ekstrem serta 773 jiwa penerima bantuan tunai bagi lansia, disabilitas, dan anak telantar. Selain itu, melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian pangan, sandang, dan layanan kesehatan (Penerima Bantuan Iuran/BPJS) bagi masyarakat miskin non-potensial telah diberikan kepada 15.486 orang atau 98,18% dari target 2024 sebesar 96% dari 15.786 orang yang dilaporkan dan terdata dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial Republik Indonesia sampai dengan bulan Desember 2024. Di samping itu, jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kutai Kartanegara mencapai 10.920 keluarga penerima manfaat (KPM), serta bantuan pangan dari Program Sembako yang menjangkau 15.486 KPM.

Program ini tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga mendukung target *Universal Health Coverage* (UHC) di Kutai Kartanegara, yang kini telah mencapai 98,18% dari total penduduk, memastikan hampir seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, Pemkab Kutai Kartanegara juga terus memperbaiki akurasi data penerima manfaat dengan melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala agar bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, upaya pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui bantuan usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) dan program *graduasi* KPM PKH, yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat agar tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Dengan kombinasi bantuan sosial dan program pemberdayaan, diharapkan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara terus mengalami penurunan secara signifikan.





Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu:

- a) Indeks Ketahanan Sosial, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman
- b) Indeks Ketahanan Ekonomi, meliputi Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah
- c) Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, meliputi Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Adapun Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:



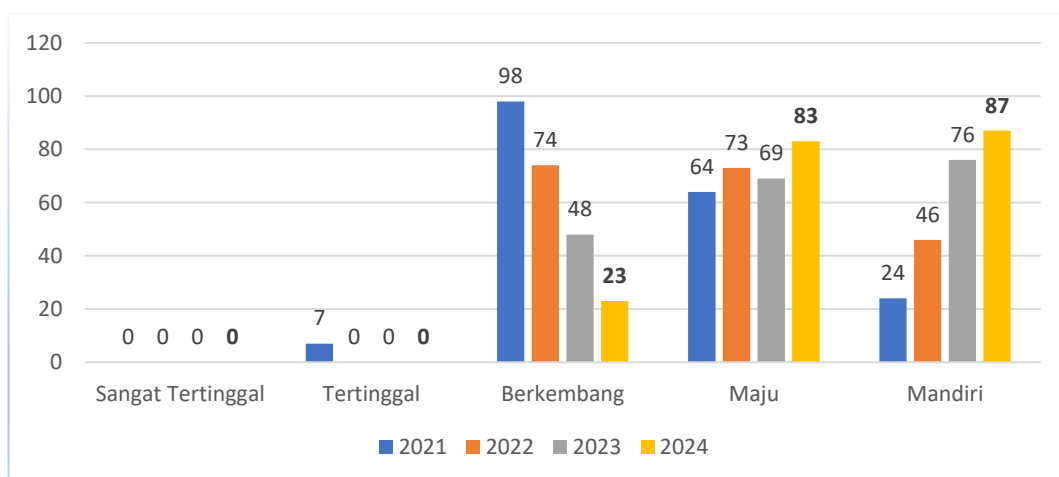


Tabel 53. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Status					2024				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Iks	Ike	Ikl	Idm	Status IDM
1	Muara Muntai	13	0	0	0	2	11	0,9143	0,9667	0,8667	0,9159	Mandiri
2	Loa Kulu	15	0	0	0	4	11	0,7943	0,7167	0,6667	0,7259	Maju
3	Loa Janan	8	0	0	0	2	6	0,8914	0,5667	0,8	0,7527	Maju
4	Anggana	8	0	0	2	3	3	0,7257	0,4833	0,9333	0,7141	Maju
5	Muara Badak	13	0	0	2	4	7	0,9029	0,7333	0,9333	0,8565	Mandiri
6	Tenggarong	2	0	0	0	1	1	0,88	0,5833	1	0,8211	Mandiri
7	Sebulu	14	0	0	0	5	9	0,8686	0,65	0,6667	0,7284	Maju
8	Kota Bangun	11	0	0	4	6	1	0,8514	0,65	0,8	0,7671	Maju
9	Kenohan	9	0	0	4	4	1	0,8171	0,7333	0,6	0,7168	Maju
10	Kembang Janggut	11	0	0	0	4	7	0,8743	0,75	0,8	0,8081	Maju
11	Muara Kaman	20	0	0	2	9	9	0,8857	0,8	0,8667	0,8508	Mandiri
12	Tabang	19	0	0	5	14	0	0,8229	0,6667	0,8	0,7632	Maju
13	Samboja	3	0	0	0	3	0	0,8629	0,6667	0,8667	0,7987	Maju
14	Tenggarong Seberang	18	0	0	0	3	15	0,9029	0,9667	0,8	0,8898	Mandiri
15	Marang Kayu	11	0	0	2	7	2	0,9143	0,8	0,8667	0,8603	Mandiri
16	Muara Wis	7	0	0	0	4	3	0,88	0,7333	0,9333	0,8489	Mandiri
17	Kota Bangun Darat	10	0	0	2	7	1	0,9029	0,8	0,4667	0,7232	Maju
18	Samboja Barat	1	0	0	0	1	0	0,7771	0,6	0,9333	0,7702	Maju

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Grafik 22. Indeks Desa Membangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Grafik Indeks Desa Membangun menunjukkan perkembangan positif desa-desa dari tahun 2021 hingga 2024, dengan peningkatan jumlah desa dalam





kategori Maju dan Mandiri serta penurunan desa Berkembang dan Tertinggal. Pada 2021, masih terdapat 7 desa tertinggal, namun sejak 2022 hingga 2024, tidak ada lagi desa dalam kategori tersebut, menandakan peningkatan signifikan dalam pembangunan desa. Desa Berkembang mengalami penurunan dari 98 desa (2021) menjadi 23 desa (2024), yang menunjukkan banyak desa telah naik status. Sementara itu, desa Maju meningkat dari 64 desa (2021) menjadi 83 desa (2024), dan desa Mandiri tumbuh pesat dari 24 desa (2021) menjadi 87 desa (2024). Secara keseluruhan, data ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam pembangunan desa, di mana semakin banyak desa yang mencapai kategori Maju dan Mandiri, menunjukkan keberhasilan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 54. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,27	0,27
9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,765	0,785

Sumber data: BPS dan Kemendes 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 55. Program dan Anggaran Sasaran 7 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,380,000,000.00	1,327,816,000.00	1,162,455,849.00	87.55%
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	6,250,000,000.00	6,250,000,000.00	5,903,265,035.00	94.45%
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3,524,499,993.00	88.11%
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	300,000,000.00	300,000,000.00	291,608,878.00	97.20%
5	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1,050,000,000.00	808,510,650.00	740,960,084.00	91.65%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	119,565,756,882.00	134,506,470,723.00	130,632,744,643.17	97.12%
Total		130,545,756,882.00	147,192,797,373.00	142,255,534,482.17	96.65%





Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran peningkatan status desa di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah Rp.142,255,534,482.17 dari total anggaran sebesar Rp.147,192,797,373.00, atau sekitar 96,65%. Dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,67%, maka terjadi tidak efisien dalam penggunaan sumber daya, karena sasaran belum berhasil 100% tercapai walaupun penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pembangunan desa telah berjalan dengan optimal, mendukung peningkatan jumlah desa Maju dan Mandiri, serta menghapus kategori desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sejak 2022.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Tersedianya pendamping desa baik dari Kementerian Desa maupun Kabupaten yang membantu dalam pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi aset lokal desa. Keberadaan pendamping ini berperan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintah desa serta mendorong sinergi program pembangunan antar sektor.
2. Kesadaran pemerintah desa terkait peningkatan status desa semakin meningkat, didorong oleh adanya *reward* dari pemerintah pusat bagi desa yang berhasil mencapai status Desa Mandiri. Selain itu, ketersediaan anggaran pembangunan yang memadai juga menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian target pembangunan desa.
3. Program jaring pengaman sosial yang efektif, seperti bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat, turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan status desa, serta mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Kutai Kartanegara.
4. Masih terdapat tantangan di tingkat desa, seperti kekhawatiran sebagian kepala desa terhadap pengurangan alokasi anggaran jika status desa meningkat. Hal ini menyebabkan beberapa desa enggan





meningkatkan statusnya meskipun sebenarnya telah memenuhi kriteria untuk naik ke kategori Maju atau Mandiri.

5. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas tetap menjadi tantangan, terutama dalam pemerataan pembangunan. Beberapa desa masih mengalami keterbatasan akses terhadap internet, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, yang dapat menghambat percepatan pembangunan desa secara merata.
6. Kurangnya pemahaman sebagian kepala desa dalam pengisian kuesioner penilaian Indeks Desa Membangun (IDM), terutama dalam aspek pencatatan kondisi sarana dan prasarana desa, sehingga beberapa desa yang seharusnya dapat naik status tidak dapat memperoleh skor maksimal dalam penilaian.

8. Analisis Kinerja Sasaran 8: “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Pengangguran di Masyarakat” dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB per Kapita mencapai 119,08% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 56. Realisasi Indikator Sasaran 8 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	107
11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	259,19	131,16
Rata-rata Capaian					119,08

Sumber: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator penting yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPT mengukur persentase angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Semakin tinggi angka TPT, semakin besar tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.





Permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah di bidang ketenagakerjaan adalah meningkatnya pengangguran. Pengangguran terjadi ketika jumlah angkatan kerja yang ada, belum atau tidak terserap sepenuhnya oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Sementara pengangguran mencakup empat kriteria, yaitu mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat besarnya tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT diperoleh dengan membagi antara jumlah pengangguran (penduduk yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan) dengan jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja dan pengangguran). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap di dalam pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara pengangguran terhadap angkatan kerja, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Kedua hal tersebut akan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang, dan sebaliknya jika kesempatan kerja besar berarti TPT akan semakin kecil.

Tabel 57. Jumlah dan Perubahan Pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2024

Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (orang)	Perubahan (orang)
2010	33980	
2011	23530	-10450
2012	23977	447
2013	22215	-1762

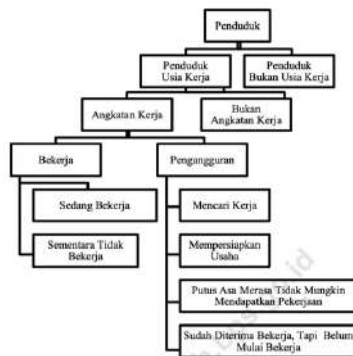




Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (orang)	Perubahan (orang)
2014	24381	2166
2015	31397	7016
2017	19473	-11924
2018	21361	1888
2019	22607	1246
2020	20497	-2110
2021	21544	1047
2022	15412	-6132
2023	14731	-681
2024	16125	1394

Sumber: BPS, Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2025

Selama 1 dekade terakhir, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berfluktuasi dengan kecenderungan menurun (lihat tabel 2.3.39). Jumlah pengangguran tercatat berkisar antara 20-35 ribu, dimana jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2010 yang mencapai 33.980 orang, dan di Tahun 2023 merupakan capaian terendah tercatat pada sebanyak 14.731 orang. Namun jumlah pengangguran di Tahun 2024 kembali meningkat sebanyak 1.394 orang dibandingkan Tahun 2023, menjadi 16.125 orang.



Gambar 1. Diagram Ketenagakerjaan

Penduduk yang terkategori sebagai pengangguran adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), serta tidak bekerja dan tidak

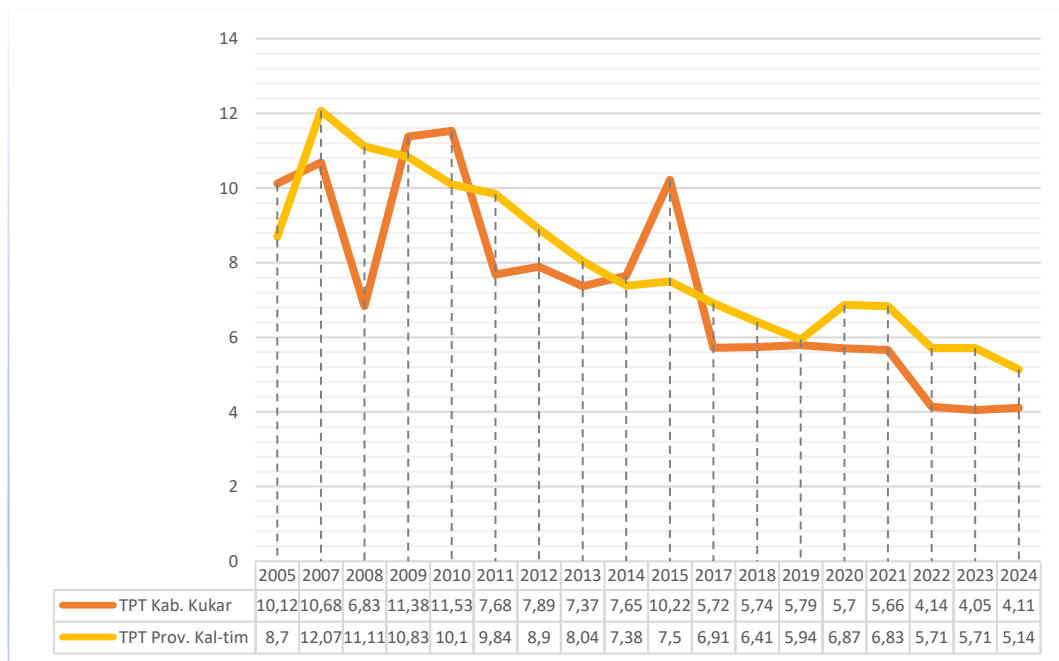
mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starters*). Jumlah penganggur yang juga tercatat cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 31.397 orang. Pada tahun 2011, jumlah pengangguran tercatat berkurang sebanyak 10.450 orang dibandingkan dengan kondisi tahun 2010. Kemudian pada tahun 2013 berkurang sebanyak 1,762 orang, tahun 2017 berkurang sebanyak 11.924





orang, dan tahun 2020 juga berkurang sebanyak 2.110 orang. Namun demikian, pada beberapa tahun juga terjadi penambahan jumlah pengangguran meskipun secara angka tidak terlalu besar. Penambahan jumlah pengangguran ini terjadi pada tahun 2012, 2014, 2015, 2018, 2019, dan 2021. Penambahan pengangguran ini banyak terjadi pada tahun dimana ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi yang kurang baik. Dengan melihat data diatas, maka secara rata-rata, jumlah pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara berkurang sebanyak 1.131 orang setiap tahunnya.

Grafik 23. TPT Kab Kutai Kartanegara dan Prov. Kal-tim Tahun 2005 s.d 2024



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur data per Agustus 2024



Pelaksanaan Job Fair/ Bursa Kerja Tahun

Kartanegara tercatat sebesar 10,12 persen, lebih tinggi daripada TPT

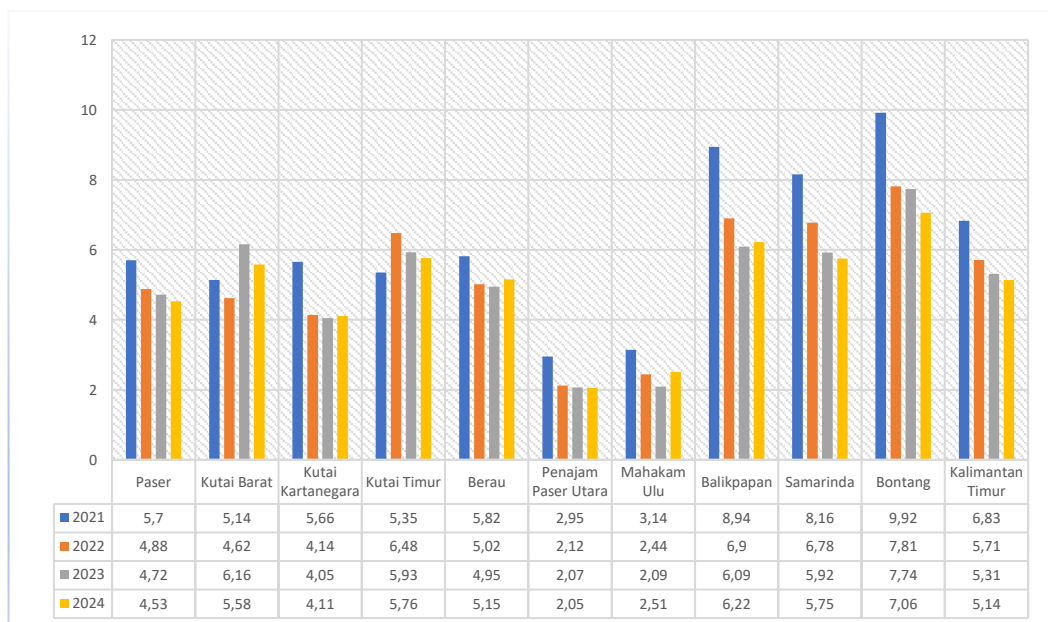
Sejalan dengan jumlah pengangguran, perkembangan tingkat pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara juga berfluktuasi dengan kecenderungan angka yang relatif rendah, terutama pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2005, TPT Kabupaten Kutai





Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar 8,70 persen. Satu tahun kemudian, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 10,68 persen, lebih rendah dari TPT Provinsi Kalimantan Timur yang melonjak menjadi 12,07 persen. Pada tahun 2008, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara kembali turun cukup drastis mencapai angka 6,83 persen, jauh lebih rendah dari TPT Kalimantan Timur yang sebesar 11,11 persen. Namun pada tahun 2009-2010 dan kemudian tahun 2015, TPT Kutai Kartanegara meningkat cukup tajam, melebihi TPT Provinsi Kalimantan Timur. Tingginya angka TPT ini tidak terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara dikenal sebagai magnet bagi para pekerja pendatang dari luar wilayah. Akibatnya jumlah pencari kerja di Kutai Kartanegara bertambah banyak dan tingkat pengangguran juga meningkat. Beruntungnya, pada periode 2017-2024, rata-rata TPT Kutai Kartanegara tercatat sebesar 5,1 persen hampir mendekati TPT provinsi Kalimantan Timur di 5,14 pada Tahun 2024.

Grafik 24. Perkembangan TPT Kabupaten/ Kota Provinsi Kaltim, 2021-2025



Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Jika melihat grafik diatas TPT Kabupaten Kutai Kartanegara menempati urutan ke 3 (tiga) terendah di antara kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Timur setelah Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu, dan TPT tertinggi berada di Kota Bontang sebesar 7,05, kemudian Kota Balikpapan di angka 6,22 dan Kabupaten Kutai Timur di 5,76.



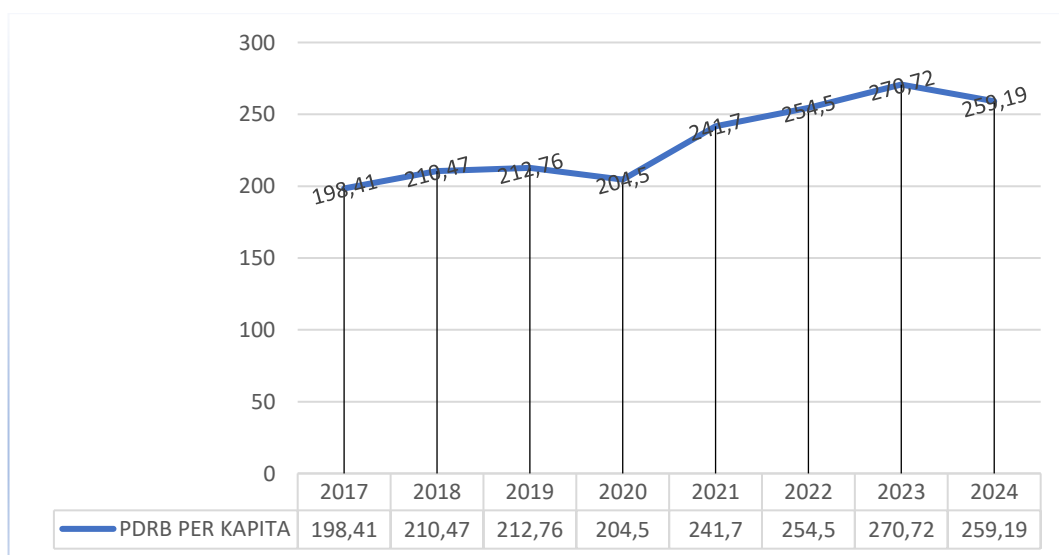


PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin besar pula rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut.

Berikut ini disajikan data capaian kinerja PDRB Per Kapita:

Grafik 25. PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2024



Sumber: BPS

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan penurunan pada Tahun 2024 jika dibandingkan Tahun 2023 dari 270,72 juta rupiah di tahun 2023 menjadi 259,19 juta di tahun 2024 atau menurun 11,53 dari Tahun 2023, setelah sebelumnya di Tahun 2023 meningkat 16,22 dari Tahun 2022. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 20 tahun terakhir telah meningkatkan PDRB per kapita penduduk, dari Rp. 113,64 juta rupiah pada Tahun 2005 menjadi Rp. 241,70 juta rupiah pada Tahun 2021 dan meningkat menjadi 270,72 juta rupiah di Tahun 2023. Kendati demikian,





masih terdapat gap yang cukup besar antara PDRB per kapita dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Hal ini disebabkan salah satunya karena peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 58. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,11	4,25	4,1
11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	259,19	202,16	204,69

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 59. Program dan Anggaran Sasaran 8 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	100,000,000.00	100,000,000.00	94,394,740.00	94.39%
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	10,352,340,000.00	16,052,340,000.00	11,567,169,818.00	72.06%
3	Program Penempatan Tenaga Kerja	7,959,000,000.00	8,672,399,000.00	7,715,264,852.00	88.96%
4	Program Hubungan Industrial	10,986,704,000.00	11,271,341,700.00	9,912,045,830.00	87.94%
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	12,000,000,000.00	14,988,540,000.00	14,190,169,975.00	94.67%
Total		41,398,044,000.00	51,084,620,700.00	43,479,045,215.00	85.11%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.43,479,045,215.00 dari anggaran sebesar Rp. 51,084,620,700.00 atau 85,11%. Realisasi keuangan sebesar 85,11% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 119,08%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.





Faktor pendukung tercapainya Target Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Peningkatan tingkat pendidikan dan pelatihan bersertifikat kompetensi meningkatkan keterampilan dan daya saing pekerja di pasar tenaga kerja.
2. Mendorong wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.
3. Kebijakan yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja, melindungi hak pekerja, dan mendorong penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Faktor Penghambat tercapainya Target :

1. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja dapat menjadi penghambat. Peningkatan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan industri dapat meninggalkan beberapa pekerja dengan keterampilan yang tidak sesuai.
2. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan di pasar tenaga kerja.
3. Pertumbuhan Jumlah Lulusan Baru (*Fresh Graduates*). Setiap tahun, Kukar mengalami peningkatan jumlah lulusan dari SMA dan perguruan tinggi yang memasuki angkatan kerja. Banyak dari lulusan baru ini belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja, sehingga menambah angka pengangguran. Fenomena ini terjadi karena proses pencarian pekerjaan oleh lulusan baru belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja yang sesuai.
4. Pertumbuhan Angkatan Kerja yang Lebih Cepat dari Penyerapan Tenaga Kerja. Meskipun jumlah penduduk yang bekerja meningkat, pertumbuhan angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Kukar meningkat lebih cepat. Hal ini menyebabkan lonjakan TPT karena pasar kerja belum mampu menampung seluruh angkatan kerja baru yang masuk setiap tahunnya.





Selain faktor-faktor tersebut, penelitian di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa variabel seperti rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan jumlah industri besar sedang memiliki pengaruh signifikan terhadap TPT. Meskipun penelitian ini mencakup wilayah Kalimantan secara umum, faktor-faktor tersebut kemungkinan juga mempengaruhi TPT di Kukar.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kutai Kartanegara.

9. Analisis Kinerja Sasaran 9: “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencapai 44,55% dan termasuk predikat “Kurang Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 60. Realisasi Indikator Sasaran 9 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55

Sumber data: BPS: Data Diolah Tahun 2024

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, tata kelola, dan pertumbuhan sektor pertanian secara luas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mendorong pertumbuhan sektor pertanian dengan target RPJMD 2024 sebesar 6,60%. Namun, realisasi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2024 hanya mencapai 2,94%, atau 44,55% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan sektor ini mencapai 2,91%, mengalami peningkatan sebesar 1% dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 1,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhan sektor ini hanya meningkat 0,03% dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan pertumbuhan yang stagnan dan belum mencapai target yang diharapkan.

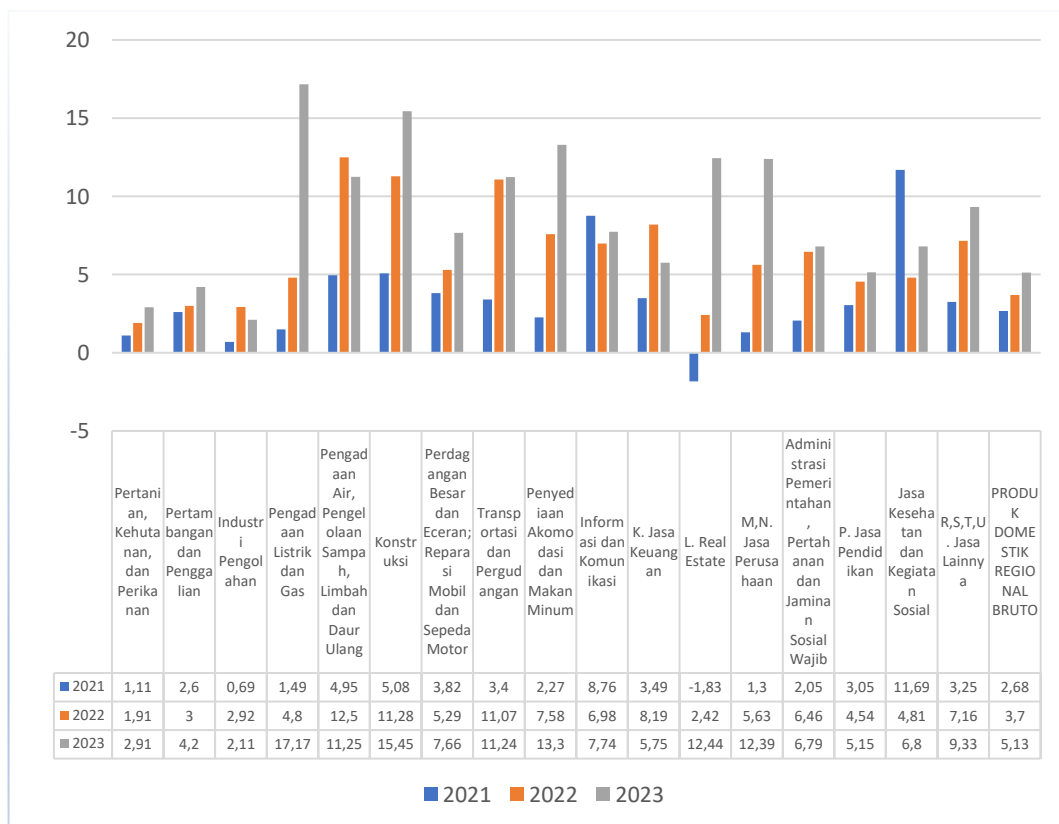




Dengan demikian, meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya, pencapaian tahun 2024 masih jauh dari target RPJMD yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan agar sesuai dengan proyeksi yang direncanakan.

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, capaian setiap tahunnya selalu dibawah target dengan predikat “Kurang Berhasil”, walaupun potensi pertanian di Kutai Kartanegara relatif besar, namun belum banyak menarik minat masyarakat, sektor migas dan batu bara masih menjadi sektor unggulan.

Grafik 26. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2021-2023



Sumber data: BPS (Data yang disajikan adalah tahun 2023 karena Data 2024 baru akan diterbitkan pada April 2025)

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:





Tabel 61. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	1,91	2,91	2,94	7,05	7,5

Sumber data: BPS

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 62. Program dan Anggaran Sasaran 9 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	575,000,000.00	575,000,000.00	365,389,825.00	63.55%
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	470,000,000.00	320,000,000.00	216,770,676.00	67.74%
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	643,484,000.00	779,002,800.00	516,198,000.00	66.26%
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	805,000,000.00	805,000,000.00	554,294,557.00	68.86%
5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	143,370,000,000.00	166,478,317,750.00	150,754,899,262.00	90.56%
6	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	308,485,228,000.00	354,419,927,378.00	318,826,289,000.00	89.96%
7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	20,600,000,000.00	20,577,163,050.00	19,573,376,805.00	95.12%
8	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	4,545,000,000.00	9,752,896,650.00	8,868,244,466.00	90.93%
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	71,566,776,000.00	80,483,750,052.00	71,622,278,154.00	88.99%
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	65,416,630,000.00	73,389,229,139.00	66,509,449,225.00	90.63%
11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1,737,300,000.00	1,737,300,000.00	1,628,404,184.00	93.73%
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1,900,000,000.00	2,168,219,454.00	1,817,746,165.00	83.84%
13	Program Perizinan Usaha Pertanian	700,000,000.00	700,000,000.00	405,199,437.00	57.89%
14	Program Penyuluhan Pertanian	13,875,575,000.00	20,794,278,650.00	18,523,844,957.00	89.08%
15	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	325,000,000.00	325,000,000.00	306,458,000.00	94.29%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	15,260,000,000.00	15,678,581,999.00	14,525,954,261.00	92.65%
17	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1,250,000,000.00	2,800,000,000.00	2,353,896,555.00	84.07%
18	Program Pengembangan Ekspor	2,230,000,000.00	2,130,000,000.00	1,809,541,722.00	84.96%
19	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	450,000,000.00	500,000,000.00	437,275,305.00	87.46%
20	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	50,770,000,000.00	44,498,729,000.00	41,738,354,023.00	93.80%
21	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	900,000,000.00	900,000,000.00	398,455,260.00	44.27%
22	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	664,909,600.00	60.45%
23	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	300,000,000.00	300,000,000.00	284,095,500.00	94.70%
Total		707,274,993,000.00	801,212,395,922.00	722,701,324,939.00	90.20%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut mencapai Rp.722,701,324,939.00 dari total anggaran sebesar Rp.801,212,395,922.00 atau sekitar 90,20%. Namun, capaian kinerja sasaran hanya mencapai 44,55%, yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya target sasaran secara penuh, sementara alokasi dana yang digunakan relatif tinggi dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut antara lain:

1. Produksi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki produksi komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur. Namun, sektor pertanian belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan karena dominasi sektor pertambangan, yang masih menjadi daya tarik utama dibandingkan dengan sektor pertanian.





2. Alih fungsi lahan pertanian

Terjadinya konversi lahan pertanian, terutama di wilayah perkotaan, turut berdampak pada stagnasi pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, masih terdapat lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan, sehingga potensi sektor ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Rendahnya regenerasi pelaku usaha pertanian

Pelaku usaha pertanian masih didominasi oleh generasi tua, sementara minat generasi muda untuk terjun ke sektor ini masih rendah. Kurangnya regenerasi ini menjadi tantangan dalam pengembangan dan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

10. Analisis Kinerja Sasaran 10: “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata mencapai 229,53% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 63. Realisasi Indikator Sasaran 10 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,5322

)* menggunakan data capaian Tahun sebelumnya (2023)

Berdasarkan data terbaru, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, tercatat 1.041.886 kunjungan, yang kemudian meningkat menjadi 1.500.126 kunjungan pada tahun 2023, menunjukkan kenaikan sebesar 458.240 wisatawan.

Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 1.215 kunjungan.

Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong sektor pariwisata sebagai pemicu





transformasi struktur ekonomi dari dominasi sektor ekonomi tak terbarukan ke sektor ekonomi terbarukan. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, diharapkan percepatan perekonomian daerah dapat tercapai.

Grafik 27. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber data: BPS Kutai Kartanegara 2018-2024

Grafik tersebut menampilkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan nusantara mencapai 1.800.756 orang, namun mengalami penurunan menjadi 1.596.277 orang pada tahun 2019. Penurunan semakin tajam terjadi pada tahun 2020, di mana jumlah wisatawan anjlok hingga 692.689 orang, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan masih rendah di angka 617.018 orang.

Namun, sektor pariwisata mulai menunjukkan pemulihan pada tahun 2022 dengan jumlah wisatawan meningkat menjadi 1.041.254 orang, lalu melonjak lebih tinggi lagi menjadi 1.530.444 orang pada tahun 2023. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 1.215.549 orang. Persentase pertumbuhan wisatawan juga mencerminkan tren ini, dengan angka tinggi pada 2018 (100,56%) dan 2019 (88,64%) yang turun drastis pada 2020 (43,39%). Namun, pemulihan signifikan terjadi pada 2022 (168,76%) dan 2023 (147,13%), sebelum kembali turun pada 2024 (79,42%).

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pariwisata domestik di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan signifikan selama pandemi, tetapi mampu bangkit dengan peningkatan kunjungan yang cukup





besar dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih mengalami fluktuasi pada 2024.

Grafik 28. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: Dinas Pariwisata Tahun 2024

Grafik tersebut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, jumlah wisatawan mencapai 4.804 orang, kemudian sedikit menurun menjadi 4.589 orang pada tahun 2019. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 dengan hanya 557 wisatawan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Penurunan semakin tajam pada tahun 2021, di mana jumlah wisatawan hanya mencapai 46 orang.

Setelah itu, jumlah wisatawan mulai menunjukkan tanda pemulihan, naik menjadi 632 orang pada tahun 2022 dan meningkat lebih lanjut menjadi 1.530 orang pada tahun 2023. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah wisatawan mencapai 3.803 orang. Tren pertumbuhan tahunan juga mencerminkan fluktuasi ini, di mana angka pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2018 dan 2019 (100,54% dan 95,52%) mengalami penurunan drastis selama pandemi (12,14% pada 2020 dan 8,26% pada 2021). Namun, pertumbuhan kembali meningkat secara



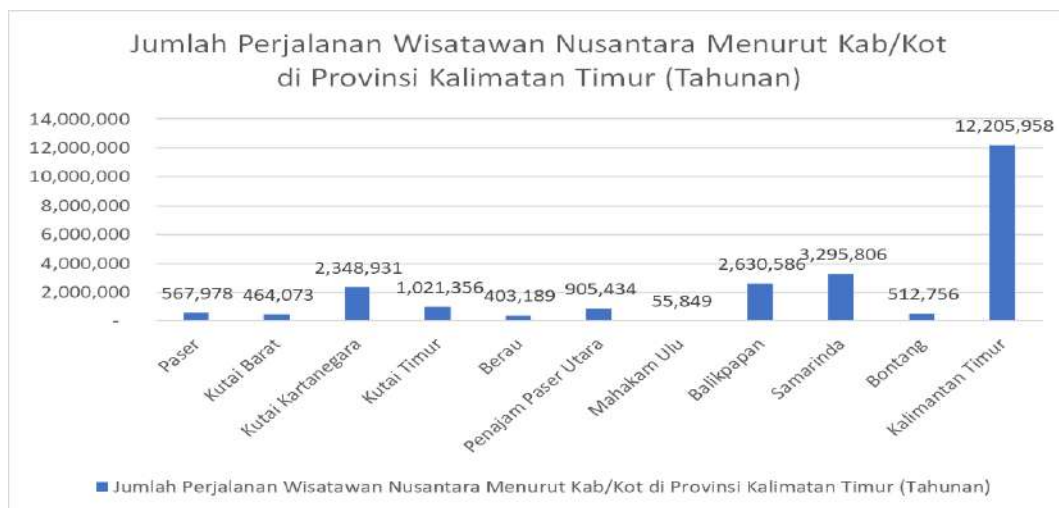


signifikan pada tahun 2023 (242%) dan 2024 (248,6%), mencerminkan pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami dampak besar akibat pandemi, tetapi mulai pulih dengan peningkatan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun terakhir.

Adapun sebagai Faktor Pembanding Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan sebagai Berikut:

Grafik 29. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber: BPS Kalimantan Timur 2024

Berdasarkan data jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tarik wisata yang cukup kuat dengan mencatatkan 2.348.931 perjalanan wisatawan dalam setahun. Angka ini menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah dengan jumlah wisatawan terbesar di provinsi tersebut, bersaing ketat dengan Kota Balikpapan yang mencatatkan 2.630.538 perjalanan dan Kota Samarinda dengan 3.295.806 perjalanan. Jumlah wisatawan di Kutai Kartanegara juga jauh melampaui beberapa daerah lainnya seperti Kutai Timur (1.021.356), Berau (403.189), dan Bontang (512.756). Data ini menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dan mampu bersaing dengan kota-kota besar di Kalimantan Timur. Jika dikelola dengan baik,





daerah ini berpotensi untuk terus meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata utama di provinsi ini.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 64. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	6,6	7,85	4	4,23

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 65. Program dan Anggaran Sasaran 10 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pemasaran Pariwisata	38.710.000.000,00	37.211.500.798,00	36.083.821.519,00	96,97%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	27.875.000.000,00	22.729.749.000,00	21.849.139.935,00	96,13%
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	49.640.000.000,00	51.419.780.000,00	27.267.201.549,00	53,03%
Total		116.225.000.000,00	111.361.029.798,00	85.200.163.003,00	76,51%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp.85.200.163.003,00 dari total anggaran Rp.111.361.029.798,00 atau setara dengan 76,51%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai 229,5322%, maka hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Target sasaran berhasil dicapai 100%, sementara penggunaan sumber daya lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata, yang berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Selain itu, pertumbuhan





Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Kartanegara semakin siap dalam mengelola sektor pariwisata serta menerima kunjungan wisatawan.

11. Analisis Kinerja Sasaran 11: “Berkembangnya Ekosistem Kreatif”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Berkembangnya Ekosistem Kreatif” dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif mencapai 117,55% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 66. Realisasi Indikator Sasaran 11 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,55	7,70	117,5573

Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang berbasis pada kreativitas, ide, dan inovasi sebagai faktor utama dalam menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi ini mencakup berbagai sektor, seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, fashion, hingga pengembangan perangkat lunak dan digital. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama yang dimanfaatkan bukan hanya bahan mentah atau modal finansial, tetapi juga daya cipta, bakat, dan keterampilan manusia dalam menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Perkembangan teknologi dan digitalisasi turut berperan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, memungkinkan para pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara global. Dengan kontribusinya terhadap inovasi dan penciptaan lapangan kerja, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif adalah tingkat perubahan atau peningkatan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa cepat sektor ekonomi kreatif berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian suatu daerah atau negara. Pertumbuhan ini dapat

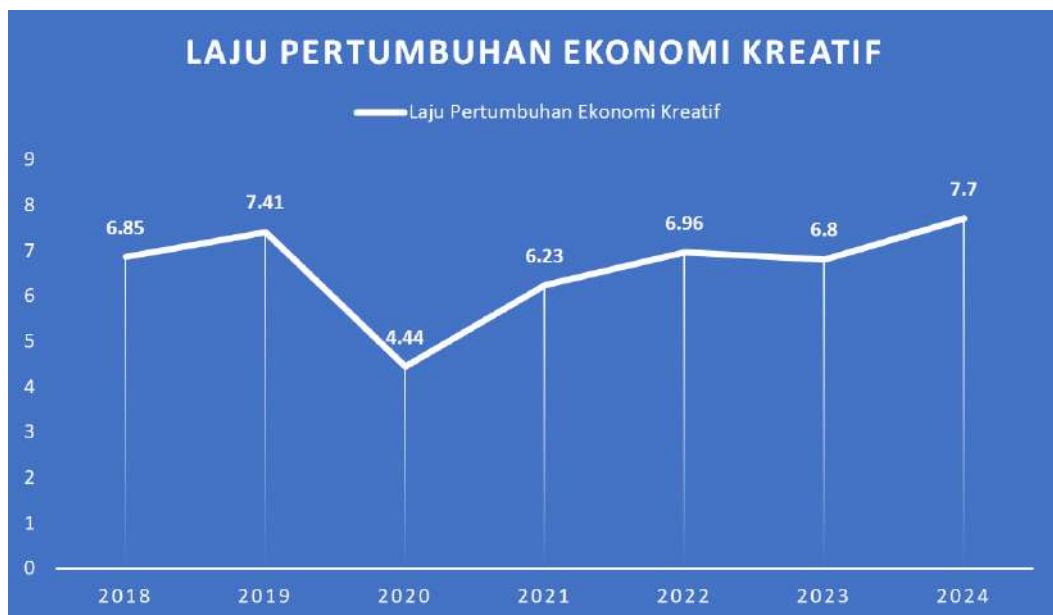




dihitung berdasarkan peningkatan nilai tambah bruto (NTB) dari industri kreatif, jumlah tenaga kerja yang terlibat, serta perkembangan sub sektor ekonomi kreatif seperti seni pertunjukan, desain, musik, film, kuliner, dan teknologi digital.

Laju pertumbuhan ekonomi kreatif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti inovasi, teknologi, kebijakan pemerintah, permintaan pasar, serta keterampilan sumber daya manusia. Jika angka pertumbuhannya meningkat, berarti sektor ekonomi kreatif semakin berkembang dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian, seperti peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya saing produk kreatif, serta kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah atau nasional. Sebaliknya, jika laju pertumbuhan mengalami penurunan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menghambat perkembangan sektor kreatif agar dapat terus bertumbuh dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Grafik 30. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018-2024, terlihat adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2018, sektor ekonomi kreatif tumbuh sebesar 6,85%, menunjukkan perkembangan yang cukup baik.





Pertumbuhan ini semakin meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 7,41%, yang didorong oleh peningkatan investasi, penguatan program ekonomi kreatif, serta berbagai kegiatan promosi dan festival daerah yang mendukung para pelaku usaha kreatif.

Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan hingga 4,44%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Pembatasan sosial, penutupan tempat usaha, serta berkurangnya mobilitas masyarakat menjadi faktor utama yang memperlambat aktivitas ekonomi kreatif selama periode tersebut. Berbagai sub sektor seperti seni pertunjukan, *event organizer*, dan industri pariwisata kreatif sangat terdampak akibat pembatasan kegiatan fisik.

Seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali dengan laju pertumbuhan sebesar 6,23%. Hal ini didorong oleh adaptasi para pelaku usaha kreatif terhadap digitalisasi, seperti penjualan produk secara daring, pemanfaatan media sosial, serta berbagai program dukungan yang diberikan untuk mendorong pemulihan usaha kreatif. Tren pemulihan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan mencapai 6,96%, menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah berhasil bangkit dari dampak pandemi.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sedikit mengalami penurunan menjadi 6,8%, yang masih menunjukkan stabilitas dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi sedikit penurunan ini adalah adanya tantangan baru seperti persaingan yang semakin ketat, inflasi, serta perubahan tren konsumsi masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk kreatif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan daya tahan yang cukup kuat dan terus mengalami perkembangan positif seiring dengan berbagai program dan inovasi yang terus dilakukan. Namun di Tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat menjadi 7,7.





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 67. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 11 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,8	7,7	7,48	7,56

Sumber data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 68. Program dan Anggaran Sasaran 11 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	2.900.000.000,00	7.085.471.000,00	6.084.644.151,00	85,87%
Total		2.900.000.000,00	7.085.471.000,00	6.084.644.151,00	85,87%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.6.084.644.151,00 dari total anggaran Rp.7.085.471.000,00 atau sebesar 85,87%. Dengan realisasi keuangan sebesar 85,87% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran yang mencapai 117,56%, terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa target sasaran berhasil dicapai 100%, sementara penggunaan sumber daya lebih rendah dibandingkan capaian kinerja.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran ini antara lain peran aktif generasi muda, ketersediaan tenaga kerja yang mendukung, serta terbukanya peluang bagi mereka untuk berkreasi. Kemajuan teknologi, kemudahan akses komunikasi, serta perkembangan media sosial juga menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan Ekosistem Kreatif. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebagai indikator utama perkembangan sektor tersebut.





12. Analisis Kinerja Sasaran 12: “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah” dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi mencapai 620% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 69. Realisasi Indikator Sasaran 12 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Di Tahun 2024 target Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi RPJMD sebesar 1,75%, Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 berhasil mencapai Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebesar 10,85%, capaian ini lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2023 sebesar 51,38%.

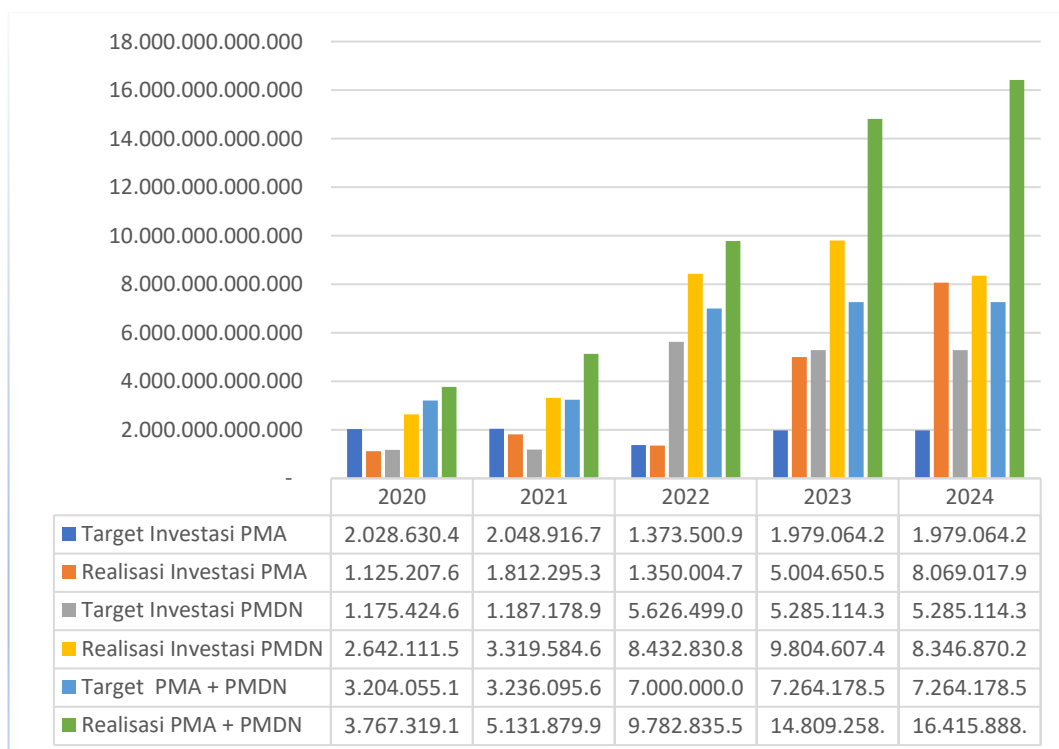
Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi adalah:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Pertumbuhan} &= \frac{(\text{Jumlah Investasi Tahun } n - \text{Jumlah Investasi } n-1) \text{ di Kabupaten/ Kota}}{\text{Jumlah Investasi } n-1 \text{ di Kabupaten/ Kota}} \times 100\% \\ \text{Tingkat Pertumbuhan} &= \frac{16.415.888.215.433 - 14.809.258.004.235}{14.809.258.004.235} \times 100\% \\ \text{Tingkat Pertumbuhan} &= \mathbf{10,85\%} \end{aligned}$$

Berikut disajikan Perhitungan Target, Realisasi dan Tingkat Pertumbuhan Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2024 :



Grafik 31. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Nilai Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024 sebesar Rp.16.415.888.215.433, lebih tinggi Rp. 1.606.630.211.198, dibandingkan realisasi investasi Tahun 2023 yang mencapai nilai Rp.14.809.258.004.235, sehingga Capaian tingkat pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,85%.

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 70. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 12 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	1,77	1,79

Sumber data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:





Tabel 71. Program dan Anggaran Sasaran 12 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	850,000,000.00	894,053,636.00	828,794,837.00	92.70%
2	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	500,000,000.00	2,542,853,000.00	799,508,254.00	31.44%
3	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1,050,000,000.00	1,150,000,000.00	1,148,040,385.00	99.83%
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1,310,423,000.00	1,229,923,000.00	876,932,873.00	71.30%
5	Program Promosi Penanaman Modal	1,200,000,000.00	1,081,660,000.00	1,077,936,018.00	99.66%
Total		4,910,423,000.00	6,898,489,636.00	4,731,212,367.00	68.58%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.4,731,212,367.00 dari anggaran sebesar Rp.6,898,489,636.00 atau 68,58%. Realisasi keuangan sebesar 68,58% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 620%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Pencapaian Tingkat Pertumbuhan Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif hal ini disebabkan karena :

1. Fluktuatif Harga Komoditas dimana Kabupaten Kutai Kartanegara masih Ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi menyebabkan volatilitas investasi ketika harga batu bara dan minyak turun.
2. Krisis Ekonomi Global dimana ekonomi dunia mengalami perlambatan yang mempengaruhi arus modal masuk ke Indonesia termasuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Regulasi Lingkungan yang Ketat menyebabkan beberapa industri besar yang bergerak pada sektor tambang dan industri mengalami kendala terkait perizinan lingkungan.





4. Ketimpangan Infrastruktur di Wilayah Tertentu dimana beberapa kawasan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur penting. Serta telah berjalannya proyek-proyek investasi pada tahun-tahun sebelumnya
5. Persaingan dengan Daerah Lain yang telah mempunyai kawasan industri atau sentra-sentra industri yang lebih berkembang daripada Kabupaten Kutai Kartanegara

Di samping Kendala yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat faktor-faktor pendorong Realisasi investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Peningkatan Infrastruktur seperti Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas industri yang terus dikembangkan mendorong investasi baru.
2. Diversifikasi Sektor Investasi dimana Sektor non-ekstraktif seperti pariwisata, industri manufaktur, dan jasa mulai berkembang sebagai alternatif dari ketergantungan pada sektor pertambangan.
3. Kondisi Ekonomi Makro yang Stabil membuat Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah yang potensial.
4. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Pemerintah daerah aktif dalam menarik investor dengan berbagai program investasi strategis.

13. Analisis Kinerja Sasaran 13: “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat dan Ketersediaan Air Bersih” dengan indikator Cakupan Layanan Air Bersih dan Persentase Rumah Layak Huni mencapai 97,77% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:





Tabel 72. Realisasi Indikator Sasaran 13 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
Rata-rata Capaian					97,77

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

1. Cakupan Layanan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari sungai Mahakam yang didalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air leding, pompa mata air terlindung dan sumur terlindung.

Indikator Kinerja Utama Cakupan Layanan Air Bersih adalah Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih / Jumlah rumah tangga dikali 100. Sumber data berasal dari Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024, Jumlah rumah tangga (sasaran) merupakan hasil konversi dari jumlah penduduk (jiwa) dengan asumsi satu rumah tangga = 4 jiwa, Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih diperoleh dari perhitungan jumlah Layanan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (tandon).

Berikut disajikan tabel data Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum/ SPAM berdasarkan kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024:

Tabel 73. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum/Spam								Ket	
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan					Jumlah
		Unit Air Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan	Sumur Dangkal	Sumur Pompa	Bak Penampungan Air Hujan	Terminal Air		
1	Anggana				5.881	614		157		6.652	





No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum/Spam									Ket
		Jaringan Perpipaan				Bukan Jaringan Perpipaan				Jumlah	
		Unit Air Baku	Unit Produksi	Unit Distribusi	Unit Pelayanan	Sumur Dangkal	Sumur Pompa	Bak Penampungan Air Hujan	Terminal Air		
2	Kembang Janggut				5.426	116		100		5.642	
3	Kenohan				2.173	422				2.595	
4	Kota Bnagun				5.062			547		5.609	
5	Loa Janan				15.582	456	150	529		16.717	
6	Loa Kulu				8.989	1.108		211		10.308	
7	Marangkayu				3.585	848				4.433	
8	Mauara Badak				6.394	3.715		390		10.499	
9	Muara Jawa				7.868	581				8.449	
10	Muara Kaman				6.657	560	1.271	1.264		9.752	
11	Muara Muntai				3.948			1.370		5.318	
12	Muara Wis				2.072			333		2.405	
13	Samboja				5.947	420		100		6.467	
14	Sanga-sanga				3.485	118				3.603	
15	Sebulu				5.221	411		100		5.732	
16	Tabang				1.677	131				1.808	
17	Tenggarong				28.152			163		28.315	
18	Tenggarong Seberang				14.677	149		422		15.248	
19	Kota Bangun Darat				1.923	164		1.282		3.369	
20	Samboja Barat				3.776	227				4.003	
Jumlah					138.495	10.040	1.421	6.968	-	156.924	

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai kartanegara Tahun 2024

Cakupan Layanan Air Bersih

$$= \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih} \times 100\%}{\text{Jumlah rumah tangga}}$$

$$= \frac{156.924}{195,660} \times 100\%$$

$$= \underline{\underline{80,20\%}}$$

Capaian kinerja Indikator Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2024, mengalami penurunan, yaitu Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih menurun sebesar 4.987, jika dibandingkan Tahun 2023, dari total rumah tangga yang mendapat akses air bersih Tahun 2023 sebesar 161.911 menjadi 156.924 di Tahun 2024.





*Pembangunan Boster Loa Ipuh Darat dan Jembatan Pipa JDU menuju Boster
Kecamatan Tenggara*

Nilai capaian Indikator Cakupan Layanan Air Bersih pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 82,18% dari target sebesar 90,74% dengan Capaian Kinerja sebesar 90,57%. Sedangkan pada Tahun 2024, realisasi kinerja sebesar 80,20% dari target yang ditetapkan berdasarkan Renstra periode 2021-2026 sebesar 92,16% dengan Capaian Kinerja sebesar 87,02 %. Dari data yang tersebut diatas terlihat adanya penurunan Capaian Kinerja dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 3,55%.



Faktor Penghambat Pelaksanaan Program.

1. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air bersih, belum meratanya pelayanan penyediaan air bersih terutama di perdesaan dan sumber air bersih yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga.
2. Data penduduk mengikuti tahun berjalan dan jumlah jiwa sebagai pembagi rata-rata nya menjadi 4 orang dalam 1 Kepala Keluarga dan capaian untuk Bukan Jaringan Perpipaan di dasarkan pada data BNBA.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program





1. Untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut menggunakan sumber dana dari APBD murni maupun perubahan.
2. Pada tahun 2024, dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah Program Air Bersih Desa, program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih yang menunjang keberhasilan Indikator yaitu Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Kegiatan yang dilaksanakan seperti yang terdapat di dalam matriks berikut:

Tabel 74. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait penyediaan air bersih Tahun 2024

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP.)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	20.430.000.000
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	550.000.000
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	3.291.615.000
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	40.050.000.000
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	28.319.079.842
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	149.350.980.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024





WTP 50 Ltr/Dtk SPM Sei Merdeka beserta prasarananya

2. Persentase Rumah Layak Huni

Indikator Kinerja Utama **Persentase Rumah Layak Huni** adalah Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Seluruh Rumah di wilayah pemda x 100%

Cakupan Rumah Layak Huni

$$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda}} \times 100\%$$

$$= \frac{182.908}{185.433} \times 100\% = \underline{\underline{98,64 \%}}$$

Keterangan:

1. Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda sumber data diperoleh dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tahun 2019.
2. Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layak huni. Di tahun 2024, jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan data RBPK sebesar 2525 unit. Sebelumnya di tahun 2023 perhitungan RTLH berdasarkan data DTKS yaitu sebanyak 12.063 unit
3. Sasaran *Yok Baiki* Rumah pada data RBPK sebanyak 5.371 unit. Setelah di verifikasi tidak semua masuk dalam kriteria RTLH. Yang masuk (layak dibantu) hanya sebesar 1228 dan yang belum di verifikasi





sementara oleh bidang terkait dimasukkan ke dalam kriteria RTLH, maka diperoleh sejumlah 2525 tersebut.

- ❖ Jumlah rumah layak huni diperoleh dari perhitungan jumlah seluruh rumah dikurangi jumlah rumah tidak layak huni.

$$185.433 - 2525 = 182.908 \text{ Unit Rumah Layak Huni.}$$

$$= \frac{182.908}{185.433} \times 100$$

$$= 98,64 \%$$

Berdasarkan data tersebut, maka nilai capaian Indikator Cakupan Rumah Layak Huni Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,15% dari 93,49% di tahun 2023 menjadi 98,64% di Tahun 2024 atau persentase capaian sebesar 108,53% dari yang di targetkan sebesar 90,89%.

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya (Sumber : UU NOMOR 01 TAHUN 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)).

Rumah yang layak huni dan sehat menjadi kebutuhan setiap masyarakat. Untuk memiliki rumah yang layak huni, setidaknya harus memenuhi lima syarat penting, yaitu :

1. Ketahanan dan keselamatan bangunan;
2. Kecukupan luas ruang penghuni;
3. Adanya luas luasan pencahayaan dan penghawaan;
4. Akses sanitasi layak;
5. Akses air minum layak.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak





merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program.

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R-RTLH, meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, menetapkan 3 Zona yang terdiri dari Zona Tengah, Zona Hulu dan Zona Pesisir untuk memperoleh bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) melalui alokasi dana APBD. Dari 1000 Unit rumah yang rencananya akan direhabilitasi sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan terealisasi sebanyak 853 Unit di Tahun 2023 dan 1146 unit di Tahun 2024.

Data realisasi tersebut didapatkan dari akumulasi hasil Rekapitulasi Perhitungan Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni,





Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan RTLH Provinsi dll dengan rincian sbb :

Tabel 75. Rekapitulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2023 (unit)	Tahun 2024 (unit)
1.	Perbaikan rumah tidak layak huni	574	617
2.	BSPS (Pusat)	265	500
3.	CSR (BSSR)	3	0
4	Rehabilitasi RTLH dilokasi Kumuh	11	29
Total Jumlah Rumah (R-RTLH)		853	1.146

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan Indikator ini dilaksanakan dengan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota pada sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Tabel 76. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran terkait rumah layak huni Tahun 2023-2024

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)
1	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	263.615.440,00	584.000.000,00
2	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	59.952.066.000,00	35.700.000.000,00

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Program adopsi dari BSPS. Pengadaan rumah secara swadaya ini telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, permasalahan yang muncul dari pembangunan

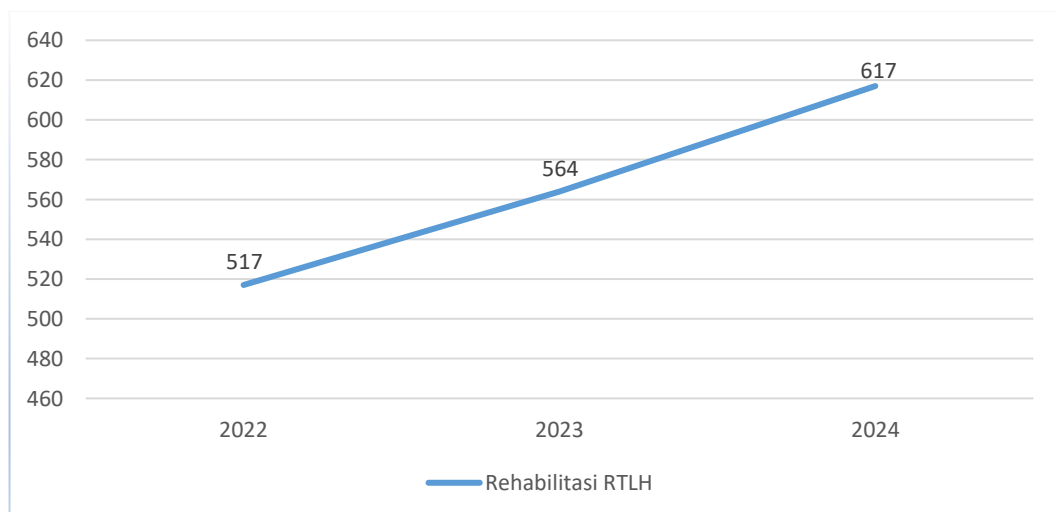




rumah secara swadaya oleh masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas adalah minimnya perencanaan dan pengetahuan teknis mengenai rumah layak huni (RLH). Hal ini menyebabkan kondisi rumah yang dibangun dalam jangka panjang menjadi tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH. Karena itulah, pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni secara swadaya dengan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Bertambahnya jumlah penghunian rumah yang layak huni melalui skema R RTLH , meningkatnya sistem pelaksanaan program Rumah Swadaya, serta terlaksananya dukungan teknis untuk pengembangan program Rumah Swadaya.

Grafik 32. Rehabilitasi RTLH Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2024

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (R-RTLH) Adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Di tahun 2024 ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara serta dalam rangka melaksanakan Misi ke 4 dari RPJMD yaitu Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta mendukung program dedikasi KUKAR IDAMAN yang salah satunya adalah melalui peningkatan kualitas permukiman masyarakat, di





Tahun 2024 sebanyak 617 unit rumah yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang tersebar di 18 Kecamatan. Jumlah yang mendapat bantuan rehabilitasi di Tahun 2024 lebih banyak dibandingkan Tahun 2023 dengan total sebanyak 562 Unit rumah yang direhabilitasi, atau meningkat 55-unit rumah.



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
di Desa Loa Raya Kec. Tenggarong



Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
di Desa Wonotirto Kecamatan Samboja

Tabel 77. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2024

No	Zona	Jumlah Unit Rumah Per Zona	Kecamatan	Jumlah Unit Rumah Per Kecamatan	Keterangan
1.	Tengah	229	Tenggarong	79	7 Kelurahan
			Tenggarong Seberang	52	10 Desa
			Loa Janan	60	4 Desa
			Loa Kulu	33	7 Desa
			Muara Kaman	5	1 Desa
2.	Pesisir	208	Samboja Barat	39	4 Kelurahan
			Samboja	24	3 Kelurahan
			Anggana	13	2 Desa
			Muara Jawa	40	3 Kelurahan
			Muara Badak	57	4 Desa
			Marangkayu	35	1 Desa
3.	Hulu	180	Kota Bangun	19	4 Desa
			Kota Bangun Darat	71	6 Desa
			Kembang Janggut	13	2 Desa
			Kenohan	22	2 Desa
			Muara Muntai	38	7 Desa
			Muara Wis	13	1 Desa
			Tabang	4	1 Desa
TOTAL		617			

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024





Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 78. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 13 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,54	80,20	93,58	95
17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	91,16	91,44

Sumber data: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 79. Program dan Anggaran Sasaran 13 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	324,022,064,168.00	325,980,259,879.00	261,518,997,749.00	80.23%
2	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	717,504,617,235.00	760,212,920,235.00	655,188,128,672.00	86.18%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	172,399,059,842.00	241,991,674,842.00	214,559,318,510.00	88.66%
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	50,574,170,000.00	52,929,406,000.00	49,757,025,631.00	94.01%
5	Program Pengembangan Perumahan	9,671,384,560.00	9,766,497,560.00	6,636,506,838.00	67.95%
6	Program Kawasan Permukiman	15,810,000,000.00	15,685,660,000.00	12,496,800,620.00	79.67%
7	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	35,700,000,000.00	35,700,000,000.00	27,976,954,410.00	78.37%
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	180,913,973,000.00	223,285,524,651.00	198,794,523,731.00	89.03%
Total		1,506,595,268,805.00	1,665,551,943,167.00	1,426,928,256,161.00	85.67%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.1,426,928,256,161.00 dari anggaran sebesar Rp.1,665,551,943,167.00 atau 85,67%. Realisasi keuangan sebesar 87,39% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 97,77%, maka terjadi ketidak efisiensi





penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walau penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

14. Analisis Kinerja Sasaran 14: “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah” dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah mencapai 88,24% dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 80. Realisasi Indikator Sasaran 14 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Indeks Aksesibilitas Wilayah diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{\text{Jalan Mantap} + \text{Aksesibilitas}}{2}$$

$$\text{Indeks Aksesibilitas Wilayah} = \frac{63,2 + 88,89}{2} = 76,045$$

Keterangan:

$$\text{Aksesibilitas} = \frac{\text{jumlah Kecamatan terhubung}}{\text{total Kecamatan}} \times 100 \%$$

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dari 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih ada 2 kecamatan yang belum terhubung jalur darat dengan ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Muara Wis, dan ada beberapa desanya terletak di pulau dan kawasan lindung daerah gambut sehingga tidak dapat terkoneksi melalui jalur darat.

Dari 237 jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada 11 desa yang belum terhubung jalur darat, dari 11 desa tersebut ada 7 desa





yang tidak bisa terhubung jalur darat karena kondisi wilayah. Data sebaran desa tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 81. Data Desa Terhubung Dan Tidak Terhubung Jalur Darat

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa yang Belum Terhubung Jalur Darat	Desa yang Tidak Bisa Terhubung Jalur Darat
1	Muara Muntai	13	1 Desa (Desa Jantur)	1 Desa (Desa Jantur)
2	Loa Kulu	15		
3	Loa Janan	8		
4	Anggana	8	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)	3 Desa (Desa Sepatin, Desa Muara Pantuan, Desa Tani Baru)
5	Muara Badak	13		
6	Tenggarong	14		
7	Sebulu	14		
8	Kota Bangun	11		
9	Kenohan	9		
10	Kembang Janggut	11		
11	Muara Kaman	20	5 Desa (Desa Kupang Baru, Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering, Desa Tunjungan)	3 Desa (Desa Liang Buaya, Desa Muara Siran, Desa Bukit Jering)
12	Tabang	19		
13	Samboja	13		
14	Muara Jawa	8		
15	Sanga-Sanga	5		
16	Tenggarong Seberang	18		
17	Marangkayu	11		
18	Muara Wis	7	2 Desa (Desa Enggelam, Desa Muara Enggelam)	
19	Kota Bangun Darat	10		
20	Samboja Barat	10		
TOTAL		237	11 Desa	7 Desa

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

Di Kecamatan Anggana terdapat 3 (tiga) desa yang terletak di pulau yaitu Desa Muara Pantuan, Desa Sepatin, dan Desa Tani Baru. Ketiga desa tersebut sulit dihubungkan melalui jalur darat karena lokasinya yang berada pulau dan Muara Selat Makassar. Selain itu, 3 (tiga) desa di Kecamatan Muara Kaman yaitu Desa Liang Buaya, Desa Bukit Jering, dan Desa Muara Siran juga sulit terhubung melalui jalur darat. Desa Liang Buaya tidak dapat terkoneksi karena desa tersebut masuk dalam kawasan lindung daerah gambur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 590/526/001/A.Ptn/2013 tentang Penunjukan Konservasi Sebaran lahan

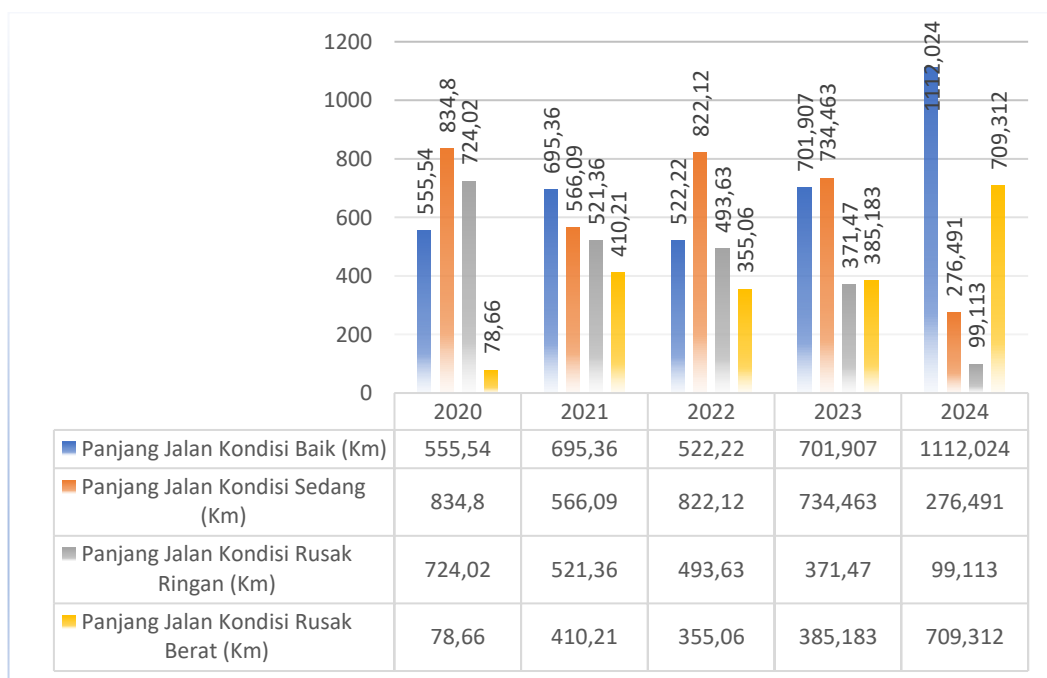




Gambut Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan Desa Bukit Jering dan Desa Muara Siran berada di lokasi yang terpisah dari Kecamatan Muara Kaman oleh Sungai Mahakam dan Sungai Kedang Kepala dan di Kecamatan Muara Muntai ada Desa Jantur.

Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah dengan indikator Indeks Aksesibilitas Wilayah Tahun 2024 sebesar 76,045%, capaian ini lebih rendah 1,145% dari capaian kinerja di Tahun 2023 yaitu sebesar 77,19%, penurunan capaian kinerja ini disebabkan adanya perubahan panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 321 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan, panjang ruas jalan 2.193,02 KM, namun berdasarkan Surat Keputusan terbaru Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ruas Jalan, panjang ruas jalan menjadi 2.196,94 KM, atau bertambah 3,92 KM. Berikut disajikan grafik perbandingan kondisi jalan dan perbandingan kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024:

Grafik 33. Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

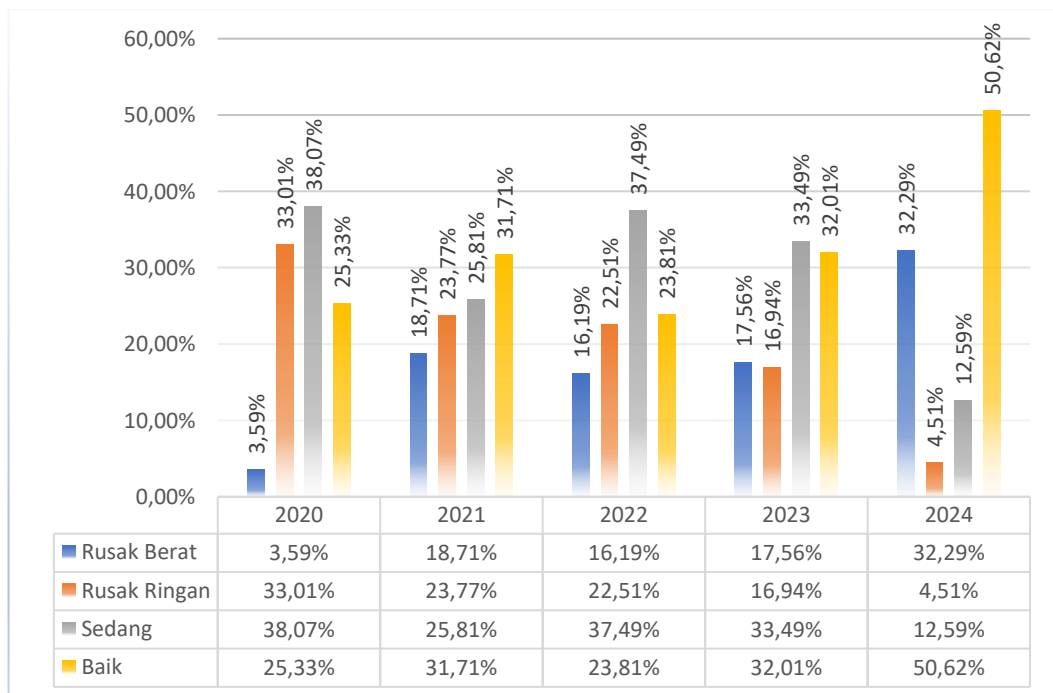




Jika melihat grafik Perbandingan Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024, peningkatan signifikan terdapat pada panjang jalan kondisi baik di Tahun 2024, yaitu sepanjang 1.112,024 KM atau 50,62% dari keseluruhan panjang ruas jalan. Peningkatan juga terjadi pada panjang jalan kondisi rusak berat, dimana di tahun 2023 sepanjang 385,183 KM menjadi 709,312 KM, meningkat

sepanjang 324,129 KM, atau sebesar 32,29% dari keseluruhan panjang ruas jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

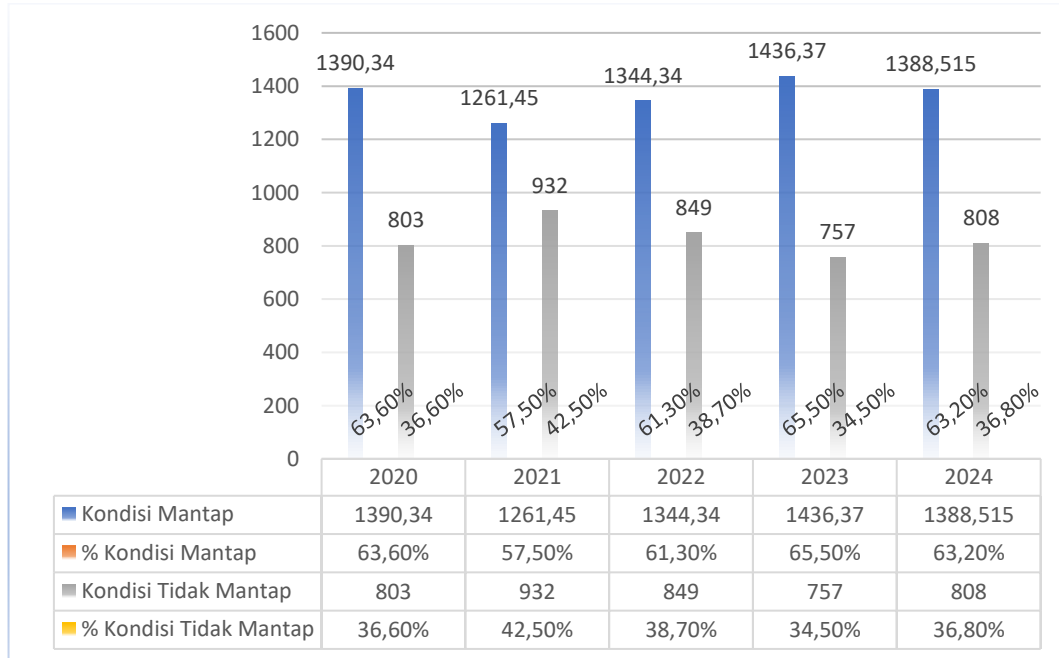
Grafik 34. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Grafik 35. Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2024



Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 82. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 14 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	87,18	88,18

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 83. Program dan Anggaran Sasaran 14 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	81,169,268,282.00	100,360,572,514.00	87,359,170,864.00	87.05%
2	Program Penataan Bangunan Gedung	59,322,554,282.00	53,737,850,782.00	44,818,967,081.00	83.40%
3	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,108,968,725.00	69.31%
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	500,000,000.00	500,000,000.00	457,048,950.00	91.41%
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	4,850,000,000.00	25,328,365,000.00	20,608,195,852.00	81.36%





No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
6	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	1,200,000,000.00	950,000,000.00	514,242,774.00	54.13%
7	Program Penetapan Tanah Ulayat	250,000,000.00	125,000,000.00	30,786,000.00	24.63%
8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	824,799,664.00	824,799,664.00	726,799,154.00	88.12%
9	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	391,989,000.00	491,989,000.00	382,476,272.00	77.74%
10	Program Penatagunaan Tanah	1,250,000,000.00	1,150,000,000.00	1,075,967,600.00	93.56%
Total		151,358,611,228.00	185,068,576,960.00	157,082,623,272.00	84.88%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.157,082,623,272.00 dari anggaran sebesar Rp.185,068,576,960.00 atau 84,88%. Realisasi keuangan sebesar 84,88%, dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,24%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan.
2. Kondisi geografis juga mempengaruhi perubahan topografi.
3. Beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut (ODOL = *over dimension over loding*) seperti kendaraan truck yang bermuatan lebih dari kapasitas.
4. Umur konstruksi yang merupakan jangka waktu di mana jalan dapat berfungsi secara optimal sebelum mengalami penurunan kualitas yang signifikan atau memerlukan rehabilitasi besar. Umur ini biasanya dihitung sejak jalan dibangun hingga kondisinya tidak lagi memenuhi standar layanan yang ditetapkan.





15. Analisis Kinerja Sasaran 15: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 99,70% dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 84. Realisasi Indikator Sasaran 15 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

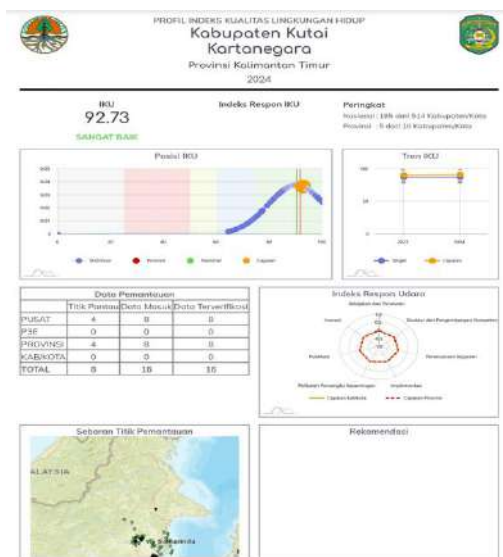
Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur kondisi dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah. IKLH mencerminkan tingkat kualitas lingkungan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Semakin tinggi nilai IKLH, semakin baik kondisi lingkungan, yang menunjukkan bahwa ekosistem di wilayah tersebut berada dalam keadaan sehat dan mampu mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. **Komponen Utama IKLH:**

1. Kualitas Udara

Kualitas udara diukur berdasarkan konsentrasi polutan seperti PM2.5, SO₂, NO₂, dan CO yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia serta ekosistem. Sumber utama pencemaran udara meliputi aktivitas industri, transportasi, dan kebakaran hutan. Berdasarkan hasil pengukuran di 8 Titik Pantau di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Indeks

Indeks Respon IKU Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024





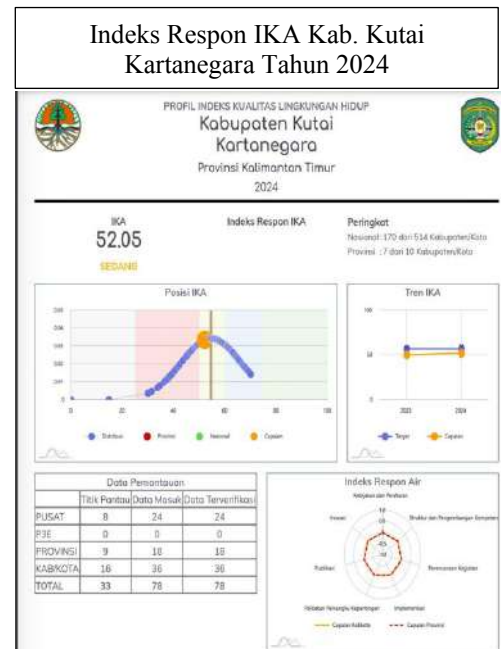
Kualitas Udara menunjukkan nilai 92,73 (Sangat Baik), hal ini menunjukkan peningkatan 1,2 dari keadaan IKU Tahun 2023 senilai 91,53 (Sangat Baik).

Di tingkat nasional IKU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 menempati urutan ke 185 dari 514 kabupaten/kota, atau peringkat 5 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kualitas Air

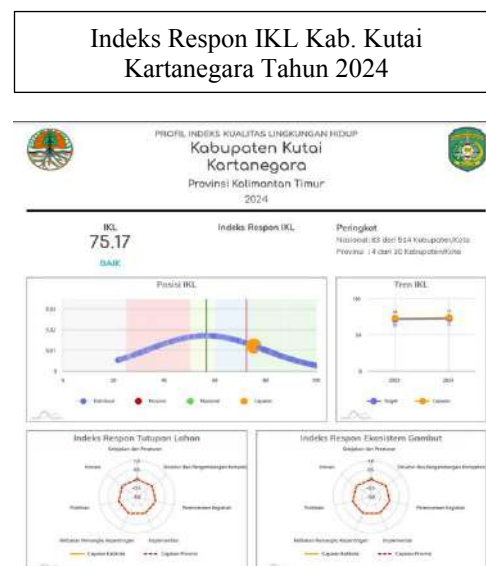
Parameter kualitas air mencakup tingkat pencemaran sungai, danau, serta air tanah yang digunakan untuk kebutuhan domestik, industri, dan pertanian. Pencemaran air sering disebabkan oleh limbah domestik, industri, serta aktivitas pertanian yang tidak ramah lingkungan. Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kutai Kartanegara di Tahun 2024 dilaksanakan di 33 Titik Pantau dengan

78 bahan uji sampel, diperoleh hasil 52,05 (Sedang), capaian ini meningkat 1,52 dari keadaan Tahun 2023, senilai 50,53. Kabupaten Kutai Kartanegara menempati peringkat 170 dari 514 kabupaten/kota, atau peringkat 7 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.



3. Tutupan Lahan

Tutupan lahan mencerminkan luas area hutan, vegetasi hijau, dan lahan yang masih alami. Degradasi tutupan lahan akibat deforestasi, urbanisasi, dan konversi lahan untuk pertanian atau industri dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kabupaten Kutai Kartanegara menempati peringkat 83





dari 514 kabupaten/kota, atau peringkat 4 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil pengukuran 3 komponen utama IKLH diatas maka diperoleh Indeks Kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

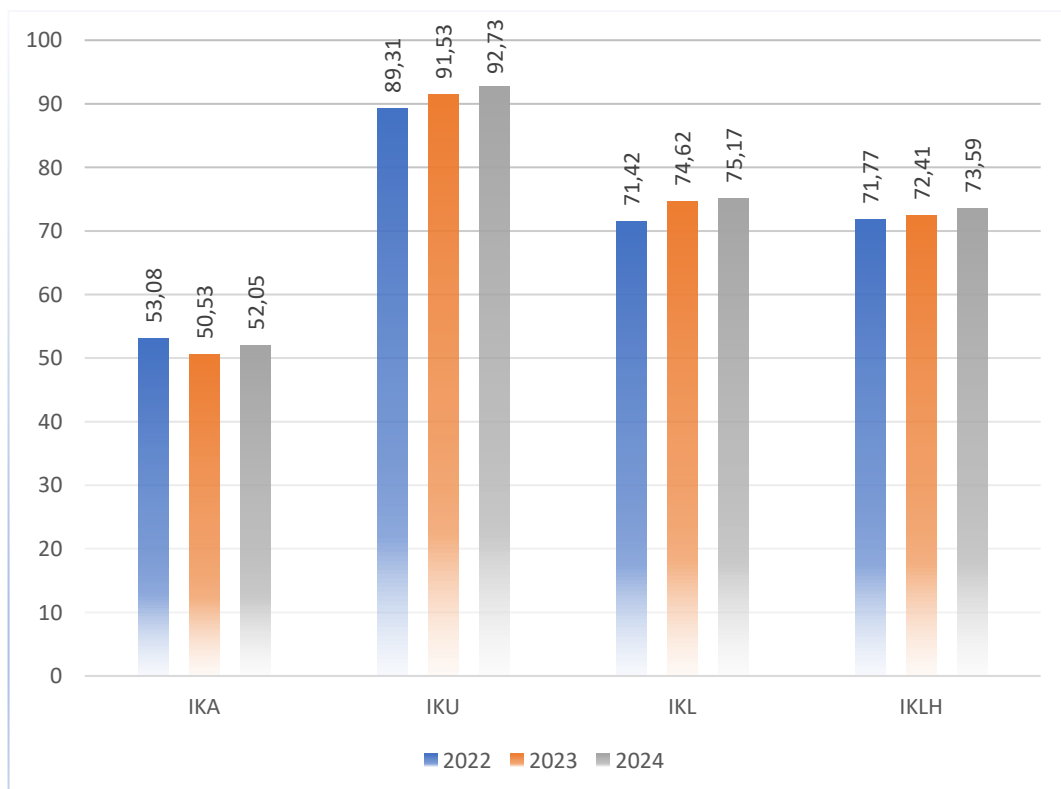
$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

$$IKLH \frac{Kab}{Kota} = (0,376 \times 52,05) + (0,405 \times 92,73) + (0,219 \times 75,17)$$

IKLH Kab. Kutai Kartanegara = 73,59 = Kategori IKLH "BAIK"

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 3 tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dari IKLH, berikut grafik IKA, IKU, IKL dan IKLH Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024:

Grafik 36. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2022 – 2024



Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024





Sungai Separi (Kec. Tenggara
Seberang)

Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep *Environmental Quality Index* (EQI) dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam merancang kebijakan lingkungan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan memahami tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti:

- Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penerapan teknologi ramah lingkungan.
- Pengelolaan limbah dan pencemaran air yang lebih efektif.
- Penghijauan kembali lahan yang mengalami degradasi.
- Penguatan regulasi lingkungan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.



Sungai Anggana (Kec. Anggana)

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:





Tabel 85. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 15 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	74,15	74,51

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:

Tabel 86. Program dan Anggaran Sasaran 15 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	960,000,000.00	909,609,060.00	805,346,753.00	88.54%
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3,354,920,000.00	3,767,991,447.00	3,263,366,778.00	86.61%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2,375,000,000.00	2,387,501,719.00	1,630,927,842.00	68.31%
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	375,000,000.00	375,000,000.00	340,730,367.00	90.86%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	702,000,000.00	491,770,940.00	442,788,873.00	90.04%
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	75,000,000.00	75,000,000.00	20,532,000.00	27.38%
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	240,000,000.00	342,000,000.00	308,120,097.00	90.09%
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	650,000,000.00	650,000,000.00	439,399,380.00	67.60%
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	288,000,000.00	288,000,000.00	202,141,600.00	70.19%
10	Program Pengelolaan Persampahan	85,435,981,808.00	87,391,180,586.00	81,963,366,542.00	93.79%
11	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	150,000,000.00	347,000,000.00	50,156,203.00	14.45%
Total		94,605,901,808.00	97,025,053,752.00	89,466,876,435.00	92.21%





Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.89,466,876,435.00 dari anggaran sebesar Rp. 97,025,053,752.00 atau 92,21%. Realisasi keuangan sebesar 92,21% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,70%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Jika dilihat dari realisasi IKLH tahun 2024 sebesar 73,59, capaian ini lebih tinggi 1,18 dari capaian IKLH di Tahun 2023 yaitu 72,41. Nilai capaian hanya sekitar 99,70 % dari target IKLH 73,81 Namun tetap masuk dalam Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup “BAIK”. Adapun beberapa hal yang menyebabkan realisasi IKLH tidak dapat tercapai sesuai dengan yang ditarget dikarenakan beberapa hal:

1. Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air, IKA : Target = 57,42 Realisasi = 52,05. Pelaksanaan Pemantauan air permukaan pada 78 titik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kutai Kartanegara sebanyak 36 titik, Pusat sebanyak 24 titik, dan Provinsi sebanyak 18 titik (penentuan titik pantau berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : P-0207/DLHK/Bid 3.1/663.1/02/2024 Tentang Penetapan Titik Pantau Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2024.
2. Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 dengan jumlah 8 parameter uji (pH,TSS,DO,BOD,COD,NO3-N,Fecal *Coli*,*Total Phospat*) tetapi pada tahun 2022 menggunakan Metode perhitungan PerMen LHK nomor 27 Tahun 2021 dengan Aplikasi IKLH.
3. Dari 78 titik pantau perhitungan indeks pencemaran air, sebanyak 58 tercemar ringan dan 6 titik tercemar sedang.





Adapun beberapa hal yang mempengaruhi status mutu air di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

1. Pola Hidup Masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan *Parameter Fecal Coliform* masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena kondisi sungai kita yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik.
2. Belum maksimalnya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik baik individu maupun Terpadu di Wilayah Perkotaan dan perdesaan;
3. Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil;
4. Belum maksimalnya pelaksanaan restorasi sungai.

Berikut beberapa sungai yang nilai parameter *Fecal Coli* di atas baku mutu:

Tabel 87. Sungai yang nilai parameter *Fecal Coli* di atas Baku Mutu

Sungai	Baku Mutu Sungai Kelas 2	Hasil Sample (fecal coliform mg/l)
Sungai Loa Haur Loa Duri	1000	35000
Sungai Perian	1000	1300
Sungai Jembayan Desa Jonggon	1000	7900
Desa Muara Aloh	1000	3400
Sungai Anggana Pelabuhan Kutai Lama	1000	7000
Sungai Saka Kanan Tenggarong	1000	22000
Kedang Rantau Pelabuhan Situs Kerajaan Mulawarman	1000	14000
Sungai Sentekan Desa Long Beleh Haloq	1000	1700

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Faktor Pendukung:

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
2. Meningkatnya atensi global tentang isu lingkungan dan dampak perubahan iklim
3. Adanya peluang pendanaan pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari luar APBD
4. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, proklamasi dan Keanekaragaman Hayati





5. Adanya kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup

Faktor Penghambat:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam masih belum berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan Sumber Daya Alam menipis.
2. Pencemaran air, udara dan tanah belum tertangani secara tepat, karena pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan.
3. Perubahan penggunaan lahan yang cepat diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat dan diikuti oleh peningkatan aktivitas yang dapat menurunkan daya dukung lahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.
4. Adanya Eksploitasi Sumber Daya Alam secara besar-besaran dapat mengakibatkan penurunan dan kerusakan lingkungan.

16. Analisis Kinerja Sasaran 16: “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah” dengan indikator Indeks Risiko Bencana mencapai 86,08% dan termasuk predikat “Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 88. Realisasi Indikator Sasaran 16 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran ini diuraikan sebagai berikut:

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasar-kan rumus berikut:





$Risk = Hazard \times Vulnerability \times Capacity$

Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitudo) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api,



dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sampai saat ini nilai Indeks Risiko Bencana hasil perhitungan dari IRBI oleh Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB.

Berdasarkan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B-06.23/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025
Tanggal 08 Januari 2025,



Nilai Indeks Risiko Bencana

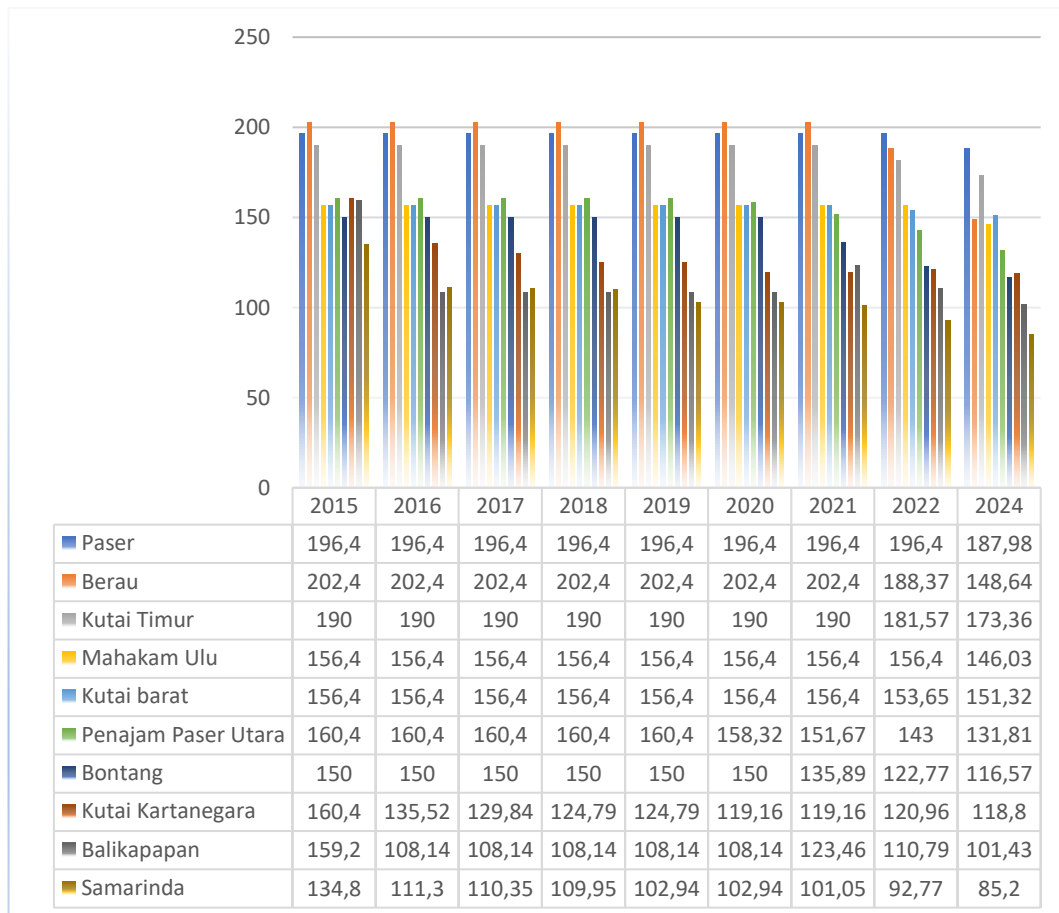
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah 136,11 dan IRB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah 118,80 masuk ke tingkat RESIKO SEDANG, capaian ini menurun 4,5 poin, jika dibandingkan capaian di





Tahun 2023 dengan nilai 114,30. Berikut disajikan data grafik perbandingan IRB kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2015-2024.

Grafik 37. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2024



Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Realisasi indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 89. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 16 terhadap target RPJMD

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	102,14	100

Sumber data: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2024

Sasaran tersebut dicapai melalui Program-program sebagai berikut:





Tabel 90. Program dan Anggaran Sasaran 16 Tahun 2024

No	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1	Program Penanggulangan Bencana	11,853,000,000.00	7,661,936,560.00	5,582,152,472.00	72.86%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	25,500,288,971.00	23,838,144,771.00	22,757,238,414.00	95.47%
3	Program Penanganan Bencana	1,050,000,000.00	1,360,000,000.00	1,139,523,722.00	83.79%
Total		38,403,288,971.00	32,860,081,331.00	29,478,914,608.00	89.71%

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.29,478,914,608.00 dari anggaran sebesar Rp.32,860,081,331.00 atau 89,71%. Realisasi keuangan sebesar 89,71% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 86,08%, maka terjadi ketidak efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, dan penggunaan sumber daya lebih tinggi dari capaian kinerja.

Faktor-faktor yang pendukung mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana, melalui pelatihan dan pengembangan program.
2. Memperkuat sistem peringatan dini dan infrastruktur mitigasi, dengan membangun infrastruktur yang memadai dan meningkatkan akses informasi.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program mitigasi bencana, melalui edukasi, kampanye, dan pembentukan kelompok relawan.
4. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, melalui forum komunikasi dan kolaborasi antar *stakeholder*.
5. Memaksimalkan alokasi anggaran dan sumber daya, dengan memprioritaskan program mitigasi yang efektif dan efisien.





Sedangkan faktor-faktor yang penghambat mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Sistem peringatan dini di beberapa wilayah masih belum optimal, sehingga informasi tentang potensi bencana tidak sampai ke masyarakat secara tepat waktu.
2. Infrastruktur mitigasi seperti shelter dan jalur evakuasi di beberapa daerah masih terbatas dan belum memadai untuk menampung jumlah penduduk yang terdampak bencana.
3. Kurangnya koordinasi antara instansi yang mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan bencana.
4. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kemampuan daerah untuk melakukan upaya penanggulangan bencana serta Kurangnya tenaga terlatih di bidang penanggulangan bencana (Relawan), khususnya di tingkat desa dan kelurahan, menyebabkan kesulitan dalam implementasi program mitigasi.
5. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam program mitigasi, menyebabkan kurangnya sinergi dalam upaya penanggulangan bencana.

Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 91. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2023	2024	
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	67,86	65,92	Menurun 1,94
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,66	8,96	Meningkat 0,298
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,41	8,74	Meningkat 0,33
4	Meningkatnya Kualitas Layanan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,679	0,71	Meningkat 0,031





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
					2023	2024	
	Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	53,23	57,42	Meningkat 4,19
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,812	0,81	Menurun 0,002
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	81,08	79,600	Menurun 1,48
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,284	0,307	Menurun 0,023
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,776	0,7969	Meningkat 0,0209
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,05	4,11	Menurun 0,06
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	270,72	240,87	Menurun 29,85
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	2,91	2,94	Menurun 0,03
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	6,60	7,85	Meningkat 1,25
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,80	7,7	Meningkat 0,9
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	51,38	10,85	Menurun 40,53
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	82,18	80,20	Menurun 1,98
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	93,49	98,64	Meningkat 5,15
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	77,19	76,045	Menurun 1,145
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,41	73,59	Meningkat 1,18
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	114,3	118,80	Menurun 4,5

Dari data pada tabel diatas secara garis besar capaian kinerja 2024 menunjukkan angka penurunan capaian kinerja jika dibandingkan dengan



tahun 2023, terdapat 11 (sebelas) indikator sasaran yang menunjukkan angka penurunan, dan ada 9 (sembilan) indikator yang capaian kinerjanya meningkat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 92. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	90,30	5.303.578.355.938,00	4.737.575.417.024,60	89,33%	Tidak Efisien
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	132,71	63.171.353.798,00	47.216.942.977,00	74,74%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	97,65	295.041.297.363,00	281.389.736.669,00	95,37%	Tidak Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Layanan	107,01	1.679.183.703.881,00	1.061.077.595.543,00	63,19%	Efisien





No	Sasaran Strategis	Rata-Rata Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Keterangan
	Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan					
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	99,14	1.041.301.800.757,00	931.993.571.263,42	89,50%	Tidak Efisien
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	100,63	13.525.452.884,00	12.172.949.722,00	90,00%	Efisien
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	98,66	147.192.797.373,00	142.255.534.482,17	96,65%	Tidak Efisien
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	114,24	51.084.620.700,00	43.479.045.215,00	85,11%	Efisien
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	44,55	801.212.395.922,00	722.701.324.939,00	90,20%	Tidak Efisien
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	229,53	111.361.029.798,00	85.200.163.003,00	76,51%	Efisien
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	108,60	7.085.471.000,00	6.084.644.151,00	85,87%	Efisien
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	620,00	6.898.489.636,00	4.731.212.367,00	68,58%	Efisien
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	97,77	1.665.551.943.167,00	1.426.928.256.161,00	85,67%	Tidak Efisien
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	88,24	185.068.576.960,00	157.082.623.272,00	84,88%	Tidak Efisien
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	99,70	97.025.053.752,00	89.466.876.435,00	92,21%	Tidak Efisien
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	86,08	32.860.081.331,00	29.478.914.608,00	89,71%	Tidak Efisien

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 16 sasaran menunjukkan 7 (tujuh) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 9 (sembilan) sasaran tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai





100%. Dari 9 (sembilan) sasaran yang tidak efisien, ada sebanyak 7 (tujuh) sasaran yang tidak mencapai target namun penyerapan anggaran lebih rendah dari capaian kinerja, dan terdapat 2 (dua) sasaran yang penyerapan anggaran lebih besar dari capaian kinerja.

b) Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebanyak 29.489 paket dengan Total Pagu Anggaran Rp.8.764.035.792.978 dengan rincian 1.801 paket dengan pagu Rp.4.299.305.188.015, dengan metode pengadaan melalui Tender/ Seleksi sebanyak 16.741 paket melalui metode pengadaan Penunjukan Langsung dengan pagu anggaran Rp.1.086.299.279.468, sedangkan pengadaan melalui Kontes sebanyak 1 paket dengan pagu anggaran Rp. 1.344.700.714, dan sebanyak 1.136 paket termasuk dalam paket pekerjaan yang dikecualikan, dengan pagu anggaran Rp.147.553.630.776, dan pengadaan melalui *e-Purchasing* sebanyak 9.810 paket pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.229.532.994.005. Dari total pagu anggaran dalam proses pengadaan sebesar Rp.8.764.035.792.978, dan total setelah ditetapkan HPS turun menjadi sebesar Rp.7.875.210.062.540,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp.362.917.321.461 atau sebesar 4,41% dari total HPS. Sedangkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai Rp. 3.927.979.48.630, dengan rincian Rp.3.116.795.773.376 dari Paket Tender dan Rp. 811.183.375.254 dari paket pengadaan Non Tender.

Tabel 93. Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengadaan Barang/Jasa

No.	Kriteria	Pagu	HPS	Realisasi	Selisih	Efisiensi	PDN/ TKDN
1.	Tender	4.225.628.098.539	4.163.889.703.700	3.116.795.773.376	61.738.394.839	1%	3.116.795.773.376
2.	Non tender	958.405.155.285	931.589.279.128	811.183.375.254	26.815.876.157	3%	811.183.375.254
3.	Dikecualikan	8.485.541.100	2.844.142.546	2.844.142.546	5.641.398.554	66%	
4.	<i>E-Purchasing</i>	3.045.608.589.078	2.776.886.937.166	2.776.886.937.166	268.721.651.912	9%	

Sumber Data: Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Tahun 2024





Dari keseluruhan penjabaran diatas dapat disimpulkan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang terdiri dari 16 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 94. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	65,92	90,30
Rata-rata Capaian							90,30
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,75	8,96	132,71
Rata-rata Capaian							132,71
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,95	8,74	97,65
Rata-rata Capaian							97,65
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,70	0,71	101,43
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	51,00	57,42	112,59
Rata-rata Capaian							107,01
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,817	0,81	99,14
Rata-rata Capaian							99,14
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,10	79,600	100,63
Rata-rata Capaian							100,63
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,28	0,307	90,36
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,745	0,7969	106,97
Rata-rata Capaian							98,66
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	4,40	4,11	106,59
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	197,62	240,87	121,89
Rata-rata Capaian							114,24
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	6,60	2,94	44,55
Rata-rata Capaian							44,55





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	% CAPAIAN
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	3,42	7,85	229,53
Rata-rata Capaian							229,53
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	7,09	7,7	108,60
Rata-rata Capaian							108,60
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	1,75	10,85	620,00
Rata-rata Capaian							620,00
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	92,16	80,20	87,02
		17	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	90,89	98,64	108,53
Rata-rata Capaian							97,77
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	86,18	76,045	88,24
Rata-rata Capaian							88,24
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,81	73,59	99,70
Rata-rata Capaian							99,70
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	104,28	118,80	86,08
Rata-rata Capaian							86,08

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja ≥ 95 % kategori “sangat berhasil” sebanyak 12 sasaran, atau 75%;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 3 sasaran, atau 18,75%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80 kategori “cukup berhasil” sebanyak 0 sasaran, atau 0%.
- Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 1 sasaran, atau 6,25%.

Jika membandingkan antara capaian Tahun 2024 dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026, dapat dilihat pada tabel diatas, dan Tahun 2024 adalah tahun ke-4 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026, sehingga dapat dilakukan pengukuran terhadap capaian Tujuan Pemerintah Daerah, adapun hasil capaian tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.





Tabel 95. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dibanding dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2024 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	NILAI SAKIP	Nilai	66,35	67,4	67,86	65,92	77	80,01	82,39	-14,09	-19,99	
2	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	8,166	8,38	8,66	8,96	6,8	7	127,97	1,96	23,71	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,5	9,81	8,41	8,74	9	9,05	96,57	-0,31	-3,43	
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	4	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,687	0,679	0,71	0,7	0,71	100,00	0,00	0,00	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
		5	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	n/a	47,42	53,23	57,42	51,5	53	108,34	4,42	8,34	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	6	Indeks Kesehatan	Nilai	0,81	0,81	0,812	0,81	0,82	0,82	98,78	-0,01	-1,22	
6	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,8	79,8	79,600	79,15	79,2	100,51	0,40	0,51	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2024 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
7	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	8	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,269	0,284	0,307	0,27	0,27	86,30	-0,04	-13,70	
		9	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,747	0,776	0,7969	0,77	0,79	100,87	0,01	0,87	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
8	Menurunnya pengangguran di masyarakat	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	Nilai	5,66	4,14	4,05	4,11	4,25	4,1	101,23	-0,01	1,23	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
		11	PDRB Per Kapita	Nilai	241,7	254,5	270,72	240,87	202,16	204,69	117,68	36,18	17,68	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
9	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	12	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Nilai	1,02	1,91	2,91	2,94	7,05	7,5	39,20	-4,56	-60,80	
10	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	3,74	3,74	7,85	4	4,23	185,58	3,62	85,58	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
11	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,96	6,96	7,70	7,48	7,56	101,85	0,14	1,85	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
12	Meningkatnya daya saing investasi daerah	15	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	36,22	90,63	51,38	10,85	30,75	30,9	35,11	-20,05	-64,89	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD





NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	% CAPAIAN 2024 DIBANDING TARGET AKHIR	SELISIH CAPAIAN	SELISIH %	KETERANGAN
13	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	16	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	76,67	82,18	80,20	93,58	95	84,42	-14,80	-15,58	
		17	Presentase Rumah Layak Huni	Persen	92,76	93,39	93,49	98,64	91,16	91,44	107,87	7,20	7,87	Capaian 2024 telah melebihi target akhir RPJMD
14	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	18	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Nilai	n.a	75,65	77,19	76,045	87,18	88,18	86,24	-12,14	-13,76	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,76	71,77	72,41	73,59	74,15	74,51	98,77	-0,92	-1,23	
16	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	20	Indeks Risiko Bencana	Nilai	119,16	120,96	114,3	118,80	102,14	100	81,20	-18,80	-18,80	





Tabel 96. Capaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 RPJMD 2021-2026

NO	MISI / TUJUAN		INDIKATOR KINERJA	Satuan	Capaian			Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024
					2021	2022	2023			
Misi 1: Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani										
1	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,95	62,74	60,12	B (64,00)	71,33	111,45
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya										
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	2	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,06	74,67	75,3	76,53	76,57	100,05
3	Meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	3	Tingkat Kebahagiaan	Nilai	NA	78,83	73,02	73,50	79,60	108,30
		4	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,35	7,96	7,61	7,53	7,28	103,32
Misi 3: Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif										
4	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	5	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	2,94	5,35	7,69	5,81	7,88	135,63
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah										
5	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	6	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,8	35,8	16,183	33,80	16,183	152,12
		7	Persentase penurunan kawasan kumuh / Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	48.00 (50.44 ha)	51,73 (86,97 ha)	45,87 (7,11 Ha) Data Revisi : 0,0046	0,0056	0,0046	82,14
Misi 5: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan										
6	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	8	Persentase penurunan Emisi GRK	Persen	5,79	9,16	6,01	5,00	6,16	123,20





B. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan / Urusan Penunjang / Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan Target dalam Dokumen Anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota meliputi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 18 (delapan belas) Bidang Urusan Pemerintahan yakni Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.

Penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) Bidang Urusan Pemerintahan yakni Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Adapun Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan terdiri atas 5 (lima) Bidang Urusan yakni Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan serta





fungsi penunjang urusan lainnya serta menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum. Secara rinci masing-masing capaian program dapat terlihat pada tabel capaian program pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:





Tabel 97. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1. BIDANG PENDIDIKAN												
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,00	0,00	1.437.357.401.070	1.303.464.901.089		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	10,00	6.105.000.000	2.410.103.423	Dari 10 Dokumen terdapat 3 dokumen masih dalam proses penilaian.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	71.894,00	70.533,00	1.233.813.493.202	1.137.688.032.468	Dikarenakan adanya pegawai pensiun dan meninggal	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Aset Perangkat Daerah	Dokumen	964,00	0,00	1.300.000.000	1.175.711.949		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pegawai PNS dan Non PNS Perangkat Daerah	Orang	771,00	771,00	1.500.000.000	1.390.790.395	Kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dalam peningkatan SDM.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Orang/Bulan	23.708,00	0,00	8.125.615.000	6.755.163.469		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Unit	30,00	0,00	9.545.540.000	8.354.852.500		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan dasar perangkat daerah	Buah	6.335,00	6.335,00	168.005.453.618	138.093.656.499		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana Prasarana yang dilakukan pemeliharaan	Unit	528,00	0,00	8.962.299.250	7.596.590.386		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD	Persen	88,43	73,00	1.432.054.507.561	863.766.260.489	Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			pendidikan yang bermutu		Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP	Persen	87,43	71,31			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
					Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD	Persen	82,02	84,62			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
					Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan	Persen	67,38	57,46			Masih banyaknya data DTKS dan data capil yang tidak sinkron sehingga menyebabkan data anak tidak sekolah (ATS) menjadi tinggi	
					Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	Orang	3.000,00	2.574,00			1. Terkendala dengan Data Penerima dan Data DTKS. 2. Masih terikatnya dengan regulasi yang tidak memperbolehkan mendapat bantuan dengan dua sumber dana berbeda.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Standar kompetensi lulusan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	91,79	76,99	820.773.690.998	478.275.688.666	1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)	
					Standar isi Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	87,50	85,77			Tingkat kompetensi murid yang harus di tingkatkan	
					Standar proses Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	94,08	59,82			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
					Standar sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	84,50	82,31			1. Masih rendahnya anggaran untuk Pembangunan Ruang Tata Usaha, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan Halaman SD dikarenakan memprioritaskan pembangunan ruang kelas, laboratorium komputer dan toilet. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											menjadi hambatan dalam jangkauan.	
					Standar pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	97,08	64,66			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
					Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	75,08	48,91			Masih rendahnya "Proporsi PTK penggerak : Jumlah guru dan kepala sekolah yang masuk ke dalam program guru penggerak dibagi total guru dan kepala sekolah," serta "Proporsi guru yang menjadi guru penggerak : Jumlah guru yang lulus program guru penggerak dibagi total guru,"	
					Standar pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	87,93	82,11			Masih rendahnya pemahaman pada satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dan menindak lanjuti hasil rapor pendidikan.	
					Standar penilaian Pendidikan Sekolah Dasar	Persen	84,93	50,57			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Standar kompetensi lulusan Pendidikan SMP	Persen	89,22	54,81	393.800.935.264	263.448.640.830	1. Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan. 2. Masih rendahnya peningkatan program musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)	-
					Standar isi Pendidikan SMP	Persen	84,79	98,12			Tingkat kompetensi murid yang harus di tingkatkan	-
					Standar proses Pendidikan SMP	Persen	91,79	60,81			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	-
					Standar sarana dan prasarana Pendidikan SMP	Persen	79,65	78,33			1. Masih rendahnya anggaran untuk Pembangunan Ruang Tata Usaha, Pembangunan Ruang UKS dan Pembangunan Halaman dikarenakan memprioritaskan pembangunan ruang kelas,	-Dianggarkan kembali ditahun 2025 menjadi KDP-Dibayarkan setelah review Inspektorat





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											laboratorium komputer dan toilet. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
					Standar pengelolaan Pendidikan SMP	Persen	92,36	81,55			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	-
					Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Persen	75,65	53,68			Masih rendahnya "Proporsi PTK penggerak : Jumlah guru dan kepala sekolah yang masuk ke dalam program guru penggerak dibagi total guru dan kepala sekolah," serta "Proporsi guru yang menjadi guru penggerak : Jumlah guru yang lulus program guru penggerak dibagi total guru."	-
					Standar pembiayaan Pendidikan SMP	Persen	86,22	76,85			Masih rendahnya pemahaman pada satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dan menindak lanjuti hasil rapor pendidikan.	-
					Standar penilaian Pendidikan SMP	Persen	80,36	66,34			Tingkat kompetensi Guru dan murid yang harus di tingkatkan.	-
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan PAUD	Persen	88,68	84,62	97.879.493.018	49.343.998.401	Masih terdapat satuan PAUD yang belum terdampingi mengingat lokasi relatif jauh dari Puskesmas	
					Standar Isi Pendidikan PAUD	Persen	90,43	82,18			Perubahan Mindset yang relatif lambat sehingga untuk melakukan adaptasi dengan kurikulum baru agak terhambat	
					Standar Proses Pendidikan PAUD	Persen	97,34	90,06			Penguasaan TIK yang masih lemah	





No	Urutan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Persen	42,69	64,56			Masih rendahnya guru yang lulus sebagai guru penggerak dan sertifikasi guru	Progres sesuai rencana
					Standar Sarana Prasana Pendidikan PAUD	Persen	72,83	87,94			1. Adanya tambahan anggaran ada di APBD Perubahan sehingga kesulitan dalam merencanakan untuk peruntukan pemenuhan parasarana dalam bentuk bangunan. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
					Standar Pengelolaan Pendidikan PAUD	Persen	91,70	90,04			Pelaksanaan supervisi yang dilakukan masih belum maksimal	
					Standar Pembiayaan Pendidikan PAUD	Persen	82,40	87,88			Di semester awal sebagian sekolah kesulitan membuat SPJ karena kondisi laptop sebagian bermasalah	
					Standar Penilaian Pendidikan PAUD	Persen	86,00	89,21			Sebagian guru masih lemah dalam penggunaan komputer	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	Persen	67,57	54,71	119.600.388.279	72.697.932.592	Standar dan indikator yang digunakan dalam rapor pendidikan berbeda dengan yang digunakan untuk perhitungan sebelumnya. Sehingga harus melakukan penyesuaian Kedua : sebagian personal yang jadi sasaran survei ANBK sebagai dasar perhitungan rapor pendidikan banyak yang belum paham dan mengisi dengan tidak maksimal	
					Standar Isi Pendidikan Kesetaraan	Persen	71,47	54,19			Sebagian indikator untuk pendidikan kesetaraan masih belum terisi atau	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tidak ditemukan skor dan nilainya pada rapor pendidikan	
					Standar Proses Pendidikan Kesetaraan	Persen	71,43	57,74			Rata-rata rekrutmen tutor baru dilakukan pada pertengahan tahun/tahun pelajaran dan baru di bimtek pada penghujung tahun	
					Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan	Persen	64,38	46,64			Kesulitan guru/tutor untuk mengikuti program guru penggerak dan Pendidikan Profesi	
					Standar Sarana Prasarana Pendidikan Kesetaraan	Persen	66,14	56,70			1. Bertambahnya satuan pendidikan baru SKB yang belum terpenuhi sarana dan prasarannya menyebabkan skor capaian menjadi menurun Tambah anggaran berada di Perubahan sehingga kesulitan diperuntukkan untuk Bangunan. 2. Masih perlu perhatiannya untuk peningkatan pendidikan transformasi digitalisasi pendidikan dengan luasan geografis di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi hambatan dalam jangkauan.	
					Standar Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	Persen	66,43	74,56			Adanya perubahan indikator capaian dan sistem penskoran	
					Standar Pembiayaan Pendidikan Kesetaraan	Persen	61,23	60,14			Perencanaan masih belum berpusat pada Data evaluasi diri	
					Standar Penilaian Pendidikan Kesetaraan	Persen	66,28	54,98			Rata-rata masih baru, dan skor yang digunakan adalah hasil pemetaan rapor pendidikan pada tahun sebelumnya	
					Angka Melek Huruf	Persen	99,97	0,00				





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	Persen	100,00	100,00	650.000.000	0	1. Luasan geografis yang menyebabkan masih terdapatnya sekolah yang belum mengimplementasikan kurikulum muatan lokal. 2. Kurangnya peningkatan Sumber Daya Manusia dalam implementasi kurikulum muatan lokal.	
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SD	Dokumen	1,00	0,00	650.000.000	0		
					Tersedianya kurikulum Muatan Lokal bagi jenjang pendidikan SMP	Dokumen	1,00	0,00				
					Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SD	Dokumen	1,00	0,00				
					Tersedianya perangkat pembelajaran kurikulum muatan lokal jenjang SMP	Dokumen	1,00	0,00				
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	Persen	100,00	0,00	250.000.000	158.234.600		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah Pendidikan Dasar	Dokumen	58,00	0,00	50.000.000	0		
	BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Penerbitan izin pendirian dan operasional sekolah PAUD dan Non Formal	Dokumen	300,00	0,00	200.000.000	158.234.600		
2. Bidang Kesehatan												
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,5	75,57	408.659.924.138	367.463.400.258	1. Kurang tepatnya dokumen perencanaan yang disajikan sesuai dengan yang dikriteriakan saat dilakukan Review AKIP	1. Melakukan review dan perbaikan seluruh dokumen perencanaan sesuai dengan yang dikriteriakan 2. Memperbaiki Kualitas Dokumen Laporan Kinerja





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	1.966.140.000	1.462.800.383	1. Banyak nya aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga diperlukan proses sinkronisasi berulang kali agar data yang dihasilkan valid dan akurat. 2. Data pendukung yang beragam, target yang banyak dengan jumlah tenaga pelaksana dan waktu yang terbatas.	1. Melakukan sinkronisasi dan validasi data pada saat monitoring & evaluasi kegiatan secara berkala 2. Memaksimalkan semua sumber daya yang ada.
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	314.654.098.281	284.033.725.949	1. Belum meratanya kompetensi pengelola keuangan di Dinkes dan UPTD 2. Banyaknya volume laporan keuangan dari berbagai unit kerja yang perlu diolah secara akurat. 3. Perubahan regulasi yang sering dan mendadak.	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	550.000.000	504.148.881	1. Kendala teknis dalam mengintegrasikan data barang milik daerah dari seluruh UPTD Puskesmas. 2. Belum optimalnya pemahaman pengelola aset di tingkat UPTD Puskesmas mengenai tata kelola BMD.	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	2.106.043.000	742.656.066	1. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena kegiatan berbarengan dengan pelaksanaan pemberkasan dan tes PPPK. 2. Ada perubahan kode rekening di Belanja Kursus Singkat Pelatihan (Kontribusi) di Triwulan IV baru bisa dilaksanakan	1. Mengatur Jadwal kegiatan supaya tidak berbenturan dengan kegiatan lain 2. Menginput kode rekening sesuai sesuai SHS di SIPD
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	2.700.000.000	2.183.678.505	1. Ada perubahan kode rekening belanja pada sub kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan sub kegiatan penyediaan cetakan dan penggandaan, sehingga	1. Melakukan input perubahan kode rekening pada anggaran perubahan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kegiatan baru bisa dilaksanakan diakhir waktu	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	22	55	7.360.602.554	6.033.205.000	1. Usulan terbanyak masuk di anggaran perubahan, sehingga waktu untuk prosesnya sangat mepet 2. Pengadaan tanah batal, dikarenakan waktu terbit DPA perubahan sangat tidak memungkinkan untuk melakukan proses pengadaan. 3. rehabilitasi rumah dinas kadinkes tdk bisa dilaksanakan krn menunggu terbitnya penetapan peralihan lokasi yang mendekati akhir tahun.	1. Melakukan proses pengadaan dengan memaksimalkan waktu yang ada 2. Menunda pengadaan tanah ditahun berikutnya 3. Mendorong percepatan proses penerbitan perubahan lokasi rumah dinas
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	22.267.623.305	23.502.405.989	Pekerjaan menyesuaikan usulan pemeliharaan dari bidang krn terkadang ada yg perbaikan berulang-ulang krn kondisi barang mmg kurang baik	Melakukan pemeliharaan sesuai waktu dan usulan yang masuk
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	95	95	12.647.162.500	10.805.615.922	1. untuk gedung dinkes krn Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pendek (hanya 5 bulan efektif), terhambat diperubahan kode rekening belanja 2. untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, tidak banyak yg dipelihara krn kendaraan masih baru	1. Melakukan addendum dengan penambahan waktu 50 hari kerja 2. Melakukan pemeliharaan sesuai jadwal pemeliharaan dan melakukan perbaikan sesuai usulan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD UPTD Puskesmas meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Unit	24	32	44.408.254.498	38.195.163.563	1. Keterbatasan sumber daya manusia di UPTD Puskesmas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. 2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia di beberapa UPTD Puskesmas. 3. Variasi kondisi geografis antar wilayah UPTD Puskesmas yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.	Memaksimalkan semua SDA yang ada





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentasi Balita Stunting	Persen	14,6	15,7	437.839.102.521	365.196.350.637	1. Beberapa indikator intervensi spesifik belum optimal seperti : pemantauan pertumbuhan balita (sebagian besar balita masih belum rutin ke posyandu), beberapa balita bermasalah gizi tidak mau dirujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan tatalaksana gizi dan penyakit penyerta. 2. Pengasuhan mulai bumil dan balita belum optimal. Perubahan 3. Data kelahiran stunting baru masih banyak. (Meskipun beberapa masalah gizi sudah mampu ditatalaksana tetap lahir stunting baru) 4. Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) masih tinggi (belum mencapai target) 5. Faktor determinan (terutama ada keluarga merokok) masih tinggi, terkait perilaku	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Keluarga sehat	Persen	0,35	0,36			Gangguan jaringan saat menginput aplikasi dan hambatan geografis beberapa wilayah tertentu	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0,75	0,91			1. Masih ada kendala akses layanan kesehatan. 2. Kendala diluar sistem layanan kesehatan (Masyarakat luar/pindah yg tidak mempunyai KK (terutama jaminan kesehatan)	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0,76	0,76			1. Balita yang dipantau pertumbuhan & perkembangan belum mencapai target. Hanya tercapai pada bulan Juni 2. Balita bermasalah gizi masih banyak 3. IDL belum capai target di semua puskesmas	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0,61	0,91			1. Masih kurangnya kemampuan / kapasitas pengelola program dan seringnya pergantian pengelola program di Puskesmas serta adanya tugas rangkap. 2. Belum optimalnya edukasi tentang penyakit menular kepada masyarakat 3. Masih kurangnya peran lintas sektor dan lintas OPD 4. Masih adanya stigma masyarakat terhadap penderita TBC dan HIV AIDS beserta keluarganya	1. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Program 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor dan Lintas OPD 3. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala 4. Meningkatkan Promosi dan Edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat 5. Meningkatkan Promosi dan Edukasi kepada Keluarga dan Masyarakat tentang Penyakit HIV, TBC serta upaya menghapus Stigma HIV AIDS, TBC di Masyarakat
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,5	0,98			1. Masih kurangnya kemampuan / kapasitas pengelola program dan seringnya pergantian pengelola program di Puskesmas serta adanya tugas rangkap. 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin 3. Masih adanya stigma masyarakat terhadap penderita penyakit tidak menular khususnya ODGJ dan keluarganya 3. Belum optimalnya edukasi tentang penyakit tidak menular kepada masyarakat 4. Masih kurangnya peran lintas sektor dan lintas OPD dalam penanganan ODGJ	1. Meningkatkan Kapasitas Pengelola Program Kesehatan Jiwa 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama Lintas Program, Lintas Sektor dan Lintas OPD serta Organisasi Masyarakat dalam penanganan ODGJ baik dalam hal Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial 3. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi secara berkala 4. Meningkatkan Promosi dan Edukasi kepada Keluarga dan Masyarakat dalam upaya menghapus Stigma ODGJ
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0,88	0,9			1. Masih kurangnya jumlah dan kapasitas Tenaga Sanitasi Lingkungan di	1. Penambahan Tenaga Sanitasi Lngkungan sesuai dengan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Puskesmas 2. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap derajat kesehatan 3. Masih kurangnya kerjasama lintas sektor dan lintas OPD dalam upaya percepatan perbaikan kesehatan lingkungan	kebutuhan puskesmas, Peningkatan kapasitas TSL dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi tenaga sanitasi yang sudah ada, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal, serta meningkatkan koordinasi antara tenaga sanitasi dengan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas. 2. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan PHBS melalui berbagai media, seperti leaflet, poster, video, dan mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan sanitasi dan PHBS untuk meningkatkan minat masyarakat. 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna melakukan pertukaran informasi dan data secara berkala untuk menyusun program yang terintegrasi, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran dari masing-masing sektor untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan.
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0,4	0,86			1. Kurang nya sosialisasi dan diseminasi informasi terkini terkait update Bidang Kesehatan 2. Keterbatasan tenaga medis 3. Perubahan peraturan yang berlaku terkait pelayanan bagi	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pemegang jaminan kesehatan	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0,47	0,52			Penguatan penerapan kebijakan dari 10 indikator PHBS belum konsisten dilaksanakan di masyarakat.	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	Persen	76	75	249.979.372.601	232.256.475.874	Proses pelaksanaan kegiatan fisik yang seringkali terkendala waktu	
		Dinas Kesehatan			Persentase KB Aktif	Persen	66	67,82			1. Masih ada akseptor aktif yg tidak melaporkan karena pemakaian mandiri (Pil dan Kondom). 2. Masih ada ibu nifas yg tidak berkaKB dalam 42 hr paska salin. 3. Masih ada pemilihan kontrasepsi diputuskan oleh suami. 4. Sebagian besar PUS yg berusia diatas 40 thn bersepsi bahwa tidak subur (tdk bisa hamil lagi)	
		Dinas Kesehatan			Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	94	60			1. Masih sangat kurangnya ketersediaan logistik vaksin (pengadaan tersentralisasi di Kemenkes) 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi 3. Masih kurangnya peran lintas sektor dalam mendukung kegiatan imunisasi	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100			Target yang banyak, kegiatan yang beragam dengan Keterbatasan tenaga pelaksana di lapangan dan petugas administrasi pertanggungjawaban kegiatan, serta peraturan dan juknis tatalaksana kegiatan yang kerap berubah-ubah	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Persentase KB Aktif	Persen	66	67,82	175.710.450.645	120.979.187.816	1. Masih ada akseptor aktif yg tidak melaporkan karena	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pemakaian mandiri (Pil dan Kondom). 2. Masih ada ibu nifas yg tidak berkaKB dalam 42 hr paska salin. 3. Masih ada pemilihan kontrasepsi diputusan oleh suami. 4. Sebagian besar PUS yg berusia diatas 40 thn bersepsi bahwa tidak subur (tdk bisa hamil lagi)	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan			Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	94,3	60			1. Masih sangat kurangnya ketersediaan logistik vaksin (pengadaan tersentralisasi di Kemenkes) 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi 3. Masih kurangnya peran lintas sektor dalam mendukung kegiatan imunisasi	1. Meningkatkan kegiatan promosi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi baik tatap muka dan media massa 2. Meningkatkan advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung kegiatan imunisasi 3. Menyampaikan permohonan vaksin ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes serta menyampaikan permasalahan keterbatasan logistik vaksin di daerah
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	Faskes	30	32			Terbatasnya SDM dan sinkronisasi jadwal	Mengusulkan pemenuhan kebutuhan pegawai
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen	100	100	2.996.000.000	2.925.388.948	Masih ada beberapa titik yang terkendala jaringan yang belum maksimal	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	Persen	75	75	9.153.279.275	9.035.297.999	Aplikasi SI-SDMK yang kurang atau lambat update karena keterbatasan dan rangkap jabatan petugas operator, sehingga kebutuhan dan pemetaan nakes dan named belum tergambar secara update	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	Izin	1.500,00	1869	3.424.526.900	2.188.643.967	1. Terbatasnya panduan secara teknis dalam beberapa kasus permohonan penerbitan izin praktik sehingga menghambat penyelesaian proses penerbitannya.	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	persen	75	100	250.000.000	68.205.000	1. Terbatasnya informasi perubahan personil pada beberapa faskes yang masih aktif namun kurang update di aplikasi SI-SDMK,	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM meningkat kompetensinya	orang	80	135	1.133.169.000	877.076.067	1. Terbatasnya anggaran pelatihan kompetensi yang disediakan bila dibandingkan dengan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada, 2. Terbatasnya Narasumber yang kompeten dan tersertifikasi di bidangnya masing-masing (Dinkes Provinsi Kaltim, Instansi Pendidikan dan Klinis) pada beberapa materi yang dibutuhkan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan,	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	2.041.357.900	1.243.362.900	Kurangnya Sosialisasi dari Dinas Kesehatan, sehingga para pelaku usaha kurang paham tentang kewajiban perijinan dan sertifikat resmi bagi usahanya	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki izin	persen	100	100	628.114.000	481.809.000	Tenaga Pengawas kurang	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Sertifikat	15	15	170.000.000	150.265.000	Pelaku usaha UMKM tidak semuanya mempunyai keinginan mendapatkan sertifikat PKP sehingga memutuskan sosialisasi lebih instan dari dinas kesehatan	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan postmarket pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persen	25	25	198.100.000	157.289.000	1. Alamat pelaku usaha tidak lengkap saat melakukan sertifikasi sehingga susah untuk melaksanakan pengawasan 2. Pelaku usaha UMKM tidak melakukan produksi secara rutin	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	% Capaian RT-PHBS	Persen	34	52	260.014.000	174.255.000	Penguatan penerapan kebijakan dari 10 indikator PHBS belum konsisten dilaksanakan di masyarakat.	1. Sosialisasi PHBS melalui media sosial 2. Penyuluhan langsung kepada masyarakat terkait 10 indikator PHBS
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Puskesmas dengan Desa Germas,	Persen	40	68,75	1.619.138.900	1.426.296.733	Masih ada Petugas Promkes yang kurang melakukan advokasi ke Desa/Kelurahan	1. Meningkatkan kapasitas Petugas Promkes dalam melakukan advokasi 2. Medorong Petugas Promkes untuk aktif melakukan advokasi ke Desa/Kelurahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Persen	50	100	300.000.000	259.199.722	Petugas Promkes merangkap jabatan	Mendorong Kepala Puskesmas untuk mengembalikan Petugas Promkes kepada tugas pokok dan fungsinya
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa Siaga Aktif dengan UKBM aktif	Persen	34	48,95	847.853.900	769.876.050	Masih ada stakeholder tingkat desa/kelurahan yang belum memprioritaskan program kesehatan, hanya berfokus pembangunan sarana dan prasarana	Meningkatkan advokasi dan koordinasi kepada Kepala Desa/Kelurahan terkait program kesehatan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Muhammad Parikesit	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	75	75,77	473.950.709.045	431.537.851.693	1. Tingginya target indikator yang ditetapkan. 2. Tidak seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja 3. Tidak memuat perbandingan realisasi kinerja OPD dengan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											realisasi kinerja di level nasional	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Muhammad Parikesit		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	300.000.000	103.430.000	-	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Muhammad Parikesit		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	24.872.238.969	15.037.165.958	Susahnya Bendahara untuk masuk ke dalam sistem aplikasi SIPD-RI sehingga pembayaran mengalami keterlambatan dari yang ditetapkan sebelum tanggal 8 tiap bulannya	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Muhammad Parikesit		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	Persen	100	100	448.778.470.076	416.397.255.735	-	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Muhammad Parikesit	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS	Persen	89,5	88,28	286.947.017.852	268.141.816.067	1. Prioritas pengadaan alat kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan 2. Penerapan Efisiensi berdasarkan kebutuhan pelayanan sehingga kelengkapan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku (ASPAK) belum tercapai. 3. Keterbatasan anggaran sehingga belum sesuai jumlah alat kesehatan dengan ketersediaan alat kesehatan tersebut.	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Muhammad Parikesit		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Essensial	Persen	78	60,92	286.947.017.852	268.141.816.067	1. Prioritas pengadaan alat kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan 2. Penerapan Efisiensi berdasarkan kebutuhan pelayanan sehingga kelengkapan alat kesehatan sesuai standar yang berlaku (ASPAK) belum tercapai. 3. Keterbatasan anggaran sehingga belum sesuai jumlah alat kesehatan dengan ketersediaan alat kesehatan tersebut.	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	77,27	76.856.722.567	67.938.513.300	Beberapa Komponen penilaian yang belum dapat dipenuhi dengan maksimal	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	2	2	483.390.000	483.311.200	Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan sebagai UOBK yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, tidak dapat melaksanakan hal tersebut karena penerapan SIPD-RI yang implementasinya membuat rumah sakit menjadi UPT yang pengelolaannya bergantung pada Dinas Kesehatan	1. Meningkatkan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam proses-proses Pengelolaan Keuangan 2. Tetap berkomitmen dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	16.475.910.657	13.554.754.621	Beberapa karyawan lulus CPNS/PPPK di luar Rumah Sakit sehingga mengurangi jumlah tenaga	1. Tetap berkomitmen menjaga mutu / kualitas pelayanan dengan SDM yang ada
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	Nilai	75	80	59.897.421.910	53.900.447.479	Terbatasnya sumber daya untuk memenuhi indikator pada penilaian Kinerja BLUD	1. Berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada 2. Terus bersinergi secara internal dan eksternal dalam memenuhi kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	Persen	82	48	74.845.053.139	69.273.747.313	Terbatasnya sumber daya untuk memenuhi indikator SPM (baik dari sumber daya Manusia maupun sarana dan prasarana)	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	Kategori	4	4	74.845.053.139	69.273.747.313	Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai standar ketentuan yang berlaku	1. Berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada seperti salah satunya menggunakan anggaran BLUD 2. Terus bersinergi secara internal dan eksternal dalam





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												memenuhi kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Persen	100	100	1.998.141.000	1.809.436.548	Proses adaptasi yang memerlukan waktu terhadap kebijakan baru terkait perpanjangan STR dan Pembuatan SIP	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	60	91	1.998.141.000	1.809.436.548	Terbatasnya anggaran karena diklat bagi tenaga kesehatan hanya ada di Pulau Jawa dan beberapa pelatihan unit khusus memerlukan waktu lama dan kuota nya terbatas	1. Berusaha memaksimalkan sumber daya yang ada 2. Melakukan in house training di internal RS
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	42,44	108.118.977.410	38.558.604.567	Pergeseran dan perubahan anggaran dikarenakan perubahan regulasi sehingga dilakukan evaluasi dan berpengaruh pada capaian program	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	24	250.000.000	157.369.620	adanya beberapa kegiatan mengalami perubahan regulasi	lebih memperhatikan regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	199.471.953	186.820.000	kurangnya ketersediaan SDM yang terlatih	Melaksanakan dan mengikuti pelatihan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	155.496.094	62.325.000	kurangnya SDM yang melakukan inventarisir barang aset daerah	Melaksanakan dan mengikuti pelatihan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	2.932.534.000	2.534.054.382	Terkendalanya dalam regulasi	lebih memperhatikan regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1.000.000.000	966.244.769	ketersediaan dana pemda untuk usulan spd dan kondisi lapangan	melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang tersedia dan kondisi rumah sakit yang mana dalam proses pengembangan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	19.409.750.000	17.039.343.141	Proses pengadaan barang jasa yang terkendala regulasi	lebih memperhatikan regulasi dalam proses pengadaan barang dam jasa
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.989.240.000	1.285.874.050	proses pembayaran yang terkendala anggaran kas	proses penyusunan anggaran kas tertumpuk triwulan IV
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD	Nilai	1	1	82.182.485.363	16.326.573.605	Belum ada jadwal penilaian kinerja BLUD	segera menyusun tim kerja penilaian kinerja BLUD yang selama ini hanya baru terukur realisasi anggaran
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	87,5	83	167.847.376.360	162.799.509.465	Masih rendahnya minat dokter spesialis untuk bekerja di RSUD Dayaku Raja	
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Sesuai Standar	Persen	70	70	166.749.276.360	162.069.087.282	proses pembayaran yang terkendala anggaran kas	proses penyusunan anggaran kas tertumpuk triwulan IV
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Rumah Sakit yang sesuai standar	Persen	75	75	998.100.000	653.956.183	kurang optimalnya proses pelayanan terhadap pasien dikarenakan proses pembangunan pengembangan rumah sakit	segera menyelesaikan proses pembangunan rumah sakit dan memaksimalkan pelayanan pelayanan kepada pasien sehingga pasien dilayani sesuai standar rumah sakit
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persen	80	80	100.000.000	76.466.000	kegiatan masih dalam proses pengembangan	segera melakukan perbaikan pelayanan rumah sakit, sehingga semua sistem terintegrasi kesemua sistem yang berjalan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	40	20	600.000.000	528.606.157	jadwal pelatihan yang tidak bisa di tentukan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan - RSUD Dayaku Raja		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya	Persen	50	50	600.000.000	528.606.157	Peta kompetensi pegawai tidak ada dan terbatasnya pagu anggaran	segera membuat perencanaan pelatihan yang tepat untuk efisiensi anggaran
3. Bidang Pekerjaan Umum												
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,50	70,00	388.725.908.848	362.030.788.094	Keterlambatan dalam penyampaian laporan	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	300.000.000	290.558.011	Keterlambatan dalam penyusunan laporan dikarenakan data yg belum lengkap	Pengambilan data sistim jemput bola
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	309.340.171.180	294.798.816.997	Keterlambatan dalam pengumpulan data	Pengambilan data sistim jemput bola
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	1.364.842.780	806.916.300	Ketersediaan anggaran	Diharapkan ketersediaan anggaran tercukupi sehingga pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan dapat terbayarkan tanpa menjadi hutang
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	7.167.029.000	5.040.769.550	Ketersediaan anggaran	Diharapkan ketersediaan anggaran tercukupi sehingga pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan dapat terbayarkan tanpa menjadi hutang
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	48.515.642.755	41.736.456.183	Ketersediaan anggaran	Diharapkan ketersediaan anggaran tercukupi sehingga pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan dapat





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												terbayarkan tanpa menjadi hutang
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	10.227.510.023	9.647.882.860	Ketersediaan anggaran	Diharapkan ketersediaan anggaran tercukupi sehingga pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan dapat terbayarkan tanpa menjadi hutang
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	100,00	10.011.190.850	8.775.092.693	Ketersediaan anggaran	Diharapkan ketersediaan anggaran tercukupi sehingga pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan dapat terbayarkan tanpa menjadi hutang
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	23,00	23,00	1.799.522.260	934.295.500	Ketersediaan anggaran	Diharapkan ketersediaan anggaran tercukupi sehingga pada saat kegiatan telah selesai dilaksanakan dapat terbayarkan tanpa menjadi hutang
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan antar wilayah)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	0,80	0,70	325.980.259.879	261.518.997.749	Akses mobilisasi alat dan material ke lokasi pekerjaan (saluran irigasi)	Memasukan dalam program kerja pembangunan dan peningkatan jalan inspeksi untuk irigasi
					Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,06	0,17			Tidak ada kewenangan kabupaten pada daerah aliran sungai (DAS)	Penguatan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) IV
					Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	Rasio	0,03	0,03			Tidak ada kewenangan kabupaten pada wilayah pantai	Penguatan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) IV
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	Dinas Pekerjaan Umum		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Luas kawasan permukiman yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	Ha	2.300,55	207,37	134.222.151.690	109.615.865.992	Tidak ada kewenangan kabupaten untuk Daerah	Penguatan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) IV





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PENATAAN RUANG			Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							Aliran Sungai (DAS) dan Pantai	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi Irigasi Primer dan Sekunder dalam kondisi baik	Persen	17,12	6,00	191.758.108.189	151.903.131.757	Akses mobilisasi alat dan material ke lokasi pekerjaan (saluran irigasi)	Memasukkan dalam program kerja pembangunan dan peningkatan jalan inspeksi untuk irigasi
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam kondisi baik	Persen	40,00	39,92	100.360.572.514	87.359.170.864	Terdapat permukiman dan tempat usaha masyarakat pada saluran drainase dan daerah aliran sungai (DAS)	Melakukan peningkatan infrastruktur pada saluran drainase dan pendekatan persuatif dg masyarakat agar saluran drainase dapat berfungsi dengan baik
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai	Persen	28,90	28,84	100.360.572.514	87.359.170.864	Terdapat permukiman dan tempat usaha masyarakat di atas saluran drainase dan daerah aliran sungai	Melakukan peningkatan infrastruktur pada saluran drainase dan pendekatan persuatif dg masyarakat agar saluran drainase dapat berfungsi dengan baik
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	Persen	66,99	66,99	53.737.850.782	44.818.967.081	1. Perubahan desain dari pengguna bangunan 2. tidak adanya kesadaran untuk memelihara/perbaikan dan tidak adanya anggaran tersedia oleh pengguna bangunan tersebut	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang dapat digunakan	Unit	17,00	28,00	53.737.850.782	44.818.967.081	1. Permohonan PBG tidak sesuai dengan ketentuan Fungsi dari tata ruang 2. ketidaksesuaian antara perencanaan dengan lokasi pada saat pelaksanaan 3. Perubahan desain dari pengguna bangunan 4. Masyarakat belum memahami pengurusan PBG secara online sehingga diperlukan sosialisasi bagi masyarakat dan OPD pemerintah yang berkaitan dengan perizinan	1. Tindak Lanjut berkoordinasi pada OPD yang berwenang. 2. Tindak Lanjut Cek Ulang Lokasi Melalui Tim Penilik Bangunan Gedung. 3. Tindak Lanjut Pengguna Bangunan melakukan Perbaikan Permohonan SLF. 4. Tindak lanjut Berkoordinasi dengan Pihak DPMPSTSP untuk Penganggaran Sosialisasi.





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pembangunan bangunan gedung	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persen	80,00	80,00	760.212.920.235	655.188.128.672	1. adanya Perubahan desain dari pengguna bangunan 2. ada beberapa pekerjaan belum bisa dilaksanakan karena menunggu pergeseran	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan dan lingkungan	Unit	41,00	46,00	760.212.920.235	655.188.128.672	1. Kendala Cuaca: - Curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrem menghambat proses konstruksi, terutama pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan seperti penggalian dan pengurukan. - Kondisi tanah yang berlumpur dan tidak stabil menyebabkan pengerjaan pondasi menjadi lebih lambat dari yang diharapkan. 2. Keterlambatan Pengiriman Material: - Keterlambatan pengiriman bahan konstruksi seperti semen, pasir, dan baja karena masalah logistik dan distribusi. - Gangguan di jalur transportasi, seperti kemacetan atau kondisi jalan yang buruk, menambah waktu pengiriman material ke lokasi proyek. 3. Permasalahan Teknis: - Ditemukannya kondisi lapangan yang berbeda dari hasil survei awal, seperti adanya batuan keras atau temuan geologi lainnya, yang memerlukan penyesuaian dalam desain dan metode konstruksi. - Kegagalan alat berat atau	Tindak Lanjut Pemberian Kesempatan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											peralatan konstruksi yang menyebabkan waktu henti dan membutuhkan waktu tambahan untuk perbaikan atau penggantian. 4. Keterbatasan waktu, beban volume pekerjaan senilai 21 milyar yg harus dikerjakan dalam waktu 50 hari kalender di masa APBD Perubahan 2024, selain itu faktor hujan	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan antar wilayah)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Kemantapan Jalan	Persen	64,66	62,00	1.562.334.123.440	1.409.865.842.309	tidak semua paket pekerjaan yang teranggarkan masuk kedalam ruas jalan kabupaten dan umur konstruksi tidak sesuai dengan yang direncanakan (banyaknya kendaraan ODOL)	belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, perlunya kolaborasi antar OPD dan instansi untuk mengatasi masalah tersebut. seperti pembatasan usulan pada SIPD sesuai SK jalan kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.. dan membuat regulasi terkait beban kendaraan yang melintas pada jalan kabupaten dan jalan desa
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten	Km	1,418,03	1.362,10	1.562.334.123.440	1.409.865.842.309	tidak semua paket pekerjaan yang teranggarkan masuk kedalam ruas jalan kabupaten dan umur konstruksi tidak sesuai dengan yang direncanakan (banyaknya kendaraan ODOL)	belum dapat mengatasi permasalahan tersebut, perlunya kolaborasi antar OPD dan instansi untuk mengatasi masalah tersebut. seperti pembatasan usulan pada SIPD sesuai SK jalan kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.. dan membuat regulasi terkait beban kendaraan yang melintas pada jalan kabupaten dan jalan desa
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengembangan Jasa Kontruksi (SOP, Data, Layanan, Intruktur dan Tenaga Terampil/Ahli)	Persen	100,00	100,00	1.600.000.000	1.108.968.725	--	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang bersertifikat	Orang	50,00	50,00	1.250.000.000	898.568.406	1. Anggaran untuk pelatihan kurang mencukupi terhadap beberapa kecamatan. 2. Perlu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan data calon peserta pelatihan. 3. Untuk pelatihan jenjang 1-2 data calon peserta pelatihan yang didapat tidak sesuai. Hal ini dikarenakan masyarakat berkeinginan pelatihan dilaksanakan segera sedangkan dana yang tersedia tidak mencukupi.	1. Penambahan anggaran agar kuota di kecamatan dapat dipenuhi 2. Pengambilan data dengan sistim jemput bola
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang disediakan	Layanan	1,00	1,00	250.000.000	173.381.300	1. Masih dalam proses pembuatan (Tahap awal) 2. Perlu penambahan kriteria dan fitur baru sesuai masukan Kepala Dinas.	1. Pembuatan aplikasi dalam rangka mendukung database tenaga kerja konstruksi
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan Dokumen Badan Usaha yang Tertib Jasa Konstruksi	Badan Usaha	0,00	12,00	100.000.000	37.019.019	Tidak terdapat anggaran kegiatan Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1. Adanya penganggaran untuk Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi secara generik (setiap tahun)
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	persen	92,16	80,20	241.991.674.842	214.559.318.510	Baseline data dan intervensi kegiatan terjadi rangkap demi pemenuhan kendala yang dialami masyarakat secara cepat dan sementara saja tetapi tidak ada substansinya karena perlu waktu evaluasi dalam hal perencanaan ulang dan penganggaran serta pelaksanaan	
					Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	persen	1,03	1,02			1. KPSAM yang belum terbentuk. 2. Jaringan Pipa Distribusi belum terlayani keseluruhan rumah. 3. Belum adanya kesepakatan antar dinas perkim dan PDAM terkait	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											siapa yang berhak mengintervensi SPAM desa Long Lalang kecamatan Tabang. 4. Adanya Kegiatan Paket Pekerjaan Desa Long Lalang belum dilaksanakan ditahun 2024 masih dalam proses perencanaan dan akan dilaksanakan ditahun 2025	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Paket	1,00	1,00	241.991.674.842	214.559.318.510	1. Anggaran yang belum tersedia secara optimal. 2. Kelembagaan pengelolaan dan operasional (penetapan luran) belum berjalan secara maksimal.	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	86,68	89,10	52.929.406.000	49.757.025.631	1. Data Masih Belum valid dan nilai perhitungan 89.90 persen didapat dari perhitungan Triwulan III Tahun 2024 dan masih dalam tahap pengumpulan data untuk perhitungan di triwulan ke IV. 2. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan serta sinkronisasi dan Validasi data air limbah domestik (Saniatsi)	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	Unit	1,00	1,00	52.929.406.000	49.757.025.631	Pergeseran/perubahan	
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan Pembangunan kawasan di lokasi IKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	75,00	75,00	5.000.000.000	4.804.579.946		
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang	Indeks Perencanaan Tata Ruang	Persen	11,00	11,00	1.250.000.000	1.239.431.019	1. terbatasnya anggaran Bimtek Fasilitasi Persub RDTR dari Kementerian ATR/BPN	1. mengajukan surat permohonan Bimtek Fasilitasi Persub RDTR ke Kementerian





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PENATAAN RUANG			(RRTR) Kabupaten/Kota							2. terbatasnya SDM teknis yang memahami proses pengajuan persetujuan substansi dan penetapan RTRW/RDTR 3. proses pengajuan persetujuan substansi dan penetapan RTRW/RDTR/kebijakan tata ruang lainnya melibatkan OPD/instansi/lembaga lain sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung dengan pihak tersebut	ATRBPB 2. menyelenggarakan bimtek/pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada 3. menambah tenaga teknis pelaksana melalui mekanisme rekrutmen outsourcing yang sesuai dengan peraturan perundangan 4. melakukan koordinasi secara intensif ke Kementerian ATRBPB dan OPD/instansi/lembaga terkait tata ruang untuk meningkatkan bargaining position penyelesaian RTRW/RDTR/kebijakan tata ruang lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelaksanaan Tata Ruang	Persen	15,04	15,04	1.900.000.000	1.871.962.830	1. terbatasnya SDM teknis yang memahami proses penyusunan RTRW/RDTR 2. proses penyusunan RTRW/RDTR melibatkan instansi/lembaga lain sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung dengan pihak tersebut 3. masih minimnya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	1. menyelenggarakan bimtek/pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada 2. menambah tenaga teknis pelaksana melalui mekanisme rekrutmen outsourcing yang sesuai dengan peraturan perundangan 3. melakukan koordinasi secara intensif ke Kementerian ATRBPB dan OPD/instansi/lembaga terkait tata ruang untuk meningkatkan bargaining position penyelesaian RTRW/RDTR/kebijakan tata ruang lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara 4. meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												sosialisasi/ workshop/pelatihan/ seminar/ bazaar/pameran/dll
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	Persen	5,00	5,00	550.000.000	478.138.670	1. masih ada RDTR kecamatan yg belum di Perbup kan 2. Keterbatasan SDM Teknis yang memahami terkait ijin pemanfaatan Ruang 3. banyak pelaku usaha yg belum mengerti jenis KKPR 4. perlu untuk mengupgrade hardware agar Sistem Informasi Penataan Ruang bisa optimal dimanfaatkan	1. akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses Perbup 2. melakukan pelatihan2 yang akan dilakukan tahun depan 3. melakukan penyebaran informasi dan membuka layanan konsultasi terkait KKPR dan jenis usaha 4. sudah menganggarkan untuk upgrade dan update berkala
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pengendalian Tata Ruang	Persen	3,75	3,75	1.300.000.000	1.215.047.427	1. Keterbatasan SDM Teknis yang mendalami terkait pengawasan dan pengendalian 2. Banyak masyarakat yang belum memahami tentang penataan ruang 3. Banyak juknis dan juklak yang baru disampaikan pada pertengahan dan akhir tahun	1. mengajukan penambahan dan pelatihan2 yang diperlukan 2. berkomunikasi dengan pihak terkait dan menganggarkan untuk penyebaran informasi/publikasi 3. melakukan koordinasi dengan kementerian/pemerintah pusat secara berkala
4. Bidang Perumahan dan Permukiman												
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	71,5	71,08	63.655.148.709	56.999.808.228	Adanya Perubahan Perhitungan dari Permenpan No.35 tahun 2023 berubah menjadi Permenpan N0.88 Tahun 2023	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	550.000.000	420.198.709	Ketersediaan data	
	BIDANG PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	39.505.030.752	36.246.150.592	Keterlambatan data dan informasi yang diterima	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kawasan Permukiman										
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	450.000.000	327.750.307	Menyesuaikan data realisasi dengan pencatatan Aset	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	100.000.000	92.571.091	Adanya beberapa ASN yang Kurang Kooperatif	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7	7	4.566.263.799	4.149.429.353	SDM yang kurang kompeten	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	203	203	5.966.526.000	5.844.560.000	-	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	7.394.982.658	5.768.526.646	-	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	143	143	5.122.345.500	4.150.621.530	-	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen	100	100	9.766.497.560	6.636.506.838	Tidak adanya Penetapan status bencana dari Kepala Daerah yang menjadi dasar hukum dalam penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana	
					Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Persen	100	100			Permasalahan sosial relokasi warga, atau penolakan masyarakat terhadap pembangunan di lokasi tertentu	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	Dokumen	6	6	1.170.113.000	1.021.966.918	Masih banyak Titik-titik Rawan Bencana yang belum teridentifikasi berdasarkan data dari BPBD (Dokumen Kajian Rawan Bencana)	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Kegiatan	1	1	175.000.000	99.231.160	SDM yang ada belum memahami pada saat pasca bencana dan relokasi.	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	Unit	35	24	7.171.384.560	4.797.080.669	Tidak ada SK bencana yang diterbitkan kepala daerah	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	2	2	1.250.000.000	718.228.091	-	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	persen	42,72	77,42	15.685.660.000	12.496.800.620	1. Mindset negatif masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh. 2. kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan adanya konflik sosial seperti penolakan relokasi masyarakat yang berada di kawasan yang bukan merupakan fungsi permukiman sesuai dengan RTRW	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	584.000.000	344.991.322	-	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	Hektar (Ha)	9,44	9,44	15.101.660.000	12.151.809.298	Adanya Kawasan Ilegal sepadam sungai	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	6,7	2,9	35.700.000.000	27.976.954.410	1. nilai 2.90 persen belum valid, perhitungan nilai ini dari perhitungan laporan triwulan ke III dan masih dalam proses pengumpulan data dan proses perhitungan di triwulan IV. 2. data yang belum	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tervalidasi sehingga perlu waktu untuk pendataan ulang. 3. Material sering kali mengalami kelangkaan.	
					Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	Unit	517	617			1. karena data yang diberikan untuk sasaran RTLH merupakan data yang belum terverifikasi dilapangan. 2. Pendataan Kebutuhan Material untuk perbaikan dilakukan ditahun yang sama dengan pelaksanaan sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan verifikasi dan pendataan kebutuahn material kerusakan untuk perbaikan.	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi	Unit	517	617	35.700.000.000	27.976.954.410	1. karena data yang diberikan untuk sasaran RTLH merupakan data yang belum terverifikasi dilapangan. 2. Pendataan Kebutuhan Material untuk perbaikan dilakukan ditahun yang sama dengan pelaksanaan sehingga dibutuhkan waktu yang lebih untuk melakukan verifikasi dan pendataan kebutuahn material kerusakan untuk perbaikan.	
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	persen	4,48	0,99	223.285.524.651	198.794.523.731	Kurangnya Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan/Desa menyebabkan Tumpang tindih pelaksanaan pekerjaan serta belum adanya pembatasan kewenangan yang jelas antara pemerintah Daerah dengan Kecamatan/ Kelurahan/Desa	
	BIDANG PERUMAHAN	Dinas Perumahan dan		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU	persen	11,81	11,81	223.285.524.651	198.794.523.731	Adanya Tumpang Tindih pekerjaan antara	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kawasan Permukiman									Kecamatan/kelurahan dan desa	
5. Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat												
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	64,27	29.281.342.566	26.430.518.783	Tidak seluruh ASN mengerti arti pentingnya pencapaian target	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		26	26	933.870.004	827.630.495	Kurang Koordinasi di semua unsur pendukung organisasi	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	17	17	18.461.695.282	16.103.869.692	Kurang Koordinasi di semua unsur pendukung organisasi	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Layanan	12	12	26.821.166	26.156.000	Kurang Koordinasi di semua unsur pendukung organisasi	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	6	6	1.653.391.043	1.563.011.223	Kurang Koordinasi di semua unsur pendukung organisasi	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Unit	12	12	7.010.543.571	6.904.742.373		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	85	85	1.195.021.500	1.005.109.000		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persen	64	98,9	17.871.593.836	16.758.632.913	Masih belumnya terkoordinasi dengan baik antar OPD teknis Pemangku perda yang memuat sanksi	
					Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Kertertiban dan Keindahan)	Persen	100	100			terjadi jaringan gangguan internet sehingga proses administrasi terlambat	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Kertertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum	Kasus	1,000,00	1,000,00	17.026.600.836	16.010.419.062		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah perda yang ditegakkan	Perda	3	37	725.232.000	631.883.206	Masih belum terjalannya koordiansi yang baik antar pemangku perda OPD teknis terkait	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina	Orang	1	3	119.761.000	116.330.645	Apabila tidak tersedia anggaran untuk Diklat PPNS dan Kuota Peserta terbatas apabila tidak secepatnya untuk mendaftarkan anggota	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79	64,64	37.698.982.736	34.117.885.743	komunikasi dan koordinasi antarBidang sangat kurang. Komunikasi dan koordinasi memiliki peran penting untuk meningkatkan efektivitas pekerjaan karenanya dibutuhkan peningkatan koordinasi tersebut menyatukan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pemahaman pelaksana pada pelaksanaan SAKIP	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	750.000.000	690.778.663	Tidak ada Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	12	12	9.660.143.329	7.675.953.872	Tidak ada Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	3	225.000.000	220.990.080	PPTK lambat melaksanakan kegiatan sehingga banyak sub kegiatan dilaksanakan di akhir tahun yang berakibat realisasi kegiatan tidak sesuai target rencana	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah	Layanan	100	90	975.000.000	774.924.909	PPTK lambat melaksanakan kegiatan sehingga banyak sub kegiatan dilaksanakan di akhir tahun yang berakibat realisasi kegiatan tidak sesuai target rencana	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Yang Disediakan	Bulan	12	12	1.160.500.000	1.043.174.028	Tidak ada Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	19.846.265.214	19.490.515.953	Tidak ada Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	12	12	2.088.185.623	1.252.757.342	Tidak ada Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	165	165	2.993.888.570	2.968.790.896	Tidak ada Faktor Penghambat dalam pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	15,11	44,8	7.661.936.560	5.582.152.472	Terbatasnya kuantitas dan kualitas relawan penanggulangan bencana 2.. Globalisasi dan kemajuan tehnologi informasi belum secara keseluruhan diterapkan dalam penanggulangan bencana	
					Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	16,55	0				
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100			1. Luas Wilayah 2. Waktu Pelaksanaan 3. Anggaran yang masih kurang	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	Layanan	15	25	255.248.000	160.775.820	1. Kurangnya perencanaan strategis kegiatan 2. Pengumpulan data personil yang mengikuti kegiatan belum memadai 3. Lambatnya respon pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	40	62,57	2.382.860.000	1.698.466.322	1. Kapasitas sumberdaya aparatur yang terbatas 2. Luas Wilayah Kutai Kartanegara 3. waktu pelaksanaan kegiatan yang terlalu sempit dengan pelaksanaan yang lain 4. terlalu terikat pada anggaran kas yang terbatas	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	100	4.148.828.560	3.102.942.257	1. Luasnya Wilayah 2. Belum Optimalnya Peran Serta Pentahelix Dalam Penyelenggaraan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										Penanggulangan Bencana Pada Saat Terjadinya Bencana	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana di daerah	Dokumen	2	2	875.000.000	619.968.073	1.kurangnya perencanaan 2. kurangan pengembangan kapasitas pegawai 3. kurangnya sapras 4. kurang keterbukaan komunikasi dan transparansi keterbukaan tidak memadai	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	71	46,31	29.663.361.933	27.653.842.166	masih ada banyak indikator indikator penilai sakip yang belum sempurna dikerjakan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	2	2	288.000.000	278.882.120	Kondisi SDM yang masih belum memahami proses penyusunan DOKumen PERencanaan perangkat daerah	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2	2	12.725.724.145	11.375.824.082		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	75.000.000	66.450.000		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	1	1	500.000.000	451.515.520	Jumlah SDM yang belum memadai sehingga beban pekerjaan jmenjadi terlalu tinggi	Mengikutsertakan bimtek atau diklat terkait mekanisme pelayanan tinggi





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	2	2	1.662.148.200	1.555.600.624	belum semua tenaga honorer memiliki kualifikasi keterampilan, terutama yang bertugas dalam pemadaman dan penyelamatan	Sarana & PRasarana yang memadai dan tenaga honorer yang sudah mulai memiliki kualifikasi dalam pekerjaannya
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksanannya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Bulan	12	12	2.926.496.000	2.882.060.234	ada beberapa bagian spare part kendaraan yang sulit didapatkan, terutama kendaraan operasional lapangan yang berusia tua	pelaksanaan melibatkan pihak ketiga... dan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan	Laporan	12	12	5.453.567.338	5.097.198.847	masih belum memahami proses penyusunan laporan dengan maksimal	Meminta advice dan pembelajaran kepada bagian aset dalam penyusunan laporan yang ideal
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	165	165	6.032.426.250	5.946.310.739		
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Responsetime Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	87,72	23.838.144.771	22.757.238.414	belum seluruh kecamatan memiliki pos sektor pemadam kebakaran	Agar seluruh kecamatan memiliki pos sektor pemadam kebakaran dan pembentukan relawan pemadam kebakaran di tingkat desa/kelurahan
					Jumlah Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Kelompok	70	70			SDM yang memiliki kualifikasi sebagai penyuluh pemadam kebakaran belum ada, sehingga dalam pembinaan masih menyampaikan materi sebatas pengetahuan yang masih bersifat teknis umum	Dipelrukan kualifikasi penyuluh pemadam kebakaran agar penyampaian materi lebih ideal
					Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	87,2			belum seluruh kecamatan memiliki pos sektor pemadam kebakaran	Agar seluruh kecamatan memiliki pos sektor pemadam kebakaran dan pembentukan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												relawan pemadam kebakaran di tingkat desa/kelurahan
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembentukan Balakar (Relawan Pemadam Kebakaran)	Persen	100	100	19.413.144.771	18.887.190.165	Tidak ada permasalahan	
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan Yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	2	2	250.000.000	168.827.001	SDM yang memiliki kualifikasi inspeksi sarana dan prasarana prooteksi kebakaran bangunan dan gedung belum ada. begitu juga dengan peralatan yang digunakan untuk menguji sarana dan prasarana tersebut.	Menyiapkan Kualifikasi SDM untuk inspeksi peralatan proteksi kebakaran melalui diklat inspektur
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran Yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	2	1	100.000.000	14.280.000	Belum memiliki tim terpadu dalam melakukan investigasi dan belum memiliki laboratorium untuk melakukan uji sebab keajaiban kebakaran	Menyiapkan Kualifikasi SDM untuk inspeksi peralatan proteksi kebakaran melalui diklat investigator dan penyiapan laboratorium
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran	Kelompok	70	70	3.525.000.000	3.207.452.248	belum semua relawan pemadam kebakaran mendapat dukungan berupa sarana & prasarana	kelompok relawan pemadam kebakaran selain dibekali keterampilan juga hendaknya difasilitasi sarana dan prasarana peralatan pemadam kebakaran, seperti APD dan mesin pompa pemadam kebakaran untuk penanganan awal jika terjadi kebakaran
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	5	11,2	550.000.000	479.489.000	masih ada beberapa kecamatan yang belum memiliki pos sektor kebakaran sehingga belum bisa mendekatkan layanan pemadaman dan evakuasi korban kebakaran secara menyeluruh di Kabupaten Kutai Kartanegara	Agar seluruh kecamatan memiliki pos sektor pemadam kebakaran dan pembentukan relawan pemadam kebakaran di tingkat desa/kelurahan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6. Bidang Sosial												
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	67,49	23.200.938.375	19.376.911.008	Adanya pembaharuan pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana peraturan ini belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh ASN pada Dinas Sosial	Meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami SAKIP
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP	Nilai	81	67,49	465.000.000	302.757.286	Adanya pembaharuan pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana peraturan ini belum dipahami sepenuhnya oleh seluruh ASN pada Dinas Sosial	Meningkatkan kapasitas SDM dalam memahami SAKIP
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	22	11.757.027.460	9.345.024.646	Tingkat akurasi perhitungan kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang masih kurang tepat	Melakukan Rekonsiliasi kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara berkala
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Laporan	4	6	189.460.000	177.673.221	1. Keterbatas Anggaran Kegiatan 2. Masih ada barang yang rusak tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset.	1. Melakukan upaya perbaikan perencanaan yang lebih matang 2. Melakukan Rekonsiliasi BMD, 3. melakukan penghapusan barang - barang yang rusak
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	Dokumen	2	2	680.000.000	568.672.088	Terbatasnya Kualitas SDM	Memberikan kesempatan kepada Seluruh ASN untuk meningkatkan Kompetensi dengan mengikutsertakan dalam Pelatihan/Bimtek/Diklat sesuai dengan Tugas dan Fungsinya





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	Layanan	8	8	1.591.984.400	1.357.918.522	1. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan 2. ketidaksesuaiannya kebutuhan dengan kegiatan dilapangan sehingga dapat menghambat kelancaran kegiatan,	Melakukan upaya perbaikan perencanaan yang lebih matang
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	4.163.377.939	3.946.400.000	Tingkat Perhitungan kebutuhan barang milik daerah masih kurang tepat	Melakukan perhitungan kebutuhan BMD yang sesuai dengan kebutuhan
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	1.293.878.576	1.167.955.933	Tidak ada Faktor kendala dalam pelaksanaan Kegiatan	-
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	Persen	100	98	3.060.210.000	2.510.509.312	1. terjadi Ketidaksesuaian Kode Rekening Belanja sehingga ada beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana, 2. Keterbatasan SDM yang Kompeten,	1. Melakukan Perencanaan yang lebih Matang dalam proses kegiatan, 2. Memaksimalkan SDM yang Berkompeten
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Persen	90	90	7.814.000.000	6.842.546.992	SDM yang belum memahami sebagai PSKS terkendala kurangnya pengetahuan dan masih belum sesuai dengan tugas - tugas sebagai PSKS kedepan masih perlu di berikan wawasan tentang tugas dan peran PSKS agar dalam peran dalam usaha kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran.	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	Orang	50	60	75.000.000	65.183.203	kurang antusias masalah Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten kutai kartanegara walupun kasus pengumpulan uang banyak terjadi namun masyarakat menjadikan amal	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	Persen	100	100	7.739.000.000	6.777.363.789	Masih belum maksimal dalam memberikan materi - materi penajaman tugas fungsi kedepan akan di lakukan penajaman materi	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											sengai penunjang kinerja kelembagaan ataupun SDM perorangan .	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	Persen	100	100	50.000.000	36.448.230		
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	Persen	100	100	50.000.000	36.448.230	Tidak ditemukan hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan, karena pelaksanaan kegiatan tergantung pada kejadian migran korban tindak kekerasan yang harus dipulangkan	-
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	5.299.105.590	4.931.376.972	Kekurangan tenaga Pekerja Sosial Profesional, SDM Aparatur yang tersedia belum memenuhi kualifikasi profesi Pekerja Sosial	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	Orang	1468	1.439	4.553.406.590	4.311.800.588	1. Terdapat pemerlu pelayanan yang tidak dapat dilayani karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan 2. Pemerlu pelayanan tidak ditemukan saat akan diberikan pelayanan sosial	Melakukan seleksi terhadap usulan pemerlu pelayanan baru yang memenuhi syarat sehingga dapat dilayani dan target terpenuhi
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Orang	595	405	745.699.000	619.576.384	1. Kondisi fasilitas Pelayanan Sosial (shelter) yang kurang memadai 2. Jumlah yang memerlukan pelayanan sesuai kewenangan kabupaten lebih sedikit dibandingkan yang direncanakan	Mengoptimalkan fasilitas yang tersedia di shelter dan mengajukan permohonan rehab fasilitas yang tidak berfungsi dengan baik
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	96,66	97,26	10.572.980.000	9.530.162.652	Kurang ketersediaan SDM Pengisi Data Kabupaten/Kota	- Tersedianya petugas Lapangan seperti Puskesmas, TSKS dan Pendamping PKH - Tersedianya Anggaran yang mencukupi. -





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			kehidupan kemasyarakatan									Tersedianya SPD yang tepat waktu.
					Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	97	97,26			Terdapat Data PMKS yang meninggal dunia / pindah domisili / tidak ditemukan, sehingga pelayanan tidak dapat direalisasikan.	- Tersedianya petugas Lapangan seperti Puskesmas, TKSK dan Pendamping PKH - Tersedianya Anggaran yang mencukupi. - Tersedianya SPD yang tepat waktu.
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	Orang	25	25	630.280.000	584.081.896	Orang Tua Anak masih ada yang belum berkenan menitipkan anaknya ke panti Odah Ngasoh Kanak dan atau anak sangat lengket dengan orang tuanya	Keaktifan petugas PUSKESOS dilapangan, sarana prasarana yang tersedia
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Persen	100	100	9.942.700.000	8.946.080.756	- Pergantian petugas/Puskesmas yang mengakibatkan terkendalanya update aplikasi SIKS-NG data DTKS - Di beberapa daerah terdapat blank spot (jaringan internet tidak ada / tidak stabil)	- Dinas Sosial melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan implementasi aplikasi SIKS-NG lapangan dan back office untuk pendataan DTKS
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Persen	100	100	1.360.000.000	1.139.523.722	Pemanfaatan Transportasi (Alat Angkut) memerlukan ijin pemakaian terlebih dahulu sehingga sering menghambat proses penyaluran Bantuan, Data bersifat global (Laporan dari Desa), Surat resmi dari Desa/Kelurahan/kecamatan (Permohonan Bantuan) seringkali terlambat, Kondisi jalan, jarak tempuh lokasi yang dituju	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	Persen	100	100	820.000.000	683.717.851	Data masih sementara masih perlu menunggu proses update data korban, Surat Resmi belum disampaikan ke Dinsos Kukar, Alat Angkut tidak tersedia di kantor dan perlu menggunakan surat ijin peminjaman mobil ke umum, jarak tempuh ke	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											lokasi, kondisi jalan menuju lokasi	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	Desa	4	0	540.000.000	455.805.871	SK Kepengurusan KSB sudah tidak berlaku (Batas masa bakti) selesai, tidak melaporkan ke Dinas Sosial mengenai KSB Vakum/terhenti (tanpa ada keterangan), Tidak memenuhi syarat dengan jumlah kepengurusan, Belum ditetapkan kampung yang dijadikan KSB, Adanya pemekaran wilayah sehingga perlu dikoordinasikan kembali tentang KSB, Perlunya bantuan Dinas Sosial Provinsi dalam memberikan pembekalan tentang KSB, Sulit memulai karena tidak ada informasi dari pejabat sebelumnya tentang progress KSB yang telah dilakukan sehingga harus memulai dari awal dengan mencari SK KSB ke Kecamatan	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang di kelola	Persen	100	100	1.862.000.000	1.683.186.782	Tidak Ada	
	BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Persen	100	0	1.862.000.000	1.683.186.782	Karena perubahan nomenklatur dan bidang yang menangani baru dilantik pejabatnya bulan Maret 2024 maka kegiatan ini sebelumnya sudah dilaksanakan dan diatur oleh Bagian Umum, Rekanan CV (Pihak Ke 3) diketahui PPKom dan Bagian Umum	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





Tabel 98. Pelaksanaan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7. BIDANG TENAGA KERJA												
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	71,50	72,00	15.094.099.333	12.552.570.451	Tidak ada kendala dan permasalahan	Melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kegiatan di sekretariat
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	450.000.000	321.931.554	Tidak ada kendala dan permasalahan dalam kegiatan penyusunan dokumen	merupakan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah untuk pelaksanaan kebutuhan dokumen laporan Tahun 2024
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Laporan	1,00	1,00	10.139.876.880	8.653.286.357	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan	Terpenuhi sarana dan prasarana serta SDM siap kerja dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien, efektif
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1,00	1,00	82.200.000	65.600.000	Tidak ada kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Ketidakesesuaian data aset antara hasil inventarisasi dan laporan keuangan. Barang yang tidak tercatat atau sudah rusak/hilang tetapi masih tercatat sebagai aset.	Tersedianya sarana dan prasarana dalam menyusun laporan BMD
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Sipil Negara	Orang	108,00	69,00	385.000.000	274.428.570	Tidak Ada kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	Tersedianya jumlah Aparatur Sipil Negara
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah	Layanan	8,00	8,00	959.700.000	804.551.417	Tidak ada penghambat kendala dalam pelaksanaan kegiatan Minimnya anggaran daerah untuk menutupi kebutuhan operasional dan gaji aparatur perangkat daerah	Tidak ada penghambat kendala dalam pelaksanaan kegiatan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit BMD yang diadakan	Unit	1,00	1,00	1.601.000.000	1.145.504.250	Keterbatasan Anggaran Daerah rencana yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengadaan BMD	Perencanaan Anggaran yang Tepat Penyusunan rencana kebutuhan barang yang terintegrasi dengan anggaran daerah (APBD). Adanya prioritas pengadaan BMD yang sesuai dengan program kerja perangkat daerah.
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	1.100.280.522	1.002.596.053	Tidak ada kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang siap kerja
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	26,00	24,00	376.041.931	284.672.250	Tidak ada kendala dan permasalahan dalam melaksanakan kegiatan	Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM yang siap kerja
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan layanan data informasi tenaga kerja di wilayah kecamatan	Dokumen	1,00	1,00	100.000.000	94.394.740		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Data Rencana Tenaga Kerja Daerah	Perusahaan	15,00	15,00	100.000.000	94.394.740	Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait (pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan lembaga ketenagakerjaan), yang dapat menyebabkan data yang diperoleh tidak lengkap atau tidak terintegrasi. Ketidaktepatan dalam tanggung jawab pengumpulan data tenaga kerja yang menyebabkan pengumpulan data menjadi terhambat atau tidak konsisten	Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pemerintah pusat dan daerah yang memberikan dukungan penuh dalam perencanaan tenaga kerja daerah melalui kebijakan yang mengarah pada penguatan sistem data ketenagakerjaan. Kebijakan yang mendukung penyusunan dan pemutakhiran data tenaga kerja, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan.
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,50	22,77	16.052.340.000	11.567.169.818	Faktor penghambat dalam pencapaian persentase tenaga kerja bersertifikat	Faktor pendukung pencapaian persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi pada bulan Desember 2024 yang





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kompetensi pada bulan Desember 2024 antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan pelatihan, mengingat beberapa program (APBDP) harus diselesaikan dalam kurun waktu yang singkat menjelang akhir tahun. Selain itu, kurangnya minat dan kesiapan sebagian calon peserta dalam mengikuti pelatihan karena kendala jarak, biaya transportasi, atau kesibukan pekerjaan lain juga menjadi tantangan. Di sisi lain, proses sertifikasi kompetensi memerlukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang terkadang terkendala jadwal dan kapasitas pelaksanaan uji kompetensi. Faktor administratif, seperti kelengkapan dokumen peserta dan proses verifikasi, juga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.	mencapai 507 orang meliputi berbagai aspek, seperti adanya komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan program pelatihan yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, dukungan anggaran dari APBD serta kerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) dan perusahaan di sektor industri juga menjadi kunci dalam memperluas cakupan peserta pelatihan. Ketersediaan fasilitas pelatihan yang memadai serta sinergi dengan program Kukar Siap Kerja yang menargetkan tenaga kerja dari kalangan masyarakat rentan semakin memperkuat upaya dalam memberikan akses pelatihan gratis dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja lokal.
					Penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja KUKAR IDAMAN	Unit	3,00	3,00			Faktor penghambat dalam proses penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja Kukar Idaman yang saat ini masih dalam tahap verifikasi di tingkat provinsi terutama terkait dengan lamanya proses administrasi dan pemenuhan persyaratan legalitas	Faktor pendukung dalam penyediaan Pusat Latihan Tenaga Kerja Kukar Idaman yang saat ini masih dalam proses verifikasi di tingkat provinsi antara lain adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelatihan tenaga kerja melalui





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											status kelembagaan UPTD sesuai dengan regulasi yang berlaku. Koordinasi antara pemerintah daerah (Ortal) dengan pihak provinsi membutuhkan waktu karena harus melalui beberapa tahapan evaluasi dan validasi dokumen, termasuk pengajuan revisi atau perbaikan dokumen jika diperlukan. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam proses pengurusan legalitas lembaga UPTD juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, perbedaan kebijakan dan prosedur antar instansi yang terlibat dalam proses verifikasi dapat memperlambat pengesahan status kelembagaan, sehingga berdampak pada penundaan operasional pusat latihan kerja tersebut.	pembentukan UPTD BLK yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dukungan anggaran yang memadai dari APBD dan peraturan daerah yang mengatur pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi dasar yang kuat dalam proses verifikasi ini. Selain itu, antusiasme dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal terhadap penyediaan fasilitas pelatihan yang representatif serta kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang bersertifikasi turut memperkuat alasan percepatan penyelesaian proses verifikasi. Adanya kerja sama dan komunikasi yang baik antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan pihak provinsi serta dukungan dari program prioritas daerah seperti Kukar Siap Kerja juga mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan administrasi dan teknis dalam proses legalisasi UPTD tersebut.
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	507,00	507,00	15.952.340.000	11.512.773.618	Faktor penghambat dalam pencapaian jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebanyak 507 orang di tahun 2024 mencakup berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan program. Salah satu kendala utama adalah sulitnya menjangkau peserta dari wilayah terpencil atau pelosok yang mengalami keterbatasan akses	Faktor pendukung pencapaian jumlah 507 tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2024 meliputi beberapa aspek strategis, seperti komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperluas akses pelatihan kerja melalui berbagai program unggulan, termasuk Kukar Siap Kerja, yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Dukungan anggaran





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											transportasi dan komunikasi. Selain itu, masih ada tenaga kerja yang kurang memahami pentingnya pelatihan dan sertifikasi kompetensi, sehingga minat dan partisipasi mereka belum maksimal. Proses rekrutmen peserta juga terkendala oleh keterbatasan waktu, terutama untuk memastikan seluruh peserta memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan. Di sisi lain, kapasitas lembaga pelatihan yang terbatas, baik dari segi tenaga pengajar maupun fasilitas pendukung, dapat memengaruhi jumlah peserta yang bisa dilayani secara optimal. Kendala teknis lainnya meliputi perubahan jadwal pelatihan, proses sertifikasi yang membutuhkan waktu, serta kesiapan mental dan fisik peserta untuk mengikuti pelatihan hingga selesai.	dari APBD serta kerja sama yang solid dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) dan dunia industri turut mempercepat realisasi target jumlah peserta pelatihan. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dengan beragam bidang keahlian, seperti operator alat berat, mekanik, dan pengelasan, mampu menarik minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Fasilitas pelatihan yang memadai serta penyediaan pelatihan secara gratis menjadi daya tarik utama bagi calon peserta, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat juga memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pelatihan ini.
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia	Lembaga	15,00	15,00	25.000.000	21.335.000	Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta mencakup beberapa aspek yang memengaruhi optimalisasi program. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari beberapa pengelola	Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta meliputi adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas dan akreditasi LPK sesuai standar nasional. Komitmen Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											LPK Swasta terkait standar akreditasi dan regulasi yang ditetapkan pemerintah, sehingga proses pembinaan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia di LPK, baik dalam hal tenaga pengajar bersertifikasi maupun staf administrasi yang kompeten, dapat memengaruhi kualitas pelatihan yang diberikan. Dari sisi anggaran, tidak semua LPK memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan peningkatan fasilitas pelatihan dan kelengkapan peralatan sesuai standar. Tantangan lain adalah rendahnya minat sebagian LPK Swasta untuk berkolaborasi dengan pemerintah karena kekhawatiran terhadap persyaratan administrasi yang dianggap rumit. Di sisi peserta, masih terdapat persepsi bahwa pelatihan di LPK Swasta kurang memberikan jaminan kerja yang pasti, sehingga memengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan.	dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan secara berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting yang memperkuat kualitas lembaga pelatihan swasta. Selain itu, dukungan anggaran dari APBD dan program prioritas seperti Kukar Siap Kerja mendorong kolaborasi dengan LPK Swasta dalam menyelenggarakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Partisipasi aktif dari dunia usaha dan industri dalam mendukung kegiatan pelatihan, baik melalui penyediaan fasilitas, instruktur, maupun kesempatan kerja bagi lulusan LPK, juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Adanya motivasi dari pihak LPK Swasta untuk meningkatkan kapasitas dan akreditasi lembaga mereka agar dapat bersaing dan memberikan layanan pelatihan berkualitas kepada masyarakat turut memperkuat efektivitas program pembinaan ini.
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktif	Perusahaan	15,00	15,00	25.000.000	21.240.000	Faktor penghambat dalam pelaksanaan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil	Faktor pendukung dalam pelaksanaan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil meliputi adanya kebutuhan yang





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											mencakup beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran dari pemilik perusahaan kecil mengenai pentingnya peningkatan produktivitas dalam bisnis mereka. Banyak pelaku usaha kecil yang masih berfokus pada operasional sehari-hari dan kurang memberikan perhatian pada aspek perencanaan jangka panjang dan efisiensi kerja. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya dari pemilik usaha untuk mengikuti sesi konsultasi secara penuh menjadi hambatan tersendiri. Faktor lain yang memengaruhi akses perusahaan kecil terhadap teknologi dan informasi terbaru, yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas. Di sisi teknis, proses adaptasi dan implementasi rekomendasi dari hasil konsultasi sering kali terhambat oleh kurangnya keterampilan tenaga kerja di perusahaan kecil. Terakhir, kondisi ekonomi dan regulasi yang berubah-ubah juga dapat memengaruhi	tinggi dari pelaku usaha kecil untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Komitmen pemerintah daerah, khususnya Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara, dalam mendorong produktivitas tenaga kerja melalui program pembinaan perusahaan kecil menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat keberhasilan konsultasi ini. Dukungan kebijakan daerah yang berfokus pada pengembangan UMKM serta penyediaan tenaga ahli dan konsultan yang berkompeten juga menjadi penunjang penting. Selain itu, antusiasme dari pemilik dan pengelola perusahaan kecil yang ingin memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kualitas produk, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki turut mendorong pelaksanaan konsultasi yang efektif. Kolaborasi dengan asosiasi pengusaha dan lembaga pendukung lainnya juga memperkuat upaya konsultasi dalam memberikan solusi praktis yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kecil di daerah.





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kemampuan perusahaan kecil untuk mengikuti arahan produktivitas yang diberikan selama proses konsultasi.	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Persen	0,25	1,00	50.000.000	11.821.200	Faktor penghambat dalam pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota meliputi adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang cukup lengkap dari instansi terkait, seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga pelatihan kerja, juga menjadi penunjang penting dalam melakukan pengukuran yang akurat. Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang berfokus pada peningkatan produktivitas, seperti program Kukar Siap Kerja dan pembinaan UMKM, turut memperkuat pelaksanaan pengukuran ini. Teknologi informasi yang semakin berkembang memudahkan proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data produktivitas, sehingga hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis di tingkat kabupaten/kota. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan	Faktor pendukung dalam pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota meliputi adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas. Ketersediaan data ketenagakerjaan yang cukup lengkap dari instansi terkait, seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga pelatihan kerja, juga menjadi penunjang penting dalam melakukan pengukuran yang akurat. Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan daerah yang berfokus pada peningkatan produktivitas, seperti program Kukar Siap Kerja dan pembinaan UMKM, turut memperkuat pelaksanaan pengukuran ini. Teknologi informasi yang semakin berkembang memudahkan proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data produktivitas, sehingga hasil pengukuran dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis di tingkat kabupaten/kota. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam upaya meningkatkan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											aspek kerahasiaan atau beban administrasi tambahan. Kendala teknis lainnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam proses pengumpulan dan analisis data produktivitas, sehingga memengaruhi kecepatan dan keakuratan hasil pengukuran. Perubahan regulasi yang dinamis juga dapat memengaruhi standar dan metode pengukuran produktivitas di tingkat daerah.	produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor juga menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan pengukuran ini.
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	Persen	10,37	13,70	8.672.399.000	7.715.264.852	Kurangnya Laporan Penempatan tenaga kerja pada perusahaan serta tidak efektif pelaksanaan Koordinasi ke perusahaan,	Kebijakan Pemerintah mendukung Program Penempatan Tenaga Kerja berdasarkan Pelayanan Antar kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dimana terdapatnya Informasi pasar kerja dan mendapatkan sarana prasarana serta pembebekalan kewirausahaan masyarakat
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Antar Kerja	Layanan	2,00	2,00	8.472.399.000	7.533.555.452	Kurangnya maksimal Perusahaan yang bisa dilaksanakan Koordinasi tentang Kebutuhan Tenaga kerja, dan Pembebekalan melalui Kesempatan kerja, kurangnya indentifikasi peserta dikarenakan Proposal	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											belum maksimal diterima.	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah informasi pasar kerja	Event	1,00	1,00	200.000.000	181.709.400	Perusahaan yang ikut melaksanakan ada beberapa belum melaporkan hasil kegiatannya, rendahnya kualifikasi pencari kerja yang mendaftar sehingga banyaknya lamaran di tolak	
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang di fasilitasi	Persen	100,00	100,00	11.271.341.700	9.912.045.830		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Perjanjian Kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan	Perusahaan	28,00	28,00	462.000.000	330.349.480		
	BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan ketenagakerjaan	Perusahaan	65,00	65,00	10.809.341.700	9.581.696.350		
8. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	76,00	56,89	13.622.220.063	11.892.156.653	1.Penyusunan Dokumen Terkait masalah data yang kurang Valid. 2. Adanya Perubahan Nilai Standart dari Inspektorat 3. Kurangnya SDM pemahaman Sakib 3.Kurang Pemahaman SDM tentang SAKIB	Melengkapi data yang sesuai permintaan Inspektorat. Mengadakan rapat internal
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	7,00	700.000.000	599.367.323	1. kurang Data yang kurang Valid 2.adanya perubahan standart penilaian dari	Melengkapi data yang sesuai permintaan Inspektorat. Mengadakan rapat internal





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Anak									inspektorat 3.kurangnya sdm yang memahami penilaian sakib	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Dokumen	3,00	3,00	8.306.343.256	6.828.185.835	Sesuai Target	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Uraian indikator kinerja	Laporan	1,00	1,00	150.000.000	108.826.306	Ketersediaan Data Pencatatan aset dan Realisasi Keuangan terdapat selisih karena pada saat pencatatan aset belum terjadi realisasi keuangan	Rekonsiliasi dengan bagian umum yang menangani pencatatan aset
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Layanan	2,00	2,00	567.500.000	553.701.598	Masih kurang lengkapnya data ketersediaan dokumen dan rekaman kepegawaian karena faktor SDM yang masih kurang	Membuat Kartu Pegawai, Buku Mutasi Pegawai, Rekaman Kepegawaian, DUK. Penambahan SDM
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	Layanan	7,00	7,00	1.380.600.000	1.346.735.324	Kurangnya sumber daya anggaran dan Sumber daya manusia	Penambahan SDM
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	16,00	16,00	602.324.000	580.006.000	Kurangnya sumber daya anggaran dan Sumber daya manusia	Penambahan SDM
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3,00	3,00	1.155.452.807	1.140.464.067	Kurangnya sumber daya anggaran dan Sumber daya manusia	Penambahan SDM
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Unit	28,00	28,00	760.000.000	734.870.200	Keterbatasan kemampuan teknis, kurangnya sumberdaya anggaran dan SDM	Pelatihan Sistem pengelolaan BMD terintegrasi, penggunaan aplikasi BMD





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERLINDUNGAN ANAK	Perlindungan Anak										
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	19,31	18,74	9.060.321.884	8.446.174.632	Belum Semua ASN memahami dalam menyusun GAP dan GBS	Perlu pemahaman ASN dalam menyusun GAP dan GBS dalam bentuk pendampingan atau pelatihan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	56,00	56,00	425.000.000	400.671.960	Tidak Ada Kendala Yang Di Hadapi	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pemberdayaan Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Organisasi	30,00	30,00	4.335.321.884	3.856.888.662	Tidak Ada Kendala Yang Di Hadapi	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	28,00	30,00	4.300.000.000	4.188.614.010	Tidak Ada Kendala Yang Di Hadapi	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00	1.769.431.000	1.440.437.056	1. Keterbatasan Sumber Daya 2. Aksesibilitas dan Infrastruktur: a. Jarak dan Lokasi b. Fasilitas yang Terbatas 3. Regulasi dan Kebijakan	Perlu penambahan SDM, tersedianya Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Dokumen	2,00	1,00	355.074.000	204.549.164	1. Keterbatasan Sumber Daya 2. Aksesibilitas dan Infrastruktur: a. Jarak dan Lokasi b. Fasilitas yang Terbatas 3. Waktu Pelaksanaan	Perlu penambahan SDM, tersedianya Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6,00	6,00	1.149.357.000	1.073.999.100	Tidak mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan.	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Layanan	6,00	6,00	265.000.000	161.888.792	1. Keterbatasan Sumber Daya 2. Aksesibilitas dan Infrastruktur: a. Jarak dan Lokasi b. Fasilitas yang Terbatas 3. Regulasi dan Kebijakan	Perlu penambahan SDM, tersedianya Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Persen	50,00	0,00	1.327.816.000	1.162.455.849	Belum tersedia anggaran dalam SPD	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3,00	3,00	650.000.000	560.421.500	Tidak mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan.	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Lembaga	5,00	10,00	577.816.000	529.954.226	Tidak mengalami hambatan dalam melakukan kegiatan.	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Layanan	3,00	5,00	100.000.000	72.080.123	Frekuensi pembinaan lembaga penyedia layanan masih kurang	Melakukan komunikasi inter dan intra personal, koordinasi dengan penyedia layanan KG dan Hak Anak
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan		PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten	Persen	57,69	56,00	250.000.000	230.582.968	Kurang Optimalnya Perangkat Daerah	Membuat Surat Edaran tentang pemberian data yang dibutuhkan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	DAN PERLINDUNGAN ANAK	dan Perlindungan Anak		SISTEM DATA GENDER DAN ANAK							Dalam Memberikan Data	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	3,00	250.000.000	230.582.968	Belum Optimalnya Perangkat Daerah Dalam Memberikan Data	Membuat Surat Edaran tentang pemberian data yang dibutuhkan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	770,00	790,00	1.130.000.000	996.002.742	data kelembagaan dan konvergensi lintas sektor belum lengkap	Melakukan pendataan sesuai kebutuhan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	3,00	600.000.000	524.442.400	frekuensi pendampingan pembinaan teknis dan monitoring / evaluasi masih kurang	melakukan pembinaan dan movev secara kontinyu
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	4,00	530.000.000	471.560.342	keterbatasan SDM , penganggaran dan frekuensi Movev, Pembinaan Teknis PHA	Penambahan SDM
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00	1.315.700.000	1.059.752.324	1. Keterbatasan Sumber Daya 2. Aksesibilitas dan Infrastruktur: a. Jarak dan Lokasi b. Fasilitas yang Terbatas 3. Regulasi dan Kebijakan	Perlu penambahan SDM, tersedianya Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	2,00	286.200.000	171.932.340	1. Keterbatasan Sumber Daya 2. Aksesibilitas dan Infrastruktur: a. Jarak dan Lokasi b. Fasilitas yang Terbatas 3. Regulasi dan Kebijakan	Perlu penambahan SDM, tersedianya Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Layanan	6,00	6,00	635.480.000	616.430.037	Tidak mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan.	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Lembaga	8,00	5,00	394.020.000	271.389.947	1. Keterbatasan Sumber Daya 2. Aksesibilitas dan Infrastruktur: a. Jarak dan Lokasi b. Fasilitas yang Terbatas 3. Waktu Pelaksanaan	Perlu penambahan SDM, tersedianya Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan
9. BIDANG PANGAN												
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan	Nilai	79,00	66,94	12.492.237.462	10.608.929.584	Terdapat Indikator Penilaian yang Belum bisa dipenuhi Perangkat Daerah	Untuk Evaluasi AKIP tahun berikutnya akan diusahakan melengkapi Dokumen Sesuai Indikator yang ada.
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	16,00	16,00	450.000.000	435.480.125	Tidak ada Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Bulan	12,00	12,00	9.757.531.274	7.950.169.593	Tidak ada Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	12,00	40.000.000	39.638.000	Tidak ada Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	6,00	150.000.000	149.877.232	Tidak ada Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12,00	12,00	725.000.000	679.622.811	Tidak ada Kendala	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Diadakan	Unit	18,00	18,00	170.000.000	166.965.000	Tidak ada Kendala dalam Pencapaian Tujuan	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	562.026.188	552.166.173	Tidak ada Kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Unit	27,00	27,00	637.680.000	635.010.650	Tidak ada Kendala Dalam pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Unit	20,00	11,00	6.250.000.000	5.903.265.035	adanya penyedia yang lambat dalam menyelesaikan pekerjaan	Melakukan Percepatan dalam pelaksanaan Kegiatan sehingga walaupun terlambat bisa selesai pada akhir tahun
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	11,00	11,00	6.250.000.000	5.903.265.035	tidak ditemuinya paktor penghambat pada pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	Kkal/Kapita/Hari	2.175,00	2.021,00	6.354.793.136	6.003.391.014	Konsumsi Beras untuk Kalangan Masyarakat Kota menurun, sehingga konsumsi Energi Cenderung Menurun	Untuk Tahun yang akan datang datang harus lebih banyak dilaksanakan Sosialisasi tentang Makanan Beragam, Bergizi seimbang, sehingga terpenuhi kebutuhan energi ideal.
					Kecukupan Konsumsi Protein	Gram/Kapita/Hari	57,10	65,10				
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)	Persen	5,00	4,10	3.127.820.000	2.963.514.206	tidak ada hambatan (Realisasi Semakin Kecil Semakin Baik, berarti Tidak ada Gejolak Harga Pangan)	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan cadangan Pangan Pemerintah	Ton	125,00	121,60	1.801.973.136	1.791.039.814	Tidak tercapainya Target karena harga Realisasi lebih besar dari Anggaran yang disediakan.	Memaksimalkan Anggaran yang tersedia, sehingga Realisasi mendekati target.





No	Urutan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Kelompok	30,00	30,00	1.425.000.000	1.248.836.994	tidak ada faktor yang menghambat dari pelaksanaan sehingga mendukung berjalannya kegiatan sesuai yang diharapkan	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	Desa	19,00	19,00	4.000.000.000	3.524.499.993	masih kurangnya respon perangkat daerah terkait dengan penyampaian data yang di butuhkan	Meningkatkan Koordinasi antar Instansi dalam pemenuhan Data yang diperlukan
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen	1,00	1,00	100.000.000	95.546.648	data data pendukung dari Perangkat Daerah belum lengkap	Meningkatkan Koordinasi dalam Pemenuhan data yang diperlukan
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	Desa/ Kelurahan	16,00	20,00	3.900.000.000	3.428.953.345	tidak ada	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Aman di Konsumsi	Persen	95,35	97,00	300.000.000	291.608.878	tidak ada penghambat	
	BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Keamanan Pangan Segar di Masyarakat	Persen	95,35	97,00	300.000.000	291.608.878	tidak ada hambatan	
10. BIDANG PERTANAHAN												
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,00	75,57	15.783.911.954	13.932.851.573	1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang	(1). SK. Kepala Dinas Pertanahan dan penataan Ruang tentang juknis penyelesaian sengketa tanah garapan tahun 2017; (2). juknis identifikasi potensi sengketa; (3). diperoleh jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan dari tahun 2009 s/d 2024 dan rekomendasi; (4). diperoleh berita acara mediasi sengketa tahun 2024; (5). diperoleh SOP penanganan dan pengedauan sengketa di tingkat Desa/kelurahan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												dan Kecamatan tahun 2024.
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	15,00	15,00	425.000.000	384.990.589	1. Aparatus Sipil Negara(ASN) bagian perencanaan sangat kurang 2. data pendukung dari bidang teknis lambat diterima	Memaksimalkan peran ASN dan Tenaga harian Lepas (THL) yang ada, Membuat List /daftar PPTK yang lambat memberikan informasi ke atasan agar pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12,00	12,00	10.346.680.193	8.811.135.531	Aparatus Sipil Negara(ASN) bagian perencanaan sangat kurang	Memaksimalkan peran ASN dan Tenaga harian Lepas (THL) yang ada
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	75.000.000	66.770.000	Aparatus Sipil Negara(ASN) bagian perencanaan sangat kurang	Memaksimalkan peran ASN dan Tenaga harian Lepas (THL) yang ada
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	580.270.000	544.170.696	Kurangnya SDM	Memberikan kesempatan kepada Seluruh ASN untuk meningkatkan Kompetensi dengan mengikutsertakan dalam Pelatihan/Bimtek/Diklat sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	7,00	7,00	952.850.000	920.208.200	1. Kurangnya koordinasi yang menyebabkan sistem pengawasan dan evaluasi tidak berjalan dengan baik, 2. Ketidakjelasan regulasi dan SOP pelayanan administrasi	Dibutuhkan perbaikan yang menyeluruh dari aspek SDM, Prosedur, Teknologi maupun Budaya organisasi dalam Perangkat Daerah
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	437.996.000	428.516.000	1. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan penundaan pelaksanaan program, 2. Kurangnya koordinasi antar instansi sehingga dapat menghambat kelancaran program, 3. Kualitas SDM yang terbatas	Melakukan upaya perbaikan perencanaan yang lebih matang, Peningkatan kualitas SDM, Penyederhanaan Birokrasi serta Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	14,00	14,00	1.513.971.761	1.411.907.077	1. Harga material yg tidak stabil sering naik secara tiba-tiba 2. Tidak tersedianya gambar rencana design awal, sehingga cukup menyusahkan dalam pekerjaan sanitasi yg ada di dalam bangunan 3. Bengkel yg cukup antri dan memakan waktu dalam proses perbaikan terutama kendaraan lapangan 4. Beberapa material yg tidak tersedia dan menunggu pengiriman barang 5. Kondisi kendaraan yg cukup banyak memerlukan dana untuk perbaikan dikarenakan kondisi dan keadaan kendaraan	1. melakukan jadwal pelaksanaan yang bisa menyesuaikan dengan penyiapan material tanpa melewati batas waktu pelaksanaan pekerjaan 2. proses rehabilitasi gedung kantor dengan mempertimbangkan keadaan/menyesuaikan dengan kondisi kantor tanpa merubah design awal gedung 3. ketersediaan kendaraan operasional yang terdapat pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 4. melakukan penyesuaian dalam proses pelaksanaan Rehab tanpa mengecualikan jadwal yang telah di buat untuk ketepatan waktu dalam pengerjaan rehabilitasi gedung kantor 5. melakukan perbaikan/pemeliharaan kendaraan dengan menyesuaikan ketersediaan dana.
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	20,00	20,00	1.452.144.000	1.365.153.480	1. Ketidaksesuaian Anggaran dan Perencanaan, 2. Keterbatasan SDM yang Kompeten, 3. Kurangnya Infrastruktur Pendukung, 4. Keterlambatan Pengiriman Barang, 5. Perubahan Kebijakan	1. Melakukan Perencanaan yang Matang dengan didukung Anggaran yang Cukup, 2. Memaksimalkan SDM yang Berkompeten, 3. Sistem Informasi yang memadai, 4. Transparansi dan Akuntabilitas serta Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	90,00	90,00	500.000.000	457.048.950	(1). Data pengaduan dan penanganan sengketa, ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagian data-data tidak terhimpun dengan tertib, karena tidak terintegrasi pengaduan dan	(1). a.) perlu Membangun sistem aplikasi berbasis web atau desktop untuk mencatat, memantau, dan mengelola pengaduan dan penanganan sengketa tanah.b.) perlu Menyusun format baku untuk dokumentasi pengaduan, laporan penanganan, dan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											penanganan sengketa dan konflik; (2). kekurangan SDM dan pengetahuan bagi aparaturnya, baik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta termasuk juga di Bidang P2AP DPPR Kukar, sehingga proses pelayanan pengaduan dan penanganan tidak maksimal; (3). untuk Indikator volume 23 Dokumen belum/lupa dilaporkan untuk dilakukan penyesuaian semestinya Indikator volume 4 dokumen, yang terdiri dari 2 Dokumen sub. kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik dan 2 Dokumen sub.kegiatan mediasi	hasil mediasi. c). perlu Membentuk tim pengumpulan data di lapangan untuk mengintegrasikan data dari desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten; (2) a). perlu Melaksanakan pelatihan tentang administrasi pertanahan, tata cara penyelesaian sengketa, dan mediasi kepada aparaturnya di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. b). diperukan Mengusulkan penambahan tenaga ahli atau tenaga lapangan kontrak khusus untuk membantu pengelolaan pengaduan dan penanganan sengketa. c). diperlukan Melakukan pendampingan berkala oleh tim dari DPPR untuk memastikan kualitas dan standar pelayanan yang diterapkan di tingkat desa dan kecamatan. (3).a). Audit Internal dan Koreksi data. b).penguatan koordinasi internal. c).peningkatan monitoring dan evaluasi; (4). a). Perlu Kolaborasi dengan Pihak Ketiga. b).diperlukan Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa tanah. c). Diperlukan Penguatan Peran Tim Mediasi di Lapangan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	23,00	23,00	500.000.000	457.048.950	(1). Data pengaduan dan penanganan sengketa, ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagian data-data tidak terhimpun dengan tertib, karena	(1). a.) perlu Membangun sistem aplikasi berbasis web atau desktop untuk mencatat, memantau, dan mengelola pengaduan dan penanganan sengketa tanah.b). perlu Menyusun format baku untuk





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											tidak terintegrasi pengaduan dan penanganan sengketa dan konflik; (2). kekurangan SDM dan pengetahuan bagi aparaturnya/asn, baik ditingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta termasuk juga di Bidang P2AP DPPR Kukar, sehingga proses pelayanan pengaduan dan penanganan tidak maksimal; (3). untuk Indikator volume 23 Dokumen belum/lupa dilaporkan untuk dilakukan penyesuaian semestinya Indikator volume 4 dokumen, yang terdiri dari 2 Dokumen sub. kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik dan 2 Dokumen sub.kegiatan mediasi	dokumentasi pengaduan, laporan penanganan, dan hasil mediasi. c). perlu Membentuk tim pengumpulan data di lapangan untuk mengintegrasikan data dari desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten; (2) a). perlu Melaksanakan pelatihan tentang administrasi pertanahan, tata cara penyelesaian sengketa, dan mediasi kepada aparaturnya di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. b). diperukan Mengusulkan penambahan tenaga ahli atau tenaga lapangan kontrak khusus untuk membantu pengelolaan pengaduan dan penanganan sengketa. c). diperlukan Melakukan pendampingan berkala oleh tim dari DPPR untuk memastikan kualitas dan standar pelayanan yang diterapkan di tingkat desa dan kecamatan. (3).a). Audit Internal dan Koreksi data. b).penguatan koordinasi internal. c).peningkatan monitoring dan evaluasi; (4). a). Perlu Kolaborasi dengan Pihak Ketiga. b).diperlukan Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa tanah. c). Diperlukan Penguatan Peran Tim Mediasi di Lapangan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	80,00	62,50	25.328.365.000	20.608.195.852	-Lokasi yang diajukan/dimohon OPD berubah -Tidak aktifnya OPD yang memerlukan Tanah	(1) Lokasi yang diajukan/dimohon berubah. (a).Opd yang memerlukan tanah menyampaikan dokumen Feasibility Study (FS) Dan Detail





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											-Harga yang ditetapkan KJPP tidak sesuai harapan warga	Engineering Design (DED) guna memastikan lokasi dan luasan lahan yang dibutuhkan. (b).Opd yang memerlukan tanah menyampaikan surat kepastian/penunjukan lokasi yang akan dibebaskan. (2) Harga yang ditetapkan KJPP tidak Sesuai Harapan Warga. (a).dibuatkan penetapan lokasi. (b).dilakukan Penilaian Ulang oleh KJPP. (c).jika masih mendapat penolakan maka dilakukan konsinyasi / Penitipan Uang Penggantian Ke pengadilan Sebagimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembngunan Untuk kepntingan Umum
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	5,00	25.328.365.000	20.608.195.852	-Lokasi yang diajukan/dimohon OPD berubah -Harga yang ditetapkan KJPP tidak sesuai harapan warga -Lokasi yang diajukan OPD berubah	(1) Lokasi yang diajukan/dimohon berubah. (a).Opd yang memerlukan tanah menyampaikan dokumen Feasibility Study (FS) Dan Detail Engineering Design (DED) guna memastikan lokasi dan luasan lahan yang dibutuhkan. (b).Opd yang memerlukan tanah menyampaikan surat kepastian/penunjukan lokasi yang akan dibebaskan. (2) Harga yang ditetapkan KJPP tidak Sesuai Harapan Warga. (a).dibuatkan penetapan lokasi. (b).dilakukan Penilaian Ulang oleh KJPP. (c).jika masih mendapat penolakan maka dilakukan konsinyasi / Penitipan Uang Penggantian Ke





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												pengadilan Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembngunan Untuk kepntingan Umum
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke Masyarakat	Persen	90,00	50,49	950.000.000	514.242.774	1. Adanya lokasi yang tidak sesuai 2. Ada sebagian proses pengusulan subyek redistribusi tanah tidak dapat dilanjutkan karena terkendala dengan aturan yang ada.	1. Koordinasi dan konsultasi ke kementerian. 2. melaksanakan studi tiru yang pernah melaksanakan program redistribusi tanah dari beberapa sumber obyek TORA 3. Meningkatkan sinergi antara BPN dengan Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang masuk didalam SK Tim GTRA 4. melakukan survei dan pemetaan ulang untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang kondisi tanah yang akan di redistribusikan. 5. meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat terlibat dalam proses redistribusi tanah agar dapat memberikan masukan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Redistribusi Tanah Serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum	Dokumen	4,00	4,00	750.000.000	413.271.732	1. Adanya lokasi yang tidak sesuai 2. Ada sebagian proses pengusulan subyek redistribusi tanah tidak dapat dilanjutkan karena terkendala dengan aturan yang ada.	1. Koordinasi dan konsultasi ke kementerian. 2. melaksanakan studi tiru yang pernah melaksanakan program redistribusi tanah dari beberapa sumber obyek TORA 3. Meningkatkan sinergi antara BPN dengan Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang masuk didalam SK Tim GTRA 4. melakukan survei dan pemetaan ulang untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang kondisi tanah yang akan di





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												redistribusikan. 5.meningkatkan partisipasi masyarakat agar masyarakat terlibat dalam proses redistribusi tanah agar dapat memberikan masukan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2,00	2,00	200.000.000	100.971.042		1. Identifikasi penyebab ketidak sesuaian karena kesalahan dlm pengumpulan data pengolahan data atau penetapan lokasi 2. Berkoordinasi dgn Instansi Terkait seperti BPN utk mencari solusi yg tepat 3. Disesuaikan rencana redistribusi tanah agar sesuai dgn kondisi lapangan 4. Pastikan proses peninjauan kembali dan penyesuaian rencana dilakukan secara transparan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat	Persen	45,00	45,00	125.000.000	30.786.000	- Klaim dari masyarakat terhadap tanah yang diajukan untuk penetapan tanah ulayat tidak ada patok batas tanah dan bukti penguasaan atau pemanfaatan tanah yang jelas; - syarat agar bisa ditetapkan menjadi tanah ulayat tidak ada yang sesuai pada kondisi eksisting; - belum pernah ada kajian dari pihak manapun keberadaan tanah ulayat di wilayah Kukar	- melakukan FGD / rapat Koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait agar kewenangan dan Identifikasi atau kajian-kajian dari Stakeholder lain yang pernah melakukan bisa menjadi salah satu tindak lanjut untuk penetapan objek dan subjek Penetapan Tanah Ulayat; - Berkoordinasi ke BRIDA untuk untuk mendorong dilaksanakan kajian keberadaan Tanah Ulayat di Kab. Kutai Kartanegara sebagai salah satu bahan dasar ditetapkannya lokasi tanah ulayat; - Melakukan study tiru pada Daerah yang sudah melakukan Penetapan dan Pengukuhan Tanah Ulayat sebagaimana arahan hasil koordinasi dengan Kanwil





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												ATR/ BPN dan Kementerian ATR/BPN RI;
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota	Dokumen	2,00	1,00	125.000.000	30.786.000	- Klaim dari masyarakat terhadap tanah yang diajukan untuk penetapan tanah ulayat tidak ada patok batas tanah dan bukti penguasaan atau pemanfaatan tanah yang jelas; - syarat agar bisa ditetapkan menjadi tanah ulayat tidak ada yang sesuai pada kondisi eksisting; - belum pernah ada kajian dari pihak manapun keberadaan tanah ulayat di wilayah Kukar	- melakukan FGD / rapat Koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait agar kewenangan dan Identifikasi atau kajian-kajian dari Stakeholder lain yang pernah melakukan bisa menjadi salah satu tindak lanjut untuk penentuan objek dan subjek Penetapan Tanah Ulayat; - Berkoordinasi ke BRIDA untuk untuk mendorong dilaksanakan kajian keberadaan Tanah Ulayat di Kab. Kutai Kartanegara sebagai salah satu bahan dasar ditetapkannya lokasi tanah ulayat; - Melakukan study tiru pada Daerah yang sudah melakukan Penetapan dan Pengukuhan Tanah Ulayat sebagaimana arahan hasil koordinasi dengan Kanwil ATR/ BPN dan Kementerian ATR/BPN RI;
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persen	65,00	70,00	824.799.664	726.799.154	- Tidak ditemukan surat tanah asli - patok batas tidak ada - Lokasi berada di HPL Trans - Lokasi berada di WKP Pertamina - perbedaan luas tanah yng signifikan, antara surat tanah dengan hasil ukur	- melakukan pemasangan tanda batas dengan menghadirkan pihak saksi batas RT dan pihak Desa/ Kelurahan dan dibuatkan berita acara pemasangan tanda batas untuk menghindari klaim pihak lain. - dibuatkan surat penguasaan fisik sebagai pengganti surat tanah serta melampirkan surat keterangan tidak sengketa - meminta pihak pengurus barang pada OPD yang bersangkutan (pemilik tanah) untuk melakukan pencatatan KIB - melakukan kordinasi berkala di ATR/BPN terkait





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												- percepatan kegiatan - membuat surat permohonan pelepasan HPL Transmigrasi di kementerian Desa - membuat surat permohonan inclave ke pihak Pertamina - terdapat kekurangan dari pelebaran jalan, perluasan selokan dan dikuasai masyarakat - rencana FGD yang melibatkan seluruh OPD yang memiliki tanah
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah laporan hasil Penyelesaian masalah Tanah Kosong	Dokumen	1,00	1,00	100.000.000	89.567.780	- Tidak ada bukti kepemilikan / perolehan tanah - Dikuasai pihak lain	- Setiap OPD yang memiliki Aset Berupa Tanah agar memasang Tanda Batas yang Jelas dan Pembuatan Papan Pengumuman. - Melakukan FGD untuk semua OPD yang memiliki Aset berupa Tanah. - Membuat Dokumen Penguasaan Fisik Bidang Tanah
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	2,00	3,00	724.799.664	637.231.374	- Patok batas tidak ada - Surat tanah asli tidak ditemukan - belum tercatat di KIB - Bukti Perolehan tidak ada - tidak adanya kepastian dari ATR/BPN terkait pengukuran dan panitia	- melakukan pemasangan tanda batas dengan menghadirkan pihak saksi batas RT dan pihak Desa/ Kelurahan dan dibuatkan berita acara pemasangan tanda batas untuk menghindari klaim pihak lain. - dibuatkan surat penguasaan fisik sebagai pengganti surat tanah serta melampirkan surat keterangan tidak sengketa - meminta pihak pengurus barang pada OPD yang bersangkutan (pemilik tanah) untuk melakukan pencatatan KIB - melakukan kordinasi berkala di ATR/BPN terkait percepatan kegiatan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	84,00	84,00	491.989.000	382.476.272	(1). Belum dilakukan meonev oleh kecamatan, terkait pemenuhan Berita Acara Monev kesesuaian pemanfaatan tanah berdasarkan IMT/SKPT yang diterbitkan (2). Perda No. 2 Tahun 2017 tentang IMTN, belum dilaksanakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan, disamping itu pada objek dan subjek, saat ini tidak berkesesuaian lagi atau bertentangan dengan PP No. 18 tahun 2021 tentang Pendaftaran tanah (3). hasil identifikasi objek tanah negara belum menjadi kesepakatan dengan kecamatan dan desa/kelurahan, karena diperukan sosialisasi dan kesepakatan terlebih dahulu dan hasilnya dapat dilakukan usulan penetapan objek tanah negara yang dapat diterbitkan izin membuka tanah pada kawasan pertanian	(1).a).Perlu Meningkatkan Koordinasi dan Penjadwalan Monev IMT/SKPT. b).perlu Penyusunan Pedoman Monev IMT/SKPT. c).perlu Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital untuk mendokumentasikan hasil Monev secara real-time. d). Memberikan pelatihan kepada aparaturnya kecamatan mengenai pentingnya Monev dan tata cara pelaksanaannya; (2). a).perlu Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). b) perlu Melibatkan instansi terkait dan akademisi untuk memberikan masukan terhadap revisi Perda. c).perlu Mengadakan sosialisasi dan pendampingan kepada desa/kelurahan dan kecamatan tentang penerapan IMTN sesuai ketentuan hukum terbaru. (3). a). perlu Sosialisasi dan FGD (Focus Group Discussion) hasil Identifikasi objek tanah negara yang diusulkan sebagai objek IMT kawasan pertanian. b). perlu Penyusunan Kesepakatan Bersama. c). perlu Tahapan Usulan Penetapan Objek Tanah Negara
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah laporan penerbitan Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	2,00	2,00	491.989.000	382.476.272	(1). Belum dilakukan meonev oleh kecamatan, terkait pemenuhan Berita Acara Monev kesesuaian pemanfaatan tanah berdasarkan IMT/SKPT yang diterbitkan (2). Perda No. 2 Tahun	(1).a).Perlu Meningkatkan Koordinasi dan Penjadwalan Monev IMT/SKPT. b).perlu Penyusunan Pedoman Monev IMT/SKPT. c).perlu Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital untuk mendokumentasikan hasil Monev secara real-time. d). Memberikan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											2017 tentang IMTN, belum dilaksanakan, karena belum ada petunjuk pelaksanaan, disamping itu pada objek dan subjek, saat ini tidak berkesesuaian lagi atau bertentangan dengan PP No. 18 tahun 2021 tentang Pendaftaran tanah (3). hasil identifikasi objek tanah negara belum menjadi kesepakatan dengan kecamatan dan desa/kelurahan, karena diperukan sosialisasi dan kesepakatan terlebih dahulu dan hasilnya dapat dilakukan usulan penetapan objek tanah negara yang dapat diterbitkan izin membuka tanah pada kawasan pertanian	pelatihan kepada aparaturnya mengenai pentingnya Monev dan tata cara pelaksanaannya; (2). a). perlu Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). b) perlu Melibatkan instansi terkait dan akademisi untuk memberikan masukan terhadap revisi Perda. c). perlu Mengadakan sosialisasi dan pendampingan kepada desa/kelurahan dan kecamatan tentang penerapan IMTN sesuai ketentuan hukum terbaru. (3). a). perlu Sosialisasi dan FGD (Focus Group Discussion) hasil Identifikasi objek tanah negara yang diusulkan sebagai objek IMT kawasan pertanian. b). perlu Penyusunan Kesepakatan Bersama. c). perlu Tahapan Usulan Penetapan Objek Tanah Negara
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah	Persen	78,00	100,00	1.150.000.000	1.075.967.600	- Keterbatasan SDM (Tenaga Teknis Pemetaan dan Tenaga Teknis pengambilan Data) - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja, baik sarana kendaraan operasional maupun peralatan penunjang pemetaan;	- Penambahan Tenaga Teknis Pemetaan; - penambahan sarana Mobilitas kendaraan Operasional Lapangan Double Gardan sangat diperlukan, karena akses jalan yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa, sementara di DPPR hanya ada 1 kendaraan operasional Double gardan yang kurang maksimal jalan, digunakan oleh 3 bidang bergantian sehingga menghambat dalam pelaksanaan pengambilan data lapangan; - penambahan peralatan penunjang pemetaan yang masih kurang yakni perangkat





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												komputer dengan kapasitas besar untuk pengolahan data peta;
	BIDANG PERTANAHAN	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Dokumen	1,00	1,00	1.150.000.000	1.075.967.600	- Keterbatasan SDM (Tenaga Teknis Pemetaan dan Tenaga Teknis pengambilan Data) - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kerja, baik sarana kendaraan operasional maupun peralatan penunjang pemetaan;	- Penambahan Tenaga Teknis Pemetaan; - penambahan sarana Mobilitas kendaraan Operasional Lapangan Double Gardan sangat diperlukan, karena akses jalan yang sulit ditempuh dengan kendaraan biasa, sementara di DPRD hanya ada 1 kendaraan operasional Double gardan yang kurang maksimal jalan, digunakan oleh 3 bidang bergantian sehingga menghambat dalam pelaksanaan pengambilan data lapangan; - penambahan peralatan penunjang pemetaan yang masih kurang yakni perangkat komputer dengan kapasitas besar untuk pengolahan data peta;
11. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	61,90	51,87	25.667.716.652	22.246.075.197	Keterlambatan dalam melengkapi beberapa data dukung	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9,00	9,00	418.380.000	366.835.279	-Data data penunjang yang diperoleh dari bidang pelaksana tidak terpenuhi atau terlambat di berikan di sebabkan oleh koordinasi tidak berjalan optimal. -Kompoen data SAKIP belum tersaji di sebab kan oleh koordinasi tidak berjalan optimal.	- Meningkatkan Koordinasi dg bidang - Meningkatkan Koordinasi dengan OPD terkait





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12,00	12,00	17.381.516.534	15.069.431.345		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	2,00	2,00	70.860.000	66.860.000		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3,00	3,00	886.010.000	665.885.906		Tidak ada Kendala dalam melaksanakan kegiatan Administrasi Kepegawaian
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	1.420.370.000	1.248.414.904		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	24,00	24,00	2.169.043.440	2.015.297.000		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	2.711.536.678	2.279.565.282		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	60,00	60,00	610.000.000	533.785.481		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemulihan daya dukung lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	Persen	100,00	100,00	909.609.060	805.346.753	Keterbatasan data sekunder yang dimiliki sehingga mempersulit dalam analisa data.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH	Dokumen	1,00	1,00	349.609.060	335.968.580	Keterbatasan data sekunder dan inovasi daerah menyangkut Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya KLHS	Dokumen	1,00	1,00	560.000.000	469.378.173	Keterbatasan series data yang dimiliki oleh masing-masing OPD terkait pencapaian target TPB / SDGs. Diharapkan untuk masing - masing OPD	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang memiliki target pencapaian TPB / SDGs agar bisa mengacu pada buku meta data yang diterbitkan oleh Bappenas.	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemulihan daya dukung lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	Pohon	200.000,00	200.000,00	3.767.991.447	3.263.366.778	Keterbatasan kewenangan yang dimiliki	Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi ke OPD Provinsi dan Pemerintah Pusat
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	4,00	4,00	2.657.421.447	2.220.542.439	Untuk mencapai output kegiatan kewenangan berada pada OPD lain baik pemerintah provinsi maupun pusat termasuk pihak swasta, selain itu keterbatasan SDM pengelola Lab. yang dimiliki.	Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi ke OPD terkait Pemkab, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Meningkatkan kapasitas SDM yang ada.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	1,00	1,00	122.000.000	100.960.000	Menemukan permasalahan atau titik lokasi pencemaran air limbah	Melakukan koordinasi ke pihak kecamatan atau desa dan pihak perusahaan yang berada di lokasi permasalahan pencemaran air limbah
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	1,00	1,00	988.570.000	941.864.339	Keterbatasan kewenangan pelaksanaan Pemulihan pencemaran, keterbatasan SDM yang dimiliki dan ketersediaan data lahan kritis.	Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi ke OPD terkait Pemkab, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan meningkatkan SDM yang ada.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	Persen	20,00	57,70	2.387.501.719	1.630.927.842	Kesulitan dalam pengadaan lokasi RTH yang ideal di dalam wilayah perkotaan Tenggarong.	Perlu konsistensi dalam perencanaan lokasi RTH yang ideal setiap tahun dan termasuk anggaran yang memadai dalam pembangunan RTH baru.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	1,00	1,00	2.387.501.719	1.630.927.842	Keterbatasan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan kehati.	Perlu melakukan penyusunan dokumen pengelolaan kehati lebih





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												awal pada tahun anggaran.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemulihan daya dukung lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	Dokumen	3,00	3,00	375.000.000	340.730.367	Minim data Kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3	Melakukan Koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaku usaha terkait dalam penyimpanan limbah B3
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelaku usaha	Pelaku Usaha	50,00	29,00	75.000.000	45.780.000	sedikitnya permohonan dalam mem verifikasi tempat penyimpanan limbah B3	Melakukan koordinasi atau sinkronisasi dengan pelaku usaha terkait penyimpanan limbah B3
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3	Pelaku Usaha	50,00	50,00	300.000.000	294.950.367	tidak ada kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	- melakukan seminar teknis / FGD dalam penyusunan dokumen dan melakukan koordinasi ke KLHK terkait dengan penyusunan dokumen.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	19,32	50,63	491.770.940	442.788.873	1. Indikator/kriteria ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan memiliki banyak kriteria dalam pengelolaan lingkungan jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka dianggap tidak taat. 2. kewenangan perijinan yang beralih ke KLHK, tidak diikuti dengan kewenangan pengawasan dampaknya adalah menghambat pelaksanaan kecepatan penyelesaian ketaatan 3. kekurangan personil DLHK dalam memenuhi kriteria sebagai PPTK mengakibatkan personil PPLH harus mengemban tugas lain yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan	1 Melakukan identifikasi jenis usaha dan kegiatan 2. Melakukan koordinasi ke KLHK terkait dengan proses perizinan 3. Melakukan penjadwalan dengan kegiatan lain agar tidak terjadi benturan kegiatan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumlah izin usaha yang diterbitkan	Persen	20,00	20,00	491.770.940	442.788.873	1. Indikator/kriteria ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan memiliki banyak kriteria dalam pengelolaan lingkungan jika salah satu kriteria tidak terpenuhi maka dianggap tidak taat. 2. kewenangan perijinan yang beralih ke KLHK, tidak diikuti dengan kewenangan pengawasan dampaknya adalah menghambat pelaksanaan kecepatan penyelesaian ketaatan 3. kekurangan personil DLHK dalam memenuhi kriteria sebagai PPTK mengakibatkan personil PPLH harus mengemban tugas lain yang dapat menghambat pelaksanaan pengawasan	1 Melakukan identifikasi jenis usaha dan kegiatan 2. Melakukan koordinasi ke KLHK terkait dengan proses perizinan 3. Melakukan penjadwalan dengan kegiatan lain agar tidak terjadi benturan kegiatan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	75,00	75,00	75.000.000	20.532.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH : Untuk pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan terkendala Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang belum disahkan.	Mempercepat Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dengan Berkoordinasi dengan OPD terkait.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota	Persen	75,00	75,00	40.000.000	0	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH :	Mempercepat Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dengan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Untuk pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan terkendala Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang belum disyahkan.	Berkoordinasi dengan OPD terkait.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat	Persen	70,00	70,00	35.000.000	20.532.000	Sampai saat ini belum ada penetapan MHA oleh pemerintah daerah sehingga kegiatan hanya berfokus pada inventarisasi keberadaan MHA	Mempercepat Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dengan Berkoordinasi dengan OPD terkait.
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan	Lembaga	35,00	35,00	342.000.000	308.120.097	1. Sisa pagu anggaran sebagian besar berasal dari biaya perjalanan dinas dalam kota hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan SDM, selisih harga tiket pesawat dan penginapan dan selisih biaya konsumsi kegiatan. 2. Kurangnya kapabilitas personil dalam menangani kegiatan peningkatan Kapasitas LH	1. Memaksimalkan SDM dan waktu yang tersedia 2. membantu personil dalam pemahaman pengembangan kapasitas LH
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Kali	35,00	35,00	342.000.000	308.120.097	Sisa pagu anggaran sebagian besar berasal dari biaya perjalanan dinas dalam kota hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan SDM, selisih harga tiket pesawat dan penginapan dan selisih biaya konsumsi kegiatan. 2. Kurangnya kapabilitas personil dalam menghendel kegiatan	Memaksimalkan SDM dan waktu yang tersedia.





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											peningkatan Kapasitas LH	
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama	Desa/Kelurahan	5,00	6,00	650.000.000	439.399.380	1. Tidak maksimalnya penganggaran karena terkait selisih harga antara penganggaran dengan realisasi harga pasar. 2. Kurangnya ASN yang dapat melakukan perjalanan dinas menghambat pembinaan dan penilaian 3. Perlunya peningkatan kompetensi ASN yang melakukan pembinaan dan penilaian	Perlunya perbaikan penganggaran
					Jumlah Penghargaan Yang Diberikan	Penghargaan	128,00	116,00			Jumlah penghargaan yang diberikan dari target 128 penghargaan dapat direalisasikan sebanyak 116 penghargaan, hal ini disebabkan karena tidak tercapainya batas nilai maksimal untuk meraih penghargaan sehingga berpengaruh terhadap realisasi target.	Melakukan pendampingan dan pembinaan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya	Jenis	2,00	2,00	650.000.000	439.399.380	Sisa pagu anggaran berasal dari selisih harga pengadaan barang dan jasa, ada 8 unit pengadaan laptop dan 8 unit pengadaan printer yang tidak bisa direalisasikan karena kesalahan kode rekening, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja perjalanan dinas dalam kota hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah SDM	Berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang terkait kesalahan kode rekening





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	97,00	100,00	288.000.000	202.141.600	1. Perlunya Peningkatan Kapasitas dalam penganan pengaduan dan pasilitasi penanganan pengaduan. 2. Perlunya penambahan personil dalam membantu penyelesaian sengketa lingkungan	1. melakukan diklat terhadap personil yang melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa lingkungan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Yang Ditindaklanjuti	Laporan	40,00	40,00	288.000.000	202.141.600	1. Perlunya Peningkatan Kapasitas dalam penganan pengaduan dan pasilitasi penanganan pengaduan. 2. Perlunya penambahan personil dalam membantu penyelesaian sengketa lingkungan	1. melakukan diklat terhadap personil yang melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa lingkungan
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	Lokasi	1,00	2,00	87.391.180.586	81.963.366.542	lokasi 6 TPA yang dibangun pada Kecamatan prioritas, dan untuk tahun 2024 sudah dilakukan progres pembangunan Tahap I terhadap 2 TPA yaitu TPA Kota Bangun dan TPA Loa Janan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan untuk TPA Sebulu, TPA Marangkayu dan TPA Kembang Janggut pada kelengkapan adminitrasi dokumen pendukung seperti Detail Engineering Design (DED) dan Izin Lingkungan, sedangkan rencana pembangunan TPA Samboja Barat masuk dalam WP Otorita IKN	Berkoordinasi dengan Instansi terkait terkait pelaksanaan teknis maupun penanggaran pembangunan kedepan terhadap TPA yang belum dilakukan pembangunan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Timbulan sampah	Persen	97,64	45,00			Jumlah pertambahan populasi penduduk dan tingkat kebutuhan gaya hidup mempengaruhi jumlah timbulan sampah	Timbulan sampah dihitung dari jumlah populasi dengan laju timbulan sampah tuk tahun 2024 sebesar 0,47 perjiwa
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Sampah	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	61,11	50,00	87.391.180.586	81.963.366.542	masih terus dievaluasi terutama cakupan layanan wilayah Kecamatan Tenggarong sebagai Ibukota Kabupaten, baik komposisi armada, jalur angkut, sarana prasarana pendukung	Monitoring dan evaluasi terhadap area pelayanan pengelolaan persampahan terutama kecamatan Tenggarong, sedangkan untuk kecamatan lainnya sudah terakomodir dalam anggaran operasional masing-masing sesuai dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah
					Persentase Jumlah sampah yang ditangani	Persen	72,00	70,00			Tidak ada ada kendala	tetap dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap jumlah sampah yang ditangani melalui penyusunan kajian kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah (Jakstrada) yang rutin dilakukan tiap tahun
					Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	24,56	20,00			Tidak ada ada kendala	Tetap dilakukan upaya peningkatan program 3R melalui pembangunan TPS3R dan Bank Sampah
12. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84,00	73,91	18.313.584.368	15.585.747.041	Penyesuaian Penilaian dalam Mengimplementasikan sesuai Pedoman Permenpan 88 Tahun 2021.	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	4,00	150.000.000	145.881.390	Terselesaikan pemenuhan dokumen LKjIP, Survey Kepuasan Masyarakat, dan LPPD	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Laporan	2,00	2,00	11.359.829.199	8.980.692.022	Tersedianya laporan keuangan Semester I dan Semester II	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	96.120.000	56.610.000	Pelaksanaan hibah laptop RT di 20 Kecamatan	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	2,00	100.000.000	91.153.241	Jadwal Bimtek yang akan diikuti oleh ASN dalam setahun telah tersedia, dan persiapan pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6,00	6,00	2.989.721.632	2.797.221.715	Layanan pada Kegiatan Administrasi Umum sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kegiatan	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	51,00	51,00	2.343.264.970	2.301.160.000	Tidak ada kendala	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	1.215.238.567	1.182.358.973	Tidak ada faktor penghambat	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	9,00	9,00	59.410.000	30.669.700	Masih kurangnya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas operasional R4/R2	Diperlukan dukungan penambahan anggaran dalam pemeliharaan kendaraan operasional dinas R4/R2
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-el	Persen	99,00	99,81	1.280.000.000	1.052.601.428	Kesadaran perekaman bagi pemula E-KTP terutama bagi	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	DAN PENCATATAN SIPIL	dan Catatan Sipil	pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT								mahasiswa yang berada diluar Kutai Kartanegara, Perekam untuk ODGJ yang cukup sulit, Perekam untuk Disabilitas yang sulit dikarenakan dari pihak keluarga yang merasa malu, Perekam untuk Lansia Tidak ada pelaporan dari anggota keluarga.	
					Persentase Kepemilikan KIA	Persen	90,00	68,37			Belum adanya dukungan dari Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan KIA, Kesadaran masyarakat atas manfaat KIA masih kurang	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	Dokumen	150.002,00	150.002,00	1.280.000.000	1.052.601.428	Tidak ada faktor penghambat	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	99,00	99,68	828.579.610	761.254.509	Tidak ada faktor penghambat	Terpenuhinya penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun tepat waktu dan sasaran
					Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	Persen	95,00	64,65			Belum paham tentang manfaat Akta Perkawinan Non Muslim, Tidak memiliki Dokumen pernikahan dari pemuka agama, Sudah tidak memiliki pasangan (Suami/Istri sudah meninggal), Status di KK menikah tapi belum memiliki Akta Perkawinan.	Terpenuhinya pelayanan administrasi kependudukan kepemilikan akta perkawinan non muslim
					Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	Persen	99,00	100,00				





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	Dokumen	1.101,00	1.101,00	671.619.610	626.262.729	Tidak ada faktor penghambat	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	Dokumen	13,00	13,00	156.960.000	134.991.780	Tidak ada pelaporan perkawinan pemilik Akta Perkawinan konvensional	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	Persen	100,00	100,00	625.000.000	294.117.135		
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	Dokumen	12,00	12,00	350.000.000	123.006.965	Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melengkapi persyaratan untuk diberikan hak akses pemanfaatan data penduduk	Disdukcapil dalam hal ini akan berupaya terus mensosialisasikan terkait Kerja Sama Pemanfaatan Data Penduduk pada seluruh Perangkat Daerah di Kab.Kutai Kartanegara, baik itu persyaratannya, manfaat yang diterima dan lain-lain.
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rata-rata lama pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jam	1,00	1,00	75.000.000	0	Tidak terdapat faktor penghambat	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1,00	1,00	200.000.000	171.110.170	Kerusakan atau ketidakterbaruan sistem informasi yang digunakan dalam pengurusan dokumen kependudukan dapat menghambat proses administrasi, kesalahan atau ketidaklengkapan	Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut: Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem Berkala, Pelatihan SDM dan Peningkatan Kapasitas Teknologi, Peningkatan Infrastruktur Teknologi, Kolaborasi





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dokumen yang diajukan oleh pemohon, serta verifikasi data yang memerlukan waktu lebih lama, Terbatasnya dana untuk pengembangan infrastruktur atau pembaruan sistem teknologi informasi di instansi yang menangani administrasi kependudukan	dengan Pihak Ketiga, Sistem Verifikasi Data yang Lebih Cepat dan Akurat, Optimalisasi Penggunaan Anggaran, Transparansi dan Sistem Pelaporan, Peningkatan Layanan Mandiri (Self-Service)
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100,00	100,00	160.000.000	91.605.760	Tidak ada kendala	
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	Dokumen	2,00	2,00	160.000.000	91.605.760	Tidak ada	
13. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	82,00	66,74	30.480.231.067	27.683.846.437	1. Kualitas Perencanaan belum berorientasi outcome 2. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai kaidah regulasi 3. Tindak lanjut SOP Evaluasi AKIP belum efektif 4. Belum teridentifikasinya crosscutting kinerja yang relevan berdasarkan Indikator Kinerja PD 5. Belum	1. DPMD telah melakukan rapat pembahasan Hasil LHE untuk ditindaklanjuti oleh semua Bidang dilingkungan DPMD terkait Rekomendasi yang termuat pada LHE 2. DPMD telah mengeluarkan Nota Dinas yang mengintruksi kepada seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, ASN dan THL untuk menindaklanjuti dalam bentuk pemeguhan Dokumen/Eviden





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											dilakukannya reviu SOP berdasarkan kondisi aktual 6. Belum sinkronnya capaian indikator program/kegiatan terhadap indikator sasaran strategis 7. Belum optimalnya pemanfaatan laporan kinerja terhadap penyusunan perencanaan yang realistis 8. Belum optimalnya pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam peningkatan capaian kinerja 9. Kelengkapan dokumen yang disajikan belum sesuai dengan pengukuran kinerja yang diharapkan	berdasarkan rekomendasi LHE Tahun 2024
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	799.894.400	793.666.824	1. Belum terdukungnya data, KAK dan RAB disetiap kegiatan dan sub kegiatan secara maksimal yang dijadikan bahan analisis dalam penyusunan perencanaan 2. Belum terdukung sepeuh bahan dan Data yang diperlukan untuk penyusunan Perencanaan dan Pelaporan hasil Kinerja Perangkat Daerah 3. Belum optimlanya evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Struktural terhadap capaian kinerja dan anggaran per triwulan.	1. Mengeluarkan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Nota Dinas yang ditujukan kepada Pejabat Struktural eselon III dan IV serta Fungsional terkait Pembuatan KAK dan RAB sebagai bahan penyusunan Renja 2. Kepala Dinas Mengeluarkan Nota Dinas agar Pejabat Struktural wajib melakukan evaluasi capaian kinerja per triwulan untuk dilaporkan ke Kepala Dinas sebagai bahan Evaluasi Kepala Dinas terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan.
	BIDANG PEMBERDAYAAN	Dinas Pemberdayaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Laporan	12,00	12,00	14.829.570.943	12.854.467.968	Belum tertibnya PPTK dalam menyampaikan Laporan	Laporan yang dibuat berdasarkan data realisasi





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	MASYARAKAT DAN DESA	Masyarakat dan Desa									Pertanggungjawaban Belanja secara rutin setiap bulan	Setiap Bulan, TW dan Semester
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Laporan	5,00	5,00	48.000.000	46.860.000	Belum ada hambatan dalam capaian target kegiatan	Laporan yang dibuat berdasarkan Data hasil Rekonsiliasi dengan Bidang Aset di BPKAD
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	20,00	110,00	250.000.000	248.851.450	Belum tersedianya Data Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Jabatan Fungsional yang diampu oleh masing-masing ASN	Dilakukannya pendataan pemetaan kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan seluruh ASN dilingkungan DPMD
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	17,00	17,00	7.330.000.000	7.091.276.700	Belum tersedianya data RKBK yang menjadi bahan dalam menyusun RKA sesuai dengan kebutuhan DPMD selama 1 Tahun	Akan dilakukan Penyusunan RKBK setiap Tahun berdasarkan analisis kebutuhan DPMD
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	112,00	4.450.529.000	4.112.149.100	1. Belum update nya data Barang/Aset yang termuat dalam Aplikasi SIMDA ASET 2. Masih banyak barang yang statusnya belum disesuaikan dengan kondisi riil, sehingga mempengaruhi data analisis kebutuhan dan pengadaan barang	Pengadaan yang dilakukan berdasarkan analisis Kebutuhan yang termuat pada RKBMD DPMD
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	20,00	100,00	1.388.586.724	1.317.742.841	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan karena bersifat rutin dan wajib dipenuhi karena terkait dengan kebutuhan wajib kantor	Pengadaan yang dilakukan berdasarkan analisis Kebutuhan yang termuat pada RKBMD DPMD
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	20,00	22,3	1.383.650.000	1.218.831.554	selama kegiatan tidak ada hambatan	Pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan BMD yang statusnya dalam kondisi baik dan digunakan secara rutin





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Desa yang memiliki Tata Ruang Desa	Persen	10,36	11	59.691.837.000	59.295.587.641	Belum adanya regulasi, dalam bentuk juknis dalam sebagai pedoman penyusunan tata ruang desa	Membuat usulan ke Kementerian Desa agar menerbitkan Juknis Tata Ruang Desa
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa	Desa	27,00	23,00	59.691.837.000	59.295.587.641	Belum adanya regulasi, dalam bentuk juknis dalam sebagai pedoman penyusunan tata ruang desa	Membuat usulan ke Kementerian Desa agar menerbitkan Juknis Tata Ruang Desa
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	Persen	100,00	100,00	808.510.650	740.960.084	1. Pihak Desa belum memahami tata cara melakukan kerjasama antar desa 2. Belum adanya regulasi dalam bentuk Perbub untuk mengatur terkait pelaksanaan Kerjasama Antar Desa 3. Belum terpetakannya potensi lokal Desa untuk di kerjasamakan	1. Dilakukannya sosialisasi dan pendampingan tata cara kerjasama antar desa 2. Penyusunan Perbub Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa 3. Dilakukannya pendataan potensi lokal desa
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kerjasama Desa yang difasilitasi	Desa	57,00	57,00	808.510.650	740.960.084	1. Pihak Desa belum memahami tata cara melakukan kerjasama antar desa 2. Belum adanya regulasi dalam bentuk Perbub untuk mengatur terkait pelaksanaan Kerjasama Antar Desa 3. Belum terpetakannya potensi lokal Desa untuk di kerjasamakan	1. Dilakukannya sosialisasi dan pendampingan tata cara kerjasama antar desa 2. Penyusunan Perbub Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa 3. Dilakukannya pendataan potensi lokal desa
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	Persen	95,00	95,00	30.767.536.174	29.743.504.397	1. Masih terdapat beberapa Desa yang belum melakukan Update Data Profil Desa dan Epdeskel karena terkendala dengan Operator yang sering berganti 2. Desa tidak secara rutin melakukan	1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia khususnya Operator Aplikasi yang ada di Desa dan memberikan reword terhadap Operator 2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa supaya memiliki pemahaman terkait





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											update data kependudukan 3. ada 9 Desa yang masih belum memiliki Data Aset Desa	Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
					Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	Persen	30,00	30,00			1. Masih ada terdapat beberapa BUMDesa yang kepengurusannya tidak aktif karena lemahnya manajemen kelembagaan BUMDesa 2. Masih terbatasnya pengelola BUMDesa yang memiliki pengetahuan dalam membaca peluang bisnis dalam mengembangkan unit usaha 3. Belum terjalinnya kerjasama antar desa maupun pihak ketiga dalam mendayagunaan BUMDesa	1. Penguatkan Kelembagaan dengan merestrukturisasi Kepengurusan Melalui pendampingan yang maksimal 2. Menghubungkan antar lembaga Bumdesa dengan melihat peluang pasar 3. Optimalisasi Kerja TKPKP (Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan) yang dapat memberikan kontribusi terdapat pemanfaatan kawasan untuk dikerjasamakan dengan BUMDesa
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Desa	193,00	193,00	30.767.536.174	29.743.504.397	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia 2. Kurang Profesionalisme dan pengetahuan aparatur desa 3. Kurangnya Pelatihan dan Pembinaan 4. Kurang efektifnya pengawasan oleh Kecamatan 5. Kurang kejelasan koordinasi antar tugas dan fungsi 6. Kurangnya kejelasan regulasi desa	1. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur di Lingkungan DPMD supaya lebih optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	Persentase Posyandu Aktif	Persen	70,35	86,76	51.348.458.500	46.637.289.811	Penilaian dilakukan secara penyebaran kuisioner elektronik kepada koresponden sehingga tidak semua	Perlu dibentuknya TIM Survey di setiap Kecamatan untuk mensurvey Keaktifan Kelembnagaan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				MASYARAKAT HUKUM ADAT							Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa berkontribusi dalam pengisian penilaian	Masyarakat di Desa dan Kelurahan
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	100,00	100,00	51.348.458.500	46.637.289.811	di dalam indikator program tidak memisahkan antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Melakukan evaluasi terkait penyusunan Indikator Program yang belum mencerminkan kineja program
					Jumlah Kelembagaan Masyarakat Aktif	Lembaga	823,00	4.721,00			belum ada acuan secara regulasi tentang definisi Kelembagaan Masyarakat Aktif	Dalam penyusunan Rumusan Indikator Kegiatan tidak mengarah kepada Lembaga Kemasyarakatan Aktif, Namun lebih kepada Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan
14. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,40	61,24	12.586.475.734	10.490.836.057		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	177,00	100,00	802.800.000	697.555.631	Perubahan Regulasi di pertengahan Tahun Anggaran	Membuat SK PPTK lebih awal, Lebih cermat dalam penyusunan Angkas, memetakan kegiatan yang dapat dilaksanakan di awal tahun anggaran
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Dinas Pengendalian Penduduk dan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	Laporan	12,00	12,00	8.662.994.829	7.112.909.297	Anggaran Gaji tidak di realisasikan sebesar Rp. 1.550.085.532	Melakukan Rekon Gaji





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KELUARGA BERENCANA	Keluarga Berencana										
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12,00	12,00			Tidak ada	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	80,00	80,00	200.000.600	194.386.000	Tidak ada	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	1,00			Pelaksanaan rekon Yang Tidak waktu	Membuat Jadwal Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah lebih awal
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	56,00	50,00	484.630.000	452.290.400	Kurangnya Sumber Daya ASN	Melaksanakan pendidikan dan Pelatihan serta pengembangan kompetensi bagi ASN
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Lapaoran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Laporan	12,00	12,00	859.574.000	791.941.060	tersedianya Anggaran di APBD-P	Sebaiknya Anggaran Kegiatan tersedia di APBD Murni sehingga kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	42,00	42,00	285.479.400	266.800.400	Tersedianya Anggaran di APBD-P	Sebaiknya Anggaran Kegiatan tersedia di APBD Murni sehingga kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Unit	171,00	171,00			Tersedianya Anggaran di APBD-P	Sebaiknya Anggaran Kegiatan tersedia di APBD Murni sehingga pelaksanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Unit	30,00	30,00	1.055.313.327	749.286.628	Distribusi Barang ke 20 Kecamatan sesuai dengan Jadwal	Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Jadwal Pendistribusian ke Balai Penyuluhan KB
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	42,00	42	235.683.578	225.666.641	tidak Ada	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK	Persen	40	46	4.273.701.000	3.672.498.148	kordinasi dengan semua stekholder belum optimal	mengutatkan kegiatan koordinasi dan membuat kesepakatan dan perjanjian kerjasama dalam program bangga kencana
					Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Dokumen	1	1			tidak ada	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga	Persen	60,00	63,00	3.100.000.000	2.728.401.472	kurangnya kordinasi dan evaluasi	meningkatkan peran stekholder dalam program bangga kencana dengan membuat kerjasama.kesepakatan atau perjanjian
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	80,00	80,00	1.173.701.000	944.096.676	rendahnya pengolahan data untuk disajikan	meningkatkan kualitas pencatatan data keluarga, kualitas SDM kader pencatat serta meningkatkan pengolahan data untuk disajikan kepada stekholder yang berkepentingan dalam program bangga kencana
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,20	71,70	10.473.414.000	8.880.592.960	Rendahnya pemahaman dari Akseptor Keluarga Berencana tentang Pemakaian Kontrasepsi Modern dan Kurangnya informasi tentang alat kontrasepsi modern melalui media atau kontak personal dengan petugas.	Edukasi Konseling Kesesuaian Pemakaian Kontrasepsi kepada Akseptor KB
					Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,00	7,92			Rendahnya pengetahun tentang keluarga berencana, budaya lokal belum terbuka, letak geografis yang sulit di jangkau	Mengadakan Sosialisasi dan Edukasi mengenai kontrasepsi, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan memberikan pendampingan dan bimbingan kepada calon peserta KB
					Meningkatnya Peserta KB Baru	Persen	15,17	82,16			tidak ada	Memberikan bantuan dana, alat, dan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												pemasangan kontrasepsi secara gratis, Melakukan pelatihan alat KB, Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan, Melakukan pendekatan kepada tokoh, Melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat masyarakat, Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan
					Menurunnya angka Drop Out (DO)	Persen	12,12	3,08			pendapatan rendah, Kurangnya pengetahuan tentang kontrasepsi, Efek samping kontrasepsi, Komplikasi akibat pemasangan alat kontrasepsi, Usia.	memberikan konseling dan informasi yang tepat mengenai pilihan kontrasepsi
					Meingkatnya akseptor MKJP	Persen	16,10	18,67			tidak ada	Memberikan layanan KB di kantor dinas atau di desa/kelurahan, Melakukan penyuluhan KB tentang pentingnya kontrasepsi jangka panjang, Menggunakan model pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB, Mengarahkan pasien dan keluarga untuk menjadi akseptor KB MKJP sejak dini dan Memperhatikan hak dan psikologis pasien
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi dan KIE	Event	5,00	5,00	1.940.030.000	1.603.157.729		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kegiatan Opsional KB di Lapangan	Desa	237,00	227,00	5.826.980.000	4.931.175.827	Jaringan Aplikasi Siga sering gangguan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat Obat dan Kontrasepsi Pada Pasilitas Keshatan	Lokasi	40,00	5,00	2.022.235.000	1.754.889.220		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik	Persen	20	29	684.169.000	591.370.184		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	69,78	100,00	7.171.450.000	6.701.445.140	Tidak tersedianya anggaran yang cukup sehingga belum semua Kelompok Kegiatan (Poktan) BKB memiliki BKB Kit.	Optimalisasi pelaksanaan promosi dan edukasi kepada poktan yang belum mendapatkan distribusi BKB kit.
					Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	80,93	80,00			1) Responsibilitas yang kurang dalam pengembangan dan pembentukan BKR; 2) Tidak adanya pembinaan kepada kader poktan terkait update keterampilan; 3) Tidak adanya dana operasional untuk kader maupun poktan.	1) Memberikan motivasi pada PKB/PLKB untuk melakukan advokasi pada stakeholder setempat; 2) Sharing materi dan update referensi yang didapat dari BKKBN ke Poktan melalui WAG PKB/PLKB; 3) pengajuan usulan melalui mekanisme musrenbag, BKPD maupun penganggaran lainnya yang punya potensi.
					Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	59,36	80,00			Validitas data cakupan yang tidak realistis.	Memotivasi PKB/PLKB agar melakukan update data setiap bulan untuk dilaporkan ke SIGA
					Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	1,00	5,00			Belum tersedianya anggaran yang mendukung dalam tahapan-tahapan pembentukan PPKS di 19 kecamatan lainnya.	Melakukan sosialisasi dan advokasi ke sektor kecamatan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	77,78	0,00				Tidak Termasuk IKU Program 2024
					Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	64,65	0,00				Tidak Termasuk IKU Program 2024
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persen	35,75	96,00	3.706.350.000	3.350.178.277	1) Terbatasnya sumberdaya PKB/PLKB dalam melakukan pembinaan dan menjangkau hingga ke desa wilayah binaan; 2) Tidak adanya supporting dalam bentuk dana operasional atau insentif bulanan bagi kader sehingga motivasi untuk pengembangan poktan menjadi pasif.	
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Keluarga, Sarana Penunjang Bagi Tim TPPS serta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Ormas	Persen	70,00	80,00	3.465.100.000	3.351.266.863	1) Kurangnya dukungan anggaran sehingga tidak mampu menjangkau keseluruhan sasaran untuk peningkatan kapasitas yang diperlukan; 2) Keterbatasan sumberdaya PKB/PLKB dalam penyampaian sosialisasi dan promosi hingga mengakses ke seluruh jejaring mitra dan organisasi kemasyarakatan; 3) Belum semua tim TPPS memahami peran, fungsi dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan pelaporan secara periodik.	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
15. BIDANG PERHUBUNGAN												
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	83,00	55,85	54.591.563.573	48.576.523.927	Berdasarkan hasil Evaluasi dari Inspektorat Kab Kukar walaupun terjadi penurunan dari target yang telah ditetapkan namun telah menginterpretasikan bahwa AKIP telah cukup baik. Adapun hal-hal yang menyebabkan penurunan nilai LKJIP Dinas Perhubungan Kab Kukar yaitu diantaranya: 1. ada beberapa materi penilaian yang ditetapkan oleh Kemenpan RB pada tahun penilaian belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota. 2. Belum mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja pada aplikasi E-Sakip di 2 bulan awal tahun anggaran. 3. Belum terdokumentasikan dengan baik terkait rapat evaluasi atas capaian kinerja secara berkala (dokumentasi foto, notulen rapat dan daftar hadir).	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100,00	100,00	3.985.000.000	3.308.832.497	PPTK lupa untuk memasukkan realisasi fisik	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase	100,00	97,80	17.167.408.684	15.377.863.446	Kurangnya koordinasi dengan tim reviu utang dari Inspektorat Kab. Kukar sehingga mengalami keterlambatan dalam penyempaan berkas kegiatan yang akan	Mengusulkan kembali utang yang tidak sempat terbayar dan memerintahkan PPTK agar lebih inten untuk berkoordinasi dengan tim reviu





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											direviu sehingga utang tidak sempat terbayarkan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100,00	100,00	197.897.694	161.520.000	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	0,50	100,00	2.015.000.000	1.961.003.064	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100,00	97,9	4.458.016.270	3.743.116.392	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100,00	100,00	6.249.065.574	5.469.225.920	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100,00	99,00	17.494.175.351	16.055.560.945	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100,00	100,00	3.025.000.000	2.499.401.663	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	34,41	34,41	141.788.517.878	139.732.137.288		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Ketersediaan Prasarana Dan Perlengkapan Jalan	Persentase	100,00	100,00	128.338.517.878	127.753.778.009		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Prosentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C/ IKM	Persentase	100,00	100	2.150.000.000	2.105.985.930		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Prosentase Peningkatan Pengeloaan Perparkiran	Persentase	100	100	650.000.000	553.556.520	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase Kepemilikan Buku Uji Angkutan Umum	Persentase	100	100	5.050.000.000	4.885.120.536		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	100,00	100,00	2.700.000.000	2.668.473.835	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Penilaian Andalalin untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	10,00	10,00	200.000.000	147.461.700	Tidak ada permasalahan dan hambatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase Peningkatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	No data	0,00	100,00	100.000.000	95.933.005		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	No data	0,00	0,00	1.400.000.000	1.050.978.101		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah kabupaten / Kota	Persentase	100,00	0,00	1.200.000.000	470.849.652		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pelayaran	Persen	52,00	100,00	20.425.000.000	19.046.457.821	Pelaksanaan kontrak pekerjaan fisik berjalan dengan baik	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Usaha Angkutan Laut Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Daerah kabupaten	Persentase	100,00	100,00	36.270.000	35.420.000	Tenaga Pelaksana siap melaksanakan kegiatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Cakupan DLKR/DLKP Diwilayah Pelabuhan Sungai Dan Danau	Persentase	100,00	100,00	500.000.000	482.005.000		
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase	25,00	100,00	5.350.000.000	5.091.321.306	Tenaga Pelaksana siap melaksanakan kegiatan	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pelabuhan Pengumpuan Lokal								
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Sungai dan danau	Persentase	100,00	100,00	14.338.730.000	13.267.390.117	didukung oleh SDM siap kerja untuk melaksanakan percepatan kegiatan	
	BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Cakupan Pengelolaan TUKS DiDalam Kawasan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Persentase	100	100	200.000.000	170.321.398	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada	
16. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,00	68,17	26.486.848.774	23.304.884.961	Masih kurangnya pemahaman terkait data dukung, masih kurangnya data dukung dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan	Meningkatkan pemahaman terkait data dukung, melengkapi data dukung masih kurang serta menyiapkan dokumentasi setiap pelaksanaan kegiatan
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16,00	16,00	200.000.000	184.580.247	Tidak ada Permasalahan	-
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	2,00	2,00	11.593.896.869	9.314.431.639	Tidak ada Permasalahan	-
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4,00	4,00	125.000.000	99.166.000	Tidak ada Permasalahan	-
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	150.000.000	148.441.500	Tidak ada Permasalahan	-
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Layanan	5,00	5,00	900.705.462	819.165.997	Tidak ada Permasalahan	-





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	7.530.094.000	7.239.990.992	Tidak ada Permasalahan	-
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	4.271.139.896	3.811.857.864	Tidak ada Permasalahan	-
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	100,00	100,00	1.716.012.547	1.687.250.722	Tidak ada Permasalahan	-
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	100,00	100,00	80.600.357.336	78.527.739.629	Kurangnya SDM dalam Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dengan cara melakukan perekrutan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis dalam mendukung Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	Informasi dan Komunikasi Publik	840,00	840,00	80.600.357.336	78.527.739.629	Kurangnya SDM dalam Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dengan cara melakukan perekrutan Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis dalam mendukung Pelaksanaan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Persen	100,00	100	108.824.352.470	104.602.759.325	1. Masih ada OPD yang belum memanfaatkan fasilitas Data Center milik pemerintah daerah, Dalam mengelola aplikasi. 2. Masih adanya OPD yang tidak mengupdate data didalam aplikasi yang dikelolanya, sehingga aplikasi yang dikelola seperti tidak aktif lagi. 3. Masih ada OPD yang belum menggunakan Sub Domain resmi Pemerintah Daerah	Perlu dilakukan Sosialisasi pemanfaatan Media Center Milik Pemerintah Daerah kepada OPD
	BIDANG KOMUNIKASI	Dinas Komunikasi		Pengelolaan Nama Domain yang Telah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	Sistem Informasi	100	100	40.797.722.645	39.333.525.601	Masih ada OPD yang belum menggunakan	Perlu dilakukan Sosialisasi untuk meningkatkan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	DAN INFORMATIKA	dan Informatika		Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Sub Domain resmi Pemerintah Daerah	kesadaran OPD dalam menggunakan sub domain resmi milik Pemerintah Daerah
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	OPD	58	56	68.026.629.825	65.269.233.724	1. Masih ada OPD yang belum memanfaatkan fasilitas Data Center milik pemerintah daerah, Dalam mengelola aplikasi 2. Masih adanya OPD yang tidak mengupdate data didalam aplikasi yang dikelolanya, sehingga aplikasi yang dikelola seperti tidak aktif lagi	Perlu dilakukan Sosialisasi pemanfaatan Media Center Milik Pemerintah Daerah kepada OPD
17. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	61,54	17.321.224.077	14.205.930.061	Adanya Perubahan Prosedur Baru Pemeriksaan Menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dimana Penilaian Terhadap Permindak Lebih Sedikit Dari Tahun Sebelumnya.	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5,00	5,00	401.610.505	181.671.900	1. Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Perencanaan, 2. Kemampuan Anggaran (APBD), 3. Sistem Penunjang Proses Perencanaan dan Penganggaran Dalam Hubungan Koordinasi dan Komunikasi Pihak Terkait	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Dokumen	2,00	2,00	10.648.421.272	8.356.888.388	1. Kualitas dan Kompetensi SDM Aparatur Keuangan, 2. Kemampuan Anggaran (APBD)	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang milik Daerah Pada SKPD Yang Direkonsiliasi	Laporan	1,00	1,00	93.926.000	74.700.000	Adanya Sinkronisasi Antara Nilai Aset dan Keuangan (Rekonsiliasi)	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	50.000.000	20.185.000	1. SDM yang tersedia, 2. Anggaran	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100,00	100,00	3.368.310.000	3.226.270.792	1. SDM yang tersedia, 2. Anggaran	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase	100,00	100,00	734.554.000	701.045.000	1. SDM yang tersedia, 2. Anggaran	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100,00	100,00	826.588.300	676.817.662	1. SDM yang tersedia, 2. Anggaran	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase	100,00	100,00	1.197.814.000	968.351.319	1. SDM yang tersedia, 2. Anggaran	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Kepatuhan Koperasi Melaksanakan RAT	Persen	21,40	150,00	575.000.000	365.389.825	koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase	100,00	150,00	575.000.000	365.389.825	koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu, dan koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan akan diberikan sanksi	
	BIDANG KOPERASI,	Dinas Koperasi dan Usaha		PROGRAM PENILAIAN	Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	Persen	11,11	46	320.000.000	216.770.676	koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kecil Menengah		KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							selama 3 tahun berturut turut	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian KSP/USP Koperasi	Persentase	100	46	320.000.000	216.770.676	koperasi selalu tepat waktu melaksanakan rat selama 3 tahun berturut turut	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas yang Memiliki Sertifikasi Pelatihan Perkoperasian	Persen	100	180	779.002.800	516.198.000	koperasi yang telah melaksanakan RAT dan usaha nya aktif, meningkatnya aset dan omset koperasi	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase	100,00	180,00	779.002.800	516.198.000	koperasi yang telah melaksanakan RAT dan usaha nya aktif, meningkatnya aset dan omset koperasi	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Aset Koperasi	Persen	2,92	6,36	805.000.000	554.294.557	Kurangnya kompetensi pengurus atau pengelola koperasi dapat mengakibatkan pengelolaan aset kurang baik dan Kurangnya partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi,	
					Persentase Meningkatnya Volume Usaha (Omzet) Koperasi	Persen	2,92	4,00			Kurangnya kompetensi pengurus atau pengelola koperasi dapat mengakibatkan menurunnya volume usaha koperasi.	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase	100,00	100,00	805.000.000	554.294.557	Kesadaran dan meningkatnya keterlibatan Pengurus, Anggota yang aktif dalam kegiatan koperasi membantu mendukung pemberdayaan dan perlindungan.	
	BIDANG KOPERASI,	Dinas Koperasi dan Usaha	Peningkatan Produktivitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase UMKM yang Difasilitasi	Persen	1,99	2,85	2.805.000.000	2.212.767.022	Tidak tersedianya rincian detail data	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Kecil Menengah	nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							profil UMKM eksisting, namun tidak berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terfasilitasinya Pelaku UMKM	Persentase	100,00	143,00	2.805.000.000	2.212.767.022	"- Masih terdapat beberapa kebutuhan data yang belum tersedia - Cakupan luasan dan kelompok target yang sangat banyak"	
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Persen	0,85	1,09	8.020.000.000	7.475.774.522	Perhitungan Omzet UMKM yang masih menggunakan metode sampling	Pemutakhiran data Aset dan Omzet UMKM secara keseluruhan melalui sensus dan pendataan lengkap didukung dengan ketersediaan program dan anggaran
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	Persentase	100,00	121,03	8.020.000.000	7.475.774.522	"- Masih terdapat beberapa kebutuhan data yang belum tersedia - Cakupan luasan dan kelompok target yang sangat banyak"	Pemutakhiran data Aset dan Omzet UMKM secara keseluruhan melalui sensus dan pendataan lengkap didukung dengan ketersediaan program dan anggaran
18. BIDANG PENANAMAN MODAL												
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Nilai	82,00	74,13	16.453.909.214	14.653.713.106	1. Belum dilakukannya Reviu terkait Dokumen Perencanaan 2. Belum tersusunnya Pohon Kinerja /logical framework belum sesuai dengan kementerian RB nomor 88 tahun 2021 3. Belum dilakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome sebagai upaya untuk mencapai suatu kinerja	1. Membuat Perbaikan Target pada Dokumen Renja baik Murni dan Perubahan 2. Peningkatan SDM Penjenjangan Kinerja 3. Seluruh ASN di DPMPSTSP sudah terfokus pada pencapaian outcome dan output bukan sekedar kegiatan dan membuat Crosscutting pada penjenjangan kinerja





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	16,00	786.959.126	754.905.913	1. Terbatasnya jumlah dan kapasitas aparatur yang memahami teknik perencanaan dan evaluasi menjadi kendala utama. 2. Masih adanya ketidakakuratan data.	1. Dukungan dan arahan dari Kepala DPMPSTSP mendorong pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang lebih baik. 2. Bimbingan dari instansi terkait seperti Bappeda, Inspektorat, dan BPKAD meningkatkan kualitas dokumen dan pelaksanaan evaluasi kinerja. 3. Fokus kegiatan pada hasil (outcome) yang berdampak langsung kepada masyarakat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang jelas dan terukur.
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Persen	100,00	83,13	10.718.011.530	9.324.570.313	1. Sering terjadi gangguan terhadap sistem berbasis teknologi seperti SIPD sehingga menghambat proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan. 2. Keterlambatan Penyusunan Dokumen Keuangan dikarenakan sering terganggunya jaringan aplikasi SIPD	1. Melakukan pelaporan kepada Admin BPKAD terkait permasalahan SIPD 2. Melakukan Pelatihan dan bimbingan teknis terkait administrasi keuangan melalui SIPD sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai.
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3,00	3,00	100.664.000	91.496.725	1. Aparatur yang kurang memahami sepenuhnya regulasi terkait BMD dapat menyebabkan kesalahan administrasi. 2. Ketidaksesuaian antara data administrasi BMD dengan kondisi fisik barang di lapangan menyebabkan masalah dalam pelaporan. 3. Belum dilakukan inventarisasi aset secara rutin untuk	1. Dukungan dari kepala DPMPSTSP dalam pengelolaan dan pencatatan BMD secara tertib mendorong terlaksananya administrasi yang baik. 2. Melakukan Rekonsiliasi Aset DPMPSTSP dan MPP 3. Koordinasi yang baik antara pengelola barang (aset) di perangkat daerah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mendukung kelancaran administrasi.





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik barang.	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, seperti Undang-Undang ASN (No. 5 Tahun 2014) dan peraturan lainnya terkait administrasi kepegawaian, menjadi pedoman dalam pengelolaan kepegawaian. 2. Penggunaan aplikasi seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) atau sistem serupa mempermudah pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan administrasi kepegawaian. 3. Dukungan dari kepala DPMPSTSP untuk memperhatikan pengelolaan kepegawaian secara tertib dan profesional.	Persen	100,00	100,00	802.000.000	785.966.989	1. Jumlah pegawai di bidang administrasi kepegawaian yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan kegiatan secara maksimal. 2. Masih adanya aparatur yang belum memahami sepenuhnya regulasi terkait kepegawaian dapat menyebabkan kesalahan dalam administrasi. 3. Kurangnya bimbingan teknis atau pelatihan kepada pengelola administrasi kepegawaian membuat proses administrasi kurang optimal.	1. Adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, seperti Undang-Undang ASN (No. 5 Tahun 2014) dan peraturan lainnya terkait administrasi kepegawaian, menjadi pedoman dalam pengelolaan kepegawaian dalam pembuatan anjab ABK 2. Penggunaan aplikasi seperti Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) atau sistem serupa mempermudah pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan administrasi kepegawaian. 3. Dilakukan Bimbingan Teknis terkait Kepegawaian
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	1.150.238.545	1.130.291.765	1. Jumlah aparatur yang terbatas atau kurangnya kompetensi dalam administrasi umum 2. Penggunaan aplikasi atau sistem berbasis teknologi seperti Srikandi membantu mempercepat proses administrasi dan pengelolaan dokumen. 3. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan administrasi umum, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), Cetak dll, sangat membantu kelancaran kegiatan. 4. Adanya SOP yang jelas dan terstandar memastikan semua kegiatan administrasi umum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur	1. Melakukan Bimbingan Teknis terkait adm Umum 2. Penggunaan aplikasi atau sistem berbasis teknologi seperti Srikandi membantu mempercepat proses administrasi dan pengelolaan dokumen. 3. Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan administrasi umum, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK), Cetak dll, sangat membantu kelancaran kegiatan. 4. Adanya SOP yang jelas dan terstandar memastikan semua kegiatan administrasi umum berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	70,00	70,00	387.226.000	340.806.000	1. walaupun sudah ada RKBMD akan tetapi belum tersusun sesuai prioritas 2. tidak adanya SDM pengadaan barang jasa di DPMTSP sehingga harus meminjam di UPBJ	1. Menyusun RKBMD dengan melakukan pendampingan dan Bimtek terhadap pegawai yang menangani BMD
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	Persen	100,00	100,00	1.851.013.649	1.772.845.650	1. Masih adanya Penyedia jasa yang tidak kompeten, seperti terlambat dalam pelaksanaan, 2. Melakukan pendampingan kepada Aparatur sehingga memiliki pemahaman tentang mekanisme penyediaan jasa, termasuk aspek teknis, administrasi, dan hukum, menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan.	1. Membuat kebutuhan jasa yang terukur, realistis, dan sesuai prioritas perangkat daerah mendukung keberhasilan penyediaan jasa. 2. Melakukan pendampingan kepada Aparatur sehingga memiliki pemahaman tentang mekanisme penyediaan jasa, termasuk aspek teknis, administrasi, dan hukum, menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan.
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	108,00	108,00	657.796.364	452.829.751	1. Keterlambatan Penyusunan Dokumen Keuangan mengakibatkan gagal lelang 2. Tenaga teknis yang memiliki keahlian dalam pemeliharaan barang, termasuk kendaraan dan peralatan 3. Koordinasi yang baik antara unit pengelola barang milik daerah (BMD) dengan unit pengguna barang mendukung pelaksanaan pemeliharaan yang efisien.	1. Perencanaan pemeliharaan yang terintegrasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMTSP 2. Tenaga teknis yang memiliki keahlian dalam pemeliharaan barang, termasuk kendaraan dan peralatan 3. Koordinasi yang baik antara unit pengelola barang milik daerah (BMD) dengan unit pengguna barang mendukung pelaksanaan pemeliharaan yang efisien.
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Pertumbuhan Proyek PMDN/PMA	Proyek	652,00	3.085,00	1.150.000.000	1.148.040.385	1. Belum adanya Penetapan Kawasan Industri; 2. Kurangnya Data Potensi Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Perangkat daerah 2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Perangkat daerah teknis terkait identifikasi data potensi Investasi





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1,00	200.000.000	199.223.310	belum adanya perda Fasilitas/ Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Sudah dilakukan koordinasi dan pengusulan perda dan sudah tahap Penomoran dan harmonisasi di DPRD
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian Peta Potensi Investasi	Dokumen	3,00	3	950.000.000	948.817.075	1. Belum adanya Penetapan Kawasan Industri; 2. Kurangnya Data Potensi Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Perangkat daerah 2. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Perangkat daerah teknis terkait identifikasi data potensi Investasi
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	Investor	310	281	1.081.660.000	1.077.936.018	belum adanya proyek investasi yang siap ditawarkan	Penguatan promosi melalui media digital dengan mengekspose sektor potensial investasi
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Investor	310	281	1.081.660.000	1.077.936.018	1. Keterbatasan anggaran. 2. Belum dilakukan follow up dari hasil pendampingan layanan untuk menyelesaikan perizinan dasar (NIB)	1. Melakukan investarisasi pelaku usaha yang belum selesai dalam proses pengurusan perijinan dasar (NIB). 2. Perlu dilakukan pendampingan ke pelaku usaha dalam pengurusan NIB
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerja sama investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan Izin	Izin	950,00	12.757,00	894.053.636	828.794.837	1. Kualitas SDM yang belum Merata; 2. Akses teknologi yang belum optimal di daerah terpencil. 3. Kebijakan pusat dan daerah yang sering kali tidak sinkron.	1. Meningkatkan kualitas SDM dalam Implementasi teknologi berbasis digital seperti OSS yang mempermudah pengajuan dan pengelolaan izin. 2. Menambah portal informasi investasi yang transparan dan mudah diakses. 3. Adanya unit pelayanan terpadu yang mempermudah koordinasi. 4. Melakukan rapat Koordinasi
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	IKM	Nilai	88,25	93,06	894.053.636	828.794.837	1. Belum meratanya jaringan internet di daerah terpencil. 2. Kurangnya pelatihan untuk	1. Mengadaan Penambahan jaringan internet di daerah terpencil; 2. Meningkatkan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Terpadu Satu Pintu		yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							meningkatkan kemampuan petugas, terutama terkait teknologi digital. 3. Jaringan OSS yang sering terjadi gangguan	Kompetensi SDM Petugas; 3. Melakukan Pelaporan dan Koordinasi ke kementerian INVeStasi
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penaikan / Penurunan Nilai Realisasi (PMDN)	Persen	3,68	-17,00	1.229.923.000	876.932.873	1. Belum keluarnya Realisasi Investasi untuk Tahun 2024, realisasi Investasi masih berada di Triwulan III	1. dikarenakan Realisasi - 17% maka tidak bisa di input pada e-Pantau 2. Fluktuatif Harga Komoditas dimana Kabupaten Kutai Kartanegara masih Ketergantungan pada sektor pertambangan dan energi menyebabkan volatilitas investasi ketika harga batu bara dan minyak turun. 3. Belum adanya PERDA Kemudahan/ Insentif Fasilitas Berusaha. 4. Belum Banyaknya Kemitraan Pemodal besar dan kecil. 5. Persaingan dengan daerah lain yang mempunyai kawasan industri/ setra- sentra industri yang lebih berkembang dari pada kabupaten Kutai Kartanegara
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian PMA/PMDN	Pelaku Usaha/ Kegiatan Usaha	1.020,00	927,00	1.229.923.000	876.932.873	1. Masih belum optimalnya Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Kepada pelaku usaha dalam penyelesaian permasalahan dalam merealisasikan usahanya, dikarenakan belum terdatanya permasalahan yang dihadapi pelaku usaha tersebut dan belum ada laporan dari pelaku usaha; 2. banyaknya pelaku usaha yang kewenangan	1. Dilakukan pendataan terhadap permasalahan yang dihadapi pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan pengawasan berusaha berbasis risiko; 2. Melakukan kegiatan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko yang kewenangan pengawasannya berada di Bupati/ Kabupaten





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pengawasan berusaha berbasis risiko bukan dikewenangan Kabupaten, sehingga untuk mencapai target pengawasan susah untuk tercapai, salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang bergerak dibidang Pertambangan dan Pelaku Usaha yang dimiliki oleh Penanam Modal Asing (PMA), dari Pihak Kabupaten tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut, sedangkan diwilayah kabupaten Kutai kartanegara didominasi oleh Pertambangan dan sebagian Perkebunan Kelapa Sawit dimiliki oleh Penanam Modal Asing.	
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan jangkauan dan mutu Layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3,00	3,00	2.542.853.000	799.508.254	1. Risiko kebocoran atau peretasan data yang dapat merusak kepercayaan Pelanggan/masyarakat 2. Kurangnya sistem keamanan siber yang andal.	1. Melakukan Pengamanan data dengan mengikuti ISO Kemanan data 2. Meningkatkan Ketersediaan Jaringan Internet yang baik 3. Adanya aparaturn dan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan pengelolaan data.
	BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	3,00	3,00	2.542.853.000	799.508.254	1. Risiko kebocoran atau peretasan data yang dapat merusak kepercayaan Pelanggan/masyarakat 2. Kurangnya sistem keamanan siber yang andal.	1. Melakukan Pengamanan data dengan mengikuti ISO Kemanan data 2. Meningkatkan Ketersediaan Jaringan Internet yang baik 3. Adanya aparaturn dan tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan pengelolaan data.





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
19. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,00	72,78	39.976.661.313	36.595.945.127	adanya perbedaan bobot penilaian dari empat komponen yang dievaluasi	menindaklanjuti dan memperbaiki hasil evaluasi akip tahun 2024
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	118,00	118,00	600.000.000	517.405.865	1. Banyak nya aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan sehingga diperlukan proses sinkronisasi berulang kali agar data yang dihasilkan valid dan akurat. 2. Data pendukung yang beragam, target yang banyak dengan jumlah tenaga pelaksana dan waktu yang terbatas.	1.Melakukan sinkronisasi dan validasi data pada saat monitoring & evaluasi kegiatan secara berkala 2. Memaksimalkan semua sumber daya yang ada.
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	71,00	71,00	18.742.270.450	16.321.606.699	1. Banyaknya volume laporan keuangan dari berbagai unit kerja yang perlu diolah secara akurat. 2. Perubahan regulasi yang sering dan mendadak. 3. Belum tertibnya PPTK dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja secara rutin setiap bulan	Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keuangan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	17,00	17,00	100.000.000	82.754.000	Tata kelola barang milik daerah sudah sesuai dengan mekanisme yang diterapkan oleh bidang aset	Laporan yang dibuat berdasarkan Data hasil Rekonsiliasi dengan Bidang Aset di BPKAD
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7,00	12,00	200.000.000	155.016.338	1. Kegiatan tidak bisa dilaksanakan secara optimal 2. kesalahan dalam	Melakukan koordinasi dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											penganggaran yang disebabkan oleh ketidakpahaman PPTK	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8,00	8,00	3.612.680.000	3.328.872.194	Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal	Melakukan koordinasi dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kali	8,00	8,00	4.032.008.459	3.936.860.000	Tidak ada usulan rencana kebutuhan barang dari bidang bidang	Melakukan koordinasi dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	5.350.037.154	5.180.050.493	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kegiatan karena bersifat rutin dan wajib dipenuhi karena terkait dengan kebutuhan wajib kantor	Pengadaan yang dilakukan berdasarkan analisis Kebutuhan yang termuat pada RKBMD
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	3,08	3,08	7.339.665.250	7.073.379.538	selama kegiatan tidak ada hambatan	Pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan BMD yang statusnya dalam kondisi baik dan digunakan secara rutin
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan kewirausahaan dan manajemen bisnis bagi kaum muda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan potensi dan daya saing pemuda	Persen	76,83	76,83	14.988.540.000	14.190.169.975	Sesuai sub kegiatan	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan	Persen	100,00	100,00	10.765.607.100	10.093.011.899	Kesulitan Verifikasi Factual Lapangan alamat tidak sesuai dan personal pemuda tersebut tidak mau mengikuti pelatihan	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	53,66	54	4.222.932.900	4.097.158.076	Kurangnya memahami pentingnya manajemen organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan.	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Prestasi dan Peran serta Masyarakat dalam Olahraga	Persen	34,66	34,66	53.079.916.085	49.921.386.914	tidak ada kendala	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				SAING KEOLAHRAGAAN								
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi	Persen	21,05	21,05	13.568.308.100	12.818.949.175	Tidak ada kendala	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga	Persen	100,00	100,00	2.585.000.000	2.488.254.054	Tidak ada kendala	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Lokal Yang Dibina	Persen	48,75	48,75	10.668.691.985	10.162.635.498	Tidak ada kendala	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan Organisasi Keolahragaan	Persen	4,00	4,00	17.207.916.000	16.629.162.122	tidak ada faktor penghambat dalam hal pelaksanaan dan perencanaan	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase masyarakat yang berolahraga	Persen	0,01	0,00	9.050.000.000	7.822.386.065	Tidak ada hambatan substansional	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan kepramukaan	Persen	100,00	100,00	4.278.263.900	4.105.562.114	Terlambatnya proses Penyerapan anggaran dikarenakan teralambat proses kelengkapan SPJ	
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Cakupan Organisasi Kepramukaan yang aktif	Persen	13,11	13,00	4.278.263.900	4.105.562.114	Tidak ada Hambatan	
20. BIDANG STATISTIK												
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Persen	100,00	100,00	2.300.000.000	1.947.244.470	Belum optimal nya pengelolaan Data Statistik Sektoral di OPD	Mengadakan Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Data Sektoral di seluruh Perangkat Daerah
	BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	OPD	58,00	58,00	2.300.000.000	1.947.244.470	belum optimal nya pengelolaan Data	Mengadakan Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Data Sektoral





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan Informatika		Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Statistik Sektoral di OPD	di seluruh Perangkat Daerah
21. BIDANG PERSANDIAN												
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persen	56,80	56,80	1.050.000.000	1.009.529.849	1. Masih kurangnya tingkat kesadaran Keamanan informasi dari beberapa pengguna, 2. Kurangnya SDM keamanan informasi di bidang persandian. 3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai, 4. Belum memiliki ASN yang memiliki Jabatan Fungsional di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi (Sandiman & Manggala Informatika dll)serta kurangnya tenaga teknis yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	1. Mengadakan sosialisasi tentang kesadaran keamanan Informasi 2. Mengadakan Pelatihan/Bimtek/Sertifikasi Kompetensi Keahlian serta perekrutan tenaga ahli dan tenaga teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi 3. Mengusulkan pengadaan sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan di bidang persandian. 4. Mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Bidang Persandian
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	OPD	11,00	11,00	850.000.000	812.776.932	1. Masih kurangnya tingkat kesadaran Keamanan informasi dari beberapa pengguna. 2. Kurangnya SDM keamanan informasi di bidang persandian. 3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai. 4. Belum memiliki ASN yang memiliki Jabatan Fungsional di Bidang Persandian dan Keamanan Informasi (Sandiman & Manggala Informatika dll)serta kurangnya tenaga teknis yang memiliki sertifikasi kompetensi keahlian	1. Mengadakan sosialisasi tentang kesadaran keamanan Informasi. 2. perekrutan tenaga ahli dan tenaga teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi 3. Mengusulkan pengadaan sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan di bidang persandian. 4. Mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Bidang Persandian serta mengadakan Pelatihan/Bimtek/Sertifikasi Kompetensi Keahlian serta perekrutan tenaga ahli dan tenaga teknis Bidang Persandian dan Keamanan Informasi





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
	BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	Layanan JKS	1,00	1,00	200.000.000	196.752.917	Masih terbatasnya kontak PIC yang berwenang dikarenakan pergantian/mutasi petugas atau pimpinan OPD	Pengumpulan data-data PIC yang ada di OPD
22. BIDANG KEBUDAYAAN												
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	event	20,00	40,00	46.206.900.000	31.342.574.312	1. Keterlambatan Penerbitan SK Bupati	Memaksimalkan penerbitan sesuai target jadwal
					Persentase Desa Budaya yang Aktif	Persen	100,00	100,00			Masih Terdapat Desa Budaya yang belum memiliki SK Bupati tentang Penetapan sebagai Desa Budaya	Pengusulan kembali atau menindaklanjuti Desa Budaya yang belum memiliki SK Bupati tentang Penetapan sebagai Desa Budaya
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana pelestarian Seni dan Tradisi budaya lokal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	Kegiatan	12,00	27,00	46.206.900.000	31.342.574.312	1. Kurang tersedianya sumber daya manusia yang memadai untuk pelestarian kesenian tradisional. 2. Letak Geografis beberapa Kecamatan sehingga menghambat pelestarian kesenian tradisional.	Berupaya bersama dengan Pelaku Seni/Budaya, Lembaga Seni/Budaya dan Tokoh Muda untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelestarian Kesenian Tradisional. 2. Pengusulan Sarana dan Prasarana dalam meningkatkan Pelestarian Kesenian Tradisional di beberapa Kecamatan.
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Lembaga Seni Budaya yang Aktif	Persen	70,00	0,00	5.650.000.000	2.194.362.924		
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelakunya	Kegiatan	12,00	0,00	5.650.000.000	2.194.362.924		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Daerah Kabupaten/Kota								
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Prosetase Sejarah lokal yang dilestarikan	Persen	72,65	100,00	850.000.000	623.004.948	1. Belum maksimalnya sinergi antar instansi yang akan menyediakan data dalam penyusunan IPK. 2. Perlunya pembahasan dimensi dan indikator yang relevan dengan kebudayaan di Kutai Kartanegara.	1. Memaksimalkan kembali sinergi antar instansi yang akan menyediakan data dalam penyusunan IPK. 2. Membuat pembahasan, diskusi dan tindak lanjut tentang dimensi dan indikator yang relevan dengan IPK di Kutai Kartanegara
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian sejarah, tradisi dan budaya lokal	Kegiatan	14,00	14,00	850.000.000	623.004.948	Kurangnya sumber daya manusia untuk penulisan sejarah dan karya budaya daerah	Sosialisasi Penulisan Sejarah dan Karya Budaya Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dipelihara	Persen	100,00	0,00	2.349.428.000	1.152.995.764		
					Persentase Penetapan Cagar Budaya Potensial	Persen	9,55	0,00				
					Persentase Museum yang Dikelola oleh Pemda	Persen	100,00	0,00				
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Lokasi	14,00	0,00	650.000.000	427.421.635		
	BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelestarian Cagar Budaya yang sudah ditetapkan	Lokasi	14,00	0,00	1.699.428.000	725.574.129		
23. BIDANG PERPUSTAKAAN												
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,00	72,24	22.155.300.885	20.081.539.223	Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen/Laporan	12,00	12,00	699.738.367	667.089.065	Tidak ada kendala atau permasalahan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan /Dokumen	5,00	5,00	12.267.522.355	11.505.567.642	Tidak ada kendala atau permasalahan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	80.000.000	79.977.000	Tidak ada kendala atau permasalahan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Paket/Orang	12,00	12,00	200.000.000	188.560.544	Tidak ada kendala atau permasalahan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8,00	8,00	3.250.000.000	2.979.803.285	Tidak ada kendala atau permasalahan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	4.408.040.163	3.904.974.168	Tidak ada kendala atau permasalahan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	218,00	218,00	1.250.000.000	755.567.519	Tidak ada kendala atau permasalahan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	Persen	37,38	10,70	8.707.000.000	7.842.165.270	Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya di bidang perpustakaan dan belum optimalnya pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi diperpustakaan	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	1,72	7,23	5.307.000.000	4.651.965.486	1. Banyaknya perpustakaan yang belum terpenuhi sarana dan prasarana perpustakaan dari sisi koleksi , Meja Kursi, Multimedia, Alat Peraga Edukasi, 2. Kurangnya ilmu perpustakaan bagi pengelola perpustakaan 3. SDM Pembinaan	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca	Kali	5,00	5,00	3.400.000.000	3.190.199.784	Budaya baca rendah dan Perkembangan Teknologi dan Informasi	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	Persen	60,00	60	530.000.000	524.340.700	belum adanya tempat/ruang penyimpanan naskah kuno dan budaya etnis nusantara	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	Naskah	5	5	180.000.000	177.283.500	Kurangnya sosialisasi tentang pelestarian naskah kuno	
	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Eksemplar	300	300	350.000.000	347.057.200	tidak ada kendala	
24. BIDANG KEARSIPAN												
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Prosentase Arsip yang dikelola	Persen	100,00	100,00	1.275.000.000	1.195.431.862	Pengelolaan arsip pada LKD belum optimal karena kurangnya Tenaga Pengelola dan tempat penyimpanan arsip (Depo Arsip)	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	Berkas	64.101,00	303.444,00	625.000.000	589.434.912	Penyimpanan Arsip yang Tidak Terorganisir dan Fasilitas Penyimpanan yang kurang Memadai	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang dikelola	Arsip	23.500,00	35.729,00	150.000.000	125.600.000	Fasilitas dan tempat penyimpanan kurang memadai	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	OPD	58,00	38,00	500.000.000	480.396.950	Kurangnya sumber daya manusia / tenaga dalam penginputan arsip statis pada aplikasi SIKN ke JIKN	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen	80,00	100,00	925.000.000	817.313.946	Belum adanya Depo Tempat Penyimpanan Arsip Yang belum Memadai	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK	Arsip	1.000,00	1000	200.000.000	168.952.500	Kurangnya Sosialisasi Pemusnahan Arsip di Perangkat Daerah	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai NSPK	Berkas	500,00	500,00	200.000.000	193.644.000	belum tersedianya mobil operasional TRC bencana sesuai standar untuk dilapangan tenaga teknis yang selalu berubah di setiap opd sehingga sukar untuk dilakukan bimbel memperluas bimtek atau magang kearsipan tentang perserpassi arsip kibat bencana	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip yang diselamatkan dan diselamatkan sesuai dengan NSPK	Daftar/Arsip	500,00	500,00	225.000.000	206.130.000	tidak tersosialisasi nya di secara merata di setiap opd tentang perlindungan dan penyelamatan arsip pada opd yang dilakukan pembubaran pemahaman dalam pembuatan daftar arsip aktif dan inaktif di setiap opd masih lemah sehingga sulit membedakan jenis arsip yang harus diselamatkan kan pada opd yang di bubarkan	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK	Arsip	500,00	500,00	100.000.000	99.256.996	Belum tersedianya alat mesin scanner yang standar belum di latihnya petugas UKA/UPPA di opd tentang alih media arsip sehingga saat akuisisi arsip belum ada penyerahan arsip	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											statis yang sudah digitalisasi	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai NSPK	Arsip	500,00	500,00	200.000.000	149.330.450	sulitnya mengakses data di lapangan karena belum adanya petunjuk teknis penelusuran arsip yang hilang untuk lingkungan kabupaten kukar	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentase izin penggunaan arsip yang diterbitkan	Persen	100,00	100,00	75.000.000	42.314.000	Kurangnya Sarana dan Prasarana serta tempat penyimpanan arsip tertutup	
	BIDANG KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota	Arsip	12,00	12	75.000.000	42.314.000	Kurangnya sosialisasi tentang arsip tertutup	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





Tabel 99. Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
25. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	85,70	69,82	29.673.487.360	25.327.874.309	Segera memperbaiki laporan SAKIP	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.	Dokumen	3,00	3,00	1.166.000.000	1.154.426.140	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Dokumen	22,00	22,00	17.375.760.045	15.205.655.524	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen.	6,00	6,00	75.000.000	15.985.000	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.	Dokumen	1,00	1,00	25.000.000	23.600.500	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.	Dokumen	2,00	2,00	478.000.000	476.744.230	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Memanfaatkan Layanan	ASN	110,00	110,00	3.263.463.650	3.158.062.881	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Diadakan	Unit	2,00	2,00	2.462.397.950	2.395.126.088	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persen	95,00	95,00	1.636.660.425	1.477.301.180	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.	Unit	90,00	90,00	3.191.205.290	1.420.972.766	Tidak adak penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	95.172,00	11.636,00	166.478.317.750	150.754.899.262		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Nelayan	2.000,00	4.061,00	109.164.466.200	96.651.017.351		
					Jumlah KUB Naik Kelas	KUB	20,00	20,00				
					Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Orang	2.500,00	2.500,00				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	Orang	500,00	751,00	56.063.851.550	53.627.153.119		
					Jumlah KUB Naik Kelas	KUB	8,00	8,00				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI Beroperasi	Unit	2,00	2,00	100.000.000	93.074.892		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan diterbitkan	Tanda Daftar Kapal Perikanan	5.000,00	50.000,00	1.050.000.000	316.171.780		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai 10 GT Terdaftar	Kapal	5.000,00	50.000,00	100.000.000	67.482.120		





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	185.608,00	203,81	354.419.927.378	318.826.289.000		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah POKDAKAN Bermitra	Pokdakan	50,00	22,00	12.964.413.300	11.642.564.544		
					Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	Pokdakan	20,00	4,00				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan	TDPI	1.000,00	560,00	200.000.000	176.597.500		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.	Pembudidaya	2.078,00	9.050,00	341.255.514.078	307.007.126.956		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	CAKUPAN WILAYAH SUMBERDAYA PERIKANAN YANG DIAWASI	Kecamatan	20,00	15,00	20.577.163.050	19.573.376.805		
					Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal/Destruktif Fishing	Persen	95,00	100,00				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi	Kelompok	5,00	9,00	20.577.163.050	19.573.376.805		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota								
					Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Nelayan	500,00	500,00				
					Jumlah Reservat Diawasi	Reservat	3,00	3,00				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	25.095,00	61.722,00	9.752.896.650	8.868.244.466		
					Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	Ton	1.687,00	1.911,00				
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Memiliki Tanda Daftar Usaha Pengolahan	Tanda Daftar Usaha.	10,00	325,00	400.000.000	393.683.700		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Menerapkan Standar Mutu	Unit Usaha	15,00	15,00	542.800.000	416.870.250		
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran	Poklahsar	50,00	52,00	8.810.096.650	8.057.690.516		
26. BIDANG PARIWISATA												
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	73,00	43,90	26.022.220.160	21.587.723.219	adanya keterbatasan pegawai mengolah data	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan , Penganggaran dan Laporan Evaluasi perangkat Daerah	dokumen	8,00	8,00	955.000.000	825.164.234	tidak ada	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	dokumen	2,00	0,00	17.912.554.748	15.500.282.864	tidak ada	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					100.000.000	97.072.720		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	600.000.000	589.734.280		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	5,00	0,00	1.874.606.000	1.671.989.470	tidak ada	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	6,00	2.628.059.412	2.334.148.862	tidak ada	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah yang dibayarkan	12	12,00	12,00	1.952.000.000	569.330.789		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial, budaya dan olah raga yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang Memenuhi Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi	Persen	63.81	65,00	51.419.780.000	27.267.201.549	-	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata	Dokumen	2,00	2,00	2.875.000.000	1.801.096.276		
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	no data	0,00	0,00	47.635.000.000	24.860.952.257	-	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang direkomendasikan untuk mendapat TDUP	Dokumen	10,00	10,00	909.780.000	605.153.016		





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial, budaya dan olah raga yang berkelanjutan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Okupansi	Persen	29.28	34,00	37.211.500.798	36.083.821.519	Tenggat waktu pelaksanaan kegiatan	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi Event daerah yang terlaksana di dalam negeri	no data	0,00	8,00	37.211.500.798	36.083.821.519	Tenggat waktu pelaksanaan	
					jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	no data	0,00	6,00			Tidak ada	
					Jumlah event luar negeri yang diikuti	no data	0,00	0,00			Belum ada agenda pelaksanaan event di luar negeri	
					Jumlah wisatawan mancanegara perkebangaan	no data	0,00	790,00			Kurangnya pemahaman pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya pendataan pariwisata	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Peningkatan produktivitas industri kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pelaku Ekonomi Kreatif yang Terfasilitasi	Persen	5,00	0,00	7.085.471.000	6.084.644.151	belum ada	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana ruang kreasi bagi insan kreatif	no data	0,00	0,00	750.000.000	149.261.830	tidak ada	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen pengembangan ; Jumlah pelaku usaha ekraf, jumlah sarana prasarana ekraf yang mendapat fasilitasi	no data	0,00	0,00	6.335.471.000	5.935.382.321	tidak ada	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					pengembangan ekosistem ekonomi kreatif							
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Peningkatan Produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial, budaya dan olah raga yang berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekraf	Persen	7,00	7,00	22.729.749.000	21.849.139.935	Indikator program ini tidak sesuai dengan output kegiatan dan subkegiatan dibawahnya sehingga berdampak pada terhambatnya pengisian capaian target.	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan	Dokumen	34,00	34,00	22.529.749.000	21.674.996.935	Salah satu pelatihan pelatihan yang menggunakan fasilitas zoom meeting, ada beberapa peserta mengalami kendala tidak stabilnya jaringan internet dilokasinya, sehingga terkendala menerima materi dari narasumber.	
	BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang di sertifikasi	no data	0,00	110,00	200.000.000	174.143.000	sarana pelatihan kain tenun badong tencep berupa alat tenun yang terbatas, sehingga para peserta belajar secara bergantian.	
27. Pertanian												
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	64,00	64,00	92.959.786.763	78.596.753.604	Masih rendahnya kualitas dan Kuantitas SDM pengelolaan pertanian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelolaan pertanian 1) Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur Peningkatan ketersediaan air meliputi pembuatan embung, 2) Perbaikan jaringan irigasi yang rusak, 3) Pelaksanaan program pompanisasi dan pipanisasi; 4) Peningkatan kapasitas petani dan fasilitas penyediaan sarana produksi yang tepat guna dan tepat





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												waktu untuk mendukung peningkatan penerapan teknologi; 5) Peningkatan kemampuan sumberdaya petani harus terus ditingkatkan melalui pelatihan, kursus-kursus atau sekolah lapang sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian secara menyeluruh. 6) Dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, program yang akan ditekankan yaitu peningkatan kemampuan petani dan kelembagaannya, serta menata jaringan agribisnis agar tercipta situasi usaha tani yang kondusif dan menguntungkan semua pihak, khususnya Petani.
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13,00	13,00	902.000.000	823.376.700	Target sudah tercapai, namun antar Bidang belum saling berkoordinasi sehingga terpenuhinya data untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Antara Bidang harus saling berkoordinasi sehingga terpenuhinya data untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	17,00	17,00	74.637.079.077	62.063.084.429	Target sudah tercapai, namun Proses Pelaksanaan administrasi masih ada kendala dalam penetapan hasil ahir didalam aplikasi	Petugas harus segera melakukan koordinasi jika terdapat kendala dalam penetapan hasil ahir didalam aplikasi





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	70.000.000	64.470.000	Target sudah tercapai, namun Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output	Harus petugas segera melakukan koordinasi jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan penganggaran
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	2,00	590.000.000	552.163.010	Target sudah tercapai, namun Masih rendahnya SDM ASN dan Non Asn berkelanjutan	Perlu diadakannya pelatihan SDM ASN dan Non Asn berkelanjutan
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8,00	8,00	1.726.065.700	1.545.824.759	Target sudah tercapai, namun masih rendahnya tingkat pelayanan	Dalam pelayanan harus ditingkatkan lagi
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	50,00	50,00	7.186.059.350	6.544.443.066	Target sudah tercapai, namun pengawasan terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah harus tetap lebih ketat	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12,00	12,00	5.937.293.636	5.531.993.219	Target sudah tercapai, namun penerima manfaat bertambah/berkurang. Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	340,00	340,00	1.911.289.000	1.471.398.421	Target sudah tercapai, namun perlu diadakannya pencatatan dalam pelaksanaannya sehingga dapat dikelola dengan baik	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	Hektar (Ha)	40.641,30	40.641,00	61.404.068.052	55.498.341.994	Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok saprodi dan benih padi
					Luas Tanam Jagung	Hektar (Ha)	13.000,00	1,66			Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok saprodi dan benih jagung
					Luas Tanam Palawija (Porang)	Hektar (Ha)	45,00	14,00			Tidak ada yang berminat untuk mengembangkannya karena pemasarannya sulit dan harganya tidak	Melakukan analisa kembali dan memberikan solusi komoditi yang sesuai





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											sebanding dengan biaya pemeliharaan	dengan daya dukung lahan yang ada di Kutai Kartanegara
					Luas Tanam Hortikultura	Hektar (Ha)	27.781,65	14,83			Lahan yang luas dengan Stok benih yang terbatas	Melakukan perencanaan untuk pengadaan stok benih dan saprodi hortikultura
					Peningkatan Populasi Ternak Besar	Ekor	36.157,00	16,20			Terbatasnya daerah sumber bibit ternak karena masih adanya kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku di beberapa daerah sumber bibit ternak sapi	Melakukan pencegahan dan pengobatan penyebaran kepada manusia
					Peningkatan Populasi Ternak Kecil	Ekor	17.990,53	12,84			Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
					Peningkatan Populasi Ternak Unggas	Ekor	16.908.000,00	19.370.909,00			Harga pakan yang sangat mahal, Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan	Unit	10.981,00	10.981,00	45.599.068.052	40.765.258.782	Sering terjadinya penyakit hewan	Melakukan pencegahan dan pengobatan pada ternak kecil
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	26,00	6,00	600.000.000	519.559.516	-Karena air sungai Mahakan sungai Mahakan surut, ternak kerbau tidak ada di kalang. Biasanya naik ke kalang jika kondisi air sungai Mahakan pasang, jadi tidak bisa melakukan pengukuran (survei harga)	Memberikan Pemberitahuan agar senantiasa melakukan Pengalangan jika akan melakukan kegiatan, koordinasi dengan tingkat bawah
					Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	26,00	20,00			Terbatasnya sumber bibit ternak kerbau di Indonesia. - Provinsi Kalsel yang juga merupakan sumber bibit kerbau masih belum boleh mengeluarkan bibit karena ada terkendala penyakit Sura	Masih berharap dari sumber luar, maka membuat perencanaan untuk bisa mandiri
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta	Cakupan Pengawasan	Jenis	2,00	2,00	150.000.000	136.877.000	tidak ada kendala	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar dan Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Ton	1,00	1,00	275.000.000	239.682.400	tidak ada	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Benih/Bibit Ternak	Ekor	322,00	322,00	14.780.000.000	13.836.964.296	Terbatasnya daerah sumber bibit ternak karena masih adanya kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku di beberapa daerah sumber bibit ternak sapi	Mengkondisikan bibit berasal dari daerah yang bebas penyakit menular, atau bibit berasal dari kota lain.
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	Meter	20.000,00	20.000,00	65.923.291.920	59.990.428.990	Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanaan kegiatan di awal tahun
					Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	Unit	23,00	22,00			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanaan kegiatan di awal tahun
					Panjang Jaringan Irigasi Yang Dibangun	Meter	17.000,00	4.788,00			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanaan kegiatan di awal tahun
					Jumlah DAM Parit Yang Dibangun	Unit	6,00	6,00			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanaan kegiatan di awal tahun
					Jumlah Pintu Air Yang Dibangun	Unit	33,00	43,00			Cuaca yang tidak menentu berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan	Upaya Pelaksanaan kegiatan di awal tahun
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	105,00	105,00	1.350.000.000	1.139.915.800	Cuaca, Ketersediaan Material	Upaya Pelaksanaan kegiatan di awal tahun
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	1,00	1,00	64.573.291.920	58.850.513.190	Cuaca, Ketersediaan Material	Upaya Pelaksanaan kegiatan di awal tahun





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	Persen	95,00	98,00	1.737.300.000	1.628.404.184	Target tercapai, namun terjadi Gangguan Alat Reproduksi, dan Terjadinya Distoksia dan lain - lain	Melakukan pemilihan bibit yang baik dan unggul agar tidak lagi terjadi gangguan Alt Reproduksi
					Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	Jenis	5,00	5,00			Dampak perubahan yang berpengaruh pada masyarakat agar terhindar dari Gizi Buruk (Stunting) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	Tersedianya Sarana (Daging Segar, Susu, Telur, Produk Olahan dan Produk Hewan) Pengendalian Daging dan Produk Olahan sehingga Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk di Konsumsi Masyarakat dan terbebasnya dari Gizi Buruk (Stunting) khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100,00	92,00	1.012.300.000	956.249.184	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan	Jenis	2,00	5,00	200.000.000	192.934.000	Dampak perubahan yang berpengaruh pada masyarakat agar terhindar dari Gizi Buruk (Stunting) di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Teknis Kesmavet	Jenis	2,00	2,00	300.000.000	273.286.000	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Perkebunan	Persen	3,00	98,00	225.000.000	205.935.000	Lokasi ternak yang berjauhan sehingga memakan waktu dan tidak bisa dilakukan dalam satu hari serta ternak	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya, melakukan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Kesehatan Masyarakat Veteriner							yang tidak tervaksin karena dilepaskan pada saat pengobatan atau Vaksinasi pada saat itu	perencanaan ditingkat bawah/teknis untuk membuat jadwal vaksinasi/pengobatan mengumpulkan ternak yang akan divaksin di satu tempat. Melakukan pengamanan terhadap ternak yang akan divaksin/diobati.
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	90,00	90,00	1.632.265.474	1.331.892.096	Tidak ada hambatan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas pengendalian OPT Pertanian	Ha	2.400,00	2.400,00	1.632.265.474	1.331.892.096	Tidak ada hambatan	Pertahankan dan ditingkatkan kinerjanya
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Rekomendasi Usaha Pertanian yang dikeluarkan	Rekomendasi	35,00	35,00	400.000.000	158.434.000	Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan	Segera melakukan Open Recrutmen yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Surat	20,00	20,00	250.000.000	63.269.000	Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan	Segera melakukan Open Recrutmen yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di verifikasi secara simultan
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Ternak	Dokumen	15,00	15,00	150.000.000	95.165.000	Belum muncul Inisiatif/peremintaan pelaku ternak dalam pendampingan sedangkan sangat butuh pendamping baik itu petugas peternakan maupun Dokter Hewan	Membuka Open recrutmen/ Petugas pendamping s peternakan maupun Dokter Hewan





No	Urutan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	3,00	3,00	20.144.278.650	17.883.439.968	Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang bertitel Ahli masih kurang dan variabel ukur yang harus di nilai secara simultan	Memberikan penganggaran monitoring kelapangan untuk verifikasi kelayakan
	Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan lembaga petani yang dibina	Persen	90,00	90,00	20.144.278.650	17.883.439.968	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia berdedikasi masih kurang serta variabel penilaian yang simultan	Melakukan perencanaan pelatihan bagi SDM baik itu PPL/Petugas Pertanian, Petani dan Peternak
	Pertanian	Dinas Perkebunan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,50	73,72	27.361.866.573	21.368.419.863	1. Adanya penyesuaian penilaian dalam mengimplementasikan sesuai pedoman permenpan 88 tahun 2021, sehingga mempengaruhi nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	392.568.000	364.257.334		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15,00	15,00	21.879.114.573	16.169.346.340		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	252.060.000	251.285.266		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	25.000.000	22.007.995		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	2,00	220.000.000	207.401.050		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6,00	6,00	1.276.520.000	1.161.365.347		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	0,00	1,00	500.000.000	458.110.000		





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	1.777.850.000	1.722.366.083		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	102,00	119,00	1.038.754.000	1.012.280.448		
	Pertanian	Dinas Perkebunan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	Hektar (Ha)	28.720,00	31.585,00	19.079.682.000	16.123.936.160		
					Luas Areal Kelapa Sawit PBS	Hektar (Ha)	268.526,00	222.940,00				
					Luas Areal Karet	Hektar (Ha)	17.958,00	17.543,00				
					Luas Areal Lada	Hektar (Ha)	3.427,00	1.879,00				
					Luas Areal Kelapa Dalam	Hektar (Ha)	7.301,00	6.796,00				
					Luas Areal Kopi	Hektar (Ha)	110,00	105,00				
					Luas Areal Kakao	Hektar (Ha)	95,00	141,00				
					Luas Areal Aren	Hektar (Ha)	248,00	266,00				
					Luas Areal Kelor	Hektar (Ha)	9,00	0,00				
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	Paket	777,00	777,00	18.916.750.000	15.974.028.200		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	Komoditi	1,00	1,00	162.932.000	149.907.960		
	Pertanian	Dinas Perkebunan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	Meter	4.000,00	4.636,50	7.465.937.219	6.519.020.235		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan									
					Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	Unit	2,00	1,00				
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	Unit	65,00	43,00	7.465.937.219	6.519.020.235		
	Pertanian	Dinas Perkebunan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	Persen	56,00	56,00	535.953.980	485.854.069		
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	Ha	240,00	240,00	535.953.980	485.854.069		
	Pertanian	Dinas Perkebunan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Penerbitan STDB	Surat (STDB)	200,00	207,00	300.000.000	246.765.437		
					Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	Surat (PUP)	20,00	16,00				
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	Pelaku	220,00	223,00	300.000.000	246.765.437		
	Pertanian	Dinas Perkebunan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan,	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persen	14,63	14,63	650.000.000	640.404.989		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			peternakan dan kehutanan									
	Pertanian	Dinas Perkebunan		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	Lembaga	46,00	46,00	650.000.000	640.404.989		
28. BIDANG KEHUTANAN												
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)	Persen	16,67	15,00	347.000.000	50.156.203	Proses penetapan tahura yang memerlukan proses tata batas dan keterbatasan waktu tenaga ahli dalam penyusunan dokumen.	
	BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen	1,00	1,00	347.000.000	50.156.203	Belum dilaksanakan tata batas rencana tahura.	Perlu melaksanakan tata batas areal tahura dengan harapan bisa temu gelang.
29. BIDANG PERDAGANGAN												
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	48,29	150.000.000	145.633.000	Masih sangat kurangnya pelaporan kinerja yang harus ditingkatkan seluruh bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	150.000.000	145.633.000	Masih kurangnya pemenuhan data pada bidang terkait di waktu yang telah ditetapkan.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan rekomendasi pejinan pendaftaran perusahaan yang dikeluarkan	persen	100,00	22,05	325.000.000	306.458.000	Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kurang Untuk jadi rekomendasi (PP. No. 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Resiko) harus dilakukan kegiatan/perjalanan beberapa kali yaitu : menginformasikan/mengantar surat kepada pelaku usaha/perusahaan, survey (untuk melihat keadaan yang sebenarnya dan melihat titik koordinat) dan pembuatan Berita Acara wajib ada yang akan di upload ketika pendaftaran OSS melalui	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											sistem yang sudah ditentukan di DMPTSP) -Pihak pelaku usaha (perusahaan/perorangan) kurang menyadari untuk melaksanakan peraturan - Terkendala masalah teknis / pelaku usaha tidak cukup waktu untuk pengurusan izin yang mendukung seperti Tata Ruang dan PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi).	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen rekomendasi izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan izin usaha toko Swalayan yang diterbitkan	persen	68,00	22,50	75.000.000	67.066.000	-Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kurang Untuk jadi rekomendasi (PERDA no.6/2012 dan PERBUP no. 53/2013) harus dilakukan kegiatan/perjalanan beberapa kali yaitu : survey (untuk melihat rencana lokasi yang sebenarnya dan melihat titik koordinat) kemudian menghadiri kegiatan sosialisasi Disperindag sebagai Narasumber karena dinas teknis di desa/kelurahan tempat rencana lokasi toko modern dan meminta persetujuan warga melalui kades atau yang mewakili untuk pendirian toko) -Pihak pelaku usaha (perusahaan/perorangan) kurang menyadari untuk melaksanakan peraturan - Terkendala masalah teknis / pelaku usaha tidak cukup waktu untuk pengurusan izin yang mendukung seperti Tata Ruang dan PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi).	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	surat TDG	52,00	12,00	100.000.000	96.041.000	-Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kurang Untuk jadi rekomendasi (PERDA no.6/2012 dan PERBUP no. 53/2013) harus dilakukan	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kegiatan/perjalanan beberapa kali yaitu : survey (untuk melihat renana lokasi yang sebenarnya dan melihat titik koordinat) kemudian menghadiri kegiatan sosialisasi Disperindag sebagai Narasumber karena dinas teknis di desa/kelurahan tempat renana lokasi toko modern dan meminta persetujuan warga melalui kades atau yang mewakili untuk pendirian toko) -Pihak pelaku usaha (perusahaan/perorangan) kurang menyadari untuk melaksanakan peraturan - Terkendala masalah teknis / pelaku usaha tidak cukup waktu untuk pengurusan izin yang mendukung seperti Tata Ruang dan PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi).	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi	11,00	4,00	75.000.000	68.851.000	-Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dimaksud kurang Untuk jadi rekomendasi (PERDA no.6/2012 dan PERBUP no. 53/2013) harus dilakukan kegiatan/perjalanan beberapa kali yaitu : survey (untuk melihat renana lokasi yang sebenarnya dan melihat titik koordinat) kemudian menghadiri kegiatan sosialisasi Disperindag sebagai Narasumber karena dinas teknis di desa/kelurahan tempat renana lokasi toko modern dan meminta persetujuan warga melalui kades atau yang mewakili untuk pendirian toko) -Pihak pelaku usaha (perusahaan/perorangan) kurang menyadari untuk melaksanakan peraturan - Terkendala masalah teknis /	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pelaku usaha tidak cukup waktu untuk pengurusan izin yang mendukung seperti Tata Ruang dan PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi).	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Luar Negeri yang diterbitkan	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Luar Negeri yang diterbitkan	Rekomendasi	4,00	0,00	75.000.000	74.500.000	-Dari pihak kecamatan yang kami datangi ketika kami mendata tidak punya data karna pelaku usaha tidak pernah melaporkan usahanya dan lagi tidak semua kecamatan ada pelaku usaha yang waralaba dari luar negeri -Pihak pelaku usaha (perusahaan/perorangan) kurang menyadari untuk melaksanakan peraturan Terkendala masalah teknis / pelaku usaha tidak cukup waktu untuk pengurusan izin yang mendukung seperti Tata Ruang dan PBG (Persetujuan Bangunan dan Gedung) & SLF (Sertifikat Laik Fungsi).	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	persen	65,00	12,50	15.678.581.999	14.525.954.261	Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan	
					Pertumbuhan pendapatan pasar	persen	3,62	56,90			1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapus Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Realisasi tidak dapat tercapai dikarenakan adanya relokasi Pasar Tangga Arung dengan pembebasan Retribusi Sewa Petak mulai bulan Maret 2024 dan tidak adanya pungutan lagi atas	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											penerimaan Retribusi MCK di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 serta Retribusi Limbah Basah/Kering di Lingkungan Pasar dikarenakan termasuk dalam Pelayanan	
					Indeks Kualitas Pasar	Nilai	58,00	74,30			optimalnya alokasi dana untuk pembenahan sarana dan prasarana ,biaya perawatan dan pemeliharaan,pemeriksaan berkala,belum adanya UPTD	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dibangun dan dikelola	unit	5,00	21,00	15.148.581.999	14.079.662.767	Dokumen/Berkas	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya (unit pengelola pasar) yang memperoleh pembinaan	unit UPP	5,00	5,00	530.000.000	446.291.494	Perlunya dianggarkan secara bertahap untuk pembenahan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan SNI Pasar Tradisional perlunya alokasi dana untuk biaya perawatan dan pemeliharaan pasar. perlunya pemeriksaan berkala perlunya di bentuk UPTD	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	persen	3,62	3,52	2.800.000.000	2.353.896.555	Barang pokok seperti cabai dan bawang impor dari luar daerah turut mempengaruhi fluktuasi harga di pasar rakyat, penyebabnya bisa keterlambatan jalur distribusi, sirkulasi panen dan faktor cuaca Aksesibilitas yang masih minim di beberapa daerah yang mengakibatkan sulitnya jalur distribusi menyebabkan harga barang lebih tinggi seperti kondisi jalan atau transportasi yang belum memadai	
					Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	persen	98,21	90,00			Kurangnya jumlah petugas pengawas dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pemantauan distribusi secara menyeluruh dapat menghambat efektivitas pengawasan, Wilayah yang sulit dijangkau	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											atau tidak memiliki infrastruktur yang memadai dapat menjadi kendala dalam pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, yang berisiko menyebabkan distribusi tidak merata.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	jenis	13,00	13,00	425.000.000	398.581.355	Gangguan seperti bencana alam, masalah transportasi, atau pandemi dapat mempengaruhi distribusi barang dan menyebabkan kelangkaan pasokan di pasar. Beberapa barang kebutuhan pokok (misalnya cabai, bawang, dan beras) sangat tergantung pada musim atau kondisi cuaca. Jika musim gagal atau cuaca buruk, pasokan dapat terganggu dan harga naik.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	persen	58,33	58,00	2.000.000.000	1.607.901.600	Cabai Merah Besar, Cabai Tiung dan Cabai Keriting 80% masih bergantung pada impor dari luar daerah membuat harga fluktuatif dengan faktor distribusi yang terhambat, Bawang merah dan bawang putih juga masih bergantung pada impor dari luar daerah hingga bergantung pada kelancaran distribusi, daging ayam lokal belum mampu menopang kestabilan harga di daerah dikarenakan belum memadainya produksi daging ayam lokal di daerah	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	persen	84.546,00	6.627,00	375.000.000	347.413.600	Daerah yang terpencil atau sulit dijangkau dapat menghambat distribusi pupuk, menyebabkan keterlambatan atau kelangkaan. Praktik curang seperti distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau adanya oknum yang menjual pupuk bersubsidi di pasar bebas bisa merugikan petani yang membutuhkan.	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan ekspor produk unggulan	persen	100,00	24,23	2.130.000.000	1.809.541.722	Tidak memiliki Pelabuhan Ekspor	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi	kali	12,00	12,00	2.130.000.000	1.809.541.722	Kendala yang di hadapi masih sulit untuk menemukan data data pelaku usaha ekspor untuk pelaku usaha umkm, dan terkait kecamatan Samboja untuk datanya berada di wilayah kota balikpapan yang akan di usahakan menjajaki bersurat dan kesana dengan berkoordinasi dengan bea cukai dari samarinda.	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	persen	28,00	38,96	500.000.000	437.275.305	Adanya sebagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada terdapat kecamatan yang tidak memiliki pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayanan tera / tera ulang	
	BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persen	19,00	41,90	500.000.000	437.275.305	Adanya Debagian pemilik timbangan yang enggan menerakan alat ukurnya - Ada Terdapat kecamatan Yang tidak memiliki Pasar tradisional sehingga pedagang tersebar yang menyebabkan terhambatnya pelayabna tera/tera ulang	
30. BIDANG PERINDUSTRIAN												
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	48,29	28.772.622.606	24.703.398.402	Masih sangat kurangnya pelaporan kinerja yang harus ditingkatkan seluruh bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	425.123.500	365.253.485	Masih kurangnya pemenuhan data pada bidang tyerkait di waktu yang telah ditetapkan.	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1,00	1,00	16.794.685.951	14.446.392.375	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1,00	135.000.000	100.615.000	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	1,00	1,00	483.000.000	325.948.800	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8,00	1,00	2.222.521.000	1.643.503.845	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis	3,00	3,00	1.327.393.000	1.232.236.800	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12,00	12,00	5.608.772.377	5.035.212.047	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	1.350,00	1.350,00	1.776.126.778	1.554.236.050	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Produktivitas nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	dokumen	2,00	1,00	44.498.729.000	41.738.354.023	Belum adanya Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) pada pembangunan pabrik minyak makan merah 2. Belum di Perda kannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) karena baru terbitnya RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, dan harus update data terbaru untuk RPIK.	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra	sentra	1,00	1,00	44.498.729.000	41.738.354.023	Belum adanya Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) pada pembangunan pabrik minyak makan merah 2.	





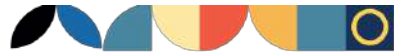
No	Urutan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Belum di Perda kannya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) karena baru terbitnya RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara, dan harus update data terbaru untuk RPIK.	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang masuk dalam SIINAS	Persen	4,64	4,64	900.000.000	398.455.260	Belum meratanya jaringan internet di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha dibidang IT	
	BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	informasi	44,00	139,00	900.000.000	398.455.260	Belum meratanya jaringan internet di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Keterbatasan kemampuan pelaku usaha di bidang IT	
31. BIDANG TRANSMIGRASI												
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang direncanakan	Kawasan	1,00	1,00	1.100.000.000	664.909.600	Kurangnya Koordinasi Antara Instansi Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian dalam implementasi. Masalah birokrasi yang menghambat efisiensi dalam pengalokasian sumber daya dan pelaksanaan program transmigrasi.	Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung program transmigrasi sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan pengurangan kemiskinan di daerah terpencil atau padat penduduk
					Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Kawasan	1,00	0,00			Kewenangan pemanfaatan HPL Transmigrasi sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi)	Perlu dilakukan evaluasi regulasi terkait pemanfaatan HPL Transmigrasi dan Tanah R (Surat Dirjen Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi No. B.380/P4 Trans/IV/2010 perihal





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												Pemanfaatan Tanah pada Unit Pemukiman Transmigrasi yang telah diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Daerah)
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	Dokumen	1,00	1,00	1.100.000.000	664.909.600	Birokrasi yang Lambat dan Rumit Proses birokrasi yang panjang dan rumit dalam pengajuan dan persetujuan kegiatan penyusunan RKT, yang dapat menghambat kelancaran perencanaan dan pengambilan keputusan. Kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menyebabkan kesulitan dalam pengaturan tugas dan tanggung jawab.	Kebijakan Pemerintah yang Mendukung Pemerintah pusat dan daerah yang mendukung penyusunan RKT sebagai bagian dari strategi pengembangan kawasan transmigrasi dan pemerataan pembangunan di wilayah yang kurang berkembang. Adanya regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung upaya pemerintah untuk mempermudah proses penyusunan dan pelaksanaan RKT, seperti kebijakan terkait penggunaan lahan atau alokasi anggaran khusus untuk transmigrasi
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	1,00	1,00	300.000.000	284.095.500	Rencana Pengembangan Blm bisa dilaksanakan secara Optimal	Rencana Pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans
	BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans	Dokumen	1,00	1,00	300.000.000	284.095.500	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Kurangnya tenaga kerja terampil atau berpendidikan yang dapat mengelola dan mengembangkan kawasan desa/KIMTRANS dengan efisien. Tidak adanya program	





No	Urutan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pelatihan yang memadai bagi masyarakat desa untuk meningkatkan keterampilan dalam bidang teknis atau manajerial terkait dengan pengembangan kawasan	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





Tabel 100. Pelaksanaan Urusan Pendukung Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
32. SEKRETARIAT DAERAH												
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	79,00	47,78	200.722.413.728	176.232.547.498	1. Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas SDM 2. Pemahaman aparatur terhadap regulasi	
					Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	96,00	96,00			Masih kurangnya jumlah kualitas dari aparatur penyelenggaraan Pemerintah yang berkompeten dibidangnya.	
					Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	Persen	92,00	96,00			Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan penggunaan kode rekening 5.1.02.02.01.0047 dikarenakan untuk tidak merekomendasikan atas pembayaran/realisasi pada rekening belanja tersebut dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
					PERSENTASE ASET YANG DI MANFAATKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	Persen	79,00	79,00			Pencatatan aset yang tidak lengkap atau tidak akurat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan pemanfaatan	
					PERSENTASE NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH PREDIKAT BB DAN A	PERSEN	80,00				1. Indikator penilaian evaluasi dipandangn masih terlalu tinggi 2. masih rendahnya kualitas penyusunan laporan kinerja perangkat daerah 3. masih adanya perangkat daerah yang tidak melaporkan lkjip perangkat daerah 4. belum menerima hasil	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											evaluasi per perangkat daerah	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13,00	13,00	355.000.000	216.742.806	Menunggu terbitnya SPD	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15,00	15,00	74.258.419.343	64.506.503.634		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	84,00	7,00	702.516.600	658.755.188		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	144.220.000	140.080.000		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6,00	6,00	9.733.297.500	9.475.585.167		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	171,00	171,00	16.407.132.073	14.866.047.056		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	20.530.455.194	18.677.592.973		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	132,00	132,00	52.304.931.954	42.805.851.800		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2,00	2,00	1.726.463.814	1.245.901.062		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Dokumen	12,00	12,00	2.946.620.000	2.933.256.538		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan	Kegiatan	3,00	3,00	21.613.357.250	20.706.231.274		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Komunikasi Pimpinan							
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	139.007.137.830	115.578.401.524		
					Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	Persen	100,00	100,00				
					Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	Persen	90,00	100,00				
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen	12,00	8,00	2.375.210.245	2.165.660.650	Tidak ada Kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Jumlah Target bukan jumlah sebenarnya dari Target yang berada di DPA Bagian Tata Pemerintahan	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		0,00	100,00	134.018.413.585	110.967.327.768		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Dokumen	404,00	404,00	1.005.000.000	877.878.143	tidak ada kendala	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen	20,00	20,00	1.608.514.000	1.567.534.963		
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	8.272.386.385	7.872.395.583	Tidak Ada Hambatan	
					Persentase permasalahan kebijakan Administrasi	Persen	90,00	100,00			Tidak Ada Hambatan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					pembangunan daerah yang diselesaikan							
					Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	76,00			Terdapatnya Peningkatan APBD/Struktur Anggaran di Tahun 2025 berdasarkan RUP LKPP RI Tahun 2025 terjadi peningkatan, Penambahan pengelolaan server Backup dan aplikasi Pendukung SPSE, Penambahan Bimtek, Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ, Monitoring dan Evaluasi, serta mengikuti Rakor UKPBJ	
					PERSENTASE PENGADAAN BARANG JASA YANG DI SELESAIKAN	Persen	100,00	99,80			Tidak Terdapat Kendala	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	13,00	13,00	1.775.336.000	1.477.246.636	Pelaksanaan kegiatan internal bersamaan dengan mengikuti kegiatan/undangan OPD teknis dan/ atau lembaga vertikal	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Dokumen	20,00	20,00	2.081.100.385	2.075.969.295	Pelaksanaan Kegiatan baik berupa fasilitasi tindaklanjut permasalahan, fasilitasi pelaksanaan maupun fasilitasi rapat-rapat koordinasi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagian Administrasi Pembangunan di rencanakan dalam penyusunan KAK, DPA dan jadwal pelaksanaan kegiatan. terhambatnya beberapa pelaksanaan kegiatan yang di	dilakukan penyesuaian anggaran melalui DPA Perubahan, KAK Perubahan dan perubahan Jadwal Pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan banyak yang di laksanakan pada APBD Perubahan.





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											sesuaikan dengan arahan atasan langsung dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	595,00	595,00	3.218.950.000	3.181.618.002	Terdapatnya Peningkatan APBD/Struktur Anggaran di Tahun 2025 berdasarkan RUP LKPP RI Tahun 2025 terjadi peningkatan, Penambahan pengelolaan server Backup dan aplikasi Pendukung SPSE, Penambahan Bimtek, Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ, Monitoring dan Evaluasi, serta mengikuti Rakor UKPBJ	
	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dokumen	28,00	28,00	1.197.000.000	1.137.561.650	Tidak Ada Permasalahan	
33. SEKRETARIAT DPRD												
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	81,00	60,17	148.259.649.341	139.392.692.480	Terlambatnya Pengumpulan Dokumen-Dokumen Pendukung	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	12,00	2.264.717.540	2.071.167.442		
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Dokumen	6,00	6,00	24.070.471.438	20.667.684.951	Keterbatasan SDM, Keterbatasan Anggaran, Bencana Alam atau Kejadian tak terduga dan Perubahan Kebijakan Pemerintah, Proses Pengelolaan Keuangan yang Rumit, Konflik kepentingan, Kurangnya	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kesadaran akan pentingnya Laporan Keuangan	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	301.080.000	293.260.800	Apabila Dananya Tidak Tersedia	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	4,00	3.429.035.000	3.376.176.733	Kualitas dan Kompetensi Pegawai, Kurangnya disiplin Pegawai, Anggaran Terbatas	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6,00	6,00	6.431.790.080	6.295.050.005	Apabila Dananya Tidak Tersedia	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1.389,00	1,39	41.688.193.600	41.464.649.535	Apabila Dananya Tidak Tersedia	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	13.273.832.896	12.297.451.491	Apabila Dananya Tidak Tersedia	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	254,00	254,00	9.013.595.989	8.729.827.452	Apabila Dananya Tidak Tersedia	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan	2,00	2,00	38.266.758.878	35.486.828.075	Tidak ada faktor Penghambat	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Layanan	3,00	3,00	9.520.173.920	8.710.595.996	Apabila Dananya Tidak Tersedia	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD	Persen	100,00	100,00	70.626.202.232	60.499.809.296		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Persentase Fasilitas Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	Persen	100,00	0,00				
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat	Perda	16,00	16,00	10.033.566.510	9.807.416.632	Bila Rapat rapatnya tidak kuorum	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan	Rapat	18,00	18,00	1.805.820.000	1.591.896.869	Tidak ada faktor Penghambat	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan DPRD	Kali	190,00	190,00	1.516.500.000	730.507.989	Berubahnya jadwal kegiatan	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan DPRD	Persen	100,00	100,00	24.578.867.157	22.166.499.220	Kurangnya Anggaran serta Fasilitas, koordinasi	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase kegiatan yang terlaksana	Persen	100,00	100,00	5.261.000.000	4.384.008.109	Tidak ada kendala dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan	Persen	100,00	100,00	976.500.000	862.469.804	Berubahnya jadwal dalam pelaksanaan kode etik	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerjasama Daerah	Dokumen	10,00	100,00	735.000.000	354.416.588	Tidak ada kendala dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan	
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persen	100,00	100,00	25.718.948.565	20.602.594.085	Tidak ada faktor Penghambat	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





Tabel 101. Pelaksanaan Urusan Pengawasan Pemerintah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
34. INSPEKTORAT DAERAH												
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,00	73,64	58.686.558.938	47.078.757.984	ada beberapa komponen penilaian yang belum tercapai	Akan dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
					Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3,00			Optimalisasi data dukung	Level sudah tercapai
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	8,00	8,00	500.000.000	207.683.726	Realisasi pelaksanaan sesuai jadwal	Realisasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan target yang ditentukan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	3,00	3,00	18.321.396.072	15.455.744.262	Realisasi pelaksanaan sesuai jadwal	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan sesuai target yang ditentukan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	40.800.000	40.800.000	Realisasi pelaksanaan sesuai jadwal	Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Kantor Inspektorat Daerah dilaksanakan sesuai jadwal dan yang ditetapkan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	3,00	5.350.000.000	4.576.005.199	Realisasi Administrasi Kepegawaian terutama Peningkatan Kompetensi SDM menyesuaikan Jadwal Pelaksanaan dan Jadwal Pengawasan	Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pada Kantor Inspektorat Daerah yang dilaksanakan sesuai target
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6,00	6,00	2.410.000.000	1.982.563.866	Realisasi layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan sesuai jadwal	Pelaksanaan Administrasi Umum Kantor Inspektorat Daerah sesuai target





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	303,00	301,00	27.864.210.732	22.429.529.922	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah tidak tercapai target karena ada dua unit belanja tidak dilaksanakan	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kantor Inspektorat Daerah disesuaikan kebutuhan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	3.294.232.134	1.801.817.577	Realisasi pelaksanaan sesuai jadwal	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kantor Inspektorat Daerah yang dilaksanakan sesuai Target
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	15,00	13,00	905.920.000	584.613.432	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kantor Inspektorat Daerah ada 2 unit yang tidak terealisasi	Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada kantor Inspektorat Daerah, dilaksanakan sesuai jadwal
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	96,00	103,00	11.500.000.000	4.808.467.577	Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan sesuai perencanaan walaupun ada beberapa pengawasan yang dilaksanakan diluar yang telah ditetapkan	Pelaksanaan Kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan sesuai target
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan	Dokumen	97,00	99,00	9.300.000.000	3.971.129.877	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal dilaksanakan sesuai yang ditetapkan dan menyesuaikan pengawasan diluar yang sudah ditetapkan	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Internal dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen	19,00	20,00	2.200.000.000	837.337.700	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sesuai jadual dan menyesuaikan pengawasan diluar yang sudah ditetapkan	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan target yang ditetapkan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP	Persen	75,00	97,00	4.000.000.000	1.649.242.765	Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dilaksanakan sesuai jadual	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dilaksanakan telah memenuhi target yang ditetapkan
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Dokumen	4,00	4,00	800.000.000	422.223.448	Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan sesuai jadual	Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan, dilaksanakan sesuai target
	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat Kabupaten		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Dokumen	83,00	80,00	3.200.000.000	1.227.019.317	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan sesuai jadual dan ada 3 dokumen penilaian ZI tidak terealisasi	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan sesuai jadual dan akan dioptimalkan

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





Tabel 102. Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
35. PERENCANAAN												
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88,50	72,78	30.917.194.267	26.812.351.921		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	12,00	426.484.000	401.908.343	Kompetensi SDM yang masih belum memadai	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan	6,00	6,00	17.859.409.655	14.928.520.486	Kompetensi SDM yang belum memadai	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	108.448.000	105.599.000	Kompetensi SDM yang belum memadai	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8,00	8,00	3.732.314.477	3.518.610.719		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	1.446.000.560	1.370.723.901		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100,00	100,00	4.000.016.637	3.306.091.427		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	3.344.520.938	3.180.898.045		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran Daerah	Persen	100,00	93,74	6.205.482.550	5.481.781.456		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	24,00	24,00	2.823.082.550	2.540.177.696		
					Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Forum	3,00	3,00				
					Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	2,00	2,00				
					Jumlah pelaksanaan Musrenbang	Kali	2,00	2,00				
					Jumlah Pendampingan perencanaan	Lembaga / OPD	58,00	58,00				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Dokumen	5,00	5,00	2.154.900.000	1.875.246.813		
					Jumlah layanan data dan informasi kecamatan	layanan data dan informasi	6,00	6,00				
					Jumlah pendampingan ketersediaan data	urusan	32,00	32,00				
					Jumlah Personil Pembinaan Data	Orang	30,00	30,00				
					Jumlah Rancangan Regulasi Daerah	Rancangan Regulasi	0,00	0,00				
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	13,00	13,00	1.227.500.000	1.066.356.947		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan	Persen	100,00	94,55	6.569.655.033	4.540.589.988		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Pemerintahan pada Renja-PD							
					Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	Persen	100,00	93,65				
					Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	Persen	100,00	92,98			Beban pekerjaan tidak sebanding dengan SDM yang ada,	
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	75,00	75,00	1.805.629.213	1.173.106.509		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya alam	Dokumen	37,00	36,00	2.604.026.000	2.069.215.514		
	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Dokumen	70,00	70,00	2.159.999.820	1.298.267.965	Perubahan Target output menjelang akhir tahun, sehingga mempengaruhi capaian volume kinerja bidang	
36. KEUANGAN												
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	100,00	51,01	66.745.418.320	59.984.501.903	Regulasi dan aturan terbaru	Predikat WQTP dari BPK RI akan dimasukkan sebagai indikator penilaian.
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perangkat Daerah	Dokumen	8,00	8,00	466.380.400	319.958.500		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan	Persen	100,00	100,00	37.523.642.955	32.632.014.716		





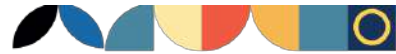
No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-Rata Nilai Kinerja ASN	Persen	80,00	80,00	350.000.000	297.303.809		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	2.909.392.430	2.630.025.072		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	15.869.079.034	15.130.004.550		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	2.853.879.401	2.494.843.721		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	6.773.044.100	6.480.351.535		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Penetapan Dana Bagi Hasil Pusat	Persen	95,48	100,00	611.000.000	508.153.777		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perhitungan penerimaan DBH Pusat	Triliun	1,99	5,92	611.000.000	508.153.777		
					Realisasi penerimaan DBH Pusat	Triliun	2,08	5,92				
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	no data	Laporan	1,00	4,00	200.000.000	198.791.000		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	no data	Laporan	4,00	4,00	200.000.000	198.791.000		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	11,33	60,00	7.066.776.000	6.248.208.259		
	KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kepatuhan Wajib Pajak Daerah	Persen	60,00	0,00	7.066.776.000	6.248.208.259		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,00	62,92	48.835.614.291	35.044.616.457		
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Target Hasil Program RPJMD	Persentase	100,00	100,00	601.100.000	175.581.959		
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100,00	100,00	29.031.595.034	19.427.168.005		
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	200.000.000	121.116.652		
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	1.900.898.000	1.222.276.117		
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	6.113.911.000	5.081.426.992		
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	3.482.292.857	2.451.134.032		
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	7.505.817.400	6.565.912.700		





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Penyusunan APBD Sesuai Prinsip Penganggaran Yang Baik	Persen	29,00	100,00	1.142.775.466.941	1.126.373.179.857		
					Persentase Konsistensi Perencanaan dengan Penganggaran	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Aparatur Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah Mendapatkan Pembinaan Perencanaan Anggaran	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Laporan Keuangan Disajikan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00				
					Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan Akuntansi	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	Persen	100,00	100,00				
					Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Transaksi Non Tunai	Persen	100,00	100,00				
					Persentase penerbitan SP2D	Persen	90,00	100,00				





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					sesuai persyaratan tepat waktu							
					Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	100,00	100,00				
					Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Tahapan Penyusunan APBD Teapt Waktu	Persen	100,00	100,00				
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tahapan penyusunan APBD tepat waktu	Persen	100,00	100,00	4.980.000.000	3.838.239.030		
					Pemenuhan peraturan dan pedoman penyusunan APBD sesuai Prinsip Penganggaran yang Baik.	Persen	100,00	100,00				
					Persentase konsistensi perencanaan dengan penganggaran	Persen	100,00	100,00				
					Persentase aparatur perencanaan anggaran Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan perencanaan anggaran	Persen	100,00	100,00			SIPD RI yang merupakan aplikasi baru sehingga perlu penyesuaian oleh pengguna	
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat pemenuhan pedoman/ peraturan pengelolaan perbendaharaan daerah	Persen	100,00	100,00	1.372.799.010	1.160.097.728		





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Persentase Realisasi Dana Transfer.	Persen	100,00	100,00				
					Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Transaksi Non Tunai	Persen	100,00	100,00				
					Persentase penerbitan SP2D sesuai persyaratan tepat waktu	Persen	90,00	100,00				
					Persentase pengelola keuangan Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan	Persen	100,00	100,00				
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan disajikan tepat waktu	Persen	100,00	100,00	2.271.808.326	1.692.332.640		
					Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan akuntansi	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan penyusunan laporan sesuai SAP	Persen	100,00	100,00				
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Jumlah Lokasi Desa Yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Desa	Persen	100,00	100,00	1.134.150.859.605	1.119.682.510.459	BTT tidak ada permasalahan, Bantuan Keuangan Desa masih lambat dalam hal pencairan.	Pendampingan dalam hal percepatan pemenuhan kelengkapan dokumen pencairan.





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Pemenuhan Peraturan dan Pedoman Pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	100,00	100,00	31.168.970.462	27.113.410.201		
					Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100,00	100,00				
					Persentase pengelola BMD Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD	Persen	100,00	100,00				
	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat pemenuhan peraturan dan pedoman pengelolaan BMD sesuai Permendagri 19/2016	Persen	100,00	100,00	31.168.970.462	27.113.410.201		
					Persentase Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan dan penatausahaan BMD sesuai ketentuan	Persen	100,00	100,00				
					Persentase Perangkat Daerah yang aktif melakukan rekonsiliasi laporan BMD	Persen	100,00	100,00				
					Persentase pengelola BMD	Persen	100,00	100,00				





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Perangkat Daerah mendapatkan pembinaan penatausahaan BMD							
37. KEPEGAWAIAN												
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					747.675.000	719.621.978		
	KEPEGAWAIAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	dokumen	8,00	8,00	747.675.000	719.621.978		
					Jumlah Pakaian	Stel	175,00	175,00				
					Jumlah ASN	Orang	60,00	60,00				
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,00	74,62	16.767.035.696	13.838.349.404	Adanya perubahan cara/parameter Penilaian, sehingga nilai SAKIP seluruh OPD Turun.	1. Laporan LKJIP dibuat per Triwulan sebagai alat Monitoring; 2. Melengkapi laporan Rapat Percepatan/Optimalisasi Serapan Anggaran dengan Absensi dan Notulen Rapat;
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	10,00	10,00	310.000.000	275.721.080	Aplikasi seperti SIPD dli sering mengalami gangguan sehingga proses pengiputan data dan penarikan data mengalami hambatan	
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	3,00	3,00	12.673.766.102	10.454.216.648	Aplikasi keuangan masih terdapat bug sehingga proses update data laporan keuangan terkadang tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya	
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	2,00	44.840.000	44.840.000	-	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	2,00	100.000.000	59.466.840	-	capaian IKK sudah terinput
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8,00	8,00	1.747.335.000	1.417.326.218	-	capaian IKK sudah terinput
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	330.000.000	306.325.000	-	capaian IKK sudah terinput
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	1.236.094.594	1.024.578.218	terdapat faktor penghambat yang berarti yang mengganggu proses Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu pembayaran Listrik, air dan komunikasi di bayarkan di Tahun 2025	capaian IKK sudah terinput
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	15,00	15,00	325.000.000	255.875.400	Lama nya waktu dalam hal pemeliharaan kendaraan terkadang harus membuat penjadwalan ulang	capaian IKK sudah terinput
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	94,00	100,00	8.390.011.000	5.882.729.974	1. Rendahnya Kemauan dan Keterarikan 2. Keterbatasan Anggaran 3. Keterbatasan Infrastruktur	
					Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	Nilai	85,00	86,43			1. Kebutuhan pengembangan antar ASN berbeda-beda, sehingga sulit untuk memenuhi semua kebutuhan secara merata 2. Tindakan lanjut	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pengaduan/keluhan yang kurang optimal 3. Akses terhadap program pengembangan kompetensi yang belum merata di seluruh wilayah, terutama bagi ASN yang bertugas di daerah terpencil	
					Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi	Nilai	85,00	91,00			1. belum ditetapkannya jumlah responden pada layanan bidang mutasi dan promosi sebagai indikator keberhasilan survei kepuasan ASN. 2. belum maksimalnya sosialisasi terkait survei kepuasan ASN pada layanan di Bidang mutasi dan Promosi BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara.	
					Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Nilai	85,00	88,25			1. adanya kesalahan dalam melakukan upload dokumen 2. keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami teknologi	
					Indeks Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Nilai	85,00	84,83			Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh pengguna layanan. Layanan sebenarnya sudah mulai dilakukan secara online, namun belum banyak pengguna layanan yang tahu akan nomor layanan via Whatsapp milik BKPSDM Kabupaten Kutai Kartanegara	
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	ASN	1.262,00	6.264,00	1.591.550.000	1.183.699.120	1. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sumber Daya Manusia									2. Sistem informasi yang kurang memadai. 3. Keterbatasan regulasi 4. adanya keterlambatan dalam pelaporan PNS yang terkena tindak pidana dari Perangkat Daerah	
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	ASN	2.583,00	3.706,00	625.000.000	624.077.062	faktor penghambat promosi : 1. terdapat beberapa jabatan fungsional yang belum mendapatkan persetujuan terhadap formasi dari Menpan RB dan Instansi Pembina. 2. terdapat beberapa jenis jabatan fungsional yang diperlukan pada perangkat daerah, namun belum tersusun dalam Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja. 3. belum ditetapkannya Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) salahsatu indikator promosi jabatan struktural. faktor penghambat mutasi: 1. Penempatan PNS yang belum terdistribusikan dengan baik berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang terbaru. 2. Rendahnya motivasi kerja PNS yang akan ditempatkan pada Perangkat Daerah kecamatan terjauh.	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											(biaya hidup tinggi dan sarana dan prasarana yang belum memadai) 3. masih terdapat beberapa PNS yang belum sesuai dengan syarat jabatan pada permenpan 45 tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana.	
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	ASN	1.190,00	9.846,00	5.633.461.000	3.725.902.710	1. Data PNS pada aplikasi SIASN tidak terupdate secara rutin dan berkala 2. Kurangnya literasi digital bagi sebagian PNS Kab. Kutai Kartanegara 3. Tingginya standar Indeks Prestasi (IP) dalam penetapan persyaratan penerima beasiswa stimulan PNS	
	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	ASN	12.093,00	11.762,00	540.000.000	349.051.082	Masih adanya ASN E Kinerja secara manual yang diupload ASN melalui aplikasi SIASN sehingga data tidak terkoneksi di aplikasi E kinerja	
38. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persen	26,00	50,57	9.992.168.000	8.273.846.996	1. Kurangnya partisipasi dan komitmen peserta 2. Keterbatasan akses terhadap internet atau perangkat teknologi, terutama di wilayah-wilayah terpencil 3. Kurangnya literasi digital bagi sebagian ASN Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Belum adanya sanksi kepada PNS yang tidak memenuhi kewajiban pengembangan	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kompetensi minimal 20 JP per orang setiap tahun	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	ASN	784,00	6.533,00	4.940.070.000	4.100.703.201	1. Kurangnya Partisipasi dan Komitmen Peserta 2. Keterbatasan akses terhadap internet atau perangkat teknologi, terutama di wilayah-wilayah terpencil 3. Kurangnya literasi digital bagi sebagian PNS Kab. Kutai Kartanegara	
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	ASN	685,00	747,00	5.052.098.000	4.173.143.795	1. Kurangnya Partisipasi dan Komitmen Peserta 2. Jadwal pelatihan bergantung pada pihak penyelenggara 3. Belum adanya sanksi yang tegas bagi ASN yang mengundurkan diri dalam pelaksanaan pelatihan	
39. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	91,00	67,03	15.906.159.749	13.395.887.782		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11,00	11,00	273.600.000	245.299.116	adanya pergantian personil/staf yang mengurus kegiatan sehingga perlunya penyesuaian pada tempat kerja yg baru	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	7,00	7,00	11.552.370.656	9.777.164.359	-adanya pergantian personil/staf yang mengurus kegiatan sehingga perlunya penyesuaian pada tempat kerja yg baru	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	7,00	7,00	90.000.000	89.973.928	-adanya pergantian personil/staf yang mengurus kegiatan sehingga perlunya penyesuaian pada tempat kerja yg baru	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6,00	3,00	780.000.000	622.766.693	- waktu pelaksanaan dan realisasi kegiatan tidak sesuai, sehingga tidak maksimalnya serapan	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	Pelayanan	7,00	7,00	2.277.736.962	1.782.134.986	-adanya pergantian personil/staf yang mengurus kegiatan sehingga perlunya penyesuaian pada tempat kerja yg baru	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12,00	12,00	797.452.131	745.278.700		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Uraian indikator kinerja	Unit	243,00	243,00	135.000.000	133.270.000		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	persen	100,00	100,00	19.534.210.438	18.640.046.291		
					Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Sosial Dan Kependudukan	Persen	100,00	0,00				
					Persentase penelitian dan	Persen	100,00	0,00				





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					pengembangan yang memanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan							
					Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi	Persen	100,00	0,00				
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Sosial Dan Kependudukan	Dokumen	10,00	17,00	4.749.660.000	4.722.601.963	Terjadinya pengurangan anggaran pada salah satu sub kegiatan saat sedang berjalannya pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Kedua	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	12,00	18,00	4.505.995.000	4.336.181.945		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Bidang Inovasi dan Teknologi	Dokumen	11,00	15,00	4.203.820.000	4.071.977.637	kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap pemenuhan administrasi dalam penerapan inovasi	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Laporan	11,00	35,00	6.074.735.438	5.509.284.746	1. Perubahan Kebijakan atau Regulasi Secara Mendadak 2. Anggaran yang terbatas untuk mendanai penelitian dan pengembangan atau untuk mendukung operasional kegiatan penelitian.	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





Tabel 103. Pelaksanaan Urusan Kewilayahan

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
40. Urusan Kewilayahan												
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	70,33	52.314.969.909	45.658.898.110		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	38	38	175.000.000	114.295.000	Alokasi tidak sesuai dengan jumlah pagu anggaran	Mencoba Lebih Teliti saat Penginputan Pagu Anggaran
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	4	4	43.051.645.721	39.143.277.446	TPP November 2024 Kurang input	Mencoba Lebih Teliti saat Penginputan Laporan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Laporan	1	1	49.000.000	41.780.000	Penanggung Jawab Tidak Mengisi Laporan Realisasi	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	0	324	150.000.000	100.327.700	Penanggung Jawab Tidak Mengisi Laporan Realisasi Jumlah Peserta belum di tambahkan	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Jenis	7	7	3.283.877.701	1.206.294.819	Realisasi Arsip tidak mencantumkan jumlah realisasi	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	96	96	200.000.000	195.865.000	Penanggung Jawab Tidak Mengisi Laporan Realisasi	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	4.726.431.783	4.258.207.829	Penanggung Jawab Tidak Mengisi Laporan Realisasi	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	86	86	679.014.704	598.850.316	Realisasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4, Memang Tidak Memasukkan Unit Kendaraan	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	Persen	80	80	69.520.799.202	49.251.148.674		





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	yang dilaksanakan sesuai SOP							
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	0	372	69.520.799.202	49.251.148.674	Faktor Alam Untuk Semenisasi dan Pengurukan. Meski Tidak Memperlambat Secara Signifikan	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	39.498.000.000	14.427.026.450		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	7	7	1.450.000.000	1.450.000.000	pendanaan selalu tersedia Realisasi Belum Di Isi	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	7	7	25.850.000.000	2.007.773.450	Terdapat Beberapa Kegiatan Tidak terealisasi 100% di Kelurahan	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang di fasilitasi	Lembaga Kemasyarakatan	15	15	12.198.000.000	10.969.253.000	Terdapat Beberapa Kegiatan Tidak terealisasi 100% di Kelurahan	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	100	100	80.000.000	80.000.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	2	2	80.000.000	80.000.000	Realisasi anggaran 77.872.000	Mencoba Memastikan Operator Mengisi Laporan Realisasi
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	54,53	10.501.674.961	8.321.589.230	Kurangnya koordinasi antara seksi dan sub di internal kecamatan	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	325.000.000	101.545.888	Waktu penginputan yang relatif singkat	Pengaturan ulang dan penyesuaian jadwal kegiatan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	8.465.221.301	6.917.661.637	Pelaporan realisasi kegiatan dari PPTK	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	48.800.000	48.390.000	Pengumpulan data hasil kegiatan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	76	68	47.000.000	26.917.700	Ketidaksesuaian anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	9	8	775.256.260	642.576.486	Ketidaksesuaian target perencanaan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	493.069.400	445.303.628	-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	50	347.328.000	139.193.891	Ketidaksesuaian target perencanaan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	61.132.090.000	60.198.841.005	Hampir tidak ada	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Laporan	13	320	61.132.090.000	60.198.841.005	hampir tidak ada	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Peran Aktif Masyarakat dalam Membangun Desa	Persen	100	100	5.480.000.000	4.902.177.500	masih perlunya sosialisasi, dan anggaran untuk pelaksanaan program di lapangan	Penambahan Anggaran
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	100	5.480.000.000	4.902.177.500	kurangnya anggaran untuk kegiatan	Perlunya Tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pra dan Musrenbang Kecamatan mengingat banyak nya jumlah Desa dalam satu Kecamatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	325.000.000	299.660.000	Hampir tidak ada	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	2	2	325.000.000	299.660.000	tidak ada	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	90	85	241.000.000	232.336.000	Hampir tidak ada	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tenggarong Seberang		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	241.000.000	232.336.000	tidak ada	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67	51,26	10.067.453.831	10.067.453.831		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	41.296.000	41.296.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	5	5	8.121.182.153	8.121.182.153		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Laporan	5	5	51.200.000	51.200.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	1000	1000	465.836.000	465.836.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.087.939.678	1.087.939.678		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	50	50	300.000.000	300.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	100	100	45.674.591.000	45.389.271.100		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kali	30	30	6.000.000	6.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	12	12	5.000.000	5.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	63	63	45.663.591.000	45.378.271.100		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	62	62	355.084.800	355.084.800		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	63	63	355.084.800	355.084.800		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang tindaklanjuti	Persen	72	72	100.000.000	100.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	63	63	100.000.000	100.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	70	70	25.000.000	25.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Kulu		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi	Kali	15	15	25.000.000	25.000.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	23,94	7.194.197.075	6.310.936.359	Tindak Lanjut dari setiap Evaluasi Kinerja	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	296.885.086	286.669.600	Keterlambatan Data, Keterbatasan Waktu dan Keterbatasan Kelengkapan Data Informasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	5.248.469.904	4.448.906.010	Kurangnya Pejabat Eselon yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Laporan	12	12	52.060.000	51.890.000	Keterbatasan Anggaran sehingga adanya jasa pengelolaan BMD yang tidak dapat dicover beberapa bulan	Memaksimalkan melaksanakan kegiatan sesuai dalam DPA dengan anggaran yang tersedia
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	1	1	566.929.050	520.335.362	Keterbatasan Anggaran, banyaknya permintaan kebutuhan baik perjalanan dinas biasa, ATK, kebersihan, aktivitas lapangan dan makan minum serta jasa pengelolaan arsip yang tidak tercover, kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek belum pernah dapat dianggarkan	Memaksimalkan melaksanakan kegiatan sesuai dalam DPA dengan anggaran yang tersedia
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	568.406.321	546.829.069	Keterbatasan Anggaran, adanya ketidaksesuaian unit yang harus dipelihara dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dicover (contohnya pengelolaan website, honorarium tenaga ahli/narasumber)	Memaksimalkan melaksanakan kegiatan sesuai dalam DPA dengan anggaran yang tersedia
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	30	30	461.446.714	456.306.318	Keterbatasan Anggaran, kurang sesuai jumlah unit yang harus dipelihara dan tidak dapat mencover pemeliharaan gedung	Memaksimalkan melaksanakan kegiatan sesuai dalam DPA dengan anggaran yang tersedia





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											yang lainnya (saat ini gedung banyak mengalami kerusakan perlu untuk diperbaiki)	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	39.951.322.900	39.275.605.677	Kurangnya kesadaran Masyarakat	
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	65	65			SDM Yang belum mengikuti Bimbingan Teknis	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	12	12	39.951.322.900	39.275.605.677	Kurangnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	146.555.100	108.243.000	Sumber Daya Manusia yang Kurang	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	12	12	146.555.100	108.243.000	Jumlah Sumber Daya Manusia yang belum memadai	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	905.985.000	812.084.000	Kurangnya Sumber Daya Manusia	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Loa Janan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	100	100	905.985.000	812.084.000	Minimnya ASN yang ada pada Perangkat Daerah	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	59,28	7.484.567.908	6.573.547.167	perlu peningkatan kompetensi ASN dalam perbaikan implementasi SAKIP	Pelaporan kinerja dapat terpenuhi dan kerjasama dan semangat ASN dalam mencapai tujuan kinerja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	185.000.000	153.054.650	perlu dorongan dan semangat kerja dan masih kurang ASN yang ada	kerjasama dan kerja keras pejabat dalam mencapai rencana kerja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	3	3	4.908.541.935	4.198.373.322	1. Kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi khusus di bidang administrasi	1. Adanya alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan administrasi





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											keuangan. 2. Beban kerja yang terlalu besar dan kurangnya ASN sehingga berdampak pada kualitas laporan.	keuangan. 2. Fasilitas kerja yang menunjang, seperti komputer, jaringan internet, dan ruang kerja yang memadai.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laoran	2	2	75.800.000	44.500.000	1. Aparatur perangkat daerah yang kurang memahami regulasi terkait pengelolaan BMD 2. Minimnya jumlah staf yang kompeten untuk menangani administrasi BMD	1. Ketersediaan anggaran untuk mendukung kegiatan inventarisasi, pengelolaan aset, dan pelaporan administrasi BMD 2. Kerjasama yang solid antara unit pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, dan pihak-pihak terkait lainnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Laporan	1	1	190.000.000	176.808.000	1. Minimnya pelatihan atau penguasaan pegawai terhadap teknologi dan prosedur administrasi kepegawaian	1. Adanya sistem kepegawaian berbasis teknologi (e-Government) yang mempermudah pengelolaan data pegawai. 2. Dukungan dari pimpinan daerah untuk pelaksanaan administrasi yang baik.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	68	68	790.083.650	725.581.033	1. Kurangnya Kompetensi SDM	1. Fasilitas kantor yang menunjang, seperti ruang kerja, perangkat komputer, dan akses internet. 2. Sinergi antara perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horizontal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	9	9	105.000.000	98.730.000	1. Minimnya pegawai bersertifikasi atau berpengalaman di bidang pengadaan 2. Kurang ASN di kecamatan	1. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif, termasuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	67	67	723.030.063	678.904.856	1. Ketidacukupan tenaga kerja yang berkualitas atau pelatihan yang belum memadai bagi staf pemerintahan.	1. Ketersediaan infrastruktur seperti kantor, teknologi informasi, dan transportasi untuk mendukung operasional.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Laporan	1	1	507.112.260	497.595.306	1. Kurangnya pemahaman bahwa pemeliharaan aset adalah investasi jangka panjang, sehingga sering diabaikan	1. Ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan, baik dalam bentuk perawatan rutin
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	32.662.898.000	31.856.453.155	masih kurangnya ASN dalam pelaksanaan	kegiatan pelayanan publik dan konektivitas di dukung anggaran
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Kegiatan	1	1	32.407.898.000	31.607.853.955	perlu adanya peningkatan support anggaran dan keterlibatan semua pihak ASN?THL	Pelayanan berjalan dengan baik atas support anggaran dan keterlibatan semua pihak ASN?THL
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Camat	Dokumen	2	2	255.000.000	248.599.200	masih kurangnya ASN di kecamatan	kegiatan yang dilimpahkan dengan camat berjalan dengan baik dengan anggaran yang lebih baik
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	77,5	78	741.022.792	686.392.000	perlu adanya peningkatan kapasitas anggota kelembagaan	kegiatan pemberdayaan didukung oleh anggaran dan keterlibatan anggota kelembagaan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Laporan	1	1	741.022.792	686.392.000	perlu peningkatan anggaran	kegiatan pemberdayaan didukung oleh anggota/kepengurusan lembaga yang ada di kecamatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	65	65	25.000.000	23.834.000	perlu anggaran yang lebih baik lagi	semua pihak sangat mendukung dalam kegiatan yang melibatkan Pemerintahan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												kecamatan, Polri, TNI dan lain lainnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Badak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Laporan	1	1	25.000.000	23.834.000	masih kurangnya ASN di kecamatan	Anggaran yang ada sangat mendukung dalam penugasan yang dilaksanakan oleh kecamatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68	62,87	7.485.132.432	6.350.799.756	Tindak lanjut dari setiap evaluasi kinerja demi peningkatan kinerja	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	139.500.000	138.485.000	Kelengkapan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Menghimpun semua kegiatan terkait peningkatan kinerja di setiap seksi dan sub bagian sebagai upaya peningkatan kinerja Perangkat Daerah
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	4.570.339.436	3.593.453.864	Keterlambatan dalam pelaporan keuangan	Melaksanakan evaluasi pelaporan keuangan setiap bulan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Laporan	1	1	207.399.985	205.640.000	Pencatatan, penertiban dan pengamanan aset Pemda perlu ditingkatkan	Pengamanan aset harus di tingkatkan dengan realisasi kegiatan baik dalam pelaporan, pematokan, pemagaran dan pemasangan plang
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	670.000.000	667.004.000	Peningkatan sarana dan prasarana	Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Unit	10	10	408.000.000	260.750.000	Perlu terus di tingkatkan pemenuhan barang penunjang kegiatan dalam pelayanan publik	Pemenuhan kelengkapan peralatan kerja sebagai penunjang pelayanan publik
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	813.235.011	810.816.392	Peningkatan SDM dan kapasitas pegawai	Adanya Diklat dan Bimtek terkait peningkatan SDM
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan	1	1	676.658.000	674.650.500	Perlunya peningkatan kesadaran untuk saling menjaga aset	Laporan Aset BMD yang dilakukan pemeliharaan di





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						pemda yang ada pada perangkat daerah	lakukan secara berkala
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	20.376.412.000	19.860.487.713	Perlu ditingkatkan peran serta dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan	Upaya Pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama sama mendukung proses pembangunan
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100			kelengkapan Dokumen adminstrasi yang lengkap dan di dukung oleh admsintrasi yang lengkap diharapkan proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai perencanaan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Laporan	1	100	20.376.412.000	19.860.487.713	Perlu ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Mengajak masyarakat mengawal serta memelihara hasil dari pembangunan yang ada untuk di manfaatkan dengan sebaik mungkin
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	80	100	781.533.369	780.550.000	Perlu ditingkatkan keaktifan Peran serta Masyarakat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Marangkayu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Laporan	1	100	781.533.369	780.550.000	Perlu Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan pembangunan	Mengajak seluruh elemen masyarakat baik bidang pendidikan, organisasi masyarakat ,organisasi perempuan, Forum anak dsb untuk selalu aktif dalam proses musrenbang yang bertujuan menyuarakan aspirasi melalui proses musyawarah
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62	49,32	20.934.049.141	18.640.275.753	Kurangnya Bukti Dukung Yang Disampaikan oleh masing2 kasi pengampu sehingga menyulitkan dalam memenuhi dokumen	Melakukan Evaluasi dan lebih meningkatkan lagi pengamanan arsip kegiatan sehingga mudah dalam melengkapi bukti dukung apabila





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											pendukung yang diminta oleh penilai	diminta kembali di tahun selanjutnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	34	34	150.000.000	21.808.425	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	14	14	13.407.011.129	12.411.846.643	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	1017	1017	130.200.000	128.720.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaporan dan Pencatatan Barang Milik Daerah	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian	Orang	86	86	130.000.000	65.276.668	-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	11	11	2.160.145.294	1.622.175.575	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Pada Kantor Camat Muara Jawa	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	80	80	190.000.000	187.680.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	3.372.506.012	3.208.431.774	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Dalam 1 Tahun	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	172	172	1.394.186.706	994.336.668	-	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	80	80	53.284.809.000	52.195.110.684	-	
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	87,5	87,5			-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	63	63	53.284.809.000	52.195.110.684	Keterlambatan memproses pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa di SPSE, karena keterlambatan penyediaan RAB	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	21.793.760.877	21.239.661.765	Tidak ada kendala dalam keaktifan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	4	4	14.916.887.000	14.714.224.265	Tidak Ada Kendala dalam pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan desa rutin setiap bulan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Lembaga	364	364	6.876.873.877	6.525.437.500	-	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	1.115.612.000	1.074.524.500	Tidak ada kendala dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Jawa		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	11	11	1.115.612.000	1.074.524.500	Tidak ada kendala yang terjadi, seluruh kegiatan urusan pemerintahan terlaksana dengan baik	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	56	22.488.410.275	16.850.991.568	SDM Pengampu belum memahami atas kegiatan yang dilaksanakan	Perlu peningkatan SDM terkait peningkatan Nilai SAKIP





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	4	158.304.000	58.468.969	Kurangnya SDM untuk mengelola Kegiatan	Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	7	7	16.128.284.008	11.668.075.898	terbatasnya SDM untuk mengelola kegiatan	Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	1030	1030	40.800.000	40.800.000	terbatasnya SDM untuk mengelola kegiatan	Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	20	20	50.000.000	21.073.200	Anggaran Yang Minim Untuk kegiatan peningkatan SDM Pada ASN	Penambahan Anggaran Untuk Peningkatan SDM
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	6	5	1.853.185.075	1.670.569.668	terbatasnya SDM yang mengelola kegiatan	Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	3.868.829.392	3.121.300.269	terbatasnya SDM yang mengelola kegiatan	Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	42	41	389.007.800	270.703.564	terbatasnya SDM yang mengelola kegiatan	Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	75	75	98.982.085.750	98.299.268.661	Kurangnya SDM sehingga anggaran tidak terserap sesuai target	Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100			Karena faktor keterbatasan material dan cuaca yang tidak bisa di prediksi	Tetap mengupayakan membeli material di daerah terdekat atau di luar Kecamatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	272	605	98.982.085.750	98.299.268.661	1. pelaksanaan kegiatan pada Non Perizinan berdasarkan kondisi yang ada karena Kurangnya SDM 2. Karena faktor keterbatasan material dan cuaca yang tidak bisa di prediksi	1. Perlu diadakan peningkatan kompetensi Pegawai terkait penyusunan pertanggungjawaban belanja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	72,7	100	24.814.361.000	24.230.114.634	Perlunya tindak lanjut dari Dinas terkait Operasional lembaga yang terlambat untuk penentuan SHS	Dinas perlu Evaluasi ulang terkait Operasional lembaga sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan di lapangan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	5	5	16.561.945.000	16.376.014.634	Minimnya SDM dalam penyusunan RAB dan Pelaporan pada Pokja di RT dan pembagian Anggaran Kas per bulan	1.Peningkatan SDM Pokja RT 2. Evaluasi Penyusunan Anggaran Kas Yang terpecah setiap bulan dan sampai akhir Tahun sehingga memperlambat pembayaran
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kali	41	41	8.252.416.000	7.854.100.000	Pertanggungjawaban Belanja yang terlambat dari Lembaga	Perlu Sosialisasi terkait pertanggungjawaban Operasional lembaga kepada Ormas, Lembaga dll nya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	80	64,64	7.552.672.390	6.728.832.056	Data Kelengkapan Dokumen SAKIP yang Kurang memadai	Rapat Kerja dan Instruksi Camat Kepada Sekretaris untuk mengalokasikan anggaran Bimtek untuk ASN sesuai dengan Kompetensinya





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	10	10	143.000.000	118.540.380	Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Terlambat Dibuat	Monitoring Rencana Kerja, Laporan Evaluasi Kinerja Masing-masing Kasi dan Kasubbag Disampaikan Tepat Waktu Setiap Bulan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	5.886.364.689	5.209.202.602	Data antara aset dalam laporan BMD dan Realisasi Keuangan belum sesuai	Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Laporan Administrasi Keuangan Oleh Atasan Langsung Sebelum Disampaikan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Laporan	2	2	33.600.000	33.600.000	Pelaksana Kegiatan Tidak menyampaikan pengadaan barang yang dibeli kepada pengurus barang	Pengurus Barang Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Dokumen dan Barang Sebelum Dilakukan Pencatatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan	1	1	107.000.000	89.075.729	Data administrasi kepegawaian belum optimal	Evaluasi Sumber Daya Manusia yang ada sebelum pelaksanaan kegiatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Kegiatan	6	6	228.560.000	215.866.544	Kepala Seksi belum melakukan inventarisasi kebutuhan ATK, barang cetakan dan prediksi Kunjungan Tamu dan perjalanan dinas yang tidak terakomodir dengan baik	Intruksi Camat untuk melakukan inventarisasi
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Pada Perangkat Daerah	Unit	4	4	130.000.000	113.400.000	RKBMD yang tidak sesuai kebutuhan SKPD	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	683.451.701	633.459.950	Jumlah tagihan tidak sesuai dengan hasil rekon sehingga realisasi anggaran tidak terserap maksimal	Monitoring Dan Efisiensi Waktu Penyelesaian
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	29	29	340.696.000	315.686.851	Inventarisasi BMD yang belum optimal	Membuat Lembar Control Penjagaan Perawatan Aset





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan perijinan Non Perijinan Yang dilaksanakan Sesuai SOP	Persen	40	40	21.863.962.000	21.463.343.419	Sebagian SDM kurang memahami SOP Pelayanan dan sarana prasarana belum memadai	Instruksi Camat untuk berkoordinasi dengan pihak / Dinas terkait
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	89	89			Jalan akses yang akan dibangun Legalitas Lahan belum dimiliki Pemerintah Daerah	Instruksi Camat Kepada Kasi PMD untuk berkoordinasi dengan pihak/instansi terkait agar mendapatkan tambahan dana untuk pembangunan sesuai kebutuhan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan Secara Efektif	Kegiatan	1	1	15.000.000	14.880.000	Sinkronisasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan yang difasilitasi belum maksimal	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	5.000.000	5.000.000	Sinkronisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi belum maksimal	Mengadakan Koordinasi dan Rapat Kerja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	21.843.962.000	21.443.463.419	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Camat Tidak Terlaksana Dengan Baik	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi kegiatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	310.000.000	303.002.498	Lembaga Kemasyarakatan yang akan difasilitasi belum menyampaikan permohonan dan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan	Rapat Kerja dan Instruksi Camat Kepada Sekretaris untuk mengalokasikan anggaran Bimtek untuk ASN sesuai dengan Kompetensinya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Layanan	2	2	310.000.000	303.002.498	Jumlah Koordinasi di Tingkat Desa tidak Terlaksana dengan baik	Melakukan Koordinasi dengan dinas/ Instansi terkait
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	438.400.000	395.565.000	Kurangnya partisipasi tingkat pimpinan FORKOMPINCAM	Intruksi Camat kepada Sekretaris Camat untuk melakukan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketertarikan dan ketertarikan	Pembinaan, Sosialisasi dan Penyampaian Aturan yang berlaku
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	14	14	438.400.000	395.565.000	Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan tidak Tepat Waktu	Melakukan Rapat Kerja dan Monitoring ke Lapangan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	Persen	60	60	226.000.000	217.173.000	Pemahaman Tim Asistensi Kecamatan tentang Regulasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa belum memadai	Intruksi Camat kepada Sekretaris Camat untuk melakukan Pembinaan, Sosialisasi dan Penyampaian Aturan yang berlaku
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sebulu		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	14	14	226.000.000	217.173.000	Kegiatan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Kurang Terpantau	Pendampingan dan Monitoring Ke Lapangan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	68,88	11.286.582.679	10.072.185.722	Terdapat Capaian Kegiatan Pendukung keberhasilan program tidak 100%	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	200.000.000	192.993.515	Realisasi Kinerja Kegiatan tidak secara langsung melainkan melalui progres per tahapan kegiatan.	Koordinasi dengan Pimpinan, Tim dan Perangkat Daerah pendukung (Bappeda).
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	13	12	8.691.578.091	7.610.795.948	Progres pencapaian kinerja kegiatan berjalan baik.	Menjaga Performa Tim
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	639	639	56.400.000	56.171.000	Penanggung jawab pengelola sub kegiatan pendukung kurang cermat dalam menyusun jadwal pelaksanaan.	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian.	Layanan	2	2	55.000.000	41.550.000	Pelaksanaan sub kegiatan menyesuaikan dengan jadwal dari	Koordinasi secara langsung dengan Stake





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Perangkat Daerah Lain.	Holder/Perangkat Daerah yang terkait.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Kegiatan	7	7	580.000.000	571.874.438	Penanggungjawab pengelola sub kegiatan kurang cermat dalam menyusun jadwal pelaksanaan.	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	990.104.588	908.503.921	Penanggungjawab pengelola sub kegiatan kurang cermat dalam menyusun jadwal pelaksanaan.	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	38	38	713.500.000	690.296.900	Penanggungjawab pengelola sub kegiatan kurang cermat dalam menyusun jadwal pelaksanaan.	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	70	70	23.728.651.798	23.478.975.300	Terdapat Beberapa Kegiatan Tidak terealisasi 100%	Rapat Evaluasi internal.
					Tingkat aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	70	70			Capaian Kegiatan pendukung keberhasilan program tidak terealisasi 100%	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi	190	4	450.000.000	340.184.000	Sub Kegiatan Pendukung Capaian Kegiatan Terlaksana dan Terealisasi sesuai Target	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	3	1	140.000.000	111.370.000	Pelaksana Kegiatan Cermat dalam menyusun Jadwal Kegiatan dan Anggaran Kas.	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	0	127	23.138.651.798	23.027.421.300	Penanggungjawab pengelola sub kegiatan kurang cermat dalam menetapkan jadwal pelaksanaan	Rapat Evaluasi internal.





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	391.866.000	240.703.700	Terdapat Capaian Kegiatan Pendukung keberhasilan program tidak 100%	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Koordinasi	4	20	391.866.000	240.703.700	Penanggungjawab pengelola sub kegiatan kurang cermat dalam menyusun jadwal	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persen	100	100	430.360.000	383.452.000	Terdapat Capaian Kegiatan Pendukung keberhasilan program tidak 100%	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	2	2	430.360.000	383.452.000	Penanggungjawab pengelola sub kegiatan pendukung kurang cermat dalam menetapkan jadwal pelaksanaan	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	Persen	55	55	50.000.000	48.990.000	Terdapat Capaian Kegiatan Pendukung keberhasilan program tidak 100%	Rapat Evaluasi internal.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Kaman		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	20	20	50.000.000	48.990.000	Koordinasi dengan beberapa Desa terkendala kondisi infrastruktur yang kurang baik.	Optimalisasi Koordinasi dengan Perangkat Desa.
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	67	72,99	8.008.951.984	5.583.729.312	Implementasi SAKIP belum sepenuhnya optimal dan konsisten di perangkat daerah	Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan SAKIP di PD
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah	Dokumen	31	4	60.967.377	3.590.000	Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	15	15	5.551.840.808	3.871.037.467	Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	590	590	197.278.712	120.340.000	Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	44	29	50.000.000	50.000.000	Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan	12	12	739.000.000	553.151.499	Ada Belanja Modal yang tidak terlampir di RKBMD sehingga tidak terealisasi dan Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	1.125.856.922	897.814.846	Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	26	26	284.008.165	87.795.500	Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	13.174.353.000	12.559.140.166	Kekurangan tenaga kerja atau keterbatasan fasilitas yang bisa menghambat pelaksanaan SOP	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,1	88,1			Keterbatasan Waktu pada kegiatan swakelola	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	13.174.353.000	12.559.140.166	pada paket swakelola keinginan Masyarakat untuk berpartisipasi masih Rendah	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	67	67	486.107.980	346.829.800	Minimnya program pelatihan dan pengembangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											kapasitas bagi anggota lembaga.	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	kali	36	35	486.107.980	346.829.800	pada beberapa kegiatan Kurangnya Monitoring dan Evaluasi	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	60	60	366.125.775	157.039.600	Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang dapat menghambat efisiensi layanan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Daerah	Kegiatan	5	5	366.125.775	157.039.600	Anggaran direalisasikan karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kategori baik	Persen	72	70	55.000.000	0	Minimnya program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa.	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Desa	11	11	55.000.000	0	Anggaran tidak terealisasi karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan	Menjadi Bahan Evaluasi ke depannya
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	60,05	9.968.755.773	7.840.319.103		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	60	60	145.000.000	48.527.400		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	75	75	7.215.439.111	7.036.211.393		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Laporan	230	230	31.000.000	833.331		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	8	8	820.852.192	223.435.000		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	15	15	50.000.000	0		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	706.464.470	8.430.600		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	10	10	1.000.000.000	522.881.379		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	10.763.264.808	6.521.633.446		
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	89	100				
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	55	10.763.264.808	6.521.633.446		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	425.000.000	223.968.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	13	13	425.000.000	223.968.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	100	100	400.000.000	290.675.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	13	13	400.000.000	290.675.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	100	100	211.000.000	185.500.000		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Muntai		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	13	13	211.000.000	185.500.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	50,04	4.924.498.105	3.815.757.331	Kurangnya Bukti Dukung Yang Disampaikan oleh masing2 kasi pengampu sehingga menyulitkan dalam memenuhi dokumen pendukung yang diminta oleh penilai	Melakukan Evaluasi dan lebih meningkatkan lagi pengamanan arsip kegiatan sehingga mudah dalam melengkapi bukti dukung apabila diminta kembali di tahun selanjutnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	4	4	29.600.000	24.874.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	37	37	3.878.133.836	2.863.706.875	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	12	34.200.000	34.200.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaporan dan Pencatatan Barang Milik Daerah	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	5	5	328.833.029	313.862.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Pada Kantor Camat Kenohan	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	14	14	78.931.000	76.300.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Desa Pada Kantor Camat Kenohan	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyesiaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	526.279.817	502.814.456	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Pemerintah Daerah	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	50	0	48.520.423	0	Waktu Mepet dalam Penginputan DPA Perubahan di RUP	di Tahun berikutnya dalam penginputan ke RUP dilakukan dengan cepat agar dapat di realisasikan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	6.836.685.000	6.459.434.197	- Jaringan internet yang lemah - Sering Mati Lampu - Perbaikan kerusakan alat perekaman yang cukup lama karena harus di bawa keKabupaten - Kinerja Sarana Pendukung (PC) kurang maksimal karena spesifikasi RAM yang rendah	Akan Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	85	85			Tidak adanya jalur alternatif untuk mengakses wilayah dikecamatan apabila terjadi Bencana Alam seperti banjir yang menggenangi jalur utama kecamatan, ada beberapa desa yang letak geografisnya cukup jauh dengan akses jalan yang terbatas sehingga tidak dapat terhubung langsung dengan ibu kota kecamatan	melakukan pendataan kondisi jalan yang rusak dan akan memfokuskan anggaran pembangunan infrastruktur ke desa-desa yang kondisi jalannya masih banyak yang rusak
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	6.836.685.000	6.459.434.197	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelimpahan kewenangan oleh bupati kepada camat	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kenohan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	1.049.759.000	834.686.000	Tidak ada kendala dalam keaktifan lembaga pemberdayaan	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											masyarakat di desa-desa di Kecamatan Kenohan	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kenohan		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	12	12	1.049.759.000	834.686.000	Tidak Ada Kendala dalam pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan desa di Kecamatan Kenohan	Melakukan Evaluasi dan lebih Ditingkatkan lagi Progresnya
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74	76,83	7.560.119.750	6.236.304.804	Kurangnya Bukti Dukung Yang Disampaikan oleh masing2 kasi pengampu sehingga menyulitkan dalam memenuhi dokumen pendukung yang diminta oleh penilai	Melakukan Evaluasi dan lebih meningkatkan lagi pengamanan arsip kegiatan sehingga mudah dalam melengkapi bukti dukung apabila diminta kembali di tahun selanjutnya
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	10	10	245.000.000	233.284.600	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	26	26	5.573.813.197	4.372.798.080	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	15	15	32.500.000	25.765.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaporan dan Pencatatan Barang Milik Daerah	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	jenis	9	9	419.300.000	381.461.150	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Pada Kantor Camat Kembang Janggut	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	332.063.169	318.605.613	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Pemerintah Daerah	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Kepada Masyarakat Dalam 1 Tahun	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	50	20	957.443.384	904.390.361	30 Unit Pemeliharaan Mebel Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Kondisi Mebel Masih Dalam Kondisi Baik, Jadi Anggaran Pemeliharaan Mebel di Geser Untuk Pembayaran Listrik Kantor Camat Baru	Anggaran Pemeliharaan Mebel di Geser Untuk Pembayaran Listrik Kantor Camat Baru
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	8.744.684.000	8.563.193.519	- Jaringan internet yang lemah - Perbaikan kerusakan alat perekaman yang cukup lama karena harus di bawa di Kabupaten - Kinerja Sarana Pendukung (PC) kurang maksimal karena spesifikasi RAM yang rendah	Akan Berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mengatasi permasalahan yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut			Tingkat aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	86,36	86			Tidak adanya jalur alternatif untuk mengakses wilayah dikecamatan apabila terjadi Bencana Alam seperti banjir yang menggenangi jalur utama kecamatan, ada beberapa desa yang letak geografisnya cukup jauh dengan akses jalan yang terbatas sehingga tidak dapat terhubung langsung dengan ibu kota kecamatan	melakukan pendataan kondisi jalan yang rusak dan akan memfokuskan anggaran pembangunan infrastruktur ke desa yang kondisi jalan masih bayak yang rusak
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	11	11	45.000.000	42.845.000	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan di 11 desa yang melibatkan perangkat daerah lain dan instansi vertikal terkait	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	8.699.684.000	8.520.348.519	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelimpahan kewenangan oleh bupati kepada camat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	Persen	100	100	499.572.872	445.739.000	Tidak ada kendala dalam keaktifan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa-desa	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kali	12	12	499.572.872	445.739.000	Tidak Ada Kendala dalam pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan desa rutin setiap bulan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	350.000.000	324.105.000	Tidak ada kendala dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kembang Janggut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	6	6	350.000.000	324.105.000	Tidak ada kendala yang terjadi, seluruh kegiatan urusan pemerintahan terlaksana dengan baik	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	33,5	10.671.113.893	9.258.833.750	kurang tepat dalam perencanaan	Melakukan Evaluasi dan lebih meningkatkan lagi pengamanan arsip kegiatan sehingga mudah dalam melengkapi bukti dukung apabila diminta kembali di tahun selanjutnya
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Uraian indikator kinerja Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	50	850.000.000	726.825.500	Kurang tepatnya dalam perencanaan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Persen	100	73,97	6.718.182.955	5.725.453.261	Tidak Terdapat Kendala Dalam Penyusunan Laporan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
											Administrasi Keuangan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persen	100	76,2	50.000.000	46.809.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaporan dan Pencatatan Barang Milik Daerah	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	76,06	803.981.239	702.711.320	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Pada Kantor Camat Tabang	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan	Unit	1	6	736.311.000	689.990.000	Tidak Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan pengadaan kendaraan operasional lapangan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	300.218.699	259.654.510	-Tidak ada kendala telah terbayarkan penyediaan jasa listrik, air - Tidak ada kendala telah terbayarkan tenaga pendukung non pns	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	3,69	1.212.420.000	1.107.390.159		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	86	75	6.208.472.000	4.627.456.522	- SDM kurang memahami SOP Pelayanan dan sarana prasarana belum memadai - Jaringan internet yang lemah	Akan Berkoordinasi serta arahan untuk peningkatan SDM dalam melaksanakan tugas dan kegiatan
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	89,5	80			- Ketidaktepatan dalam perencanaan - Keterbatasan SDM	Koordinasi dan serta arahan untuk peningkatan SDM perangkat dalam melaksanakan tugas dan kegiatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Tabang		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP tingkat Aksesibilitas wilayah kecamatan	Persen	86	80	6.208.472.000	4.627.456.522	SDM kurang memahami SOP Pelayanan dan sarana prasarana belum memadai	





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tabang		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	86	70	611.000.000	567.845.000	Tidak ada kendala dalam keaktifan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa-desa	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tabang		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	86	80	611.000.000	567.845.000	Tidak Ada Kendala dalam pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tabang		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	86	80	250.000.000	239.412.500	Tidak ada kendala dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Tabang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen	86	80	250.000.000	239.412.500	Tidak ada kendala yang terjadi, seluruh kegiatan urusan pemerintahan terlaksana dengan baik	
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Wis	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63	49,83	6.954.664.440	5.828.716.399		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	130.000.000	108.615.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	5.033.045.106	4.063.213.673		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	500	500	70.800.000	61.204.000		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	31	30	110.000.000	85.827.100		
	Ururan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	Jenis	10	10	621.698.146	558.815.000		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	553.521.188	525.412.917		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	26	26	435.600.000	425.628.709		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	10.479.682.000	10.385.087.646		
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	78,5	78,5				
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	10.479.682.000	10.385.087.646		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	145.000.000	118.212.500		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	2	2	145.000.000	118.212.500		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	329.265.000	253.430.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	2	2	329.265.000	253.430.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kondisi baik	Persen	71,4	71,4	425.000.000	410.015.000		
	Urusan Kewilayahan	Kec. Muara Wis		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	7	7	425.000.000	410.015.000		





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63	62,67	12.261.331.861	10.398.143.217	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	147.136.402	131.239.700	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	75	75	9.586.859.142	8.007.871.975	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Dokumen	56	56	25.000.000	24.445.000	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian atau Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	56	56	25.000.000	24.853.600	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	369	369	795.250.416	728.494.141	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit	0	1	236.094.000	230.540.150	Kurangnya SDM	Perbaikan Target Pada Kertas Kerja
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	Laporan	15	15	1.117.081.901	1.073.732.925	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	31	31	328.910.000	176.965.726	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Laporan	12	12	29.951.185.000	29.877.680.241	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
					Tingkat Akseibilitas Wilayah Kecamatan	Kegiatan	90	90			Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
												memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Laporan	12	12	15.000.000	15.000.000	Tidak ada faktor penghambat	Sudah dilakukan perbaikan inputan pada indikator kegiatan di EPantau
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	90	90	29.936.185.000	29.862.680.241	Tidak ada faktor penghambat	Sudah dilakukan perbaikan inputan pada indikator kegiatan di EPantau
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Kegiatan	110	110	6.880.239.000	6.778.396.600	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	105	105	3.487.839.000	3.486.900.100	Tidak ada faktor penghambat	Sudah dilakukan perbaikan inputan pada indikator kegiatan di EPantau
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Lembaga Masyarakat	Kegiatan	10	10	3.392.400.000	3.291.496.500	Tidak ada faktor penghambat	Sudah dilakukan perbaikan inputan pada indikator kegiatan di EPantau
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kegiatan	1	1	50.000.000	49.580.000	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan	1	1	50.000.000	49.580.000	Tidak ada faktor penghambat	Sudah dilakukan perbaikan inputan pada indikator kegiatan di EPantau
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Orang	1300	1300	1.384.301.526	1.367.751.726	Kurangnya SDM	semakin meningkatkan kemampuan dan memberdayakan SDM yang ada
	Urusan Kewilayahan	Kec. Sangasanga		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Orang	1300	1300	1.384.301.526	1.367.751.726	Tidak ada faktor penghambat	Sudah dilakukan perbaikan inputan pada indikator kegiatan di EPantau





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	70	44,07	6.414.282.475	5.740.913.997	Data kelengkapan dokumen SAKIP Kurang Memadai, kurangnya bukti dukung yang disampaikan masing-masing kasi pengampu sehingga menyulitkan dalam pengumpulan data yang diminta oleh penilai	Rapat kerja dan instruksi Camat kepada sekretaris untuk mengalokasikan anggaran bimtek SAKIP dan peningkatan SDM sesuai kompetensinya, memenuhi kelengkapan data, melakukan evaluasi dalam pemenuhan data kepada pengampu kegiatan masing-masing kasi dan kasubbag
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	6	6	322.500.000	288.524.730	tidak terdapat kendala dalam penyusunan Dokumen rencana, dan penganggaran	Monitoring rencana kerja, laporan evaluasi masing-masing Kepala Seksi dan sub bagian tepat waktu setiap bulan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan	12	12	5.023.492.524	4.439.584.495	tidak ada hambatan	Pelaksanaan Pelaporan dilaksanakan tepat waktu
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	3	3	38.600.000	37.790.000	tidak ada hambatan	Pelaksanaan Pelaporan dilaksanakan tepat waktu
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Dokumen	4	4	272.986.937	265.720.500	tidak ada hambatan	Monitoring dan efesiensi waktu penyelesaian
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	596.703.014	560.342.327	tidak ada hambatan	Monitoring dan efesiensi waktu penyelesaian
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	20	20	160.000.000	148.951.945	tidak ada hambatan	Membuat Lembar kontrol penjagaan dan perawatan aset daerah
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perizinan dan non perizinan yang dilakukan sesuai SOP tingkat Aksesibilitas wilayah Kecamatan	Persen	90	100	53.330.736.001	52.492.184.802	sebagian SDM belum memahami SOP Pelayanan	Perlu peningkatan Kapasitas dan bimtek bidang pelayanan





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	81,3	100			terdapat perbedaan usulan dan perencanaan dalam memenuhi kebutuhan sesuai usulan masyarakat	Camat menginstruksikan kepada Kasi PMD untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan sesuai usulan masyarakat di APBD Perubahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	53.330.736.001	52.492.184.802	kendala lapangan , cuaca, bahan baku, dan koordinasi lokasi kegiatan	Mengadakan koordinasi dan rapat kerja bersama instansi terkait
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	90	100	395.000.000	346.865.500	monitoring terkendala waktu dan jadwal kegiatan, efesiensi anggaran sesuai kebutuhan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan lembaga yang aktif
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa/ Kelurahan	Kegiatan	5	5	395.000.000	346.865.500	Kegiatan pembinaan dan pendampingan belum tepat waktu	mengadakan rapat kerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /kelurahan yang aktif	Persen	90	100	397.200.000	317.185.000	Kegiatan pembinaan dan pendampingan belum tepat waktu, kegiatan disesuaikan kebutuhan dan efesiensi anggaran	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan lembaga pemberdayaan desa
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	1	1	397.200.000	317.185.000	Kegiatan pembinaan dan pendampingan belum tepat waktu	mengadakan rapat kerja dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki predikat penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa dalam kondisi baik	Persen	90	100	169.000.029	155.226.000	keterbatasan jangkauan evaluasi dan monitoring ke desa	mengadakan rapat kerja dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Urusan Kewilayahan	Kec. Anggana		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	8	8	169.000.029	155.226.000	Kegiatan rekomendasi dan koordinasi, pengawasan Pemerintahan Desa belum maksimal kendala letak geografis 3 desa di pesisir laut	mengadakan rapat kerja dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan strategi pengawasan





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	62	47,54	6.675.594.977	3.031.500.769	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada perlu ditingkatkan kualitas kinerja melalui Bimtek dan Pelatihan, serta ASNnya ditambah sesuai kebutuhan OPD
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	14	0	180.000.000	0	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	20	20	4.060.071.560	2.224.730.721	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	500	500	49.160.000	8.160.000	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	10	11	108.690.000	107.320.000	Waktu pelaksanaan masih kurang	Kegiatan Perlu lebih dimaksimalkan dalam pelaksanaan
	Ururan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	24	24	1.140.850.000	371.864.400	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	16	4	280.000.000	80.000.000	Kompetensi SDM yang masih belum memadai	Kompetensi SDMnya perlu bimbingan dan pelatihan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	12	12	336.823.417	224.925.648	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	14	14	520.000.000	14.500.000	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	93	23.032.063.000	22.033.217.173	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat			Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	88,1	88,1			Kondisi jalan dan jembatan sebagian masih belum memadai, serta akses komunikasi dan informasi masih ada wilayah yang blank spot	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	25	25	468.500.000	412.290.000	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	25	25	22.563.563.000	21.620.927.173	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persen	100	96	206.630.000	191.658.563	SDMnya Yang Kurang	SDM yang ada Perlu Bimbingan dan pelatihan, serta perlu tambahan tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Urusan Kewilayahan	Kec. Kota Bangun Darat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Kegiatan	1	1	206.630.000	191.658.563	Fasilitas belum memadai	Perlu Tambahan Fasilitas yang cukup, Tenaga ASN yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan OPD
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	4,54	22.149.288.527	13.651.238.791	Terdapat Capaian Kegiatan Pendukung keberhasilan program tidak 100%	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	1	299.612.000	52.674.000	Tertib penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, Tertib pelaporan, tertib administrasi dan fasilitas pendukung	Tidak semua perencanaan kegiatan bisa dilaksanakan tepat waktu, serta adanya eselon yang kosong sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran tunjangan dan gaji
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	Laporan	1	1	16.319.230.698	10.595.333.809	Kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan standar akuntansi pemerintahan	Penetapan perda APBD yang terhambat, tidak ada dukung dari masyarakat, lemahnya perencanaan yang sering memakan waktu





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Unit	1	1	40.800.000	33.600.000	Anggaran yang terbatas, Kurangnya koordinasi, Keterbatasan sumber daya manusia	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Orang	1	1	159.000.000	100.000.000	Anggaran yang terbatas, Kurangnya koordinasi dan komunikasi, Kurangnya perangkat kerja, seperti pegawai PNS	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit	1	1	2.357.786.070	947.309.883	Kemampuan aparatur masih terbatas, kemampuan aparatur masih terbatas, tanggung jawab aparatur kurang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	1	1	291.339.000	35.560.000	Kemampuan aparatur masih terbatas, kemampuan aparatur masih terbatas, tanggung jawab aparatur kurang.	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Bulan	12	12	2.000.891.665	1.420.087.653	Anggaran yang terbatas, Kurang koordinasi dan komunikasi	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	1	1	680.629.094	466.673.446	ketidaksesuaian antara regulasi dengan pelaksanaan di lapangan	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	98	73.278.035.000	72.851.161.896	Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	98			Kemacetan lalu lintas, Biaya kendaraan, Kurangnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas, Kurangnya pendampingan keluarga atau tenaga profesional	Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Laporan	1	1	5.300.000	0	Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah, Perubahan lingkungan strategis, Terbatasnya sumber daya manusia	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	1	1	73.272.735.000	72.851.161.896	Kurangnya anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran masyarakat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	29.702.607.933	15.267.447.650	Kurangnya anggaran, Kurangnya sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran masyarakat	
	Urusan Kewilayahan	Kec. Samboja Barat		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang Diikuti Desa/Kelurahan	Kegiatan	0	0	29.702.607.933	15.267.447.650		

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





Tabel 104. Pelaksanaan Pemerintahan Umum

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
41. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	88,00	70,98	16.559.162.468	14.371.313.864	Masih terdapat dokumen pendukung yang belum dapat dipenuhi terkait pelaporan kinerja masing-masing kegiatan	Membuat SOP terkait pengumpulan data kinerja masing-masing bidang
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6,00	6,00	101.184.000	93.366.411	Belum terdapat Pedoman/SK/SOP dalam Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan data Kinerja	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	20,00	20,00	9.344.309.482	7.913.864.244	Kurang telitinya pelaksanaan administrasi keuangan pada PPTK	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	3,00	3,00	40.800.000	40.800.000	Terdapat kode barang yang tidak spesifik sehingga menyulitkan dalam pencatatan aset BMD	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	4,00	20.000.000	10.476.000	Adanya Penyesuaian Jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6,00	6,00	1.414.543.000	1.364.709.213	Adanya keterlambatan pengiriman barang pesanan	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	100,00	100,00	3.362.804.216	2.949.400.000	Terdapat keterlambatan pengiriman barang pesanan	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12,00	12,00	1.193.101.770	1.089.762.196	Terdapat kebocoran pipa, sehingga terjadi	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
					Daerah yang disediakan						pembengkakan biaya	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100,00	68,00	1.082.420.000	908.935.800	Terdapat surat kelengkapan kendaraan dinas yang masih dalam penelusuran	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	persen	1,99	3,12	8.778.680.000	7.093.473.122	Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi	Melaksanakan Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan tokoh agama serta melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta bersama FPK dan FKUB
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	12,00	12,00	8.778.680.000	7.093.473.122	Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	persen	14,27	17,67	75.135.281.911	70.936.300.063	Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan	Melakukan kerjasama dengan partai politik dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pendidikan politik kepada aparatur dan masyarakat
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	Dokumen	12,00	12,00	75.135.281.911	70.936.300.063	Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan	





No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	persen	11,40	11,10	700.000.000	599.540.000	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdapat banyak ormas
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	20,00	20,00	700.000.000	599.540.000	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	persen	1,33	2,06	2.603.122.200	2.093.162.395	Kegiatan pembinaan belum dapat menjangkau wilayah pedesaan	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan serta Tes Urine terhadap ASN dan Masyarakat serta pembentukan Desa dan Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) di 11 Desa dan 2 Sekolah
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Dokumen	5,00	5,00	2.603.122.200	2.093.162.395	Masih tinggi angka kasus Narkoba di Kabupaten Kutai Kartanegara	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100,00	100,00	3.063.010.000	2.715.249.193	Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat	Telah dilakukan upaya melalui pendidikan dan pelatihan dasar deteksi dini dan pelaporan serta monitoring deteksi dini terhadap dampak yang akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah serta penyusunan dokumen ketahanan ekonomi





No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	12,00	12,00	3.063.010.000	2.715.249.193	Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat	

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan berdasarkan SIPD RI dan Laporan Capaian Kinerja berdasarkan Laporan e-pantau





C. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Selama Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis yang memiliki dampak dalam pencapaian sasaran strategis serta menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang meliputi sebagai berikut:

Tabel 105. Kebijakan Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Sebagai pedoman dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah
2	Perlindungan Produk Lokal	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Produk Lokal	Menjamin perlindungan produk lokal di kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki kekhasan daerah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah
3	Pemantapan Tata Kelola Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Daerah	Sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
4	Pemantapan Tata Kelola Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman	Sebagai pedoman pelaksanaan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman di daerah
5	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Menjamin hak-hak dasar tenaga kerja lokal dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
6	Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Sebagai dasar pembentukan perangkat daerah
7	Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika	Sebagai pedoman dalam rangka pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkotika psikotropika di kabupaten Kutai Kartanegara
8	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada
9	Pemantapan Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Niaga dan Tata Kelola Sarang Burung Walet	Sebagai pedoman terkait dengan tata niaga dan tata kelola sarang burung walet





No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
10	Penataan Kepemudaan	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	Mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945
11	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD kabupaten Kutai Kartanegara
12	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sesuai dengan rumpun urusan pemerintahan
13	Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2024-2029	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2024-2029	Sebagai pedoman terhadap arah pembangunan kependudukan di daerah agar terarah, efektif, efisien, terukur dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
14	Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	Sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024
15	Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024	Sebagai pedoman pengalokasian dan pembagian alokasi dana desa tahun anggaran 2024
16	Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Dan Retribusi Daerah Untuk Desa Tahun Anggaran 2024	Sebagai pedoman pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa tahun anggaran 2024
17	Penyesuaian Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Desa	Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Staf Desa	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkinerja tinggi yang sejahtera
18	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penyesuaian penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024
19	Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo Di	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa	Tindak lanjut atas aspirasi masyarakat desa bangun rejo dengan memperhatikan rekomendasi hasil





No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Kecamatan Tenggarong Seberang	Persiapan Sumber Rejo Di Kecamatan Tenggarong Seberang	kajian dan verifikasi persyaratan penataan desa
20	Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Barukang Di Kecamatan Anggana	Tindak lanjut atas aspirasi masyarakat desa sepatin dengan memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan desa
21	Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu Di Kecamatan Kembang Janggut	Tindak lanjut atas aspirasi masyarakat desa kembang janggut dengan memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan desa
22	Pembentukan Desa Persiapan Sumber Rejo Di Kecamatan Tenggarong Seberang	Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sungai Payang Ilir Di Kecamatan Loa Kulu	Tindak lanjut atas aspirasi masyarakat desa sungai payang dengan memperhatikan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan penataan desa
23	Pembentukan Gugus Tugas Pendamping Desa	Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman"	Pendamping desa sebagai bagian fasilitasi aparatur desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa guna melaksanakan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu menetapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani yang tertuang dalam program dedikas ke-3 program kukar bebaya
24	Pembentukan Gugus Tugas Pendamping Desa	Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Gugus Tugas Pendamping Desa "Kukar Idaman"	Pendamping desa sebagai bagian fasilitasi aparatur desa dalam peningkatan kapasitas aparatur desa guna melaksanakan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yaitu menetapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani yang tertuang dalam program dedikas ke-3 program kukar bebaya
25	Penyesuaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Penyesuaian pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
26	Penetapan Inovasi Daerah	Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Inovasi Daerah	Penetapan inovasi daerah untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan inovasi daerah
27	penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah pada Rencana Kerja Tahun 2024	Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah pada rencana kerja tahun 2025 dengan berpedoman pada rkp tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi Kalimantan timur tahun 2025
28	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jonggon Tahun 2024-2043	Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Jonggon Tahun 2024-2043	Mewujudkan wilayah perencanaan jonggon sebagai mitra ibu kota negara berbasis agroindustri dan kawasan pendidikan yang berdaya saing dan berkelanjutan
29	Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah	Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana	Mewujudkan wilayah perencanaan koridor sanga sanga - muar jawa mitra





No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	Perencanaan Koridor Sanga Sanga - Muara Jawa Tahun 2024-2043	Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Koridor Sanga Sanga - Muara Jawa Tahun 2024-2043	ibu kota negara yang handal berbasis pengembangan agroindustri, pariwisata, dan perdagangan dan jasa yang tangguh dan berkelanjutan
30	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023	Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023	Menindaklanjuti ketentuan pasal 11 peraturan daerah kabupaten Kutai Kartanegara nomor 12 tahun 2024 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023
31	Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah
32	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pembentukan unit pelaksana teknis daerah balai pelaksana penyuluhan pertanian pada dinas pertanian dan peternakan
33	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan	Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Pertanian Dan Peternakan	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan
34	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi	Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Afirmasi	Membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOSP dan BOSKAB pada jenjang PUAD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan
35	Sebagai Pedoman bagi satuan pendidikan dalam menggunakan dana BOS Kabupaten	Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten	Untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah di alokasikan dalam bantuan operasional sekolah dari pemerintah
36	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Dayaku Raja	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja	Pedoman dalam tata kelola penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Dayaku Raja
37	Tata Kelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat dan mudah diakses
38	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Aji Bata Agung Dewa Sakti	Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti	Pedoman dalam tata kelola penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti
39	Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa pada Perumda Air Minum Tirta Mahakam	Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada	Pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Mahakam dalam pengadaan Barang/Jasa





No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahakam	
40	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026	Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024-2026	Sebagai panduan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang responsif gender

D. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh rekomendasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-4/DPRD/04/2024 tertanggal 30 April 2024 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Rekomendasi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta menyusun peraturan daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya. Adapun tindaklanjut rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Dalam pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) harus mempedomani dan melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tentunya secara khusus pembahasan dalam aspek ini adalah masa tugas Plt. baik secara khusus pada sub pokok pada konsidi di RSUD AM Parikesit maupun berbagai Plt. pada OPD lainnya. hal ini jangan sampai menjadi contoh jelek dalam aspek etika dan penegakkan maupun pelaksanaan agenda reformasi kepegawaian,	Telah dilaksanakan pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur RSUD. AM. Parkesit pada tanggal 6 maret 2024 secara definitif SK pelantikan. Selanjutnya, dalam rangka pengisian kekosongan terhadap 12 JPTP sampai dengan saat ini (11 Juni 2024) sedang dilaksanakan proses seleksi (uji Kompetensi) sesuai jadwal yang telah ditetapkan PENGUMUMAN.	Telah ditetapkan Pejabat Definitif (Direktur RSUD. AM. Parkesit) TMT 6 maret 2024 SK pelantikan.





No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	mengingat hingga saat ini terdapat kurang lebih 12 orang Plt.		
2	Melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam proses promosi dan mutasi pegawai, dan memastikan adanya penyusunan dan penegakkan aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) diseluruh tingkatan jabatan di instansi	Saat ini sedang dilaksanakan penyusunan Dokumen Perencanaan Roadmap BKPSDM sebagai tindak lanjut penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Penyusunan Dokumen Perencanaan Roadmap Manajemen Talenta tahun 2024-2028 Dokumen perencanaan manajemen talenta.
3	Melakukan proses lelang jabatan Kepala Badan/Dinas/Kantor/Instansi (OPD) secara tepat waktu dan akuntabel sebagai bagian upaya untuk jaminan peningkatan dan pengembangan karier ASN dan juga penegakan etika dan implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Pelaksana Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Rekomendasi KASN Nomor: B-1259/JP.00.00/03/2024 tanggal 30 Maret 2024 dan Persetujuan Pelaksana Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/3288/OTDA tanggal 7 Mei 2024.	Mengisi 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Kutai Kartanegara yang Lowong.
4	THL, untuk LKPJ Pemerintah Daerah kedepannya harus dimasukkan menjadi bagian dalam sub laporan pada sistematika item jumlah PNS, Distribusi Laporan THL/THD yang dimaksud disampaikan di LKPJ, sesuai dengan data dan informasi di masing-masing OPD	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2024 ini sudah menginformasikan jumlah THL yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara	-
5	BKPSDM mengelola Administrasi tenaga kerja yang profesional terhadap tata kelola THL dimasing-masing OPD	1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menerima Surat Kemenpan RB Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pemkab Kutai Kartanegara menerima Surat Kemenpan RB Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. 3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan Pendataan Tenaga Non ASN Kabupaten Kutai Kartanegara dengan surat Nomor : B-468/BKPSDM/PPI.2/830/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Perihal Data THL pada Unit Kerja.	Menyelesaikan Permasalahan Tenaga Non ASN di Wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan arahan Pemerintah Pusat
6	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan proses manajemen tata kelola yang profesional, akuntabel dan transparan terhadap THL masuk dalam kuaota usulan menjadi P3K maupun tidak kedepannya.	1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/3540/M.SM.01.00/2023 Tanggal 21 Desember 2023 perihal Usulan Jumlah Kebutuhan ASN Tahun 2024. 2. Pemerintah Kabupaten Kutai	Penyelesaian Tenaga Non ASN Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mekanisme Usul Kebutuhan ASN Tahun 2024 melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2024.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Kartanegara menerbitkan surat nomor P-2/PPI/800.1.1/01/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Usulan Kebutuhan Pengadaan ASN Tahun 2024. 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan surat nomor B/1006/M.SM.01.00/2024 Perihal Persetujuan Perinsip Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.	
7	Pemerintah Daerah seharusnya membuat perencanaan penggunaan anggaran yang didasarkan atas analisis kajian kebutuhan dari masing masing wilayah (Kecamatan, Desa atau Kelurahan) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti, misalnya berdasarkan : kondisi sekolah, luas wilayah, dan perkembangan jumlah penduduk.	1. Melakukan pembangunan ruang kelas baru bagi wilayah yang jumlah penduduknya banyak. 2. Melakukan Rehabilitasi Ruang Kelas bagi sekolah yang kondisi ruang kelasnya rusak bera	1. Terpenuhinya jumlah penerimaan siswa dalam Penuntasan anak tidak bersekolah sebagai upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS). 2. Tersedianya sarana dan prasarana satuan pendidikan yang layak sebagai upaya peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
8	DPRD menemukan beberapa fasilitas layanan Kesehatan yang jam pelayanannya tidak sesuai dengan jam kerja dan kekosongan tenaga kesehatan yang bertugas, seperti di puskesmas Tabang dan Muara Pantuan.	1. Telah menegur dan menginstruksikan Kepala UPTD Puskesmas Tabang untuk mengecek petugas yang bertugas saat itu, mengatur jadwal jaga dan memonitor jadwal jaga untuk memastikan petugas telah menjalankan tugasnya sesuai jadwal dan jam pelayanan puskesmas 2. sudah melakukan pengaturan jadwal kunjungan dokter 1 kali seminggu bersama tim pelayanan kesehatan lainnya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan kunjungan dokter, hal itu dilakukan mengingat kemampuan anggaran Puskesmas terkait besarnya biaya transportasi yang dibutuhkan jika kunjungan dilakukan setiap hari, disamping keterbatasan Tenaga Dokter yang ada	
9	Pembangunan RSUD Muara Badak yang sudah berjalan perencanaanya sejak tahun 2021 sampai saat ini. Dari sisi keuangan, DPRD menyoroiti anggaran pembangunan fisik RSUD ini yang sebesar Rp. 68.748.605.055,. Dan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 37.977.096.527,. alokasi ini tidak terlalu besar jika dibandingkan presentase anggaran bidang pelayanan kesehatan yang mencapai 14% dari total APBD pada tahun 2023. Tetapi sampai saat ini, RSUD ini selesai dan belum segera dioperasikan. Keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di	• BKPSDM akan melakukan Koordinasi bersama Perangkat Daerah terkait (Bagian Organisasi Setkab dan Dinas Kesehatan) dalam rangka Penyusunan Kebutuhan Tenaga Kesehatan (Administrasi dan Fungsional); dan Struktur Organisasi) di RSUD Muara Badak. • Sehubungan dengan tenaga kesehatan pada Puskesmas Tani Baru di Kecamatan Anggana akan kami laksanakan supervisi terkait kedisiplinan ASN pada Puskesmas tersebut bersama Dinas Kesehatan sebagai Organisasi induk	• Dinas Kesehatan menyusun kebutuhan ASN Tenaga Kesehatan berdasarkan Anjab ABK terbaru; • Bagian Organisasi Menyusun draf Struktur Organisasi RSUD Muara Badak; • BKPSDM Menyusun rencana pengadaan SDM pada RSUD Muara Badak berdasarkan penetapan Anjab ABK dan Struktur Organisasi yang telah ditetapkan; • BAPPEDA Mengalokasikan anggaran rencana pengadaan ASN, Sarana dan prasarana yang akan diperlukan dalam



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	wilayah Muara Badak dan Marang Kayu perlu ditingkatkan lagi mengingat pembangunannya yang membutuhkan waktu sampai 4 tahun ini. DPRD juga menyoroti pentingnya dalam memperhatikan pengadaan pemenuhan tenaga kesehatan maupun pegawai administrasi pada RSUD ini. Terdapat beberapa faskes yang saat ini sudah terbangun bagus seperti di Puskesmas Tani Baru di Kecamatan Anggana tetapi tenaga kesehatan hanya datang beberapa hari sekali.		pelaksanaan kegiatan tersebut.
10	Pembangunan RSUD Muara Badak yang sudah berjalan perencanaannya sejak tahun 2021 sampai saat ini. Dari sisi keuangan, DPRD menyoroti anggaran pembangunan fisik RSUD ini yang sebesar Rp. 68.748.605.055,.- Dan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 37.977.096.527,.- alokasi ini tidak terlalu besar jika dibandingkan presentase anggaran bidang pelayanan kesehatan yang mencapai 14% dari total APBD pada tahun 2023. Tetapi sampai saat ini, RSUD ini selesai dan belum segera dioperasikan. Keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Muara Badak dan Marang Kayu perlu ditingkatkan lagi mengingat pembangunannya yang membutuhkan waktu sampai 4 tahun ini. DPRD juga menyoroti pentingnya dalam memperhatikan pengadaan pemenuhan tenaga kesehatan maupun pegawai administrasi pada RSUD ini. Terdapat beberapa faskes yang saat ini sudah terbangun bagus seperti di Puskesmas Tani Baru di Kecamatan Anggana tetapi tenaga kesehatan hanya datang beberapa hari sekali.	1. Pembangunan Rumah sakit sampai pada operasional memerlukan beberapa tahapan. Tahap 1 tahun 2021 dilakukan studi kelayakan dan penyusunan master plan Tahap 2 tahun 2022 proses legalitas lahan, penetapan Lokasi dan penyusunan DED. Ada 10 gedung yang direncanakan yang akan di bangun. Tahun 2022 juga melalui APBD Perubahan dialokasikan anggaran untuk Pengurangan lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Tahap 3 tahun 2023 Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit berupa Gedung A, Gedung B, Gedung C dan Gedung H, anggaran dan pelaksanaan dari Dinas Pekerjaan Umum. Tahap 4 Tahun 2024 Lanjutan Pembangunan Gedung D, E, G, H, I, oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan dari Dinas Kesehatan mengalokasikan Anggaran untuk pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlatan Kesehatan dan Mebelair untuk bangunan yang sudah diselesaikan pada tahun 2023. Tahun 2024 juga sedang proses penetapan Satuan Tugas untuk percepatan operasional Rumah Sakit. Pada saat yang sama juga dilakukan proses penetapan Peraturan Bupati untuk pemberian Nama Rumah Sakit Muara Badak, serta dokumen pendukung untuk izin operasionalnya. Tahap 5 tahun 2025 direncanakan Rumah Sakit Muara Badak sudah dapat beroperasi. 2. Pemenuhan Tenaga Di RS Muara Badak akan disiapkan secara bertahap, pada saat ini sedang disiapkan tenaga dokter yang terlebih dahulu dimagangkan di Rumah Sakit Parikesit, dan saat ini satuan tugas percepatan operasional RS Muara Badak melakukan perhitungan kebutuhan tenaga dan alternatif penyediaan tenaganya, serta kebutuhan pembiayaannya	Rumah Sakit Muara Badak dapat segera beroperasi Tersedianya Tenaga Administrasi dan Tenaga Kesehatan Di RS Muara Badak





No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		3. Selama ini sudah tersedia Tenaga Kesehatan di Puskesmas Pembantu Tani Baru sebanyak 3 orang, terdiri dari 2 orang Bidan dan 1 orang Perawat yang melakukan pelayanan setiap hari. salah seorang bidan yang ada menempati Pusban sebagai tempat tinggal dan tetap memberikan pelayanan walaupun diluar jam Dinas.	Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tani Baru melaksanakan tugasnya setiap hari sesuai jam kerja
11	DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara merekomendasikan pemerintah agar dapat dengan serius mengembangkan sektor pertanian di kabupaten kutai kartanegara dengan mewujudkan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung dan parit sehingga program kawasan pertanian pada 5 kawasan dan kawasan yang lain dapat terwujud.	Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai Renstra terus melanjutkan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian sesuai kewenangan Dinas Pertanian dan Peternakan serta mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan menyinkronkan pembangunan infrastruktur pertanian yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Balai Sungai Kalimantan IV Samarinda yang dititikberatkan pada 5 (lima) kawasan utama pengembangan pertanian	1. Mengatasi kesulitan petani dalam memperoleh dan pembuangan air di areal persawahan 2. mengatasi kesulitan petani dalam pengangkutan hasil pertanian
12	DPRD meminta kepada pemerintah untuk menyusun program peningkatan perkebunan kelapa sawit serta meningkatkan kesejahteraan para petani sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Dinas Perkebunan sudah menyusun dan melaksanakan program terkait peningkatan perkebunan kelapa sawit serta meningkatkan kesejahteraan para petani sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu : a. Dinas Perkebunan pada tahun 2024 melaksanakan Kegiatan Ekstensifikasi Kelapa Sawit Rakyat dengan luas 494 Ha, berupa benih kelapa sawit siap tanam 64.220 pohon, beserta Saprodinga (Pupuk SP TRO 36 sebanyak 28.572 kg, Pupuk Organo Triba Plus sebanyak 49.666 kg, Pupuk Kandang sebanyak 47.918 kg, Dolomit sebanyak 34.130 kg, Herbisida sebanyak 2.250 ltr dan Klerat sebanyak 4.550 kg.) b. Intensifikasi, yaitu Pengadaan Pupuk NPK sebesar 176,25 Ton, yang tersebar di 15 Kecamatan yaitu : Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun Darat, Kota Bangun, Muara Muntai, Anggana, Muara Badak, Marang kayu, Muara Jawa, Samboja, Loa Janan, Loa kulu, Tenggarong dan Muara Kaman. c. Pengadaan alat dan mesin perkebunan berupa mesin pemotong rumput sebanyak 51 Unit di Kecamatan Samboja dan Kota Bangun serta pengadaan Handsprayer Elektrik sebanyak 39 unit di Kecamatan Marangkayu. d. Prasarana, yaitu Peningkatan	1. Tersedianya benih kelapa sawit yang unggul dan bersertifikat untuk pengembangan kelapa sawit rakyat. 2. Tersedianya pupuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil kelapa sawit. 3. Tersedianya alat dan mesin perkebunan untuk pemeliharaan kebun kelapa sawit. 4. Tersedianya jalan produksi untuk mempermudah angkutan sarana produksi dan hasil panen.





No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Jalan Produksi sepanjang ± 4.000 meter, yang tersebar di 9 Kecamatan yaitu, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Loa Kulu, Sebulu, Muara Badak, Marangkayu, Anggana dan Samboja Barat.	
13	Meningkatkan kualitas permukiman masyarakat juga harus didukung oleh ketersediaan cakupan air bersih dalam hal ini DPRD sangat mengapresiasi kepada Perangkat Daerah terkait dengan capaian Kinerja Indikator cakupan layanan air bersih tahun 2023 meningkat cukup tinggi, yaitu jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih meningkat sebesar 29.951 jika dibandingkan tahun 2022 dengan total rumah tangga yang mendapat akses air bersih sebesar 131.960.	1. Pengadaan dan pemasangan jaringan Pipa distribusi bagi pipa 150 mm dan jaringan distribusi pelayanan (JDL) pipa 75 mm kearah pelayanan dusun TSM Desa Bendang Raya Perumda Ranting Rapak Lambur 2. Pembuatan Sumur BOR RT.4 Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong	Menempatkan target capaian 100% terhadap pemenuhan dan isu strategis seperti pengentasan kemiskinan dan stunting
14	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air Minum (SPAM) harus terus ditingkatkan karena pelaksanaan program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih masih jauh dari kata mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satu contoh Desa Bendang Raya yang merupakan Desa terdekat dengan perkotaan masih belum bisa merasakan cakupan Air bersih secara menyeluruh data ini diperoleh sesuai dengan fakta dilapangan.	Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 193 Desa, perlu dilakukan pembangunan berdasarkan pengelolaannya sehingga keberlanjutan berjalan	Dalam hal suksesnya pembangunan juga harus didukung pengelolaan karena air bersih ini merupakan suatu program yang berkelanjutan sehingga pengaruh terbesarnya adalah pengelolaan sehingga Dinas Perkim mengelompokkan pengelolaan perkotaan dimanfaatkan oleh perumda Tirta Mahakam dan Pengelolaan perdesaan dimanfaatkan oleh KPSAMP/BUMDES masing-masing lokasi atau desa, mengenai desa Bendang Raya awal masuk dalam perdesaan sehingga pembangunan awal dilakukan oleh program pusat yaitu pamsimas yang mana kapasitasnya menyesuaikan lokasi/desa, akan tetapi berkembangnya waktu Dinas Perkim telah menyiapkan langkah pengembangan yang nanti akan berubah menjadi pengelolaan perumda tirta mahakam diawal telah dilakukan kegiatan perluasan jaringan yang mengarah ke Desa Bendang Raya
15	Dalam hal ini DPRD menyoroti hal terpenting yang harus diperhatikan ketersediaan air bersih mengingat sumber baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari sungai Mahakam yang didalamnya juga mengalir limbah baik dari Perusahaan maupun limbah rumah tangga.	Melakukan uji mutu kualitas air baku baik pra pembangunan dan pasca pembangunan juga dilakukan per 3 bulan pada masa pengelolaan atau pemanfaatan	menyiapkan unit SPAM akan dalam pengelolaan admisnitrasi danb teknis dengan dilakukan pelatihan setiap tahunnya dengan materi sesuai permasalahan dengan langkah besar pengelolaan perdesaan mampu seperti perumda Tirta Mahakam
16	Pemerintah Daerah harus mengambil sikap untuk menindak pertambangan ilegal yang ada di Kutai Kartanegara karena telah melanggar pasal 158 UU Nomor 4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara telah melakukan permohonan bantuan penanganan p[engaduan	meminimalisir kegiatan ilegal mining





No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Aktivitas pertambangan ilegal jelas akan berdampak negative karena kegiatan pertambangan bertentangan dengan RTRW daerah, dapat memicu konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kerusakan lingkungan, merusak hutan, mengganggu produktifitas lahan pertanian dan perkebunan, pencemaran air sungai, kegiatan pertambangan ilegal juga mengabaikan kewajiban-kewajiban kepada negara dan masyarakat sebagaimana seharusnya.	perusakan lahan dan ilegal mining pada tahun 2018 kepada Kementerian Lingkungan Hidup Cq. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI CQ. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan WII Kalimantan Timur dengan Surat Nomor 660.1/226/B.IV.2/DLHK tanggal 15 Maret 2018, Namun sayang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya lebih lanjut, 2. selanjutnya akan melakukan Indetivikasi dan Inventarisasi kerusakan lahan akibat kegiatan ilegal mining, melakukan evaluasi hasil indentifikasi dan inventarisasi dan menyampaikan laporan hasil indetivikasi dan invetarisasi serta evaluasi kepada sekretaris daerah	
11	Pemerataan bukan berarti sama rata namun Pemerintah Daerah perlu membuat data base jalan, Drainase dan Normalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terintegrasi dengan komponen lainya seperti Sistem Informasi Geografik hal ini agar tidak terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam pemerataan Infrastruktur khususnya peningkatan dan pembangunan jalan.	Dinas Pekerjaan Umum setiap tahun selalu melakukan survey kondisi jalan dan di update datanya melalui www.binamargakukar.com dan dapat diakses secara umum oleh masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan dan penentuan prioritas kegiatan Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan data hasil survey kondisi jalan, bukan hanya terhadap kewilayahan dan besaran anggaran masing-masing kecamatan.	Panjang Jalan kondisi baik dapat meningkat dan pada akhirnya pelayanan jalan kepada masyarakat dapat terus meningkat
12	Dinas Pekerjaan Umum tidak memberikan alasan dasar baik secara lisan maupun secara tertulis kepada DPRD terhadap perubahan persetujuan nilai anggaran yang mana telah dibahas sebesar 53 M namun berubah hanya kurang lebih 20 M saja. Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki beberapa wilayah yang belum terhubung oleh Akses Darat seperti Desa Enggelam dan Muara Enggelam diharapkan adanya segera penuntasan. DPRD sangat menyoroti penuh terhadap Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum hal ini tidak adanya keseriusan dalam upaya penyelesaian aksesibilitas dan konektifitas secara cepat dan tepat.	Dalam melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum selalu menyesuaikan keadaan lokasi dan kebutuhan lokasi pekerjaan sehingga konstruksi berjalan secara maksima. Pada jalan Anggana - Muara Badak, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan secara bertahap setiap tahunnya dengan menggunakan anggaran pemerintah kabupaten maupun dana Bankeu Provinsi Kal-tim. Terhadap Desa Enggelam dan Muara Enggelam yang berada di area danau/perairan dengan membutuhkan perencanaan yang matang dan biaya yang cukup besar dikarenakan kondisi geografis daerah tersebut	Jalan akses penghubung antar kecamatan dalam kondisi baik
13	Pemerintah perlu membuat kebijakan dan intervensi guna meningkatkan pendapatan dari pengelolaan sektor wisata di kabupaten kutai kartanegara	1. Melakukan pembenahan dan peningkatan wahana dan atraksi serta fasilitas umum pada Daerah Tujuan Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata Melaksanakan even di obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata.	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas umum dalam obyek wisata yang dikelola 2. Menambah wahana baru obyek wisata yang dikelola Melaksanakan even didalam obyek wisata yang dikelola





BAB IV

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pada Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mendapatkan pelaksanaan tugas pembantuan baik itu dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.





BAB V

Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan langkah tahun kedua dalam pelaksanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026. Tahun 2024 tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah *“Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan”*.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dukungan, partisipasi, dan kolaborasi serta sinergi seluruh komponen dalam mendukung pembangunan dengan semangat *betulungan etam bisa* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kinerja pembangunan daerah yang sudah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi prestasi sekaligus sebagai catatan kritis dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang senantiasa akan lebih memberikan manfaat, inovasi, dan keberlanjutan serta mampu merespons segala tuntutan dan dinamika masyarakat yang semakin kritis.

Sebagai bagian akhir penyampaian LKPJ ini, diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara yang selama ini telah menjalin sinergitas hubungan yang harmonis serta memberikan motivasi, kritik yang konstruktif dalam pelaksanaan roda pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap *stakeholder* maupun masyarakat atas partisipasi, dukungan, masukan, dan saran masukan dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang.





Demikian penyampaian LKPJ Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, semoga di tahun-tahun mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan ikhtiar kita demi mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Sejahtera dan Berbahagia.





Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara

LKPJ 2024

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024